

R A N C A N G A N

RKPD

(RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH)

Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2021

**“MENUMBUHKAN INDUSTRI HILIR
YANG MENDUKUNG EKONOMI KERAKYATAN
DAN EKONOMI KAWASAN”**

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasal 263 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa RPJMD dilaksanakan dan dijabarkan kedalam dokumen perencanaan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD digunakan pula sebagai instrumen evaluasi dan penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, RKPD ini selanjutnya dijadikan sebagai pedoman kepala daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD).

Berdasarkan arti penting RKPD tersebut, maka Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur wajib menyusun RKPD tahun 2021 yang merupakan pelaksanaan tahun kedua pembangunan jangka menengah daerah periode 2019-2023. Selanjutnya berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 diamanatkan bahwa penyusunan RKPD harus mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Adapun RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 adalah pelaksanaan dari tahapan kelima RPJPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2005-2025.

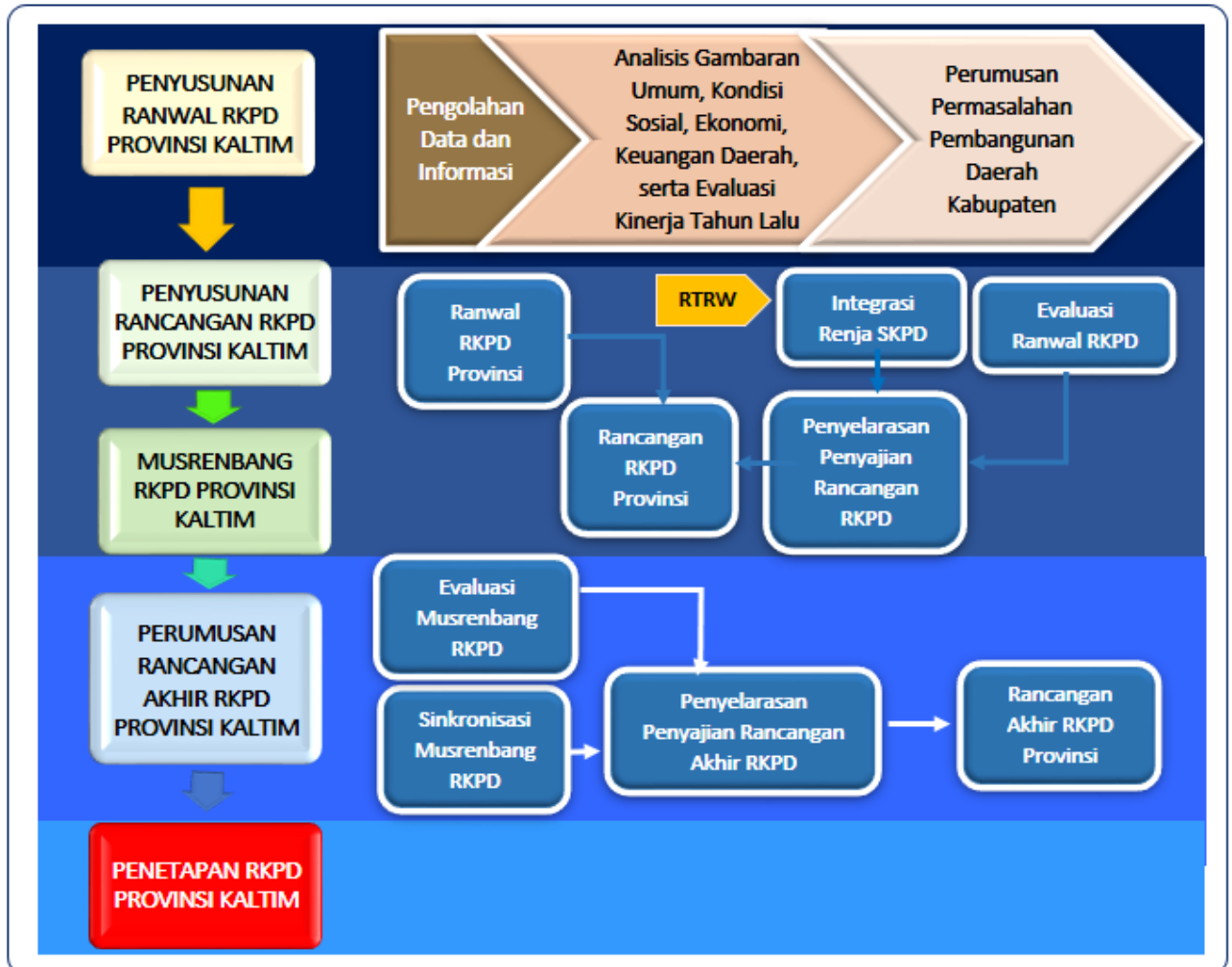
Penyusunan RKPD 2021 dilakukan melalui 6 (enam) tahapan, sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur;
2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur;
3. Penyusunan Rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Timur;
4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Timur;
5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Timur; dan
6. Penetapan RKPD Provinsi Kalimantan Timur.

Tahapan penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 tersebut secara runut tergambar pada bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.1

Bagan Alur Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021



1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

A. Undang-Undang

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); serta
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

B. Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah

Landasan hukum yang digunakan dalam bentuk Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

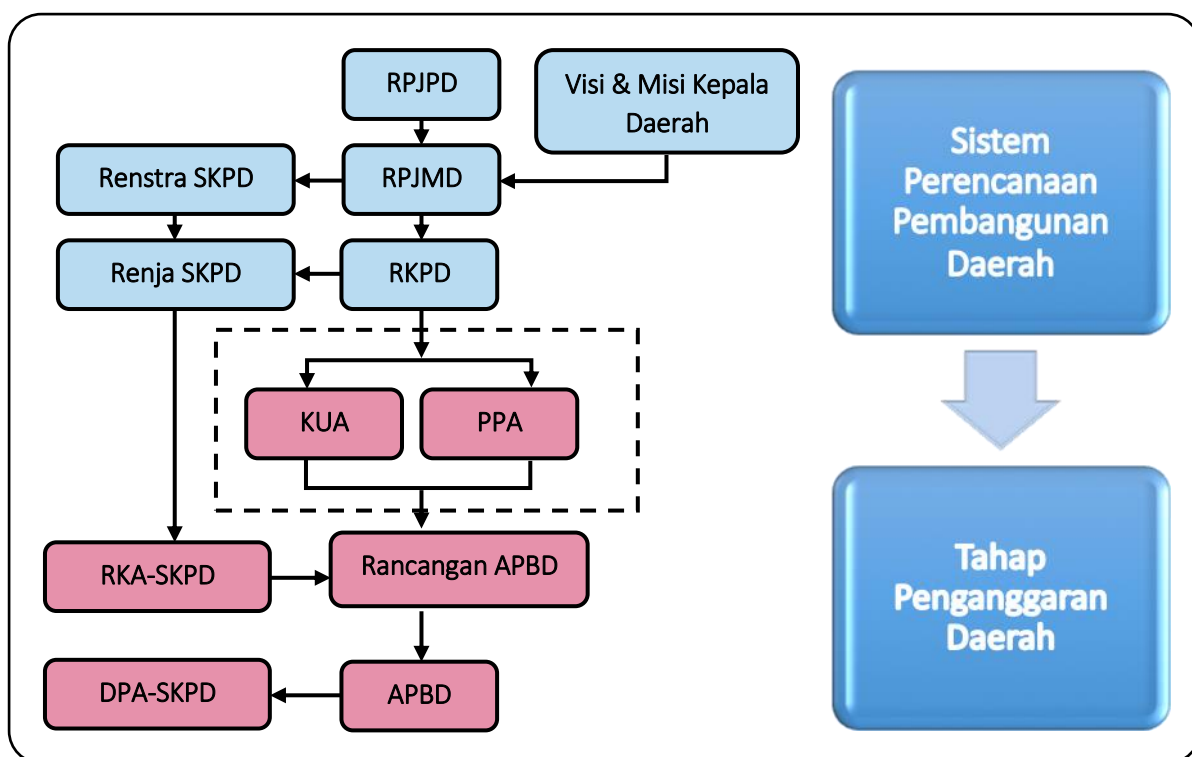
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2036).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 1); dan

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Rencana Kerja Pemerintah Daerah memiliki hubungan/keterkaitan yang erat dengan dokumen rencana maupun anggaran terutama RPJMD, Renstra OPD, Renja OPD, dan RAPBD. Hubungan antar dokumen pembangunan tersebut dapat terlihat pada Gambar 1.2 berikut.

Gambar 1.2
Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah



Dari gambar 1.2. tersebut dapat dijelaskan bahwa:

1. Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan rangkaian panjang dalam satu kesatuan yang tidak dapat berdiri sendiri, dimulai dari perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan; serta
2. Merupakan satu kesatuan dengan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui tahap penganggaran.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 adalah memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam menjabarkan perencanaan pembangunan tahun 2021. Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan dokumen RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021, yaitu:

- a. Mensinkronisasi dan mensinergikan program pembangunan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. Menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan rumusan sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, hubungan antar dokumen, serta sistematika dokumen RKPD.

BAB II. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Memuat gambaran umum kondisi daerah (kondisi geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing), evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah selama ini.

BAB III. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah

Memuat kondisi ekonomi daerah tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

BAB V. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

Mengemukakan tentang arahan kebijakan pembangunan kabupaten/kota yang ditetapkan oleh provinsi yang nantinya akan menjadi pedoman bagi kabupaten/kota dalam penyusunan RKPD kabupaten/kota.

BAB VI. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Mengemukakan rencana kerja yang berisi tentang program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun perencanaan pembangunan (RKPD), dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Mengemukakan tentang penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VIII. Penutup

Mengemukakan kaidah pelaksanaan RKPD dan mekanisme pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD.

BAB 2

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Proses pembangunan hilirisasi industri di Provinsi Kalimantan Timur perlu menjadi perhatian besar mengingat sektor industri pengolahan dapat menjadi penopang ekonomi yang *sustainable* untuk menggeser dominasi aktivitas pertambangan dan penggalian. Hal ini didasari dengan besarnya potensi keanekaragaman sumber daya alam, baik terbarukan maupun tak terbarukan. Sumber daya alam yang terkenal diantaranya sumber daya mineral berupa tambang batubara dan minyak bumi (SDA tak terbarukan). Sedangkan SDA terbarukan yang dapat memiliki potensi dalam pengembangan ekonomi hijau seperti kelapa sawit, karet, padi, perikanan, peternakan dan pariwisata. Maka, untuk meningkatkan nilai tambah produk, diperlukan hilirisasi industri yang dapat menyentuh ekonomi kerakyatan hingga berdampak pada ekonomi kawasan.

RKPD Provinsi Kalimantan Timur sebagai dokumen perencanaan tahunan, dalam proses penyusunannya perlu mempertimbangkan berbagai aspek pembangunan baik sosial, ekonomi dan lingkungan. Proses perumusan kebijakan pembangunan daerah harus dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan tahapan analisa terhadap potensi, kelemahan dan tantangan pembangunan daerah. Disamping itu juga perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Oleh sebab itu, sebagai langkah awal dalam menyusun rencana program dan kegiatan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021, terlebih dahulu pada bagian ini akan dijabarkan kinerja pembangunan daerah yang mencakup gambaran umum kondisi daerah; evaluasi kinerja tahun lalu; dan permasalahan serta isu strategis pembangunan daerah.

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

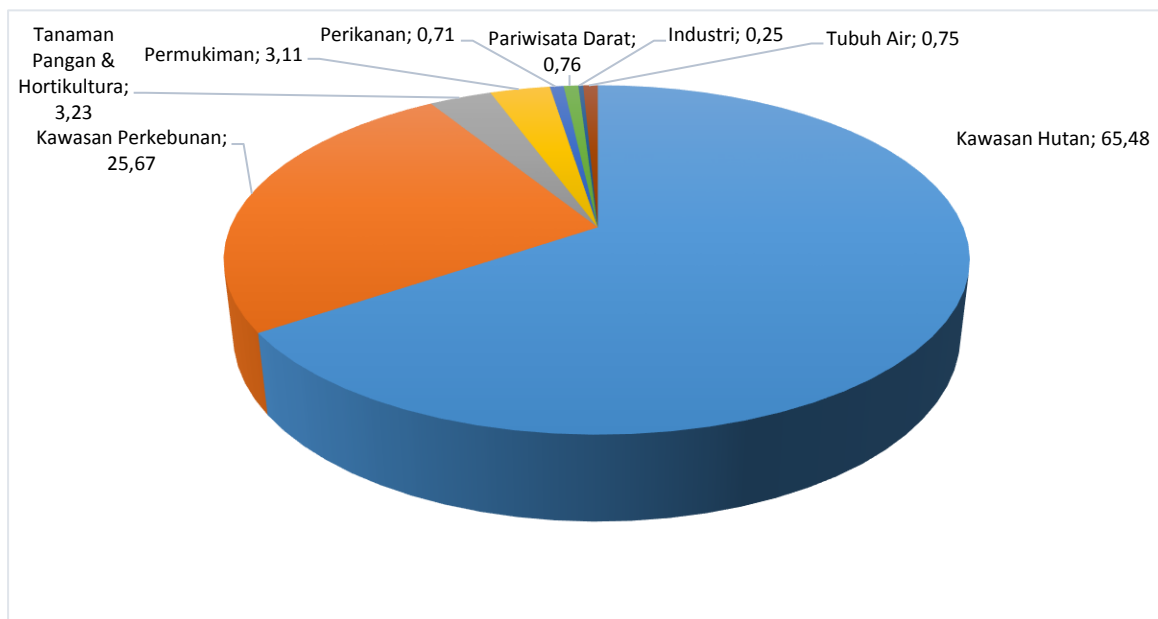
Secara geografis, Provinsi Kalimantan Timur terletak antara 2^o 33' Lintang Utara (LU) dan 2^o 25' Lintang Selatan (LS), 113^o 44' Bujur Timur (BT) dan 119^o 00' Bujur Timur (BT). Secara administratif, batas wilayah Provinsi Kalimantan Timur adalah:

1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Utara;
2. Sebelah Barat : berbatasan dengan Negara Bagian Serawak Malaysia, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan; dan

4. Sebelah Timur : berbatasan dengan Selat Makasar dan Laut Sulawesi.

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan cakupan wilayah yang cukup luas, yaitu mencapai 16.732.065,18 ha. Sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Timur berupa daratan dengan luasnya mencapai 12.734.692 ha. Bentangan alam yang luas ini menjadikan Provinsi Kalimantan Timur memiliki peluang lebih besar untuk mengelola sumber daya alam yang ada di dalamnya.

Gambar 2.1
Persentase Luas Wilayah Berdasarkan Peruntukan Kawasan
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 – 2035



Sumber: Perda No. 1 tahun 2016 Tentang Rencana RTRW Provinsi Kaltim Tahun 2016-2035

Jika dilihat dari peruntukan kawasannya, sebagian besar luas sumber daya lahan (wilayah daratan) Kalimantan Timur berstatus sebagai Kawasan Hutan dengan luasan mencapai 8.339.155 Ha (65,48%), yang terdiri dari Kawasan Lindung seluas 2.283.360 Ha dan Kawasan Budidaya Hutan seluas 6.055.793 Ha. Sedangkan sisanya seluas 4.395.537 Ha (34,52%), berstatus sebagai Areal Penggunaan Lain (APL) yang terbagi untuk kawasan perkebunan seluas 3.269.560 Ha (25,67%), kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura sebesar 412.095 Ha (3,23%), kawasan permukiman seluas 396.266 Ha (3,11%), kawasan perikanan seluas 91.547 Ha (0,71%), kawasan pariwisata darat seluas 97.423 Ha (0,76%), kawasan industri seluas 32.887 Ha (0,25%), dan tubuh air seluas 95.758 Ha (0,75%).

Berdasarkan ketinggian lahan di Provinsi Kalimantan Timur, terluas adalah wilayah pada ketinggian 100-500 M sebesar 4,23 juta Ha (terutama di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau), disusul wilayah pada ketinggian 25-100 M sebesar 4,12 Ha, dan wilayah pada ketinggian

0-25 M sebesar 2,08 Ha. Artinya wilayah di Kalimantan Timur cenderung didominasi oleh dataran rendah yang subur karena merupakan wilayah pengendapan. Sementara itu yang termasuk daerah dataran tinggi di Provinsi Kalimantan Timur (pada ketinggian 1000-15000 M) sebesar 2,02 juta Ha terutama pada Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Jika dilihat dari kemiringan lahan di Provinsi Kalimantan Timur, wilayahnya didominasi dataran dengan kelas kemiringan 15-25% seluas 7,23 juta Ha termasuk kategori agak curam, terutama pada Kabupaten Kutai Timur, Kutai Barat dan Berau. Selanjutnya luas wilayah pada kemiringan diatas 40% (curam) sebesar 2,91 juta Ha dan kemiringan 2-15% sebesar 1,82 juta Ha (datar dan landai).

Kemudian, dari segi administrasi pemerintahan, Provinsi Kalimantan Timur terbagi menjadi 7 (tujuh) kabupaten, yaitu: Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Paser, Penajam Paser Utara, dan Mahakam Ulu, serta memiliki 3 (tiga) wilayah administrasi kota, yaitu: Balikpapan, Bontang, dan Samarinda. Adapun pembagian wilayah administratif Provinsi Kalimantan Timur menurut kabupaten/kota dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.1
Data Wilayah Administratif Provinsi Kalimantan Timur

Kabupaten/Kota	Luas wilayah (Ha)*	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa dan Kelurahan
1. Paser	1.109.696	10	144
2. Kutai Barat	1.370.992	16	194
3. Mahakam Ulu	1.944.941	5	50
4. Kutai Kartanegara	2.598.808	18	237
5. Kutai Timur	3.105.171	18	141
6. Berau	2.173.519	13	110
7. Penajam Paser Utara	292.373	4	54
8. Balikpapan	51.225	6	34
9. Samarinda	71.653	10	59
10. Bontang	16.314	3	15
Kalimantan Timur	12.734.692	103	1.038

Sumber: Luas Wilayah berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Timur, Jumlah kecamatan, desa dan kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, 2017.

Keterangan: *) Luas wilayah dihitung berdasarkan batas wilayah administratif yang sebagian masih bersifat indikatif

Dari sisi klimatologi, pengukuran iklim Provinsi Kalimantan Timur dilakukan melalui tiga stasiun bandara, yaitu: di wilayah Samarinda, Balikpapan, dan Tanjung Redeb. Diketahui bahwa kondisi curah hujan Provinsi Kalimantan Timur yang dilihat dari tiga stasiun ini berada dalam

kategori sedang. Tabel 2.2 berikut ini menunjukkan statistik klimatologi Provinsi Kalimantan Timur di tiga stasiun bandara.

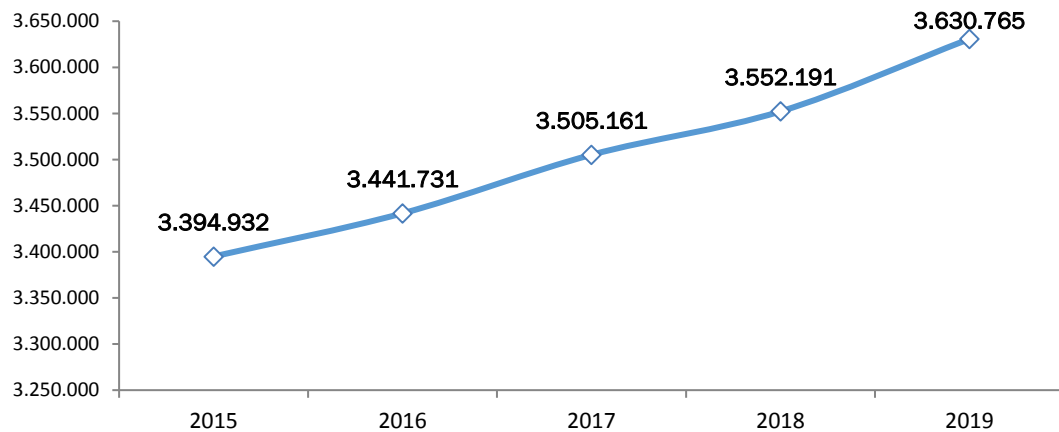
Tabel 2.2
Statistik Klimatologi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

No	Uraian	Stasiun		
		Samarinda	Balikpapan	Tanjung Redeb
1	Suhu Udara (°C)			
	- Minimum	23,70	24,10	22,70
	- Maksimum	34,30	31,90	35
2	Kelembaban (%)	72	81	87
3	Tekanan Udara (Mbs)	1.012,90	1.011,6	1.012,9
4	Kecepatan Angin (Knot)	4,00	3,00	4,00
5	Curah Hujan (mm)	1.358,1	2.270,60	1.742,2
6	Penyinaran Matahari (%)	52	56	55

Sumber: BMKG Wilayah Kaltim

Dari segi demografi, penduduk Provinsi Kalimantan Timur dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik dikarenakan pertumbuhan penduduk alami (kelahiran) maupun efek dari migrasi. Jumlah penduduk Kalimantan Timur pada tahun 2018 sebesar 3.552.191 jiwa dan terus meningkat menjadi 3.630.765 jiwa pada tahun 2019.

Gambar 2.2
Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019

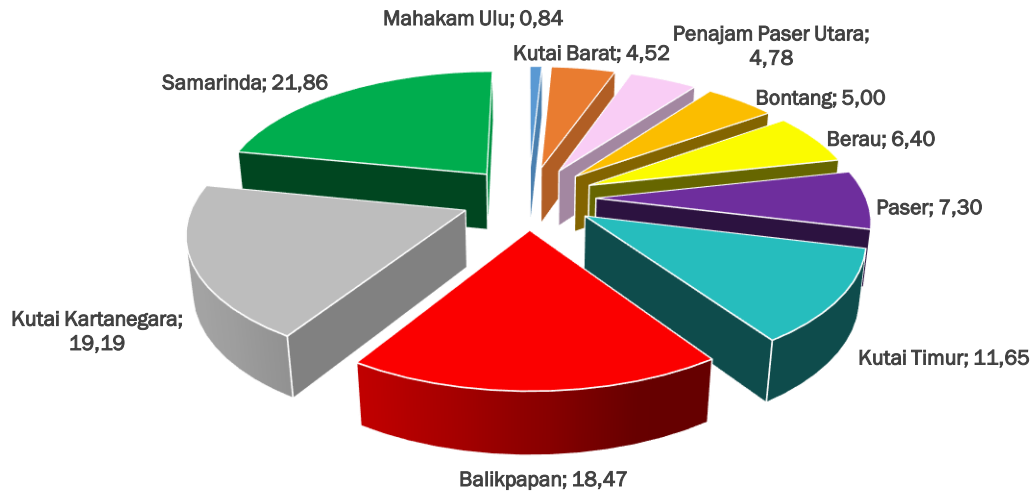


Sumber : Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur

Persebaran penduduk di Provinsi Kalimantan Timur tidak merata sehingga terjadi ketimpangan antar kabupaten/kota, baik itu dari jumlah penduduk maupun kepadatannya. Penduduk Provinsi Kalimantan Timur paling banyak berdomisili di Kota Samarinda, yaitu sebesar 21,86 persen. Tidak dipungkiri bahwa Kota Samarinda menjadi daerah dengan kepadatan penduduk tertinggi mengingat Kota Samarinda merupakan pusat pemerintahan sekaligus perdagangan di Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian, jumlah sebaran penduduk Provinsi Kalimantan Timur yang distribusinya kurang dari lima persen terdapat di Kabupaten Penajam

Paser Utara (4,78%), Kabupaten Kutai Barat (4,52%), dan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kabupaten Mahakam Ulu dengan distribusi tidak mencapai satu persen (0,84%).

Gambar 2.3
Distribusi Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019



Sumber: Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur

Kepadatan penduduk di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2019 mencapai 28,51 jiwa per Km² artinya dalam setiap satu Km² terdapat 28-29 penduduk, dimana menurut Kota Balikpapan sebagai kota yang berpenduduk paling padat, yaitu 1.308,94 jiwa per Km². Penduduk Provinsi Kalimantan Timur didominasi oleh laki-laki dimana *sex ratio* mencapai 108,27. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam setiap 100 penduduk berjenis kelamin perempuan terdapat 108 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki. Fenomena ini terjadi di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2.3
Luas Wilayah, Sex Ratio, dan Kepadatan Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

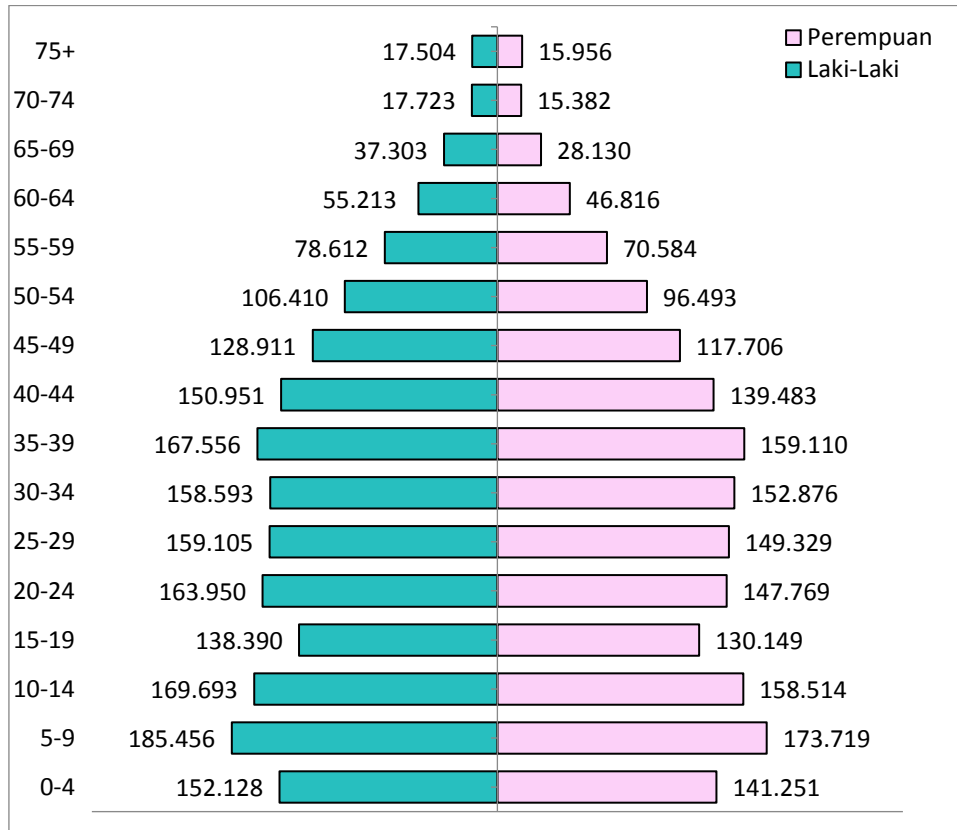
No	Kab/Kota	Penduduk (Jiwa)			Sex Ratio	Kepadatan Penduduk (per Km ²)	Laju Pertumbuhan Penduduk (2015-2019) (%)
		Laki-laki	Perempuan	Total			
1	Paser	137.945	127.203	265.148	108,44	23,89	1,50
2	Kutai Barat	86.001	78.047	164.048	110,19	11,97	0,89
3	Kutai Kartanegara	363.796	332.988	696.784	109,25	26,81	1,24
4	Kutai Timur	227.538	195.367	422.905	116,47	13,62	0,45
5	Berau	123.795	108.394	232.189	114,21	10,68	2,20

No	Kab/Kota	Penduduk (Jiwa)			Sex Ratio	Kepadatan Penduduk (per Km ²)	Laju Pertumbuhan Penduduk (2015-2019) (%)
		Laki-laki	Perempuan	Total			
6	Penajam Paser Utara	90.043	83.628	173.671	107,67	59,40	1,72
7	Mahakam Ulu	16.147	14.174	30.321	113,92	1,56	4,53
8	Balikpapan	343.248	327.257	670.505	104,89	1.308,94	1,87
9	Samarinda	404.402	389.174	793.576	103,91	1.107,53	0,99
10	Bontang	94.583	87.035	181.618	108,67	1.113,26	2,03
Kalimantan Timur		1.887.498	1.743.267	3.630.765	108,27	28,51	1,35

Sumber: Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur. Data sex ratio, kepadatan penduduk, dan laju pertumbuhan penduduk data diolah

Dilihat dari struktur usia penduduk, sebagian besar penduduk Provinsi Kalimantan Timur berada pada usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun), sebagaimana tampak pada gambar 2.4. Piramida penduduk Provinsi Kalimantan Timur ini mengindikasikan tingkat ketergantungan penduduk non produktif (penduduk usia 0-14 tahun dan 65+) dibawah 50 persen. Berdasarkan komposisi penduduknya maka piramida penduduk Kalimantan Timur terdefinisi sebagai bentuk piramida penduduk muda atau ekspansif. Pada Piramida Penduduk Ekspansif, suatu wilayah digambarkan memiliki angka kelahiran yang tinggi dan angka kematian yang rendah sehingga mengalami pertumbuhan penduduk yang cepat. Namun, pada tahun 2019 jumlah penduduk usia non produktif di Kalimantan Timur mengalami peningkatan lebih tinggi daripada penduduk usia produktif. Jumlah penduduk non produktif bertambah sebesar 53.715 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk produktifnya hanya mengalami kenaikan sebesar 24.859 jiwa. Bila dilihat dari jenis kelamin, jumlah penduduk usia produktif di Provinsi Kalimantan Timur didominasi oleh laki-laki sebesar 1,31 juta sedangkan jenis kelamin perempuan usia produktif sebesar 1,21 juta jiwa. Dimana keduanya mengalami kenaikan jumlah di tahun 2019.

Gambar 2.4
Piramida Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019



Sumber: Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Indikator-indikator utama yang digunakan dalam menganalisis kesejahteraan dan perekonomian daerah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), struktur perekonomian wilayah, Laju Pertumbuhan Ekonomi, laju inflasi, dan angka kemiskinan. Indikator-indikator ini nantinya akan menjadi salah satu dasar bagi perencanaan pembangunan, terutama untuk monitoring dan evaluasi berbagai kebijakan dalam menyukseskan program-program prioritas pembangunan nasional.

A. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2015 hingga tahun 2019 menunjukkan tren yang meningkat baik dari komposisi dengan migas, non migas, serta non migas dan batubara. Adapun nilai PDRB dengan migas Tahun 2019 tercatat sebesar Rp 653,68 triliun, sedangkan nilai PDRB non migas sebesar Rp 542,15 triliun dan nilai PDRB non migas dan batubara sebesar Rp 313,17 triliun.

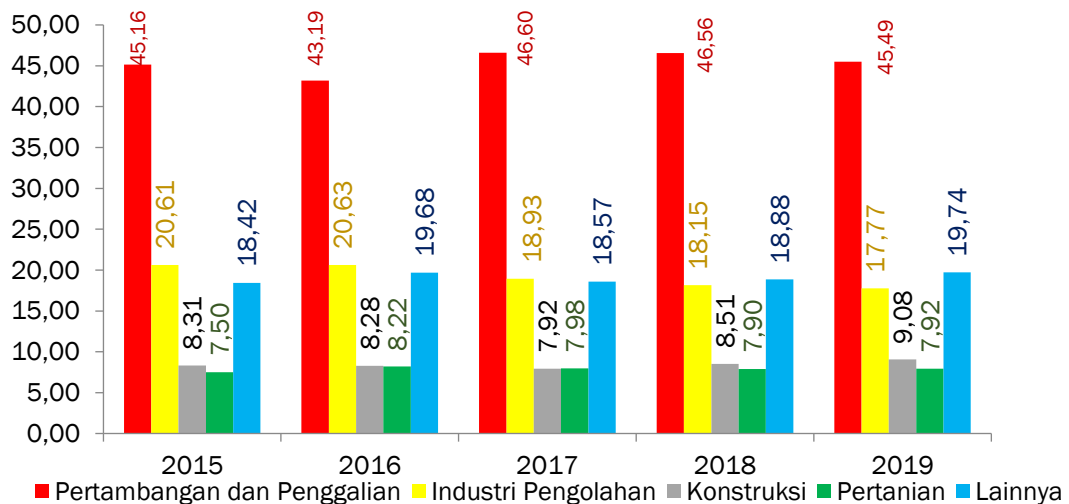
Tabel 2.4
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah)

Tahun	Migas	Non Migas	Non Migas dan Batubara
2015	503.691.107	389.773.657	226.700.171
2016	508.880.236	400.847.613	243.496.746
2017	591.903.487	476.190.332	267.249.474
2018	636.454.483	518.074.570	291.567.584
2019	653.677.103	542.147.098	313.167.530

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2019

Jika dilihat menurut kontribusinya, struktur perekonomian Kalimantan Timur masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian. Kontribusi Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian secara konsisten menyumbang di atas 40 persen dari total PDRB Kaltim. Namun dalam beberapa tahun terakhir kontribusi Lapangan Usaha ini cenderung menurun tipis meski masih fluktuatif. Pada tahun 2019, kontribusi Lapangan Usaha utama yakni Pertambangan dan Penggalian serta industri pengolahan mengalami penurunan, demikian pula kontribusi Lapangan Usaha pertanian yang turun tipis. Sementara itu Lapangan Usaha konstruksi mengalami peningkatan kontribusi.

Gambar 2.5
Struktur Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019 (persen)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Menyadari bahwa Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian bergantung pada sumber daya alam yang tak terbarukan, maka transformasi ekonomi yang didukung hilirisasi industri sangat tepat untuk dilakukan. Lapangan Usaha yang coba di dorong diantaranya Lapangan Usaha Pertanian (dalam arti luas). Jika dilihat dari kontribusinya terhadap PDRB Kaltim secara rata-rata dari tahun 2015-2019 sebesar 7,90 persen. Capaian ini tentunya masih sangat

kecil. Maka diperlukan dorongan besar untuk melakukan perubahan yang besar pula, terutama diarahkan pada inovasi pengembangan komoditas. Dimana sektor yang dominan menggerakkan lapangan usaha ini adalah sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian terutama pada sub perkebunan tahunan, sektor perikanan, dan sektor kehutanan dan penebangan kayu.

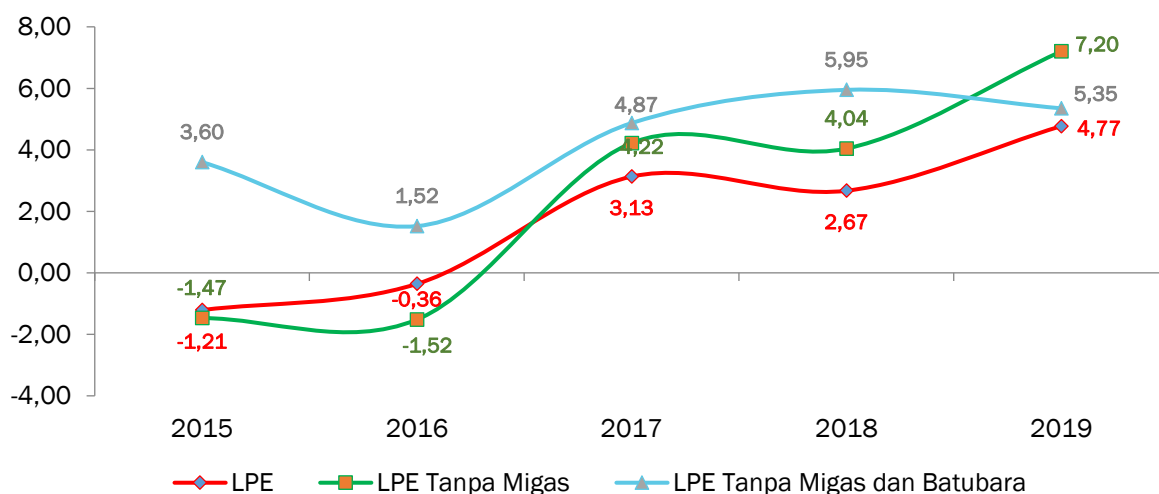
Sub sektor perkebunan tahunan menunjukkan nilai PDRB yang meningkat dari tahun ke tahun. Komoditas perkebunan tahunan yang dimiliki Provinsi Kaltim diantaranya kelapa sawit, karet, kelapa dalam, dan lada. Potensi ini perlu mendapatkan perhatian besar untuk memperkuat struktur ekonomi Kaltim di luar migas dan batubara.

Komoditas dalam sektor perikanan dan sektor kehutanan dan penebangan kayu juga berpotensi dalam mendongkrak geliat ekonomi di lapangan usaha pertanian, namun untuk melihat komoditas apa yang perlu dikembangkan dibutuhkan supporting data yang lengkap, akurat dan valid.

Perlu diketahui bahwa *share* Lapangan Usaha Perdagangan terhadap PDRB Kaltim juga menunjukkan pergerakan yang positif, serta cenderung dipengaruhi oleh sub sektor perdagangan besar dan eceran bukan mobil dan sepeda motor dimana di dalamnya tercatat omzet dari UMKM. Nilai PDRB pada sub sektor ini terus meningkat ditengah-tengah menurunnya aktivitas pertambangan dan penggalian, namun kontribusinya masih sangat kecil, pada tahun 2019 kontribusinya hanya sebesar 5,92 persen.

Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur yang pernah mengalami kontraksi hingga negatif 1,20 persen pada tahun 2015, perlahan mulai menunjukkan pertumbuhan positif. Seperti pada tahun 2018, laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur sebesar 2,67 persen dimana laju pertumbuhan ekonomi non migas tercatat sebesar 4,22 persen serta laju pertumbuhan ekonomi non migas dan batubara sebesar 6 persen. Adapun kondisi saat ini, tahun 2019 laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur sebesar 4,77 persen, dimana laju pertumbuhan ekonomi non migas melesat cukup tajam hingga 7,20 persen, sedangkan laju pertumbuhan ekonomi non migas dan batubara sebesar 5,35 persen. Capaian ini menjadikan laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur berada di atas capaian laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Gambar 2.6
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019 (persen)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2019

Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur jika dilihat menurut Lapangan Usaha cukup berfluktuatif. Pada tahun 2019 terjadi pertumbuhan positif di seluruh lapangan usaha. Laju pertumbuhan tertinggi diciptakan oleh Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 8,65 persen. Kemudian disusul Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 8,16 persen, Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 6,99 persen, Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 6,89 persen, Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 6,86 persen, dan Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum sebesar 6,12 persen. Sedangkan Lapangan Usaha lainnya tumbuh di bawah 6 persen.

Tabel 2.5
Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019 (persen)

Kategori	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,55	0,46	5,66	6,14	3,88
B	Pertambangan dan Penggalian	(4,89)	(3,52)	1,79	1,07	6,89
C	Industri Pengolahan	2,66	5,46	2,80	0,69	0,19
D	Pengadaan Listrik dan Gas	30,43	8,32	6,78	9,76	8,65
E	Pengadaan Air	2,56	6,57	8,37	3,22	5,56
F	Konstruksi	(0,94)	(3,86)	5,76	7,91	5,62
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,42	3,20	8,22	7,16	5,20
H	Transportasi dan Pergudangan	2,76	3,05	6,46	5,80	2,11
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,33	6,79	8,37	8,70	6,12
J	Informasi dan Komunikasi	7,66	7,45	7,79	4,38	6,86
K	Jasa Keuangan	2,05	1,84	(0,72)	4,05	3,03
L	Real Estate	3,59	(0,83)	3,35	4,83	2,12
M,N	Jasa Perusahaan	(3,75)	(4,25)	3,54	4,96	1,43

Kategori	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,20	(3,27)	(3,47)	3,11	4,25
P	Jasa Pendidikan	9,88	7,06	6,73	7,73	4,64
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,53	9,31	7,16	8,05	6,99
R,S,T,U	Jasa Lainnya	8,81	7,81	6,44	9,02	8,16
Laju Pertumbuhan Ekonomi		(1,21)	(0,38)	3,13	2,67	4,77

Sumber : Badan Pusat Statistik

Beberapa hal yang menjadi catatan pada tahun 2019 terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi hampir pada seluruh sektor. Hanya empat lapangan usaha yang mengalami percepatan pertumbuhan yaitu Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalan, Lapangan Usaha Pengadaan Air, Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi, dan Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Wajib Sosial.

Tabel 2.6
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran 2015-2019

No	Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	86.786.224	91.536.846	96.807.320	103.474.158	109.769.675
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2.460.192	2.439.025	2.629.574	2.973.197	3.246.860
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	25.949.715	23.578.344	21.596.789	23.723.231	26.338.928
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	145.766.484	144.654.384	154.503.230	173.413.127	187.709.065
5	Perubahan Inventori	5.771.866	1.922.887	1.757.926	1.610.952	725.912
6	Ekspor Luar Negeri	256.979.357	197.483.435	246.069.397	264.745.228	252.772.199
7	Impor Luar Negeri	88.717.186	65.089.941	69.188.554	80.826.683	59.635.608
8	Net Ekspor Antar Daerah	70.108.410	112.355.257	137.727.806	147.341.273	132.750.072
PDRB		505.105.062	508.880.236	591.903.487	636.454.483	653.677.103

Sumber : Badan Pusat Statistik

Nilai PDRB Provinsi Kalimantan Timur atas dasar harga berlaku dari sisi pengeluaran pada tahun 2015-2019 secara keseluruhan mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, PDRB Provinsi Kalimantan Timur atas dasar harga berlaku menurut kelompok pengeluaran mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 653,68 triliun, dimana Komponen Ekspor baik luar negeri maupun antar daerah mengalami penurunan nilai.

Tabel 2.7
Distribusi PDRB Menurut Kelompok Pengeluaran
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019

No	Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	17,18	17,99	16,36	16,26	16,79
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,49	0,48	0,44	0,47	0,50
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5,14	4,63	3,65	3,73	4,03
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	28,86	28,43	26,10	27,25	28,72
5	Perubahan Inventori	1,14	0,38	0,30	0,25	0,11
6	Ekspor Luar Negeri	50,88	38,81	41,57	41,60	38,67
7	Impor Luar Negeri	17,56	12,79	11,69	12,70	9,12
8	Net Ekspor Antar Daerah	13,88	22,08	23,27	23,15	20,31

Sumber : Badan Pusat Statistik

Distribusi komponen pengeluaran PDRB Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2015-2019 masih didominasi oleh Komponen Net Ekspor Luar Negeri (Ekspor luar negeri dikurang impor luar negeri), disusul Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Komponen Net Ekspor Antar Daerah, dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga.

PDRB Kalimantan Timur sangat dipengaruhi oleh aktivitas perdagangan luar negeri yang tercermin dari besarnya kontribusi Komponen Net Ekspor Luar Negeri, dimana komoditas ekspor Kalimantan Timur sebagian besar didominasi komoditas bahan bakar mineral (seperti batubara, minyak bumi dan gas alam). Namun apabila melihat pergerakan komoditas ekspor non migas pada tahun 2019, terjadi pergerakan hilirisasi industri non migas yang tercermin melalui peran hasil industri non migas pada ekspor luar negeri Kalimantan Timur yang mencapai 10,49 persen. Hanya saja, jenis komoditas secara spesifik belum diketahui karena keterbatasan data.

Peningkatan kontribusi pada tahun 2019 terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Komponen PMTB, dan Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT.

Tabel 2.8
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran ADHK
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019

No	Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1,46	1,56	2,58	3,14	3,15



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

No	Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018	2019
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	8,30	(4,04)	4,89	9,41	5,95
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	(4,93)	(13,03)	(9,79)	7,91	9,97
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	(1,47)	(6,04)	2,75	7,54	4,79
5	Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6	Ekspor Luar Negeri	(16,07)	(9,88)	2,55	(3,71)	9,02
7	Impor Luar Negeri	3,49	(12,70)	2,51	9,39	(25,46)
8	Net Ekspor Antar Daerah	222,87	32,54	7,07	16,02	(23,67)
PDRB		(1,20)	(0,38)	3,13	2,67	4,77

Sumber : Badan Pusat Statistik

Laju pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan kelompok pengeluaran pada tahun 2018 sebesar 2,67 persen. Dimana pertumbuhan tertinggi dicatat oleh Komponen Net Ekspor Antar Daerah sebesar 16,15 persen, dan Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 9,41 persen. Komponen Net Ekspor Antar Daerah selalu mencetak nilai pertumbuhan ekonomi tertinggi dari sisi pengeluaran. Pertumbuhannya juga terjaga di angka positif meskipun ekonomi Kaltim secara keseluruhan sempat terkoreksi negatif di tahun 2015 dan 2016. Adapun kondisi tahun 2019, melalui perhitungan sementara tercatat pertumbuhan ekonomi sebesar 4,77 persen. Dimana pertumbuhan tertinggi terjadi pada Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT. Komponen lain seperti Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dan PMTB tumbuh positif, sedangkan komponen lainnya mengalami kontraksi.

Tabel 2.9
Nilai PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2019 (%)

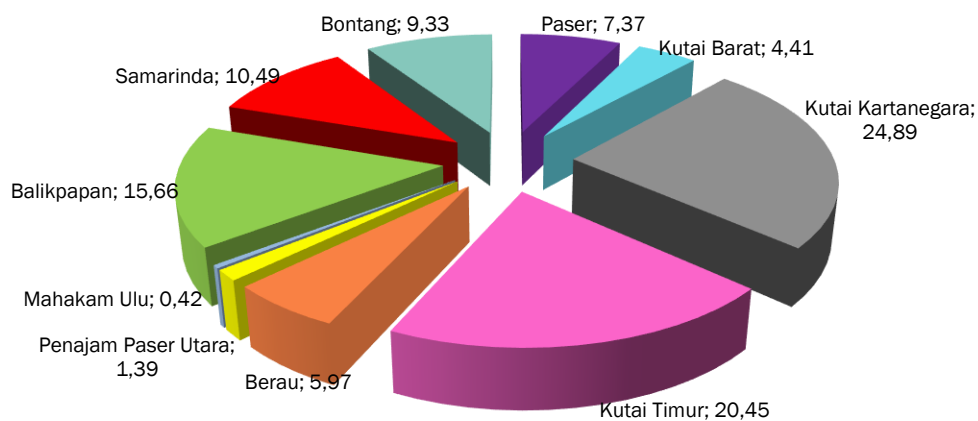
No	KABUPATEN/KOTA	Nilai PDRB (Juta Rp)			LPE		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	Paser	43.954,25	48.280,13	48.175,70	1,17	3,68	3,88
2	Kutai Barat	25.787,19	28.242,13	28.865,24	3,64	5,04	5,58
3	Kutai Kartanegara	149.220,00	161.933,47	162.739,38	1,63	2,12	3,77
4	Kutai Timur	120.264,73	127.779,59	133.725,07	3,28	2,34	7,97
5	Berau	35.656,56	37.638,32	39.050,66	3,01	2,05	5,55
6	Penajam Paser Utara	8.480,81	8.851,02	9.087,47	2,44	1,24	2,52
7	Mahakam Ulu	2.337,70	2.511,49	2.718,25	4,29	5,40	5,44
8	Balikpapan	87.716,53	96.057,53	102.389,03	3,84	4,95	4,78
9	Samarinda	58.443,75	63.917,75	68.570,72	3,85	4,94	4,97
10	Bontang	58.884,68	58.948,51	58.479,36	0,55	-4,10	-2,18

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Nilai PDRB Kabupaten dan Kota di Kalimantan Timur dari tahun 2017-2019 cenderung mengalami kenaikan kecuali Kota Bontang. Kemudian, jika dilihat dari Laju Pertumbuhan Ekonomi tertinggi diperoleh oleh Kabupaten Kutai Timur sebesar 7,97 persen, disusul Kabupaten Kutai Barat dengan laju pertumbuhan 5,58 persen, Kabupaten Berau sebesar 5,55 persen, dan Kabupaten Mahakam Ulu sebesar 5,44 persen. Disamping itu daerah yang mengalami perlambatan pertumbuhan adalah Kota Balikpapan, sedangkan daerah yang mengalami peningkatan laju pertumbuhan ekonomi terutama di Kabupaten Kutai Timur dan Berau. Sementara itu, Kota Bontang satu-satunya yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar negatif 2,18 persen.

Berdasarkan distribusi kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019, maka terlihat bahwa kontribusi Kabupaten Kutai Kartanegara paling besar diantara kabupaten/kota lainnya yang mencapai 24,89 persen, selanjutnya disusul Kabupaten Kutai Timur 20,45 persen yang sektor dominannya disumbang oleh kinerja pertambangan batubara, dan Kota Balikpapan sebesar 15,66 persen sebagai pusat jasa dan niaga serta industri kilang minyak. Selebihnya Kabupaten/Kota lainnya berkontribusi pada PDRB Kalimantan Timur dibawah 15 persen.

Gambar 2.7
Distribusi PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 (%)



Sumber : Kaltim Dalam Angka 2020

Pada tahun 2018, terdapat 6 (enam) kabupaten yang menjadikan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebagai sektor ekonomi utama. Jika dilihat dari besaran kontribusi yang diberikan, maka terlihat bahwa sektor Pertambangan dan Penggalian sangat mendominasi terutama pada perekonomian Kabupaten Kutai Timur. Besaran yang diberikan

sangat signifikan, hingga mencapai 81,29 persen, dan kegiatan tersebut ditopang oleh aktivitas pertambangan batubara.

Tabel 2.10
Tiga Kategori Dominan Dalam Struktur Ekonomi Sektoral Kabupaten/Kota
Menurut PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018

Kab/Kota	Peringkat I		Peringkat II		Peringkat III	
	Lap. Usaha	Share (%)	Lap. Usaha	Share (%)	Lap. Usaha	Share (%)
Paser	Pertambangan	74,97	Pertanian	9,79	Industri	4,43
Kubar	Pertambangan	51,48	Pertanian	13,58	Konstruksi	11,18
Kukar	Pertambangan	64,91	Pertanian	12,98	Konstruksi	7,85
Kutim	Pertambangan	81,29	Pertanian	7,74	Industri	3,02
Berau	Pertambangan	62,68	Pertanian	10,78	Transportasi	5,58
Penajam PU	Pertambangan	30,88	Pertanian	19,96	Industri	15,95
Mahulu	Pertanian	75,62	Pertambangan	7,42	Konstruksi	5,94
Balikpapan	Industri	46,04	Konstruksi	15,84	Transportasi	12,48
Samarinda	Konstruksi	20,85	Perdagangan	16,09	Pertambangan	13,62
Bontang	Industri	82,20	Konstruksi	5,64	Perdagangan	2,78

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

Peranan aktivitas Pertambangan dan Penggalian juga cukup dominan di wilayah Kabupaten Paser, mencapai 74,97 persen. Sama halnya dengan wilayah Kutai Timur, wilayah Kabupaten Paser juga didominasi oleh kegiatan pertambangan batubara. Wilayah lainnya yang juga memiliki kemiripan karakteristik dengan Kutai Timur dan Paser adalah Kabupaten Kutai Kertanegara, dimana Lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian memberikan peranan yang cukup besar mencapai 64,91 persen terhadap total PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun aktivitas pertambangan yang dimaksud adalah pertambangan migas, pertambangan batubara dan pertambangan lainnya.

Adapun daerah yang menggantungkan sektor utamanya pada sektor industri adalah Kota Bontang, sedangkan daerah yang sektor utamanya Pertanian adalah Kabupaten dengan laju pertumbuhan tertinggi di Kalimantan Timur yaitu Kabupaten Mahakam Ulu.

Tabel 2.11
Tiga Kategori Dominan Dalam Struktur Ekonomi Pengeluaran Kabupaten/Kota
Menurut PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018

Kab/Kota	Peringkat I		Peringkat II		Peringkat III	
	Komponen	Share (%)	Komponen	Share (%)	Komponen	Share (%)
Paser	Net Ekspor	62,71	PMTB	21,50	K. Ruta	12,18
Kubar	Net Ekspor	40,84	PMTB	35,58	K. Ruta	15,37
Kukar	Net Ekspor	54,67	PMTB	31,55	K. Ruta	10,79
Kutim	Net Ekspor	75,41	PMTB	16,18	K. Ruta	6,06
Berau	Net Ekspor	64,25	PMTB	20,01	K. Ruta	11,66
Penajam PU	K. Ruta	40,08	PMTB	32,62	Net Ekspor	15,63
Mahulu	Net Ekspor	34,70	PMTB	27,83	K. Ruta	23,62
Balikpapan	PMTB	42,02	Net Ekspor	28,16	K. Ruta	26,39
Samarinda	K. Ruta	44,94	PMTB	42,11	K. Pemerintah	12,06
Bontang	Net Ekspor	76,42	PMTB	11,98	K. Ruta	9,51

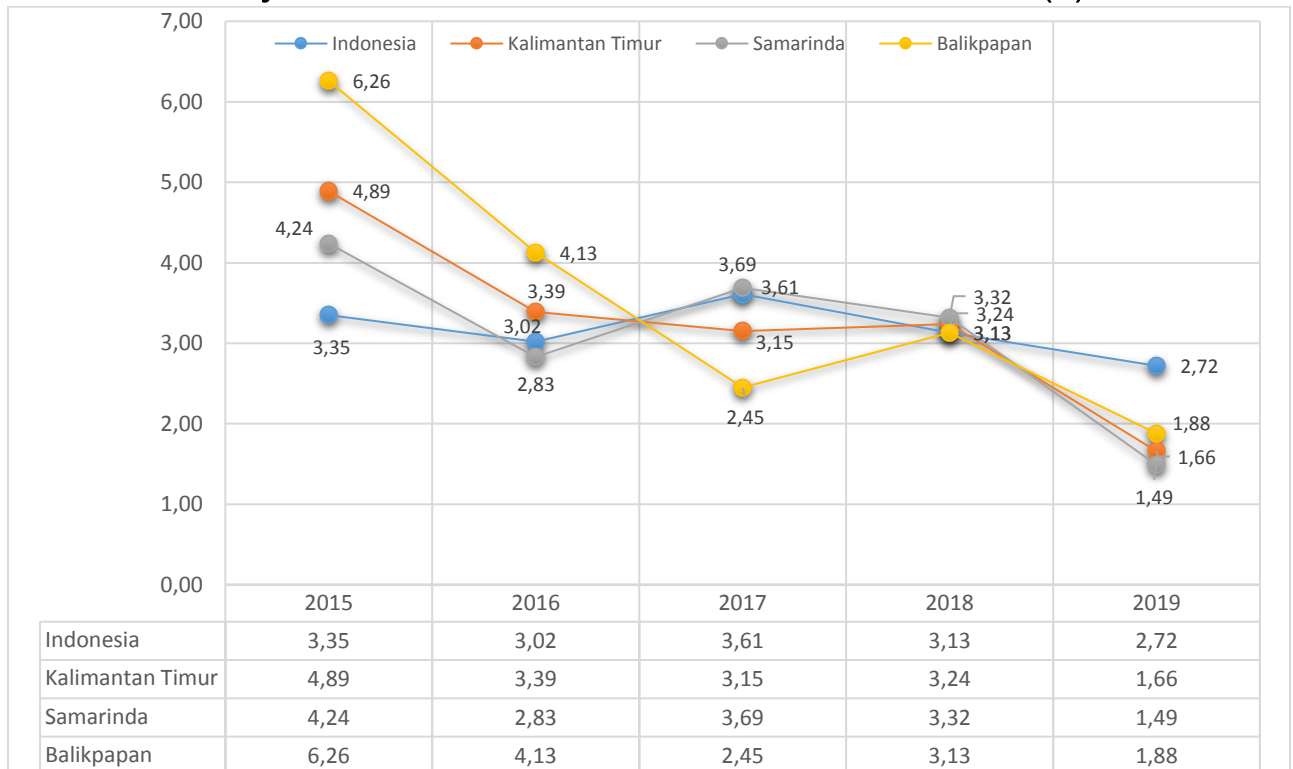
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

Berdasarkan kelompok pengeluaran pada PDRB Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, tujuh kabupaten/kota didominasi oleh Komponen Net Ekspor antara lain Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Berau, Kabupaten Mahakam Ulu dan Kota Bontang. Dua kabupaten/kota lainnya didominasi oleh Konsumsi Rumah Tangga adalah Kota Samarinda dan Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian Kota Balikpapan didominasi oleh komponen pengeluaran PMTB.

A. Laju Inflasi

Laju inflasi Provinsi Kalimantan Timur cenderung menurun dari tahun ke tahun, terutama pada tahun 2019 hanya sebesar 1,66 persen. Rendahnya tekanan inflasi bersumber dari Kelompok Transportasi dan Komunikasi yang mengalami deflasi. Hal ini merupakan dampak dari upaya pemerintah dalam pengendalian tarif angkutan udara melalui penyesuaian Tarif Batas Atas (TBA) Pesawat Terbang dengan menerbitkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 106 Tahun 2019 mengenai Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Gambar 2.8
Laju Inflasi di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019 (%)



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Namun demikian penurunan inflasi tertahan oleh kenaikan harga dari kelompok sandang, kelompok bahan makanan, kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga, kelompok makanan jadi, kelompok kesehatan dan kelompok perumahan.

Kota Samarinda pada tahun 2019 mengalami inflasi lebih rendah dari tahun sebelumnya menjadi 1,49 persen, dan lebih rendah dibandingkan inflasi Kota Balikpapan sebesar 1,88 persen. Sehingga secara keseluruhan tingkat inflasi Kalimantan Timur berada di bawah inflasi nasional yang mencapai 2,72 persen.

B. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 5,94 persen. Namun secara absolut, jumlah penduduk miskin meningkat menjadi sebesar 219,92 ribu jiwa. Dimana garis kemiskinan di Kalimantan Timur juga meningkat menjadi sebesar Rp 609.155 yang didominasi untuk memenuhi kecukupan pangan/makanan.

**Tabel 2.12
Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019**

Periode	Garis Kemiskinan			Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin
	Makanan	Non Makanan	Total		
Maret 2015	336.356	137.353	473.710	212,89	6,23
Maret 2016	363.918	147.287	511.205	212,92	6,11
Maret 2017	389.152	158.943	548.094	220,17	6,19
Maret 2018	405.108	169.596	574.704	218,90	6,03
Maret 2019	429.165	179.991	609.155	219,92	5,94

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Komoditi makanan yang mempunyai andil terbesar dalam pembentuk garis kemiskinan makanan di Kalimantan Timur pada bulan Maret 2019 antara daerah perkotaan dan perdesaan terdapat kemiripan pola. Dari enam komoditi penyumbang garis kemiskinan makanan terbesar di pedesaan dan di perkotaan, tiga komoditi terbesarnya terdapat persamaan. Tiga jenis komoditi terbesar yang sama yaitu beras, rokok kretek filter, dan telur ayam ras. Berikut adalah jenis komoditi penyusun garis kemiskinan makanan untuk daerah perkotaan secara berturut-turut adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, mie instan dan tongkol/tuna/cakalang. Sedangkan di daerah perdesaan adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, mie instan, gula pasir, daging ayam ras. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel Persentase komoditi makanan terhadap garis kemiskinan makanan menurut daerah.

**Tabel 2.13
Persentase Komoditi Makanan terhadap Garis Kemiskinan Makanan
Menurut Daerah Tahun 2019**

No	Perkotaan		Perdesaan	
	Komoditi	%	Komoditi	%
1	Beras	16,54	Beras	20,28
2	Rokok Kretek Filter	12,65	Rokok Kretek Filter	13,88
3	Telur ayam ras	4,96	Telur ayam ras	4,46
4	Daging ayam ras	3,69	Mie Instan	3,35
5	Mie Instan	3,02	Gula Pasir	2,97
6	Tongkol/Tuna/Cakalang	2,54	Daging Ayam Ras	2,63
7	Kue basah	2,35	Tongkol/Tuna/Cakalang	2,08
8	Gula Pasir	2,20	Bawang merah	1,76
9	Tempe	1,71	Roti	1,68
10	Tahu	1,57	Tempe	1,62
11	Bawang Merah	1,52	Kue Basah	1,38
12	Kopi Bubuk & Kopi Instan (Sachet)	1,37	Kopi Bubuk & Kopi Instan (Sachet)	1,31
13	Susu Bubuk	1,31	Cabe Rawit	1,29
14	Bandeng	1,31	Tahu	1,26
15	Roti	1,22	Susu Kental Manis	1,20

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Jika dilihat menurut kabupaten/kota, pada tahun 2019 tingkat kemiskinan tertinggi terdapat di Kabupaten Mahakam Ulu sebesar 11,25 persen, Kabupaten Kutai Timur sebesar 9,48 persen, Kabupaten Kutai Barat sebesar 9,09 persen dan Kabupaten Paser sebesar 8,95 persen. Sedangkan tingkat kemiskinan terendah tercatat di Kota Balikpapan hanya sebesar 2,42 persen.

Pada tahun 2019 kenaikan tingkat kemiskinan hanya terjadi di Kabupaten Kutai Timur. Sedangkan kabupaten/kota lainnya mampu menurunkan tingkat kemiskinan, dimana penurunan tertinggi terjadi di Kota Bontang dan Kabupaten Mahakam Ulu.

Tabel 2.14
Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019 (persen)

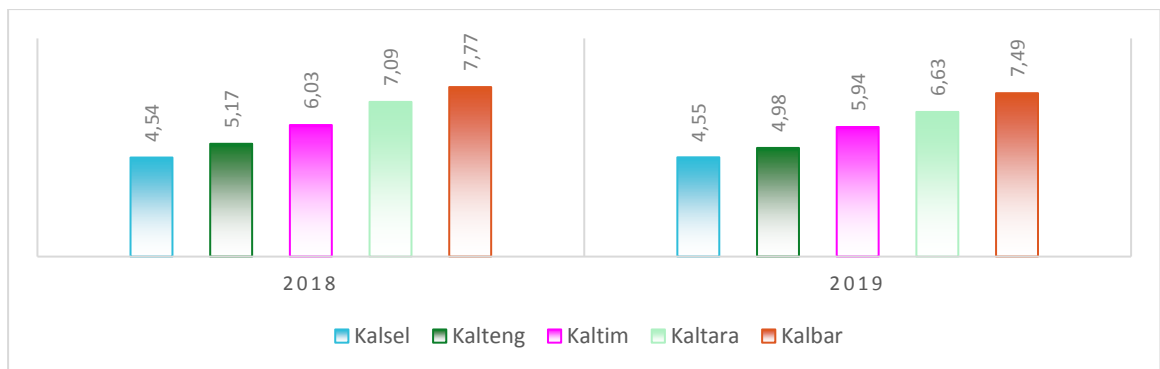
No	Kab/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
1	Paser	8,76	8,68	9,28	9,03	8,95
2	Kutai Barat	8,33	8,65	8,72	9,15	9,09
3	Kutai Kartanegara	7,99	7,63	7,57	7,41	7,20
4	Kutai Timur	9,31	9,16	9,29	9,22	9,48
5	Berau	5,33	5,37	5,41	5,04	5,04
6	Penajam Paser Utara	7,92	7,49	7,63	7,40	7,18
7	Balikpapan	2,91	2,81	2,82	2,64	2,42
8	Samarinda	4,82	4,72	4,77	4,59	4,59
9	Bontang	5,06	5,18	5,16	4,67	4,22
10	Mahakam Ulu	10,50	10,65	11,29	11,62	11,25

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Tingkat kemiskinan di Kalimantan Timur adalah yang tertinggi ketiga di Regional Kalimantan, setelah Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara. Tingkat kemiskinan terendah

dicatat oleh Provinsi Kalimantan Selatan. Disamping itu, pada tahun 2019 terjadi penurunan tingkat kemiskinan di tiga provinsi Regional Kalimantan, kecuali Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun penurunan tingkat kemiskinan terbesar terjadi di Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 0,46 poin dan Kalimantan Barat turun sebanyak 0,28 poin, sementara Kalimantan Timur menurunkan tingkat kemiskinannya sebanyak 0,09 poin.

Gambar 2.9
Tingkat Kemiskinan Regional Kalimantan



Sumber : BPS

Secara absolut, jumlah penduduk miskin terbesar terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 56.340 jiwa, Kota Samarinda sebanyak 39.800 jiwa, Kabupaten Kutai Timur sebanyak 35.310 jiwa. Disisi lain, yang perlu menjadi perhatian adalah share PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur merupakan dua terbesar terhadap total PDRB Kalimantan Timur namun ternyata memiliki jumlah penduduk miskin yang terbesar di daerah tersebut. Besarnya nilai PDRB daerahnya belum mampu memberikan dampak maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

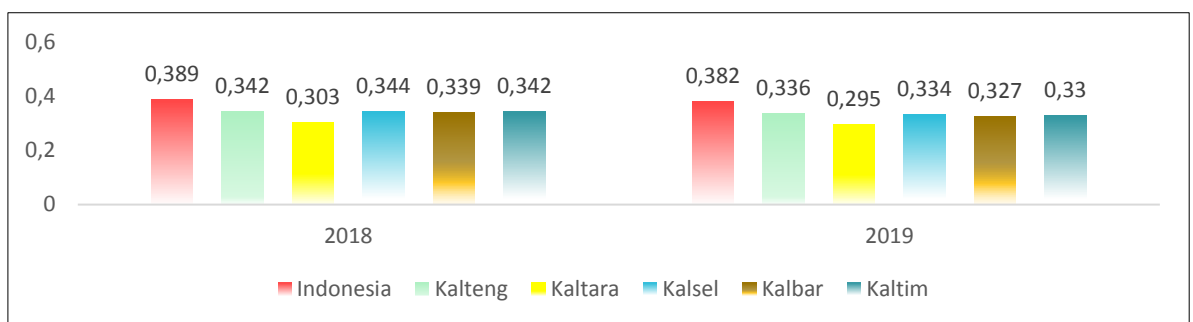
Tabel 2.15
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019 (jiwa)

No	Kab/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
1	Paser	22.820	23.170	25.300	25.140	25.450
2	Kutai Barat	11.120	12.650	12.800	13.490	13.450
3	Kutai Kartanegara	56.990	55.820	56.570	56.560	56.340
4	Kutai Timur	29.570	30.170	31.950	33.020	35.310
5	Berau	11.210	11.470	11.860	11.330	11.620
6	Penajam Paser Utara	12.170	11.660	12.000	11.760	11.520
7	Balikpapan	17.890	17.550	17.860	17.010	15.780
8	Samarinda	32.250	38.950	40.010	39.230	39.800
9	Bontang	8.020	8.600	8.750	8.100	7.470
10	Mahakam Ulu	2.830	2.880	3.070	3.250	3.190

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Indeks Gini Kalimantan Timur yang mencerminkan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat pada tahun 2019 menunjukkan penurunan angka ketimpangan menjadi 0,330. Sebelumnya indeks gini Kalimantan Timur sebesar 0,342. Jika dibandingkan dengan regional Kalimantan, pada tahun 2019 ketimpangan pendapatan terendah di Kalimantan Utara sebesar 0,295. Sedangkan sisanya menunjukkan level ketimpangan yang serupa pada posisi 0,32-0,34. Dengan capaian indeks gini Kalimantan Timur tersebut, masih berada di bawah tingkat ketimpangan Indonesia yang mencapai 0,382 pada tahun 2019.

Gambar 2.10
Indeks Gini Regional Kalimantan dan Indonesia Tahun 2018-2019



Sumber : BPS

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

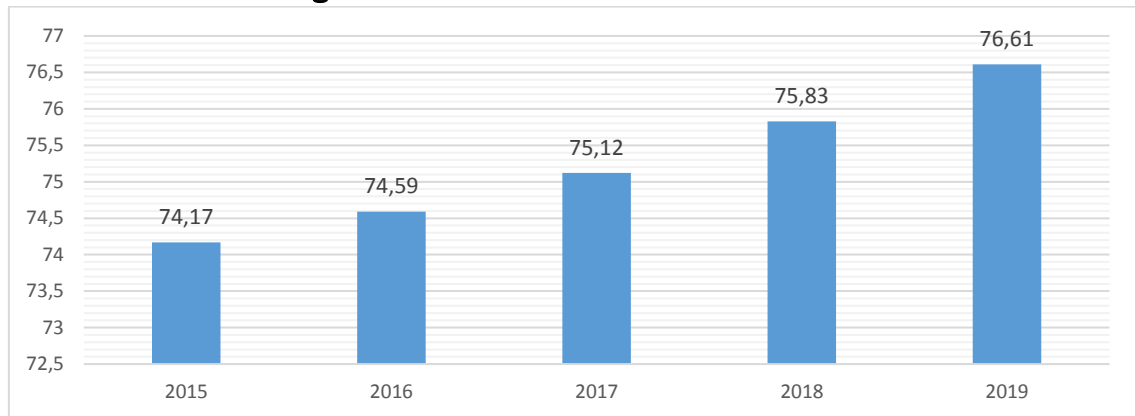
Fokus kesejahteraan sosial masyarakat dalam analisis hasil pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain: aspek kependudukan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, hingga seni budaya dan olahraga. Namun, dari aspek-aspek tersebut terdapat aspek utama sekaligus *ultimate impact* dalam melihat kesejahteraan sosial masyarakat, yaitu melalui analisis pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun ke tahun. Dengan menggabungkan tiga komponen dasar (kesehatan, pendidikan, dan ekonomi) menjadikan IPM sebagai salah satu indeks acuan pembangunan suatu daerah untuk memonitoring dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah.

A. Indeks Pembangunan Manusia

Secara umum, pembangunan manusia Provinsi Kalimantan Timur terus mengalami kemajuan selama periode 2015 hingga 2019. IPM Provinsi Kalimantan Timur meningkat dari 74,17 pada tahun 2015 menjadi 76,61 pada tahun 2019. Selama periode waktu tersebut, IPM Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan pertumbuhan positif, namun status pembangunan manusia Provinsi Kalimantan Timur masih belum mengalami lompatan status.

Hingga saat ini, pembangunan manusia Provinsi Kalimantan Timur masih berstatus “tinggi” menduduki peringkat ke 3 (tiga) nasional. Hasil capaian ini tentunya di dukung oleh peningkatan pada empat komponen pembentuk IPM di Kalimantan Timur.

Gambar 2.11
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Pada tahun 2019 tiga kota di Kalimantan Timur mengalami lompatan status dari tinggi menjadi sangat tinggi. Kota Samarinda dengan nilai IPM sebesar 80,20, Kota Balikpapan sebesar 80,11, dan Kota Bontang sebesar 80,09. Sehingga wilayah dengan IPM tinggi di Kalimantan Timur masih ditempati wilayah perkotaan. Dibandingkan dengan wilayah kota, wilayah kabupaten memiliki kesenjangan IPM yang cukup jauh dengan wilayah kota dimana IPM tertinggi adalah Kabupaten Berau dengan IPM sebesar 74,88 dan terendah adalah Kabupaten Mahakam Ulu dengan IPM sebesar 67,58.

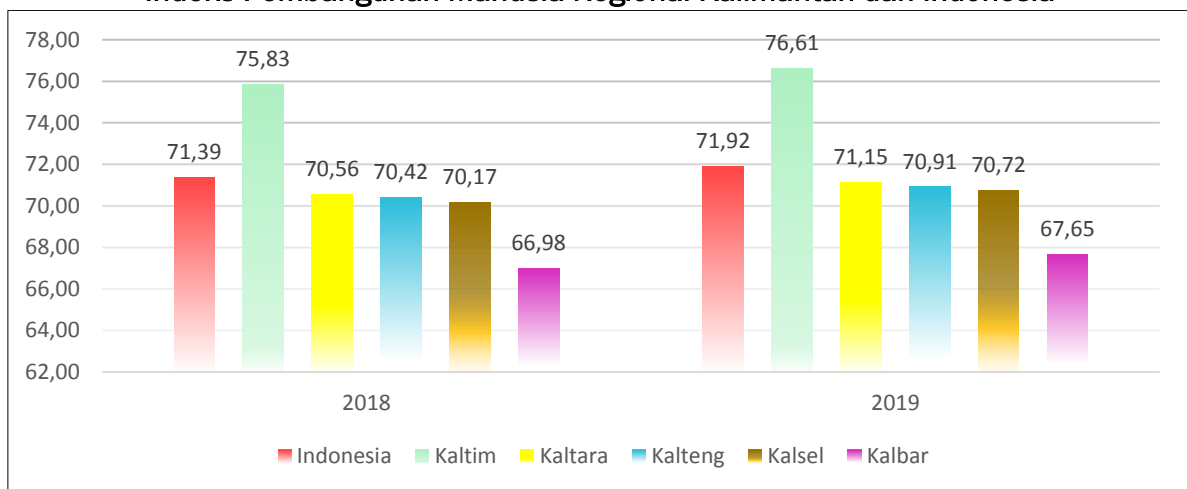
Tabel 2.16
Indeks Pembangunan Manusia Berdasar Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

No	Kab/Kota	UHH	EYS	MYS	Pengeluaran per kapita (Rp ribu)	IPM
1	Paser	72,52	13,00	8,54	10.767	72,29
2	Kutai Barat	72,79	12,89	8,34	10.338	71,63
3	Kutai Kartanegara	72,21	13,58	9,10	11.152	73,78
4	Kutai Timur	73,03	12,78	9,18	11.196	73,49
5	Berau	71,94	13,31	9,25	12.726	74,88
6	Penajam Paser Utara	71,30	12,55	8,16	11.750	71,64
7	Mahakam Ulu	71,90	12,50	7,89	8.008	67,58
8	Balikpapan	74,41	14,13	10,67	14.791	80,11
9	Samarinda	74,17	14,70	10,47	14.613	80,20
10	Bontang	74,18	12,90	10,73	16.843	80,09

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

IPM Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 merupakan IPM tertinggi di Regional Kalimantan dengan interval yang cukup jauh, dimana berkisar antara 67,65 – 71,15. Demikian pula laju pertumbuhan IPM tertinggi di Regional Kalimantan dicatat oleh Kalimantan Timur sebesar 1,03 persen dan Kalimantan Barat sebesar 1,00 persen. Capaian ini juga lebih cepat dibandingkan pertumbuhan IPM nasional sebesar 0,74 persen.

Gambar 2.12
Indeks Pembangunan Manusia Regional Kalimantan dan Indonesia



Sumber : BPS

Hal yang penting untuk dimaknai dalam pencapaian IPM Kalimantan Timur yang tinggi bukanlah ranking secara nasional atau regional. Laju pertumbuhan IPM menjadi hal yang paling utama untuk diulas karena hal ini terkait perkembangan dimensi pembangunan manusia yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Namun di sisi lain, jika tidak didorong, maka capaian pembangunan manusia di Kalimantan Timur dapat tertinggal. Oleh karena itu, pembangunan yang terus menerus pada dimensi pendidikan, kesehatan dan ekonomi harus terus dilakukan dalam rangka percepatan pembangunan manusia di Kalimantan Timur.

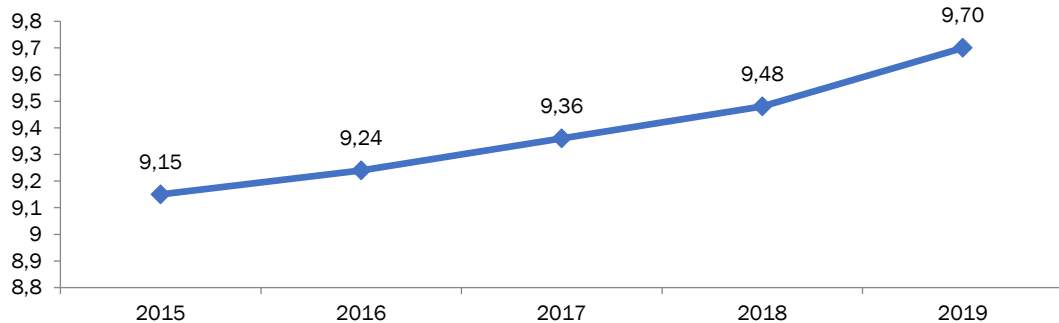
B. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor kunci dalam peningkatan potensi dan daya saing sumber daya manusia. Hal ini dikarenakan, dengan memiliki pendidikan yang berkualitas maka setiap penduduk akan memiliki lebih banyak kesempatan dalam memperbaiki kualitas kehidupannya dari mulai mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, pendapatan lebih layak, hingga kehidupan yang lebih sejahtera. Berikut beberapa indikator kinerja pembangunan daerah pada bidang pendidikan:

1) Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan suatu indikator yang menggambarkan rata-rata lama sekolah penduduk di suatu wilayah dalam mengenyam jenjang pendidikan. Di Provinsi Kalimantan Timur, rata-rata lama sekolah penduduk terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya dimana pada tahun terakhir 2019 mencapai 9,70 tahun. Angka ini mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk di Provinsi Kalimantan Timur usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas X (SMA Kelas I). Capaian Rata-rata Lama Sekolah Kalimantan Timur di tahun 2019 berada di atas target yang ditetapkan sebesar 9,40 tahun.

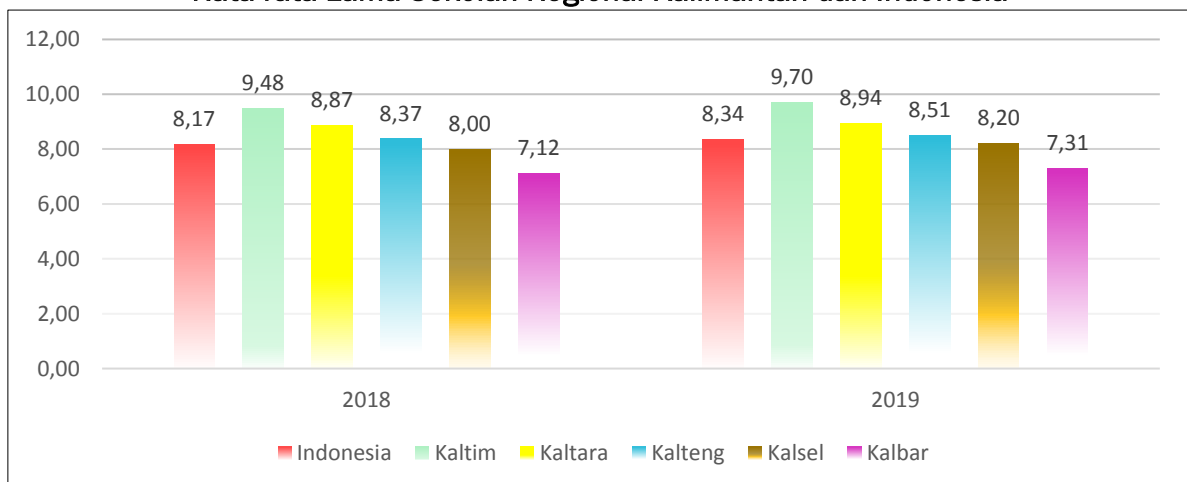
Gambar 2.13
Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019 (Tahun)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Capaian Rata-rata Lama Sekolah Kalimantan Timur sebesar 9,70 tahun adalah yang tertinggi di Regional Kalimantan serta lebih tinggi dari Nasional sebesar 8,34 tahun. Disusul Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah masing-masing sebesar 8,94 tahun dan 8,20 tahun.

Gambar 2.14
Rata-rata Lama Sekolah Regional Kalimantan dan Indonesia



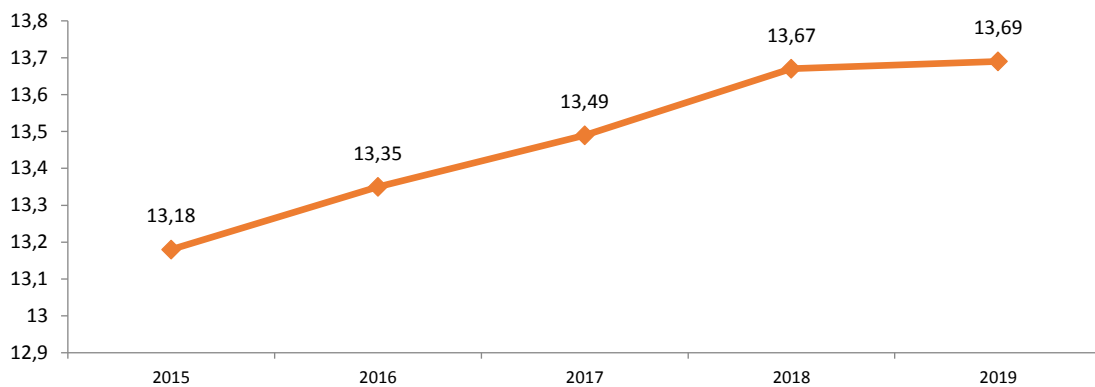
Sumber : BPS

2) Harapan Lama Sekolah

Di tahun 2019, Harapan Lama Sekolah di Provinsi Kalimantan Timur telah mencapai 13,69 yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga SMA atau D1. Hal ini sangat baik karena menjadikan potensi sumber daya manusia pada generasi mendatang menjadi lebih baik. Angka ini menggambarkan makin tingginya perhatian pemerintah provinsi terhadap dunia pendidikan sehingga harapan lama sekolah setiap penduduk dapat mengikuti pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi.

Capaian Harapan Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Timur masih sedikit di bawah target yang telah ditetapkan sebesar 13,89 tahun. Terdapat selisih sebanyak 0,20 tahun. Dimana laju pertumbuhan rata-rata komponen ini selama lima tahun terakhir sebesar 0,78 persen.

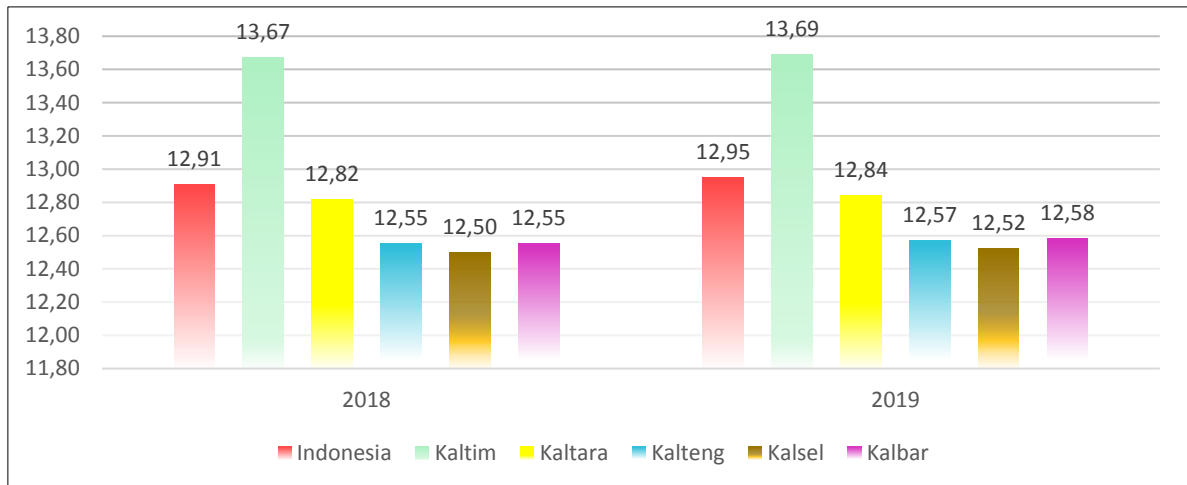
Gambar 2.15
Harapan Usia Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019 (Tahun)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Harapan Lama Sekolah Kalimantan Timur selalu menjadi yang tertinggi di Regional Kalimantan. Namun trend laju pertumbuhan komponen ini (2015-2019) cenderung mengalami perlambatan. Berbeda dengan Provinsi lainnya di Regional Kalimantan yang meski berfluktuasi, namun cenderung meningkat. Laju pertumbuhan tertinggi ditunjukkan oleh Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

Gambar 2.16
Harapan Lama Sekolah Regional Kalimantan dan Indonesia



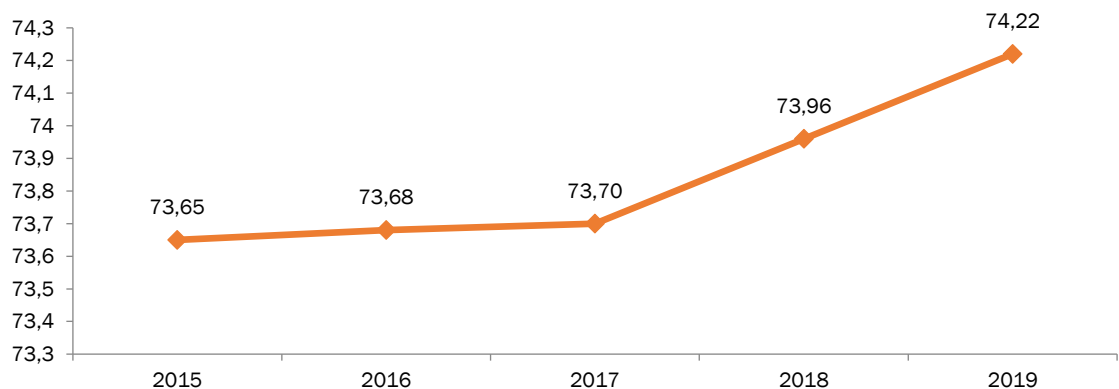
Sumber : BPS

Harapan Lama Sekolah Kalimantan Timur juga lebih tinggi dari Harapan Lama Sekolah Indonesia. Namun sayangnya, rata-rata laju pertumbuhan Harapan Lama Sekolah Indonesia selama lima tahun terakhir lebih tinggi dari laju pertumbuhan Kalimantan Timur.

C. Kesehatan

Kesehatan merupakan modal dasar bagi manusia untuk melakukan aktivitas kesehariannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa pergerakan perekonomian maupun pembangunan daerah sangat tergantung pada derajat kesehatan suatu masyarakat. Indikator kinerja pembangunan di bidang kesehatan diwakili oleh Angka Harapan Hidup yang merupakan salah satu indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia. Angka Harapan Hidup mengindikasikan peluang bayi yang baru lahir akan mencapai usia harapan hidup sekian tahun.

Gambar 2.17
Angka Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019 (Tahun)



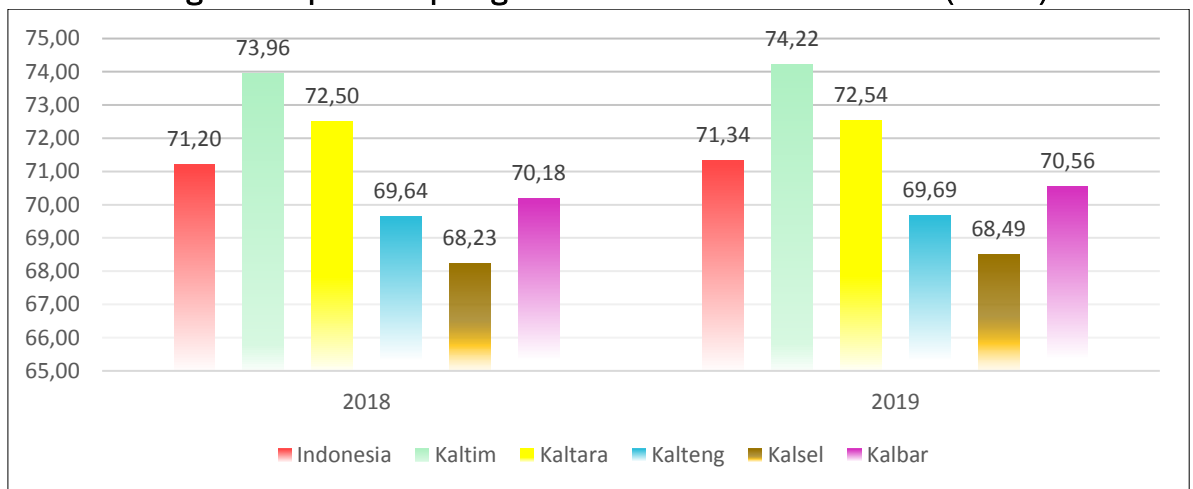
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Di Provinsi Kalimantan Timur, Angka Harapan Hidup mengalami kenaikan di setiap tahunnya dimana pada tahun 2018 mencapai 73,96 tahun dan meningkat kembali pada tahun

2019 menjadi 74,22 tahun. Angka ini mengindikasikan bahwa bayi yang lahir pada tahun 2019 akan memiliki harapan hidup hingga usia 74 tahun. Sehingga, angka ini bisa dikatakan memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 73,72 tahun.

Jika dibandingkan dengan provinsi di Regional Kalimantan, Angka Harapan Hidup Kalimantan Timur masih menjadi yang tertinggi. Namun laju pertumbuhan tertinggi lima tahun terakhir terjadi di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat. Sedangkan capaian Kalimantan Timur masih berada di atas capaian nasional sebesar 71,34 tahun.

Gambar 2.18
Angka Harapan Hidup Regional Kalimantan dan Indonesia (Tahun)

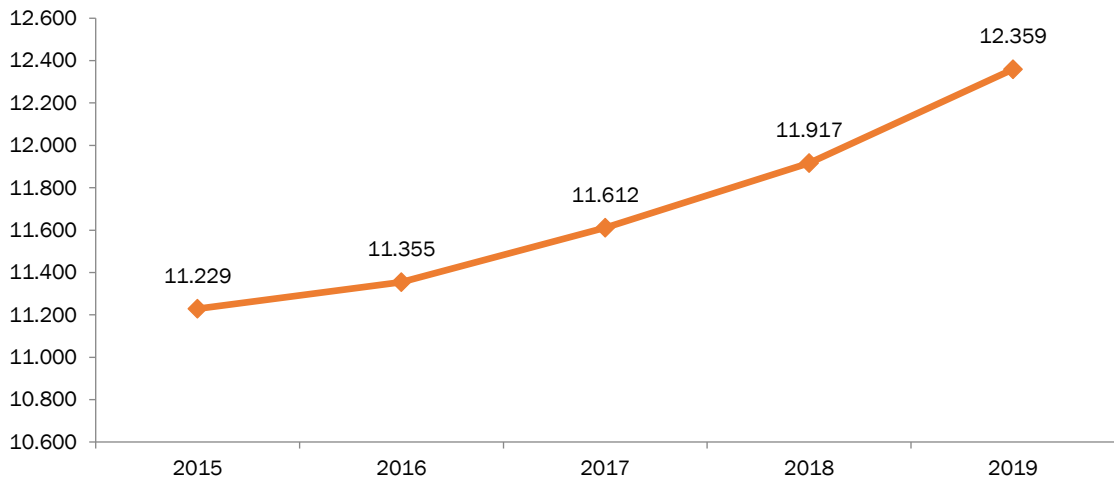


Sumber : BPS

D. Standar Hidup Layak

Standar hidup layak digambarkan oleh Pengeluaran per Kapita Disesuaikan, yang nilainya ditentukan dari pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*). Pada tahun 2019, Pengeluaran per Kapita Disesuaikan masyarakat Kalimantan Timur mencapai 12,36 juta rupiah per tahun, atau bertambah 442 ribu rupiah dibandingkan tahun 2018. Maka, Pengeluaran per Kapita Disesuaikan tersebut selama periode lima tahun terakhir rata-rata tumbuh 2,33 persen per tahun.

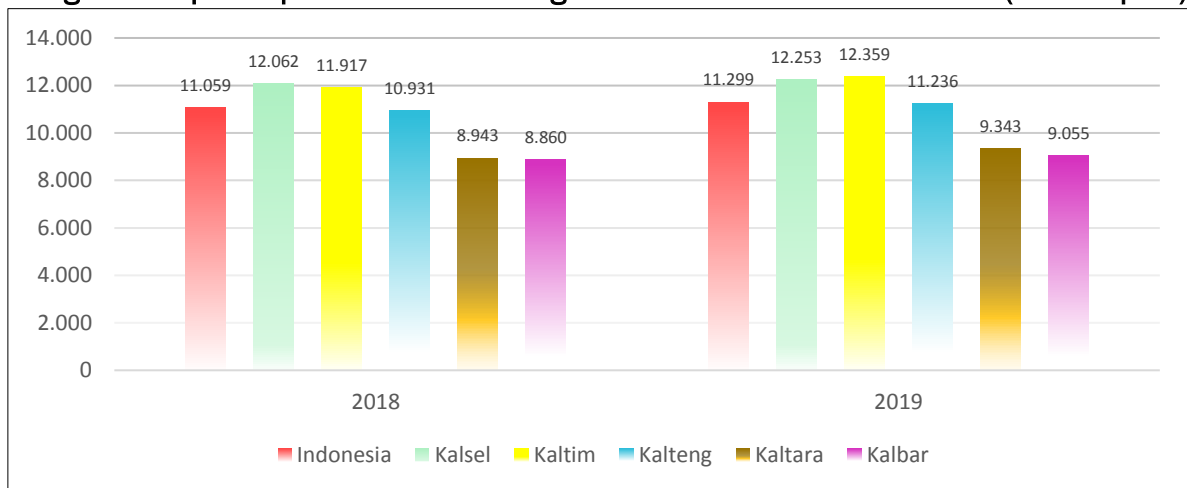
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019 (Ribu Rp)



Sumber : BPS

Pada komponen standar hidup layak di Regional Kalimantan tahun 2019, Kalimantan Timur kembali menjadi yang tertinggi dimana pada tahun sebelumnya posisi ini disalip oleh Kalimantan Selatan. Serta perolehan komponen pengeluaran per kapita Kalimantan Timur masih berada di atas nasional.

Gambar 2.19
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Regional Kalimantan dan Indonesia (Ribuan Rupiah)



Sumber : BPS

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

A. Pendidikan

Salah satu indikator penting dalam melihat keberhasilan pendidikan adalah dengan menganalisis Angka Partisipasi Sekolah (APS). Angka Partisipasi Sekolah (APS) menggambarkan

seberapa banyak atau besar penduduk usia sekolah yang telah menikmati pendidikan tanpa melihat jenjang pendidikannya.

Secara umum, peningkatan APS menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan, terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan. Semakin tingginya persentase penduduk usia sekolah yang mengenyam pendidikan merupakan target mutlak yang harus dicapai oleh pemerintah. APS Provinsi Kalimantan Timur pada jenjang usia 7-12 tahun dan usia 16-18 tahun terus mengalami kenaikan yang mengindikasikan jumlah penduduk usia sekolah mengenyam pendidikan semakin meningkat. Sedangkan APS pada jenjang usia 13-15 tahun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2019.

Tabel 2.17
Angka Partisipasi Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019

Angka Partisipasi Sekolah						
Usia Sekolah	2014	2015	2016	2017	2018	2019
7-12	97,60	99,63	99,54	99,67	99,76	99,68
13-15	89,00	97,92	98,18	98,79	98,89	98,83
16-18	74,24	80,68	80,81	81,32	81,55	81,81
Angka Partisipasi Kasar						
Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016	2017	2018	2019
SD	111,04	112,61	110,04	108,07	108,02	105,86
SLTP	91,49	97,90	95,28	91,46	92,57	104,81
SLTA	85,54	90,31	95,38	99,51	96,08	94,79
Angka Partisipasi Murni						
Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016	2017	2018	2019
SD	96,45	97,00	97,13	97,43	98,40	98,41
SLTP	77,53	79,06	79,20	79,58	79,68	80,42
SLTA	59,35	67,78	67,92	68,23	68,43	68,55

Sumber: BPS Kalimantan Timur

Angka Partisipasi Kasar (APK) digunakan untuk menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2019 paling tinggi berada pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar, yakni sebesar 105,86, hal ini menunjukkan bahwa terdapat 5,86 persen penduduk yang bukan dari golongan umur 7-12 tahun bersekolah di tingkat SD.

Angka Partisipasi Murni (APM) digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Terdapat 98,41 persen penduduk usia 7-12 tahun yang bersekolah tepat waktu. Selanjutnya pada kelompok usia 13-15 tahun terdapat 80,42 persen penduduk bersekolah tepat waktu. Sementara pada kelompok usia 16-18 tahun yang seharusnya mengenyam pendidikan Sekolah Menengah di Kalimantan Timur hanya terdapat 68,28 persen penduduk bersekolah tepat waktu.

Rasio Murid-Guru yang menggambarkan tingkat perbandingan guru terhadap murid untuk melihat kecukupan jumlah guru di suatu wilayah terhadap jumlah murid yang harus diajar. Sedangkan Rasio Murid-Sekolah menggambarkan tingkat perbandingan fasilitas pendidikan yakni jumlah sekolah yang aktif terhadap jumlah murid di Provinsi Kalimantan Timur. Meskipun begitu, angka ini masih umum mengingat belum dilihat persebaran fasilitas pendidikan di wilayah Kalimantan Timur.

Tabel 2.18
Rasio Murid-Guru dan Murid-Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

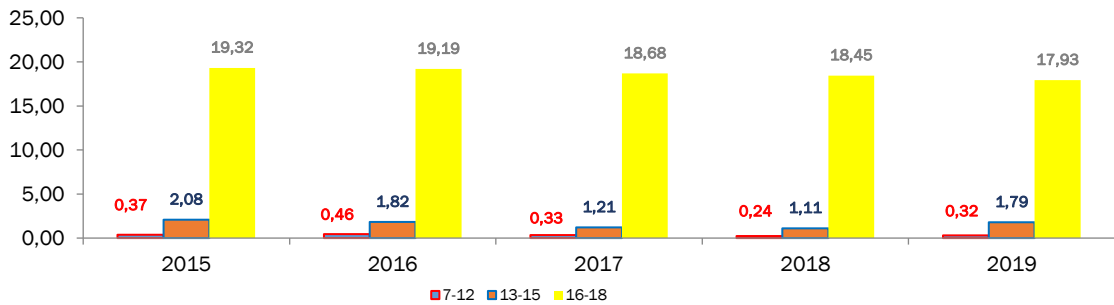
Tingkat Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid-Sekolah
Sekolah Dasar (SD)					
Negeri	1.656	354.825	20.678	17,16	214,27
Swasta	230	56.077	3.098	18,10	243,81
MI	122	23.122	1.419	16,29	189,52
Sekolah Menengah Pertama (SMP)					
Negeri	434	125.347	7.637	16,41	288,82
Swasta	212	31.328	2.115	14,81	147,77
MTs	151	26.888	1.941	13,85	178,07
Sekolah Menengah Atas (SMA)					
Negeri	137	62.628	3.610	17,35	457,14
Swasta	83	11.556	868	14,58	139,23
MA	61	9.111	787	11,58	149,36
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)					
Negeri	87	47.186	2.944	16,03	542,37
Swasta	135	28.097	1.806	15,56	208,13

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur dan Kanwil Kemenag Wilayah Kaltim

Pada tahun 2019, rasio murid-guru paling tinggi pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar. Sedangkan rasio guru terendah pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Sementara rasio murid-sekolah tertinggi adalah pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Angka Putus Sekolah di Provinsi Kalimantan Timur pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar cukup rendah (di bawah 1 persen). Sementara angka putus sekolah pada tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) juga cukup rendah, dimana hingga tahun 2019 angka putus sekolah berada di bawah 2 persen. Adapun angka putus sekolah tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas setiap tahun mengalami penurunan, hingga tahun 2019 mencapai 17,93 persen.

Gambar 2.20
Angka Putus Sekolah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019 (persen)



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Perguruan tinggi merupakan jenjang pendidikan tertinggi dalam peningkatan potensi sumber daya manusia sebagai bagian dari pendidikan formal. Di Provinsi Kalimantan Timur, terdapat 56 perguruan tinggi/akademi/lembaga pendidikan tinggi. Pada tahun 2018, jumlah lulusan pendidikan tinggi mencapai 12.853 dengan jumlah dosen sebanyak 3.970 orang.

Tabel 2.19
Indikator Perguruan Tinggi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

Kategori	Jumlah Perguruan Tinggi / Akademi/ Lembaga Pendidikan Tinggi	Jumlah Program Studi	Jumlah Dosen	Jumlah Lulusan
Perguruan Tinggi				
Negeri	5	159	1.664	6.783
Swasta	51	171	2.306	6.070
Jumlah	56	330	3.970	12.853

Sumber: Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

B. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu modal utama dari sumber daya manusia dalam melaksanakan aktivitas untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Kesehatan juga menjadi prasyarat mutlak bagi penduduk untuk melaksanakan segala program perencanaan pembangunan terkait pendidikan, ketenagakerjaan, perekonomian, bahkan kesehatan itu sendiri. Oleh karena itu, peningkatan bidang kesehatan akan memiliki *multiplier effect* pada program-program pembangunan kedepannya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah melihat bagaimana perkembangan kesehatan masyarakat, baik dari segi fasilitas, sarana prasarana, pemerataan kesehatan, maupun tingkat kesehatan penduduk. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya melakukan peningkatan berbagai pelayanan kesehatan guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal dan berkualitas. Berbagai upaya peningkatan tersebut antara lain dilakukannya penyempurnaan pada beberapa program pembangunan kesehatan

masyarakat, seperti peningkatan kesadaran akan kesehatan ibu dan bayi, kesadaran untuk menggunakan fasilitas kesehatan resmi, hingga terkait pola hidup sehat di masyarakat. Berikut fasilitas dan pelayanan kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2.20
Fasilitas dan Pelayanan Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019

No.	Fasilitas Kesehatan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Rumah Sakit	46	47	47	44	45
2	Tempat Tidur RS	4.873	6.154	6.219	6080	6080
3	Rumah Sakit Swasta	16	16	16	16	16
4	Dokter Umum	1.113	1.035	1.114	1.010	1.024
5	Dokter Gigi	335	323	320	309	314
6	Dokter Spesialis	347	583	678	503	647
7	Tenaga Medis RS	1.189	1.358	1.472	1.513	1.671
8	Perawat RS	6.893	7.178	6.662	7.823	7.538
9	RS Bersalin	10	10	10	9	8
10	Puskesmas	180	180	181	190	187
11	Pustu	689	669	714	716	716
12	Dokter Puskesmas	607	714		672	589
13	Pedagang Besar Farmasi	44	45	47	18	18
14	Apotek	561	524	524	637	637
15	Persentase Persalinan dengan Tenaga Medis	91,26	90,12	88,2	96,34	96,39

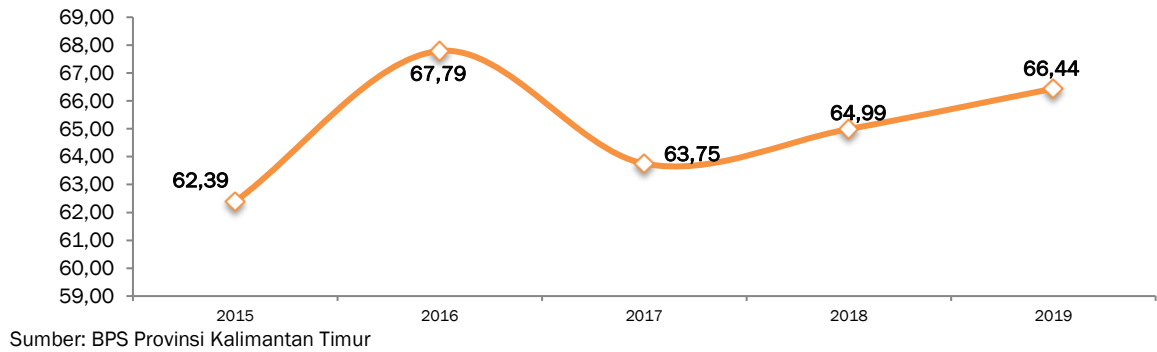
Sumber: Dinas Kesehatan

C. Ketenagakerjaan

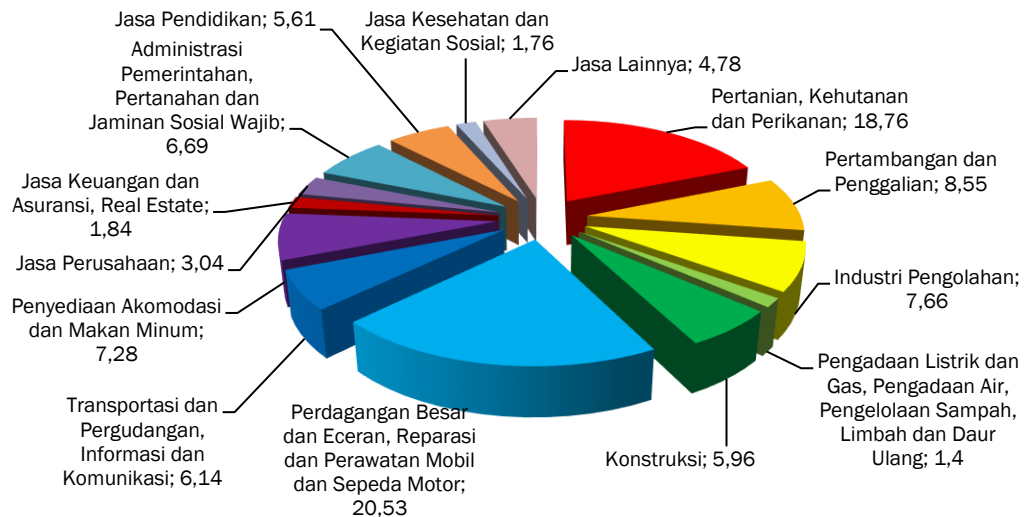
Ketenagakerjaan merupakan salah satu indikator penting dalam melihat kemampuan kehidupan masyarakat sekaligus mengindikasikan daya saing sumber daya manusia suatu wilayah. Di Provinsi Kalimantan Timur, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 67,79 persen pada tahun 2016 menjadi 64,99 persen pada tahun 2018. Hal ini dimungkinkan karena terjadinya pergeseran penduduk angkatan kerja menjadi penduduk bukan angkatan kerja, baik yang sekolah, mengurus rumah tangga atau kegiatan yang lainnya. Selain itu, penurunan ini juga bisa disebabkan oleh penimbangnya, yaitu jumlah penduduk yang tumbuh melebihi pertumbuhan angkatan kerja.

Namun secara perlahan tingkat partisipasi angkatan kerja mulai meningkat di tahun 2019, sebelumnya pada tahun 2018 TPAK Kalimantan Timur sebesar 64,99 persen, mengalami peningkatan sebesar 1,45 persen di tahun 2019 menjadi 66,44 persen.

Gambar 2.21
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019



Gambar 2.22
Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Pekerjaan Utama Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 (%)



Pada tahun 2019, penduduk bekerja di Kalimantan Timur memiliki pekerjaan yang terbagi dalam 14 (empat belas) sektor lapangan usaha seperti yang terlihat pada di atas. Sebagian besar penduduk Provinsi Kalimantan Timur bekerja pada sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor mencapai 20,53 persen, diikuti oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mencapai 18,76 persen dan yang paling sedikit bekerja di sektor pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang mencapai 1,40 persen.

Gambar 2.23
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2019 (persen)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Penduduk yang tidak bekerja (pengangguran) di Provinsi Kalimantan Timur semakin menurun di setiap tahunnya. Pada tahun 2019, tingkat pengangguran terbuka mencapai 6,09 persen dimana angka ini menurun jika dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mencapai 6,60 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diartikan sebagai persentase dari penduduk yang mencari kerja (menganggur) terhadap jumlah angkatan kerja. Secara umum, kebijakan pemerintah terkait angkatan kerja memberi dampak positif pada penurunan tingkat pengangguran di Provinsi Kalimantan Timur sehingga keberlanjutan program prioritas yang memberdayakan masyarakat harus terus dioptimalkan.

Tabel 2.21
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019 (persen)

No	Kab/Kota	2015	2017	2018	2019
1	Paser	9,06	5,54	5,00	4,55
2	Kutai Barat	11,7	5,87	4,86	5,08
3	Kutai Kartanegara	10,22	5,72	5,96	5,98
4	Kutai Timur	5,14	4,61	5,93	5,53
5	Berau	5,72	6,45	5,62	5,08
6	Penajam Paser Utara	7,28	4,75	4,76	6,26
7	Balikpapan	5,95	10,39	9,52	7,29
8	Samarinda	5,61	6,19	6,16	5,87
9	Bontang	12,07	12,44	9,61	9,19
10	Mahakam Ulu	4,75	9,05	4,17	3,69

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

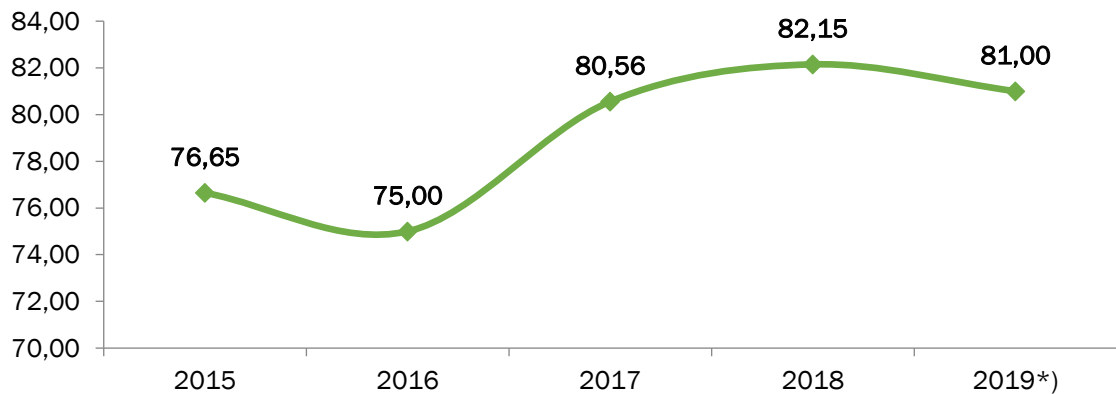
Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2019 terlihat bahwa tingkat pengangguran terbuka pada kabupaten/kota di Kalimantan Timur paling tinggi terdapat di Kota Bontang sebesar 9,19 persen, Kota Balikpapan sebesar 7,29 persen, dan Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 6,26 persen. Sedangkan tingkat pengangguran terendah kembali ditorehkan oleh Kabupaten Mahakam Ulu sebesar 3,69 persen.

D. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

1) Pelayanan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur senantiasa berupaya memberikan pelayanan prima untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan berbagai fasilitas dan pelayanan pada setiap bidang pembangunan. Hasil dari berbagai program dan kegiatan terkait pelayanan masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung, dapat dilihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Gambar 2.24
Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2019



Keterangan : *) Data Sementara
Sumber: SIDATA Kalimantan Timur

Indeks Kepuasan Masyarakat di Kalimantan Timur pada tahun 2019 sementara turun tipis jika dibandingkan tahun sebelumnya menjadi sebesar 81. Sebelumnya Indeks Kepuasan Masyarakat tercatat sebesar 82,15.

2) Pengelolaan Keuangan Daerah dan Integritas Kinerja Daerah

Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2014 dan pada Tahun 2018 Provinsi Kalimantan Timur berhasil mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk keenam kalinya, setelah sebelumnya opini WTP diraih pada tahun 2012, 2014, 2015, 2016 dan 2017. Sempat terjadinya penurunan status opini BPK pada tahun 2013, hal ini menjadi “pekerjaan rumah” bagi pengelolaan keuangan daerah agar meningkatkan pengawasan dan monitoring terhadap setiap penggunaan keuangan daerah. Dalam hal integritas kinerja, Provinsi Kalimantan Timur memperoleh peringkat keempat dari lima provinsi yang memiliki Skor Integritas Tertinggi secara nasional.

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

A. Pertanian

1) Pertanian Tanaman Pangan

Swasembada beras merupakan status yang diupayakan terwujud di Provinsi Kalimantan Timur sejak lama, tetapi belum dapat dicapai hingga saat ini. Produksi padi di Provinsi Kalimantan Timur dilakukan pada lahan kering (ladang) dan lahan basah (sawah). Berdasarkan dukungan teknologi, agro-ekosistem sawah hingga saat ini mendapat dukungan teknologi lebih maju dibandingkan dengan ladang sehingga produksi padi sawah lebih banyak berperan dalam memenuhi kebutuhan pangan, meskipun produksi padi masih belum mencapai swasembada untuk tingkat Provinsi dan masih di bawah target produksi yang ditetapkan.

Secara umum Produksi dan Produktivitas Padi Tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2018. Namun disisi lain terjadi penurunan Luas Panen pada Tahun 2019 sebesar 869 Ha dari Tahun 2018 yang disebabkan oleh faktor kemarau panjang yang terjadi pada tahun 2019.

Tabel 2.22
Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019

Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
2015	99.209	408.782	4,12
2016	80.343	305.337	3,80
2017	94.394	400.102	4,24
2018	100.383	374.040	3,73
2019	99.514	378.676	3,81

**) Angka Ramalan II, Sumber: Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov Kaltim*

2) Perkebunan

Provinsi Kalimantan Timur memiliki komoditas perkebunan unggulan yang memberikan dampak cukup signifikan dalam pembentukan perekonomian daerah. Komoditas perkebunan yang cukup mendominasi dan menarik banyak investasi luar daerah adalah perkebunan kelapa sawit yang hingga saat ini luas tanamnya mencapai 1,4 juta ha dan memiliki produksi mencapai 14,15 juta ton. Selain itu, komoditas karet juga cukup memberikan sumbangsih dalam perekonomian daerah dengan produksi karet yang cukup tinggi mencapai 59,88 ribu ton pada tahun 2019. Berikut produktivitas komoditas perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2.23
Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Perkebunan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

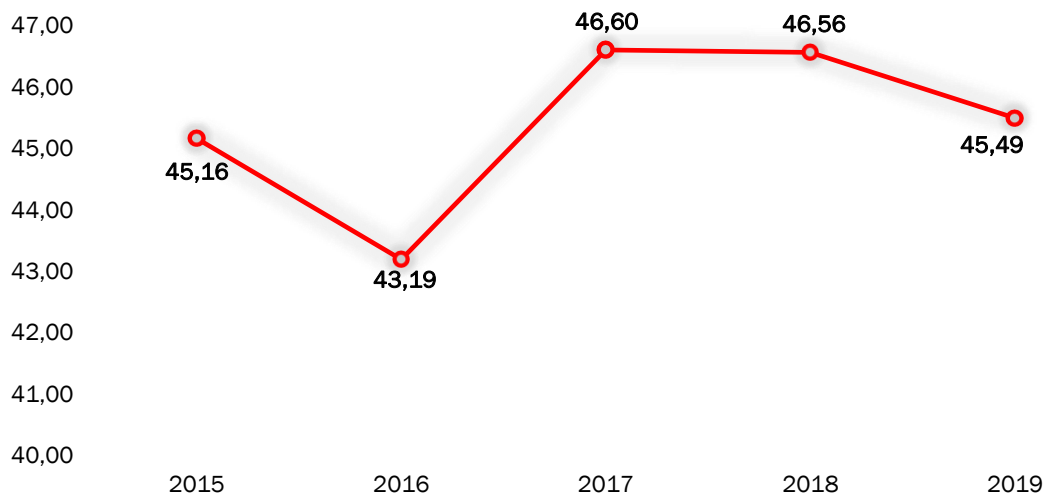
No.	Tahun	Luas Tanam (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
1.	Karet	118.639	59.881	1,22
2.	Kelapa	21.156	10.186	0,62
3.	Kopi	2.528	267	0,22
4.	Lada	8.886	5.797	0,91
5.	Kakao	7.313	2.532	0,56
6.	Kelapa Sawit	1.244.499	14.067.789	16,26

Sumber: Sidata Kaltim; Dinas Perkebunan. Angka Tahun 2019 merupakan angka sangat sementara.

B. Energi Dan Sumber Daya Mineral

Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian pada pembentukan PDRB Provinsi Kalimantan Timur cenderung fluktuatif. Namun pada tahun 2019, kontribusinya turun tipis menjadi sebesar 45,49 persen dari tahun sebelumnya sebesar 46,56 persen. Meski demikian, kontribusi tersebut masih belum bisa disusul oleh lapangan usaha lainnya.

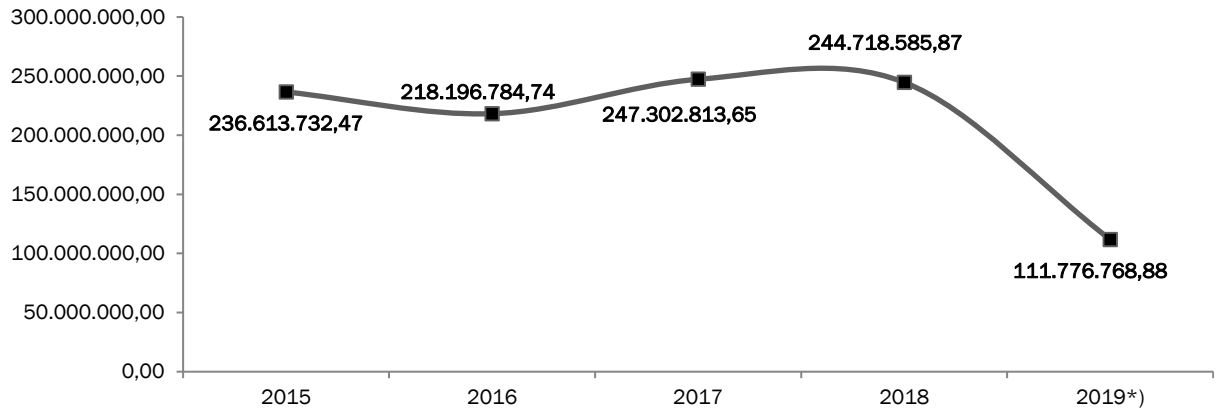
Gambar 2.25
Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019 (persen)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Produksi pertambangan batubara di Kalimantan timur sangat berfluktuatif. Sempat meningkatkan jumlah produksinya di tahun 2017 menjadi sebesar 247,30 juta ton, produksi batubara Kalimantan Timur sedikit turun di tahun 2019 menjadi sebesar 111,78 juta ton.

Gambar 2.26
Produksi Pertambangan Batubara
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019 (Ton)



Keterangan : *) Angka Sementara
Sumber: Sidata Kaltim; Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Jika dilihat produksi pertambangan unggulan lainnya di Kalimantan Timur, terdapat penurunan produksi pada tahun 2019 seperti minyak bumi dan gas bumi.

Tabel 2.24
Produksi Pertambangan Unggulan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019

Tahun	Batubara (Ton)	Minyak Bumi (Ribu Barrel)	Gas Bumi (Ribu MMBTU)
2015	236.613.732,47	36.605,80	609.744,52
2016	218.196.784,74	34.323,80	568.588,80
2017	247.302.813,65	29.754,18	449.579,20
2018	244.718.585,87	23.717,95	296.832,49
2019*)	111.776.768,88	20.829,80	240.828,16

Ket: *) Angka produksi batubara baru tersedia hingga bulan Juli; Sumber : BPS Kaltim; Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur

C. Jumlah Proyek Investasi Dalam Negeri dan Asing (PMDN/PMA)

Kenaikan jumlah proyek investasi merupakan “angin segar” bagi perekonomian Kalimantan Timur karena selain meningkatkan perekonomian secara makro dan mikro, juga meningkatkan faktor produksi penunjang kegiatan perekonomian.

Tabel 2.25
Jumlah Proyek PMDN/PMA
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019

Tahun	PMDN	PMA	Total
2015	143	420	563
2016	243	471	714
2017	357	566	923
2018	520	513	1.033

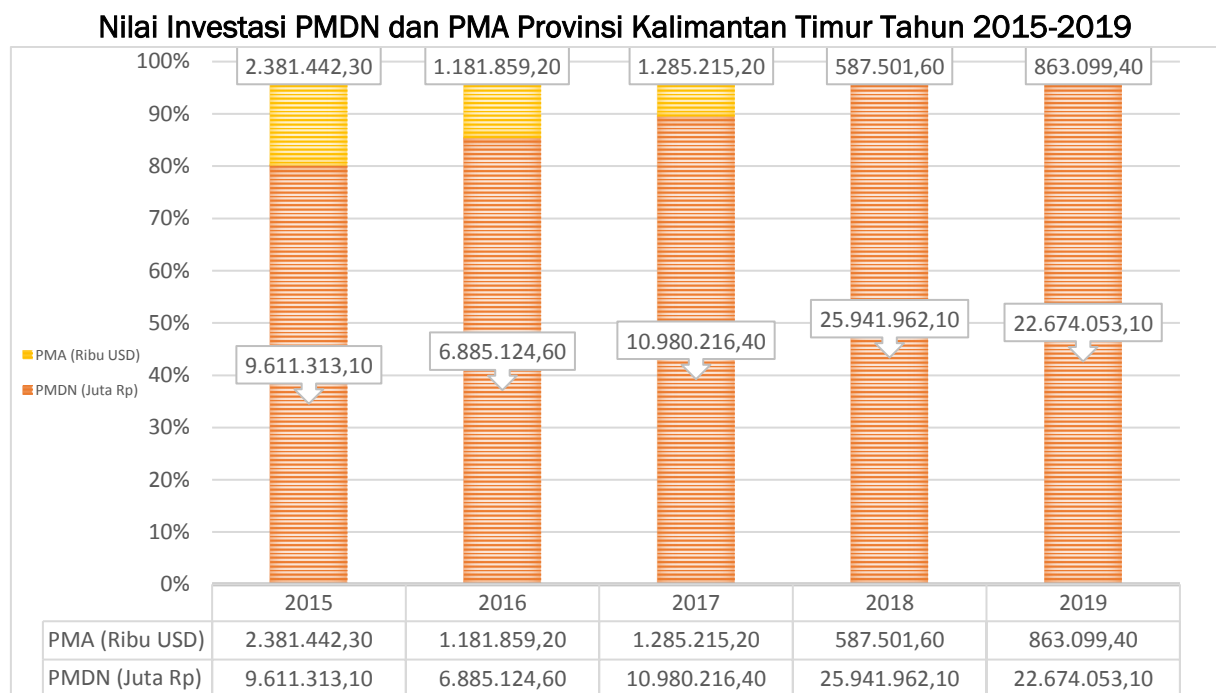
Tahun	PMDN	PMA	Total
2019	2.227	903	3.130

Sumber: DPMPSTSP Kalimantan Timur

Dilihat dari jumlah proyek, secara total terdapat peningkatan. Pada tahun 2019 jumlah proyek di Kalimantan Timur sebanyak 3.130, meningkat hingga tiga kali lipat jika dibandingkan jumlah proyek pada tahun 2018 yang hanya sebanyak 1.033 proyek. Kenaikan jumlah proyek pada investasi Dalam Negeri sebesar 1.707 proyek dan kenaikan proyek pada investasi Asing sebesar 390 proyek.

D. Nilai Investasi (PMDN/PMA)

Nilai realisasi investasi dalam negeri tahun 2019 mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya dari Rp 25,94 triliun menjadi sebesar Rp 22,67 triliun. Sedangkan nilai realisasi investasi asing mengalami peningkatan menjadi 863,09 juta USD. Jika dilihat menurut trennya, nilai investasi Kalimantan Timur sangat berfluktuasi.



Berdasarkan rilis resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur, total investasi di Kalimantan Timur pada tahun 2019 senilai Rp 35,62 triliun. Capaian ini masih berada di bawah target yang ditetapkan untuk tahun 2019 yang seharusnya sebesar Rp 36,35 triliun.

E. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Rasio daya serap memperlihatkan bagaimana investasi yang ditanamkan di Kalimantan Timur mampu menyerap tenaga kerja (penduduk Provinsi Kalimantan Timur maupun migran). Rasio daya serap tenaga kerja dari nilai investasi, baik PMDN maupun PMA, di Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.26
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019

PMDN						
No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja pada perusahaan PMDN	24.825	29.023	9.236	12.935	20.837
2	Jumlah proyek seluruh PMDN	143	243	357	520	2.227
3	Rasio daya serap tenaga kerja	173,60	119,44	25,87	24,88	9,36
PMA						
No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja pada perusahaan PMA	66.230	22.204	15.508	12.500	15.166
2	Jumlah proyek seluruh PMA	420	471	566	513	903
3	Rasio daya serap tenaga kerja	157,69	47,14	27,40	24,37	16,80

Sumber: DPMPSTP Provinsi Kalimantan Timur

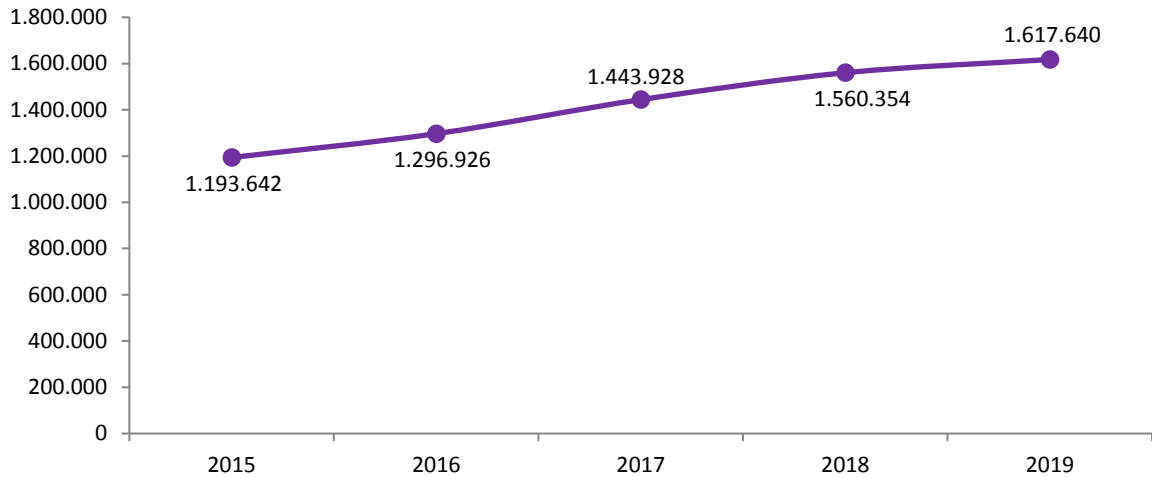
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

A. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Salah satu indikator dalam melihat kemampuan ekonomi suatu daerah adalah dengan menelaah pengeluaran rata-rata per kapita setiap bulannya. Selama kurun waktu beberapa tahun, pengeluaran konsumsi rata-rata per kapita per bulan di Provinsi Kalimantan Timur mengalami kenaikan yang cukup baik dimana pada tahun 2019 mencapai Rp. 1.617.640,- per bulan.

Gambar 2.27
Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019 (Rupiah)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

B. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan (Persentase Konsumsi RT untuk Non Pangan)

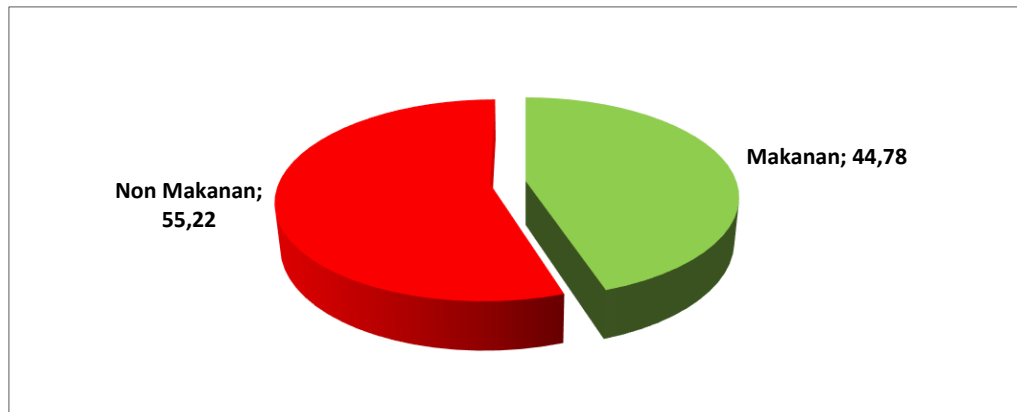
Kenaikan persentase konsumsi rumah tangga non makanan di tiap tahunnya, secara umum menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur. Hal ini dikarenakan konsumsi rumah tangga sudah mulai fokus ke pengeluaran barang sekunder maupun tersier yang merupakan kebutuhan penunjang kehidupan dan tidak hanya memikirkan pemenuhan kebutuhan dasarnya (terutama makanan).

Tabel 2.27
Konsumsi Rumah Tangga non Makanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita/Bulan Non Makanan (Rp)	644.291	709.006	780.443	857.449	893.217
2	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita/Bulan (Rp)	1.193.642	1.296.926	1.443.928	1.560.354	1.617.640
3	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Makanan (%)	53,98	54,67	54,05	54,95	55,22

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 2.28
Persentase Pengeluaran Konsumsi per Kapita sebulan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

C. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator untuk melihat kemampuan/daya beli petani di wilayah pedesaan. Selain itu, NTP juga menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi pertaniannya. Semakin tinggi NTP-nya maka semakin kuat kemampuan/daya beli petani.

Pada periode tahun 2014-2019, NTP Provinsi Kalimantan Timur selalu berada di bawah nilai 100 yang berarti bahwa petani mengalami defisit/penurunan daya beli karena kenaikan penerimaan hasil produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga input biaya produksi dan kebutuhan konsumsi rumahtangganya.

Tabel 2.28
Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019 (2012=100)

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Indeks Yang Diterima Petani (It)	117,00	120,03	121,96	123,16	124,84
2.	Indeks Yang Dibayar Petani (Ib)	118,66	122,30	125,53	130,36	131,92
3.	Nilai Tukar Petani (NTP)	98,61	98,14	97,16	94,48	94,63

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Jika dilihat Nilai Tukar Petani berdasarkan subsektornya maka NTP tertinggi adalah NTP pada subsektor Peternakan yang mencapai 110,95. Sedangkan NTP terendah berada pada subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat yang hanya mencapai 81,38, namun angka ini meningkat dari tahun sebelumnya 80,68.

Tabel 2.29
Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kalimantan Timur
Menurut Subsektor Tahun 2018-2019 (2012=100)

No	Uraian	NTP		% Perubahan
		2018	2019*	
NTP Gabungan		94,48	94,63	0,16
1.	Tanaman Pangan	95,86	94,21	-0,72
2.	Hortikultura	91,08	93,12	2,24
3.	Tanaman Perkebunan Rakyat	80,68	81,38	0,87
4.	Peternakan	112,22	110,95	-1,13
5.	Perikanan	103,11	104,61	1,45

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur. Keterangan : *) Angka Sementara

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

A. Luas Wilayah Produktif

Pengembangan luas wilayah produktif harus terus mendapat kawalan dari instansi terkait mengingat produktifitas pertanian, perkebunan, maupun pemukiman merupakan lahan yang bersentuhan langsung ke masyarakat Kalimantan Timur. Gambaran tentang luas wilayah produktif dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.30
Rasio Luas Wilayah Produktif (Pertanian, Perkebunan, dan Permukiman)
terhadap Luas Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013

No.	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Produktif (Ha)	Luas Wilayah Budidaya Non Kehutanan (Ha)	Rasio (%)
1.	Berau	370.716	536.320	62,12
2.	Kutai Barat + Mahakam Ulu	515.012	862.681	59,70
3.	Kutai Kertanegara	420.324	936.710	44,87
4.	Kutai Timur	472.421	942.679	50,11
5.	Penajam Paser Utara	113.402	145.011	78,20
6.	Paser	301.226	445.964	67,54
7.	Balikpapan	22.538	34.069	66,15
8.	Bontang	5.643	10.002	56,42
9.	Samarinda	13.320	68.888	19,34
Jumlah		2.234.602	3.982.325	56,11

Sumber: BPS Kalimantan Timur Tahun 2013

B. Infrastruktur Pembangunan

Kemajuan pembangunan infrastruktur terkait sarana dan prasarana wilayah diukur dari kemajuan pembangunan yang meliputi: pembangunan jalan, jembatan, transportasi darat dan SDP, transportasi laut, transportasi udara, air baku dan air bersih, jaringan irigasi, serta perumahan dan permukiman.

Gambaran umum penyediaan infrastruktur Kalimantan Timur belum sepenuhnya tercapai secara maksimal. Prasarana Jaringan Jalan provinsi sepanjang 895,09 Km dengan kondisi

mantap sampai tahun 2019 mencapai 61,45 %. Berdasarkan kondisi permukaan jalan yaitu kondisi baik mencapai 93,74 km, kondisi sedang mencapai 456,26 Km, kondisi rusak ringan mencapai 195,12 Km, dan kondisi rusak berat mencapai 149,97 Km. Sedangkan jaringan jalan nasional sepanjang 1.710,90 Km dengan kondisi mantap sampai tahun 2019 mencapai 81,59 %. Berdasarkan kondisi permukaan jalan yaitu kondisi baik mencapai 251,16 Km, kondisi sedang 1.144,83 Km, kondisi rusak ringan mencapai 249,72 Km, dan kondisi rusak berat mencapai 65,19 Km.

Pembangunan infrastruktur dihadapkan pada salah satu permasalahan yaitu rasio panjang jalan terhadap luas wilayah mencapai 149,19 km per 1.000 km² (terdapat jalan sepanjang 149,19 km di dalam wilayah seluas 1000 km²) masih di bawah rasio nasional, yaitu 265,47 km/1.000 km². Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

- 1) Penyebaran penduduk yang tidak merata masih dalam satuan kecil dan terpencil serta kondisi topografi yang berbukit dan bergunung;
- 2) Permasalahan penyediaan lahan pembangunan yang belum sesuai dengan kebutuhan.
- 3) Keterbatasan alokasi pendanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan menyebabkan belum terpenuhinya target jalan mantap, baik nasional maupun provinsi, dan belum tuntasnya pembangunan jalan lintas kalimantan;
- 4) Pembangunan jalan diperbatasan terkendala fungsi pemanfaatan ruang dan status kawasan lindung;
- 5) Dukungan pendanaan melalui swasta belum optimal.
- 6) Pengendalian batas maksimal muatan barang yang sesuai kelas jalan belum optimal;
- 7) Pembangunan jalan belum sesuai dengan spesifikasi teknis sebagai jalan arteri dan kolektor

Tabel 2.31
Panjang Jalan Menurut Status dan Jenis Permukaan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

NO	STATUS	PANJANG (KM)	ASPAL	KERIKIL	TANAH	LAINNYA
1	Nasional	1.490,50	0,00	4,31	216,10	1.490,50
2	Provinsi	895,09	577,57	6,25	124,55	186,73

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Timur

Tabel 2.32
Panjang Jalan Menurut Status dan Kondisi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

NO	STATUS	BAIK	SEDANG	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT
1	Nasional	251,16	1.144,83	249,72	65,19
2	Provinsi	93,74	456,26	195,12	149,97
3	Kabupaten/Kota	6.859,70	2.265,13	2.035,89	2.355,49
TOTAL		7.204,60	3.866,22	2.480,73	2.570,65

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Timur

Terkait penyelenggaraan layanan transportasi dalam konteks pembagian kewenangan pemerintahan sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pemerintah di level provinsi berkaitan dengan urusan perhubungan lebih ditekankan pada pelayanan perhubungan darat, laut, sungai, danau dan angkutan penyeberangan. Di Kalimantan Timur terdapat 6 bandar udara yang terdiri dari 1 bandara yang diusahakan oleh PT. Angkasa Pura I dan 5 bandara dikelola oleh Unit Pengelola Bandar Udara (UPBU) Kementerian Perhubungan RI. Secara khusus perkembangan bandara APT. Pranoto, saat ini telah beroperasi dengan jumlah 7 (tujuh) maskapai dengan rute penerbangan yaitu Surabaya, Jakarta, Yogyakarta, Makassar, Berau, Melak, Tanjung Selor, dan Datarah Dawai.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP 432 Tahun 2017 bahwa pendekatan multi-dimensi dalam perumusan kebijakan pelabuhan nasional sebagaimana amanat undang-undang diharapkan mampu mendukung dan menggerakkan dinamika pembangunan, meningkatkan mobilitas orang, barang dan jasa, membantu menciptakan konektivitas dan pola distribusi nasional yang handal (reliable) dan dinamis serta berkontribusi dan menurunkan biaya logistik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan hirarki pelabuhan, di Kalimantan Timur telah ditetapkan 13 pelabuhan laut yang terdiri 1 (satu) Pelabuhan Utama, 9 (Sembilan) Pelabuhan Pengumpul dan 3 (Tiga) Pelabuhan Regional sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.33
Rencana Induk Pelabuhan Nasional Di Kalimantan Timur
Berdasarkan KP 432 Tahun 2017

No.	PENETAPAN LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN							
	Kabupaten/Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan				Keterangan
				2017	2022	2027	2037	
XXIII. Provinsi Kalimantan Timur								
304	Balikpapan	1	Balikpapan	PU	PU	PU	PU	*
305	Berau	2	Mataritip	PR	PR	PR	PR	
306	Berau	3	Tanjung Redeb	PR	PP	PP	PP	*
307	Bontang	4	Lhok Tuan	PP	PP	PP	PP	*/TK
308	Bontang	5	Tanjung Laut	PP	PP	PP	PP	*/TK
309	Kutai Kertanegara	6	Kuala Samboja / Sebulu	PP	PP	PP	PP	*/TK
310	Kutai Kertanegara	7	Tanjung Santan	PP	PP	PP	PP	*/TK
311	Kutai Timur	8	Maloy	PP	PP	PP	PP	
312	Kutai Timur	9	Sangatta	PP	PP	PP	PP	*/TL/TK
313	Kutai Timur	10	Sangkulirang	PR	PR	PR	PR	*
314	Paser	11	Tana Paser / Pondong	PP	PP	PP	PP	*/TK
315	Penajam Pasir Utara	12	Penajam Paser	PP	PP	PP	PP	
316	Samarinda	13	Samarinda	PP	PP	PP	PP	*

Sumber : Lampiran KP 432 Tahun 2017

*Keterangan : PU (Pelabuhan Utama); PP (Pelabuhan Pengumpul); PR (Pelabuhan Regional)

Untuk pelayanan angkutan penyeberangan telah ditetapkan 7 (tujuh) pelabuhan penyeberangan yang terdapat di Kalimantan Timur yaitu 2 (dua) Pelabuhan Kelas I yang terdiri dari Pelabuhan Kariangau dan Pelabuhan Penajam, 1 (satu) Pelabuhan Kelas II yaitu Pelabuhan Tenggarong, dan 4 (empat) Pelabuhan Kelas IV yang terdiri dari Pelabuhan Desa Sakka, Sungai Meriam, Handil I dan Gunung Tabur.

Sedangkan untuk transportasi darat, di Kalimantan Timur terdapat 2 terminal tipe A yang telah beroperasi untuk melayani rute Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yaitu Terminal Tipe A Batu Ampar di Balikpapan, dan Terminal Tipe A Samarinda di Samarinda Seberang. Namun kondisi kedua terminal tersebut memerlukan peningkatan pelayanan fasilitas.

Kawasan kumuh yang berada di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan SK Bupati/Walikota adalah seluas 1.187,81 ha yang tersebar di 9 kabupaten/kota dimana luasan kawasan kumuh kewenangan provinsi adalah 67,67 ha. Rendahnya akses masyarakat terhadap permukiman layak huni disebabkan oleh kurang optimalnya upaya penataan permukiman. Terdapat 7 (tujuh) aspek dan kriteria dalam penanganan kawasan kumuh berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No.2/PRT/M/2016, meliputi: kualitas bangunan gedung, jalan lingkungan, drainase lingkungan, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, sistem penyediaan air minum dan proteksi kebakaran.

Tabel 2.34
Lokasi Kawasan Kumuh di Provinsi Kalimantan Timur

No.	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)
1	Balikpapan	58,58
2	Samarinda	133,33
3	Kutai Timur	75,93
4	Bontang	73,56
5	Kutai Kartanegara	172,67
6	Berau	184,30
7	Penajam Paser Utara	49,07
8	Paser	10,68
9	Kutai Barat	488,59
TOTAL		1.187,81

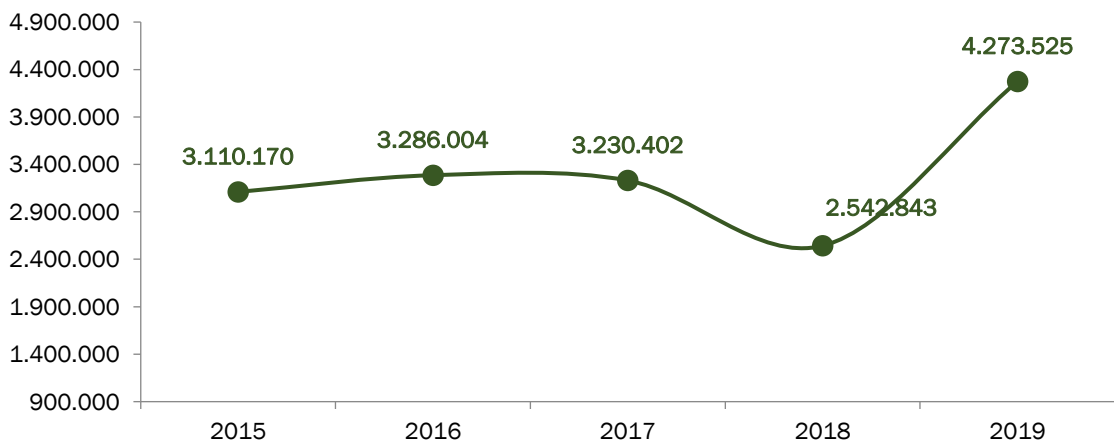
Sumber: SK Kumuh Bupati/Walikota Tahun 2019

Permasalahan lain yang perlu diperhatikan adalah masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni di Provinsi Kalimantan Timur. Rumah tidak layak huni merupakan rumah yang belum memenuhi standar minimal dilihat dari kualitas jenis atap, lantai dan dinding rumah. Hingga tahun 2019 tercatat bahwa rumah tidak layak huni mencapai 62.686 unit (berdasarkan verifikasi

pemda yang dimuat dalam Laporan Akhir Tenaga Ahli Pendataan Perumahan Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Satker SNVT Provinsi Kalimantan Timur). Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang menghuni rumah dalam kondisi tidak layak. Ketidaklayakan rumah tersebut baik dari segi kualitas fisik rumah maupun kualitas fasilitas rumah.

Dari segi kelistrikan, infrastruktur listrik di Provinsi Kalimantan Timur memang perlu pembenahan, utamanya dalam pendistribusian listrik ke seluruh masyarakat. Oleh karena itu, PLN berusaha meningkatkan produksi tenaga listrik mencapai 4.273.525 MWh pada tahun 2019. Jumlah Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 sebanyak 1.038 Desa, sebanyak 1.029 Desa telah memiliki listrik (Desa Berlistrik) yang bersumber dari PLN maupun Non PLN (Genset, PLTS dan lain-lain). Desa berlistrik yang bersumber dari PLN sebanyak 788 Desa dan yang bersumber dari non PLN sebanyak 241 Desa. Sehingga rasio desa berlistrik mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebesar 98,94% menjadi 99,13% di tahun 2019. Sejalan dengan peningkatan rasio desa berlistrik, rasio elektrifikasi Kalimantan Timur juga mengalami peningkatan yakni sebesar 85,75% pada tahun 2018 menjadi 88,93% pada tahun 2019.

Gambar 2.29
Produksi Tenaga Listrik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019 (MWh)



Sumber: PT. PLN Wilayah Kaltimra

Tabel 2.35
Pelanggan Listrik Rumah Tangga Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah pelanggan listrik rumah tangga	727.328	774.995	832.528	1.018.222	1.032.475
2.	Banyaknya tenaga listrik rumah	1.707.503.633	1.801.719.937	1.748.943.749	2.213.445.295	2.213.445.295

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
	tangga yang terjual (MWh)					

Sumber: PT. PLN Wilayah Kaltimra

Kinerja pengelolaan sumber daya air di Provinsi Kalimantan Timur masih perlu mendapat perhatian, terutama masih rendahnya luas lahan pertanian yang beririgasi teknis. Hingga tahun 2018, sawah yang mendapat layanan irigasi diperkirakan baru mencapai 14,8% atau sekitar 13.771 Ha. Lahan tersebut tersebar di 10 Kabupaten/Kota di Kaltim yang mencakup kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Secara khusus pada Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi layanan jaringan irigasi telah mencapai 6.820 Ha.

Tabel 2.36
Luas Lahan Pertanian Yang Beririgasi Teknis di Kalimantan Timur

No	KABUPATEN/KOTA	Sawah Irigasi (Ha)	Sawah Tadah Hujan (Ha)	Sawah Rawa Pasang Surut (Ha)	Sawah Rawa Lebak (Ha)	Total Luas Sawah (Ha)
1	Paser	0	9.850	1.934	918	12.702
2	Kutai Barat	608	4.425	1.742	3.034	9.809
3	Kutai Kartanegara	7.174	26.622	1.177	650	35.623
4	Kutai Timur	1.850	5.415	0	0	7.265
5	Berau	2.939	5.833	2.136	25	10.933
6	Penajam Paser Utara	933	10.578	694	0	12.205
7	Mahakam Ulu	0	480	0	0	480
8	Balikpapan	0	250	0	0	250
9	Samarinda	267	2.810	70	622	3.769
10	Bontang	0	37	0	0	37
TOTAL		13.771 (14,80%)	66.300 (71,23%)	7.753 (8,33%)	5.249 (5,64%)	93.073 (100,00%)

Sumber : Dinas Pangan, Tanaman Pangan, & Holtikultura Kaltim

Bendungan-bendungan yang sudah terbangun belum sepenuhnya terhubung jaringan irigasi ke lahan pertanian, karena jaraknya yang sangat jauh dari lahan pertanian, dan bahkan banyak bendungan yang tidak berfungsi karena adanya alih fungsi lahan pertanian sekitarnya menjadi perkebunan sawit dan pertambangan. Persoalan lain yang menyebabkan belum optimalnya cakupan irigasi adalah rendahnya kualitas air baku untuk irigasi karena tingkat keasaman air yang tinggi dan adanya pencemaran limbah tambang batu bara. Peningkatan jaringan irigasi disertai dengan peningkatan ketersediaan air baku yang berkualitas pada bendungan atau waduk sangat dibutuhkan untuk peningkatan produksi hasil pertanian tanaman

pangan. Selain sebagai sumber air irigasi, bendungan juga dapat dimanfaatkan untuk budidaya perikanan, sumber air minum dan pengendali banjir.

Permasalahan banjir di Kalimantan Timur terjadi secara simultan, karena kondisi geografis DAS yang luas, daerah paparan banjir, pembukaan lahan dan penebangan hutan di daerah hulu sungai, permasalahan drainase kota dan pengaruh pasang surut laut. Hampir semua kota di Kalimantan Timur mengalami permasalahan banjir. Tingginya kejadian banjir mayoritas terjadi pada wilayah perkotaan, yaitu Samarinda, Balikpapan dan Bontang.

Tabel 2.37
Daerah Rawan Banjir Kalimantan Timur

No.	Kabupaten/Kota	DAS	Perkiraan Luas Genangan (Ha)
1	Kota Balikpapan	Sungai Ampal	150
		Klandasan	50
		Sepinggan	50
2	Kota Samarinda	Karangmumus	150
		Karangasam Besar	100
		Karangasam Kecil	30
		Loa Bakung	20
		Loa Lah	15
		Rapak Dalam	30
		Keledang	5
		Sempaja	20
		Bengkuring	15
		Palaran	30
3	Kota Bontang	Bontang	120
		Guntung	35
4	Kabupaten Paser	Longkali/Telakai	1000
		Kandilo	200
5	Kabupaten Berau	Segah	200
		Bayur	5
6	Kabupaten Kutai Karta Negara	Sungai Mahakam	100
		Medeka	200
7	Kabupaten Kutai Timur	Sungai Sanggata	500
		Sungai Bengalon	100
8	Kabupaten Kutai Barat	Sungai Mahakam	500
9	Kabupaten Mahulu	Sungai Mahakam	500
10	Kabupaten Penajam Paser Utara	Sungai Tunan	20
		Sungai Sepaku	20
		Sungai Sesulu	5

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur

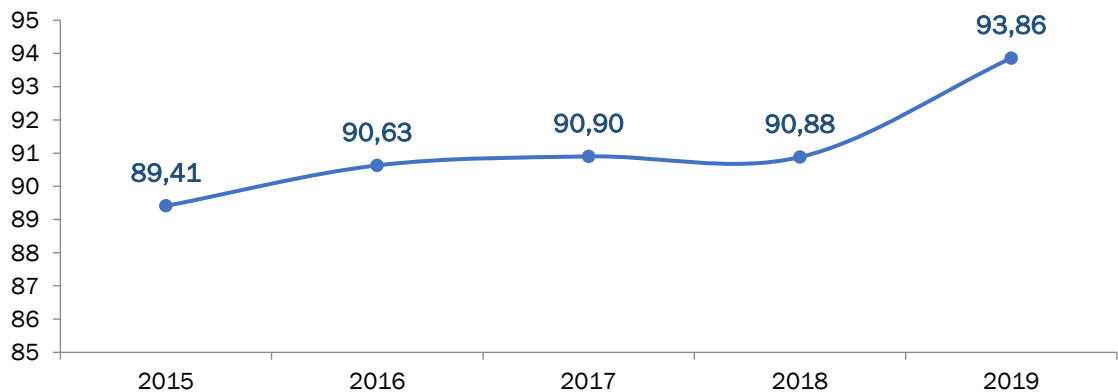
Infrastruktur pengendali banjir yang telah terbangun masih belum mampu mengatasi banjir, dan masih rendahnya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam membantu mengurangi risiko banjir. Berbagai macam persoalan dalam menyediakan infrastruktur pengendali banjir disebabkan oleh rumitnya pembebasan lahan untuk pengembangan sistem

pengendali luapan air sungai. Selain persoalan tersebut, banyaknya sedimentasi dan penyempitan sungai juga menjadi penyebab infrastruktur pengendali banjir belum maksimal.

Terkait dengan rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, salah satu upaya yang terus dilakukan adalah ditingkatkannya pengetahuan masyarakat mengenai hubungan antara upaya menjaga keberlanjutan lingkungan dengan penurunan risiko banjir. Kegiatan ini lebih kepada ditingkatkannya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

Selain irigasi pertanian, permasalahan sumber daya air lainnya di Provinsi Kalimantan Timur adalah belum optimalnya akses air bersih terutama untuk air minum. Hal ini disebabkan oleh kurangnya akses penyediaan layanan air bersih perpipaan yang memadai. Pelayanan air bersih perpipaan belum sepenuhnya menjangkau wilayah Kalimantan Timur khususnya daerah perbatasan seperti di Kabupaten Mahakam Ulu.

Gambar 2.30
Persentase Rumah tangga dengan Sumber Air Minum Bersih
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Perusahaan air minum di Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan segala daya dan upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih. Saat ini, terdapat 9 perusahaan air minum tersebar di 9 kabupaten/kota dengan kapasitas produksi efektif sebesar 6.934 Liter/detik yang telah melayani 93,86% rumah tangga untuk pemenuhan kebutuhan air bersih.

Tabel 2.38
Indikator Perusahaan Air Minum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019

NO.	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Perusahaan Air Minum	9	9	9	9	9
2.	Kapasitas Produksi Potensial	6.985	7.185	7.354	7.583	7.844
3.	Kapasitas Produksi Efektif (ltr/dtk)	6.420	6.445	6.743	6.919	6.934

NO.	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
4.	Efektivitas Produksi (%)	91,91	89,70	91,69	91,24	90,41

Sumber: Dinas PUPR Prov.Kaltim, 2019

Tabel 2.39
Penduduk Terlayani Air Bersih Perpipaan

No	Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Yang Terlayani Air Bersih Perpipaan (%)		
		2017	2018	2019
1	Paser	38,29	51,18	51,20
2	Penajam Paser Utara	15,87	50,14	49,67
3	Samarinda	95,46	91,06	78,29
4	Balikpapan	76,98	77,92	78,40
5	Kutai Kertanegara	63,39	66,10	61,72
6	Kutai Barat	34,35	43,34	43,65
7	Kutai Timur	33,13	68,27	66,17
8	Berau	44,70	49,73	52,38
9	Bontang	87,05	73,98	74,89
10	Mahakam Ulu	-	-	-
Rata-Rata		54,3	70,4	66,6

Sumber: Dinas PUPR Prov.Kaltim

Berdasarkan data di atas, peningkatan cakupan pelayanan air bersih perpipaan mengalami peningkatan dari yang sebelumnya di Tahun 2017 sebesar 54,3 % menjadi 70,4 % di Tahun 2018, hal ini dikarenakan adanya pembangunan beberapa SPAM baru di beberapa lokasi Kabupaten/Kota. Meskipun pada tahun selanjutnya, yakni tahun 2019 terjadi penurunan kembali menjadi 66,6%. Hal ini dikarenakan pertumbuhan penduduk di beberapa lokasi Kabupaten/Kota mengalami peningkatan, sementara tidak didukung dengan peningkatan kapasitas SPAM maupun pembangunan unit baru SPAM, ditambah lagi karena persentase kehilangan air pada SPAM yang juga semakin meningkat, yakni 39,9%. Masih minimnya cakupan layanan air bersih perpipaan disebabkan oleh infrastruktur penyediaan air minum yang kurang memadai dan terbatasnya akses layanan air bersih yang menjangkau beberapa kawasan di Kalimantan Timur. Salah satu cara mengatasi permasalahan ini adalah dengan pembangunan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional. SPAM Regional dibangun untuk meningkatkan penyediaan air bersih pada PDAM lintas batas administrasi kabupaten/kota yang kemudian dikelola dan disalurkan.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 - 2036 pada tanggal 15 Februari 2016. Adapun 8 Kabupaten/Kota yang lebih dulu menetapkan Perda RTRW Kabupaten/Kota-nya sebelum ditetapkannya Perda RTRW Provinsi, yaitu Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kota Samarinda, Kab.

Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Barat, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Paser dan Kab. Kutai Timur. Sementara untuk Kab. Berau menetapkan Perda RTRW-nya pada November 2017 lalu. Sedangkan untuk Kab. Mahakam Ulu saat ini masih dalam proses penyesuaian terhadap pedoman baru, penyusunan KLHS, serta proses persetujuan peta dasar oleh Badan Informasi Geospasial (BIG).

Terhadap perbedaan waktu dalam penetapan Perda RTRW Provinsi dan Perda RTRW Kabupaten/Kota menyebabkan masih adanya perbedaan peruntukan pola ruang. Sehingga, perlu dilakukan kajian Peninjauan Kembali guna mensinkronkan dan menyelaraskan kebijakan nasional, peraturan perundang-undangan baru, serta Perda RTRW Provinsi dan Perda RTRW Kabupaten/Kota yang mengacu pada Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali (PK). Hingga tahun 2019, hanya Kota Bontang yang sudah menetapkan Revisi Perda RTRW Kota melalui Perda Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2019 tentang RTRW Kota Bontang Tahun 2019 – 2039. Berikut disampaikan status Peninjauan Kembali Perda RTRW Kabupaten/Kota :

Tabel 2.40
Status Peninjauan Kembali Perda RTRW Kabupaten/Kota

No.	RTRW Kab/Kota	Tahun PK	Status Pelaksanaan Perda RTRW Kabupaten/Kota											Keterangan
			Persiapan	SK Penetapan PK	SK Tim PK	PK	Rekom PK	Revisi	Rekom Gubernur	Persub ATR/BPN	DPRD	Evaluasi Provinsi	PERDA	
1	Balikpapan	2016	2016	√	√	2016	Revisi	2017	-	-	-	-	-	Dalam proses permohonan rekomendasi BIG untuk peta dasar (terutama tata guna lahan) karena diminta memperbaiki peta dasar skala 1:25.000
2	Kutai Kartanegara	2017	2017	√	√	2018	Revisi	2018	-	-	-	-	-	Sudah dilakukan revisi, konsultasi publik, membuat BA Kesepakatan dengan Kab/Kota yang berbatasan, dan membuat KLHS Revisi, namun masih perlu dilakukan penyesuaian kembali dengan peraturan/NSPK terbaru serta sedang dalam proses konsultasi peta dasar dengan BIG
3	Kutai Barat	2017	2018	√	√	2018	Revisi	2019	-	-	-	-	-	Dalam proses persetujuan peta dasar ke BIG
4	Samarinda	2018	2018	√	√	2018	Revisi	2019	-	-	-	-	-	Dalam proses persetujuan peta dasar ke BIG dengan target rekomgub dan persub ATR tahun 2020
5	Penajam Paser Utara	2018	2019	proses	proses	2019	Revisi	2020	-	-	-	-	-	Proses penyusunan SK Penetapan dan SK Tim Pelaksana PK
6	Paser	2019	2019	√	√	2019	Revisi	2020	-	-	-	-	-	Dalam Proses Revisi RTRW
7	Kutai Timur	2020	2020	proses	proses	2020	-	2021	-	-	-	-	-	Proses penyusunan SK Penetapan dan SK Tim Pelaksana PK
8	Berau	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Bontang	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Revisi Perda RTRW Kota Bontang telah ditetapkan melalui Perda Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2019 tentang RTRW Kota Bontang Tahun 2019 - 2039 pada tanggal 6 Desember 2019

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Keadaan suatu wilayah sangat berpengaruh terhadap daya tarik investor dalam menanamkan modal usahanya di wilayah tersebut. Iklim investasi yang positif dibangun dari kondusifnya wilayah, baik itu segi keamanan, demokrasi, politik, hingga unsur sosial budaya. Hal ini dikarenakan adanya jaminan keamanan berinvestasi akan menentukan keberlangsungan dan konsistensi gerak perekonomian suatu wilayah sehingga para investor berani menanamkan modal dan pada akhirnya dapat mengembangkan perekonomian wilayah. Salah satu analisis kinerja yang mempengaruhi iklim berinvestasi dapat dilihat pada indikator angka kriminalitas yang menunjukkan kondisi keamanan dan jumlah demonstrasi yang menunjukkan situasi demokrasi suatu wilayah.

A. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas menunjukkan bagaimana situasi keamanan di suatu wilayah sehingga aktivitas masyarakat bisa dilakukan dengan nyaman tanpa rasa takut. Selama tiga tahun terakhir terjadi penurunan angka kriminalitas per 10.000 penduduk dimana pada tahun 2019 terjadi 7 kasus kriminalitas diantara 10.000 penduduk. Menurun jika dibandingkan tahun 2018, terjadi 15-16 kasus kriminalitas diantara 10.000 penduduk.

Tabel 2.41
Angka Kriminalitas Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019

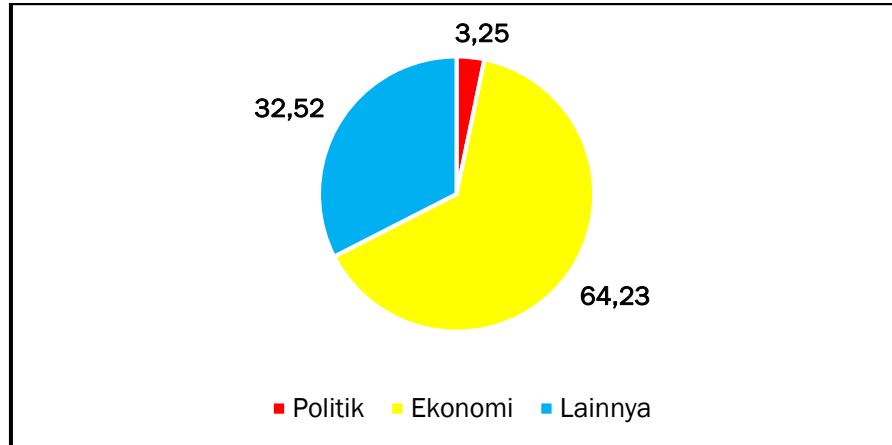
Tahun	Dilaporkan	Tertunggak	Diselesaikan	% Tindak Kejahatan Diselesaikan	Angka Kriminalitas Per 10.000 Penduduk
2015	12.632	4.447	8.186	64,80	24,11
2016	12.620	3.482	9.138	72,41	26,55
2017	11.705	1.591	8.622	73,66	24,60
2018	6.715	1.228	5.487	81,71	15,45
2019	3.194	596	2.599	81,37	7,16

Sumber: Polda Kaltim

B. Demonstrasi

Demonstrasi menunjukkan kebebasan aspirasi masyarakat dalam berpendapat jika dilakukan dengan damai dan tujuan yang jelas. Namun jika demonstrasi dilakukan dengan diiringi kekerasan maka sudah menyalahi konsep dasar sebuah demokrasi. Jumlah demonstrasi meningkat pada beberapa tahun ini mengindikasikan tingginya animo masyarakat dalam menyampaikan aspirasi pendapatnya. Pada tahun 2019, jumlah demonstrasi secara keseluruhan berjumlah 123 demonstrasi dimana sebanyak 64,23 persen (79 demonstrasi) merupakan demonstrasi terkait ekonomi; 32,52 persen (40 demonstrasi) terkait hal lainnya, dan 3,25 persen (4 demonstrasi) terkait politik.

Gambar 2.31
Persentase Demonstrasi Menurut Jenisnya
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 (%)



Sumber: Polda Provinsi Kaltim

Tabel 2.42
Jumlah Demonstrasi Menurut Jenisnya
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019

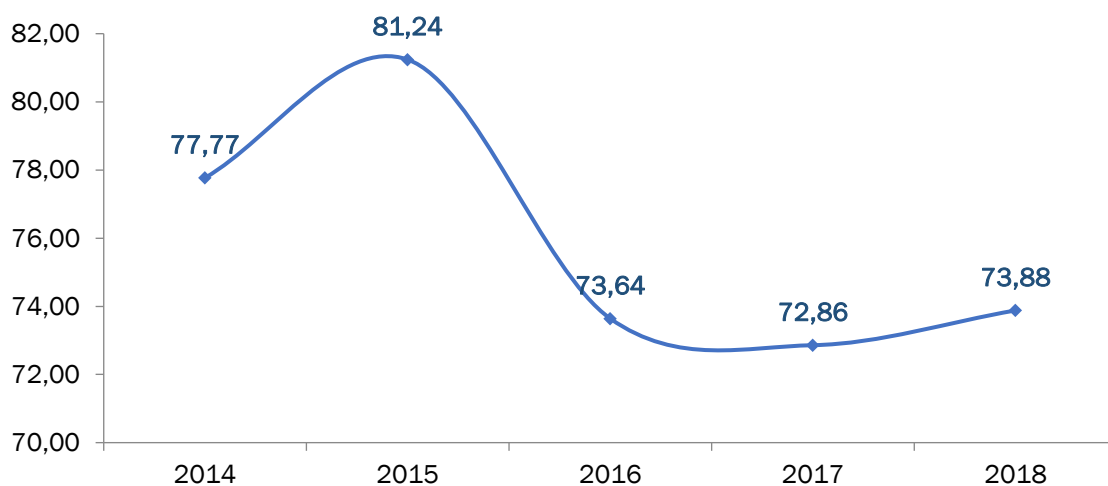
Tahun	Jenis Demo			Jumlah
	Politik	Ekonomi	Lainnya	
2015	14	141	95	352
2016	9	109	130	755
2017	0	132	283	415
2018	0	179	80	259
2019	4	79	40	123

Sumber: Polda Kaltim

C. Demokrasi

Provinsi Kalimantan Timur, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib untuk menjalankan sistem demokrasi yang berkeadilan. Jika dilihat dari perhitungan Indeks Demokrasi Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur memiliki kehidupan berdemokrasi yang baik dengan indeksinya mencapai 73,88 pada tahun 2018. Meskipun begitu, angka indeks ini masih cukup fluktuatif di setiap tahunnya sehingga pemerintah daerah harus mempertahankan prestasi demokrasi seperti masa sekarang ini.

Gambar 2.32
Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

D. Iklim Investasi Daerah

Pada tahun 2019, terdapat 2.227 proyek investasi dari PMDN sebesar Rp 22,67 triliun dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 20.837 orang. Sedangkan pada penanaman modal asing terdapat 903 proyek sebesar 863,09 juta USD dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 15.166 orang.

Lebih dari 50 persen investasi di Kalimantan Timur diciptakan oleh sektor primer. Dimana sektor pertambangan masih menjadi daya tarik investasi terbesar di Kalimantan Timur baik dari dalam negeri maupun asing. Sektor usaha lainnya yang memiliki daya tarik besar adalah sektor tanaman pangan dan perkebunan serta sektor usaha listrik, gas, dan air.

Tabel 2.43
Investasi Berdasarkan Sektor Usaha Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

No	Sektor Usaha	Nilai PMDN (juta Rp)	Proyek	Tenaga Kerja Indonesia	Nilai PMA (Ribu USD)	Proyek	Tenaga Kerja Indonesia
Sektor Primer		13.274.031,00	604,00	13.296,00	495.005,80	368,00	14.037,00
1	Tanaman Pangan & Perkebunan	4.278.114,90	269	7.621	185.796,30	183	5.637
2	Peternakan	33,40	3	-	-	3	-
3	Kehutanan	283.625,00	38	650	2.751,70	24	2.438
4	Perikanan	-	5	-	-	-	-
5	Pertambangan	8.712.257,70	289	5.025	306.457,80	158	5.962



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

No	Sektor Usaha	Nilai PMDN (juta Rp)	Proyek	Tenaga Kerja Indonesia	Nilai PMA (Ribu USD)	Proyek	Tenaga Kerja Indonesia
Sektor Sekunder							
1	Industri Makanan	569.890,60	129	1.288	14.264,60	140	251
2	Industri Tekstil	-	2	-	-	-	-
3	Industri Barang dari Kulit & Alas Kaki	-	-	-	-	-	-
4	Industri Kayu	350.224,00	35	26	33,30	8	53
5	Industri Kertas, Barang Kertas dan Percetakan	-	2	4	-	-	-
6	Industri Kimia Dasar, Barang Kimia, dan Farmasi	444.145,60	48	15	60,00	29	94
7	Industri Karet, Barang dari Karet & Plastik	9.000,00	6	10	561,10	13	156
8	Industri Mineral Non Logam	292.133,100	20	-	15.809,60	7	20
9	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin & Elektronik	-	3	-	1.879,40	10	16
10	Industri instrumen kedokteran, presisi, optik, dan jam	-	5	30	1.533,40	4	-
11	Industri Alat Angkutan & Transportasi Lainnya	151.706,50	26	98	43,80	10	68
12	Industri Lainnya	509,50	18	2	134,60	5	4
Sektor Tersier							
1	Listrik, Gas, dan Air	2.021.363,600	57	1.366	280.607,90	33	62
2	Konstruksi	1.223.384,700	180	1.153	-	13	-
3	Perdagangan & Reparasi	341.327,600	511	549	4.258,10	109	75
4	Hotel & Restoran	1.086.261,80	62	882	1.297,00	32	63
5	Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi	940.606,300	163	1.121	14.847,70	35	185
6	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	345.944,10	45	107	146,90	14	-
7	Jasa Lainnya	1.623.524,70	311	890	32.616,20	73	82
TOTAL		22.674.053,10	2.227	20.837	863.099,40	903	15.166

Sumber : DPMPSTSP Kalimantan Timur

Adapun sektor usaha yang dapat menyerap banyak tenaga kerja adalah sektor kehutanan dengan total penyerapan tenaga kerja 49-50 orang per proyek. Disusul sektor Tanaman Pangan dan Perkebunan dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 29 orang per proyek, sektor pertambangan sebesar 24-25 orang per proyek.

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Manusia sebagai subjek sekaligus objek pembangunan merupakan pondasi awal dan sebagai tujuan akhir dari pembangunan daerah. Namun untuk mencapai pembangunan yang diinginkan, tidak hanya kuantitas penduduk saja yang dibutuhkan, melainkan sumber daya manusia berkualitaslah yang menjadi harapan utama penyokong pembangunan suatu daerah.

Indikator paling mudah dalam melihat kualitas sumber daya manusia adalah pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh masyarakat. Selain itu, kelompok umur produktif dan non produktif juga dapat dijadikan acuan dalam menunjang analisis beban kualitas sumber daya manusia. Analisis kinerja atas sumber daya manusia dapat dilakukan terhadap indikator pendidikan penduduk yang telah ditamatkan sehingga akan terlihat kualitas sumber daya manusia serta rasio ketergantungan yang menggambarkan ketergantungan penduduk usia non produktif terhadap penduduk produktif.

A. Rasio Lulusan S1/S2/S3

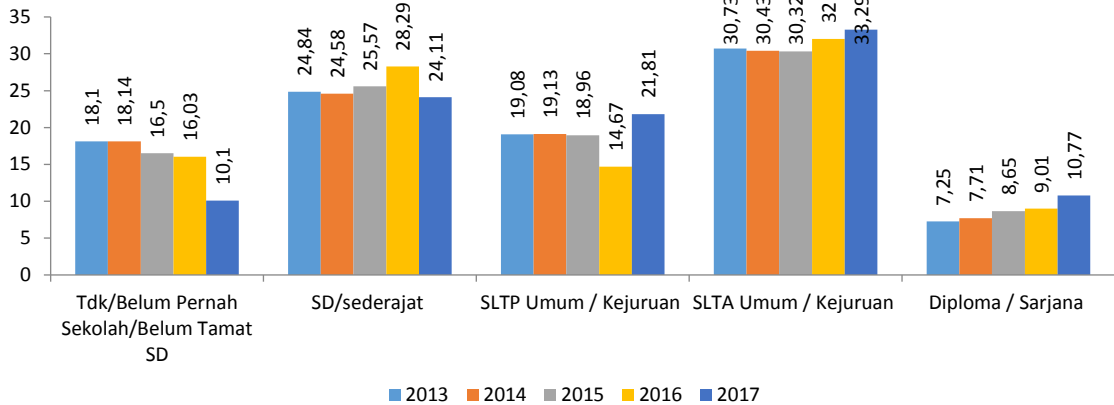
Semakin tinggi penduduk mengenyam pendidikan maka semakin berkualitas sumber daya manusia yang ada di suatu daerah. Oleh karena itu, perlu adanya analisis terkait pendidikan penduduk sebagai subyek pembangunan untuk mengetahui seberapa tinggi kualitas potensi sumber daya manusia di suatu wilayah.

Terlihat bahwasanya penduduk yang telah mengenyam pendidikan hingga bangku diploma/sarjana pada tahun 2019 hanya sebesar 13,81 persen, sementara yang lain hanya mengenyam pendidikan hingga jenjang SMA/MA/SMK (41,30 persen), SLTP/MTs (21,03 persen) dan SD/MI (16,05 persen). Diluar hal tersebut yang penting untuk ditekankan adalah masih cukup tingginya masyarakat yang tidak/belum sekolah/belum tamat SD yang mencapai 7,81 persen, walaupun persentase ini menurun dibandingkan presentase pada tahun-tahun sebelumnya, namun hal ini mengindikasikan masih belum optimalnya perhatian pemerintah dalam menggalakkan peningkatan sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Timur.

Efek dari rendahnya tingkat pendidikan ini akan mempengaruhi minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan keahlian sebagai modal daya saing tenaga kerja. Hal tersebut perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah maupun *stakeholder* terkait untuk mengoptimalkan kembali program dan kegiatan dalam meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Timur.

Gambar 2.33
Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan

Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019

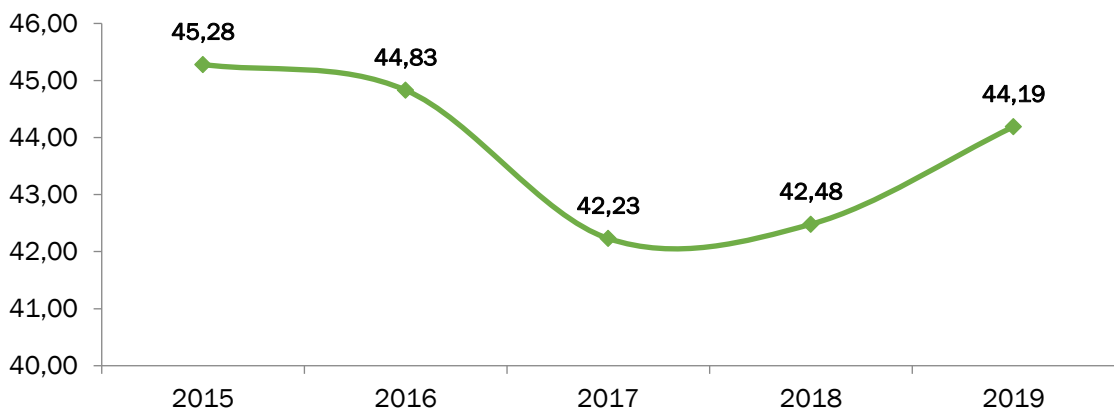


Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2018

B. Rasio Ketergantungan

Produktivitas penduduk, selain dari kualitas pendidikan juga ditentukan oleh kelompok umur dimana terdapat kelompok usia non produktif (<15 tahun dan >64 tahun) dan usia produktif (15-64 tahun). Asumsi umum yang berlaku adalah penduduk usia non produktif akan menjadi beban tanggungan oleh penduduk usia produktif, baik dalam hal pendidikan, kesehatan, maupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Di Provinsi Kalimantan Timur, rasio ketergantungan penduduk non produktif pada tahun 2019 sedikit mengalami peningkatan menjadi sebesar 44,19, artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 44 orang penduduk usia non produktif.

Gambar 2.34
Rasio Ketergantungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Perumusan berbagai dokumen perencanaan tidak akan terlepas dari analisis dan evaluasi kinerja pembangunan pada periode sebelumnya sebagai bagian penting untuk memulai tahapan lanjutan pembangunan daerah. Oleh karena itu, evaluasi kinerja pembangunan periode sebelumnya harus memiliki validitas dan akurasi serta ketepatan waktu sehingga setiap data dan informasi yang dikembangkan sebagai analisis dan evaluasi pembangunan menjadi relevan. Salah satu tahapan penting dalam pembangunan daerah adalah evaluasi terhadap program-program dan kegiatan yang telah dilaksanakan apakah sesuai dengan perencanaan dan mencapai target yang diinginkan. Dengan adanya evaluasi, ketidakcocokan atau kesalahan perumusan program kegiatan pembangunan untuk mencapai target dapat segera diantisipasi dengan berbagai perubahan sehingga arah pembangunan daerah dapat kembali ke koridor sesuai visi dan misi kepala daerah.

Evaluasi pembangunan daerah pada periode sebelumnya yang menjadi dasar perumusan perencanaan pembangunan tahunan adalah evaluasi terhadap prioritas dan sasaran pembangunan melalui indikator kinerjanya (outcome). Indikator kinerja yang dimaksud adalah variabel untuk mengukur keberhasilan suatu program dan kegiatan pembangunan yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Selanjutnya, indikator kinerja inilah yang menjadi ujung tombak dalam evaluasi pembangunan daerah sekaligus penentu apakah pencapaian tujuan pembangunan daerah berhasil atau tidak.

Pada penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2021 ini, evaluasi pembangunan masih menggunakan evaluasi RPJMD tahun pertama yaitu tahun 2019. Secara umum, hasil evaluasi pada setiap misi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur hingga tahun 2019 menunjukkan kecenderungan positif sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Meskipun begitu, masih terdapat beberapa hal yang harus dibenahi terutama dalam kaitannya dengan pemerataan hasil pembangunan dan perekonomian makro pembangunan daerah.

Evaluasi tersebut akan memberi masukan dalam perencanaan ke depannya apakah akan terus dilanjutkan, disempurnakan, atau akan diganti sepenuhnya dengan kebijakan serta program kegiatan yang baru untuk memberikan optimalisasi pencapaian tujuan pembangunan seutuhnya. Berikut hasil evaluasi setiap misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023:

Misi 1 : Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas

Kalimantan Timur memiliki kekayaan alam yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam, namun dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan kuantitas yang memadai. Tidak meratanya distribusi jumlah dan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Timur menjadi tantangan yang perlu dikedepankan, agar semakin meningkatkan daya saing provinsi, baik secara regional, nasional dan internasional.

Arah kebijakan untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi melalui pengembangan pendidikan secara merata di Provinsi Kalimantan Timur baik pendidikan formal di sekolah, pendidikan vokasi, maupun pendidikan informal di luar sekolah. Peran serta perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas semakin ditingkatkan, untuk memberikan keadilan bagi seluruh warga Kalimantan Timur. Sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing tinggi saja tidak cukup akan tetapi diperlukan juga sumber daya manusia yang berakhlak mulia untuk membentuk identitas dan karakter manusia yang berkualitas. Pendidikan agama dan integrasi budaya lokal penting untuk dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan pembangunan daerah.

Berdasarkan analisis capaian program kegiatan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada tahun 2019, dari 23 Program Prioritas dengan 23 indikator capaian kinerja, maka 56,52 % telah *on-track*, 8,70 % *on-going*, 13,04% masih *off-track* dan sisanya sebesar 21,74 % tidak dilaksanakan ditahun 2019 (baru akan dilaksanakan ditahun 2020). Atau dengan kata lain bahwa 13 program prioritas telah mencapai sasaran, 2 program priortas akan mencapai sasaran, 3 program prioritas belum mencapai sasaran dan 5 program prioritas tidak dilaksanakan ditahun 2019.

Faktor penghambat capaian kinerja pembangunan misi 1, antara lain :

1. Pelaksanaan program sebatas pada pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM);
2. Keterbatasan anggaran APBN dan APBD;
3. Karakteristik wilayah (geografis) yang sulit dan infrastruktur yang terbatas serta belum terkoneksi di beberapa wilayah di Kalimantan Timur kurang mendukung percepatan layanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perpustakaan;
4. Ketersedian tenaga pendidik dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah yang terbatas;
5. Rendahnya kualitas tenaga kerja akibat masih minimnya sarana dan prasarana pelatihan seperti BLK;

6. Belum dilakukan program pendidikan politik yang secara spesifik bertujuan menyoasar kelompok pemilih pemula;
7. Konteks budaya lokal masih belum ditentukan secara spesifik;
8. Pendekatan pendidikan vokasional belum menjadi prioritas program untuk meningkatkan kompetensi SDM yang akan memasuki pasar tenaga kerja;
9. Belum adanya base data masyarakat yang tergolong dalam kemiskinan;
10. Proses penetapan standarisasi infrastruktur olahraga belum selesai.

Rekomendasi terhadap pelaksanaan RPJMD 2019-2023 tahun pertama pada misi 1, antara lain :

1. Melakukan pemetaan menyeluruh untuk mendapatkan gambaran aktual dinamika permintaan – penawaran tenaga kerja;
2. Menyusun peta jalan akselerasi kualitas layanan pendidikan umum dan vokasi yang berorientasi pada prinsip *link and match* antara kurikulum pendidikan dan kebutuhan kompetensi tenaga kerja pada dunia industri/dunia usaha;
3. Perluasan dan peningkatan layanan pelatihan vokasi yang berorientasi permintaan pasar tenaga kerja;
4. Program pemagangan pada perusahaan/lembaga mitra dan perluasan serta peningkatan layanan sertifikasi kompetensi tenaga kerja di Kalimantan Timur.

Misi 2 : Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan

Hal yang ingin dicapai dalam konteks ekonomi yang berkerakyatan dalam misi kedua adalah terciptanya sistem ekonomi partisipatif yang meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat serta memberikan akses sebesar-besarnya secara adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat baik dalam proses produksi, distribusi, maupun konsumsi. Upaya bantuan modal usaha, pendampingan teknis dan manajerial, serta bantuan pemasaran pada usaha kecil dan menengah akan semakin ditingkatkan. Ekonomi kerakyatan dikembangkan sebagai upaya dan strategi untuk lebih mengedepankan masyarakat dalam membangun kesejahteraan, serta memperkuat BUMDES sebagai penggerak perekonomian pedesaan. Pembangunan dan pengembangan ekonomi harus berakar pada ekonomi kerakyatan namun tetap mengacu pada pertumbuhan, pemerataan, stabilitas, dan peningkatan sumber daya manusia dengan cara mempercepat proses perubahan dari masyarakat yang masih berfikir dan berperilaku tradisional ke masyarakat modern; dari sistem ekonomi subsistem ke ekonomi pasar; dan dari masyarakat yang tergantung ke masyarakat yang mandiri. Penyelesaian konflik antara masyarakat dan perusahaan dilakukan melalui berbagai skema yang dimungkinkan di dalam peraturan

perundang-undangan, termasuk dalam menguatkan kemitraan antara perusahaan dengan kelompok ekonomi masyarakat.

Peningkatan kesejahteraan rakyat tak lagi bertumpu pada dominasi pemerintah pusat, modal asing, dan perusahaan konglomerasi, melainkan pada kekuatan pemerintah daerah, persaingan yang berkeadilan, kepastian berusaha, dukungan permodalan dan teknologi, usaha pertanian rakyat, serta peran BUMDES dan koperasi sejati yang diharapkan mampu berperan sebagai fondasi penguatan ekonomi rakyat. Strategi pembangunan yang memberdayakan ekonomi rakyat merupakan strategi dalam melaksanakan demokrasi ekonomi yaitu produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, dan dibawah kepemimpinan dan kepemilikan anggota masyarakat.

Berdasarkan analisis capaian program kegiatan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada tahun 2019, dari 26 Program Prioritas dengan 26 indikator capaian kinerja, maka 53,85 % telah *on-track*, 30,77% masih *off-track* dan sisanya sebesar 15,38 % tidak dilaksanakan ditahun 2019 (baru akan dilaksanakan ditahun 2020). Atau dengan kata lain bahwa 14 program prioritas telah mencapai sasaran, 8 program prioritas belum mencapai sasaran dan 4 program prioritas tidak dilaksanakan ditahun 2019.

Faktor penghambat capaian kinerja pembangunan misi 2, antara lain :

1. Minimnya sarana dan prasarana sistem informasi sebagai pendukung lembaga ekonomi pedesaan;
2. Program pembangunan wilayah dan kawasan masih terhambat terhadap aksesibilitas;
3. Geografi pedesaan dan kawasan di Kalimantan Timur yang masih sangat luas;
4. Belum ada mapping dan data base produksi bahan baku yang bisa menjadi suplai bagi industri;
5. Belum adanya regulasi pengawasan dan pengendalian tata niaga produksi dan pemasaran di Kalimantan Timur;
6. Belum semua perencanaan perangkat daerah berbasis pengembangan wilayah (geospasial);
7. Ketersediaan infrastruktur sarana dan prasarana produksi yang belum terintegrasi dan terkoneksi di seluruh kawasan produksi;
8. Disharmoni kebijakan dan regulasi antar Pemerintah Pusat dan daerah serta antar perangkat daerah yang mengatur pengelolaan aktivitas produksi di Kawasan;
9. Belum ada mapping kesesuaian lahan oleh perangkat daerah yang terdapat di RTRWP Kaltim;

10. Program kegiatan yang direncanakan hanya bersifat rutinitas sehingga inovasi untuk menemukan sumber pendapatan baru masih belum maksimal;
11. Aksesibilitas kawasan produksi yang belum terkoneksi secara merata dengan kawasan industri di Kaltim.

Rekomendasi terhadap pelaksanaan RPJMD 2019-2023 tahun pertama pada misi 1, antara lain :

1. Perlunya regulasi di daerah untuk melakukan “audit produksi kawasan sumberdaya alam”, pengawasan dan pengendalian produksi dan produktifitas hasil-hasil sumberdaya alam;
2. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dengan kebijakan di daerah;
3. Peningkatan kinerja perangkat daerah pada sektor-sektor strategis untuk meningkatkan produktifitas kawasan dan penerimaan daerah;
4. Penguatan pemahaman aparaturnya perangkat daerah dalam penyusunan perencanaan program berbasis kemampuan wilayah seperti geospasial, geoekonomi, geososiokultur dan geostrategi terutama kesesuaian dalam pencapaian program prioritas RPJMD;
5. Review terhadap Penataan Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten untuk melakukan verifikasi dan sinkronisasi;
6. Membangun sistem koordinasi yang intensif antara perangkat daerah pengendali produksi bahan baku industri;
7. Menegaskan pembagian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dipungut oleh pemerintah terhadap Pemerintah daerah;
8. Membentuk titik kendali dan kontrol dalam bidang pengawasan dan pengendalian aktivitas tata niaga hasil produksi kawasan di daerah;
9. Perlunya dibuat produk hukum daerah dan kebijakan tentang Pengelolaan sumberdaya kawasan mulai tahapan perencanaan, pengawasan dan pengendalian produksi dan pemasaran produk kawasan.

Misi 3 : Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan

Misi ini diarahkan untuk pemenuhan infrastruktur dasar yang berkualitas guna mendukung pertumbuhan dan kelancaran perekonomian masyarakat secara merata dengan tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, sertaantisipasi bencana yang mengancam keberadaan sumber daya potensial dan strategis. Hal ini diwujudkan melalui penyediaan jalan dengan kapasitas di atas 10 Ton pada jalan provinsi dan jalan produksi lainnya dalam rangka menghubungkan sentra-sentra produksi dan kawasan pertumbuhan ekonomi menuju pusat pemasaran outlet. Penyediaan transportasi

udara dan laut yang handal serta representatif untuk meningkatkan arus barang dan jasa dari dan ke Provinsi Kalimantan Timur, sebagai upaya pembukaan keterisolasian wilayah dengan dikembangkannya sarana dan prasarana transportasi melalui pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan dermaga, pembangunan bandar udara serta penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi. Disamping itu pemenuhan kecukupan layanan air minum, air baku untuk jaringan irigasi dan kawasan industri serta infrastruktur pertanian melalui peningkatan kualitas dan kapasitas pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan, penyediaan perumahan sederhana, layak huni dan sehat diarahkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam konteks energi terbarukan, misi ini tidak terlepas dari konsep pembangunan ekonomi hijau. Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan strategi besar mewujudkan ketahanan energy melalui pengembangan sumber energi baru terbarukan (EBT).

Berdasarkan analisis capaian program kegiatan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada tahun 2019, dari 8 Program Prioritas dengan 8 indikator capaian kinerja 100 % telah *on-track*. Atau dengan kata lain bahwa seluruh program prioritas pada misi 3 ini telah mencapai sasaran.

Faktor penghambat capaian kinerja pembangunan misi 3, antara lain :

1. Keterbatasan anggaran dalam upaya penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat;
2. Masih rendahnya pola kesesuaian ruang antara kawasan produksi dengan kawasan lain di dalam RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga aksesibilitas kawasan masih sulit;
3. Variasi dan kompleksitas kondisi geografis di Kalimantan Timur
4. Disharmoni kebijakan antar perangkat daerah dalam upaya mengkonektivitaskan kawasan dalam upaya pengelolaan SDA salah satunya ketersediaan infrastruktur sumber daya air seperti irigasi;
5. Disharmoni kebijakan antara Pemerintah Daerah dengan perusahaan negara yaitu PLN dalam pemanfaatan energi terbarukan yang ada di Kaltim;
6. Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana penyedia air baku bagi masyarakat;
7. Aktivitas kawasan produksi bergerak secara parsial berdasarkan keberadaan masyarakat sehingga mempersulit pemetaan untuk pembangunan konektivitas wilayah produksi;
8. Ketidaksiharian perencanaan pendanaan dengan kebutuhan implementasi;
9. Belum adanya regulasi baik di secara Nasional maupun di daerah terhadap mendorong pemanfaatan energi terbarukan khususnya pada sektor limbah perkebunan kelapa sawit;

10. Belum ada mapping dan data base penanganan dan penataan kawasan kumuh di beberapa kota di Kaltim.

Rekomendasi terhadap pelaksanaan RPJMD 2019-2023 tahun pertama pada misi 3, antara lain :

1. Perlunya penguatan manajemen pengelolaan dan pemahaman perencanaan berbasis pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi bukan sekedar pengerjaan rutinitas untuk mendukung program kinerja perangkat daerah;
2. Melakukan sinkronisasi terhadap indikator kinerja antar perangkat daerah terutama yang berbasis kawasan agar terjadi konektivitas perencanaan pembangunan di kawasan;
3. Adanya harmonisasi perangkat daerah di tingkat provinsi dalam mendukung upaya pemerataan pembangunan sebagai dasar pemenuhan infrastruktur wilayah;
4. Penyelarasan dan penguatan peran Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat dan BUMN dalam mengelola dan memanfaatkan energi terbarukan di Kaltim;
5. Evaluasi dilakukan dalam penyusunan perencanaan anggaran dan kebijakan sesuai sasaran;
6. Program perencanaan kawasan yang dikelola oleh perangkat daerah harus berbasis pengembangan wilayah dalam upaya peningkatan aksesibilitas antar wilayah kawasan

Misi 4 : Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan

Tranformasi ekonomi berbasis *unrenewable resources* ke *renewable resources* harus dilakukan dengan mewujudkan keseimbangan antara pilar ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam perencanaan pembangunan menuju ekonomi hijau. Diharapkan transformasi pembangunan menuju ekonomi hijau atau ekonomi yang rendah karbon akan mewujudkan kondisi masyarakat yang lebih baik dan berkeadilan sosial serta mengurangi resiko lingkungan dan kerusakan ekologi.

Berdasarkan analisis capaian program kegiatan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada tahun 2019, dari 5 Program Prioritas dengan 5 indikator capaian kinerja, maka 60 % telah *on-track*, 20% masih *off-track* dan sisanya sebesar 20 % tidak dilaksanakan ditahun 2019 (baru akan dilaksanakan ditahun 2020). Atau dengan kata lain bahwa 3 program prioritas telah mencapai sasaran, 1 program prioritas belum mencapai sasaran dan 1 program prioritas tidak dilaksanakan ditahun 2019.

Faktor penghambat capaian kinerja pembangunan misi 4, antara lain :

1. Masih tingginya tingkat konflik sosial berkaitan dengan pemanfaatan lahan;

2. Koordinasi lintas sektor di perangkat daerah yang belum berjalan optimal dalam pengelolaan lingkungan;
3. Regulasi pengelolaan dan penanganan lingkungan yang masih tumpang tindih;
4. Keterbatasan kapasitas dalam pelaksanaan tanggap darurat serta upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana;
5. Masih adanya ketidaksesuaian Perda RTRW antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota terutama pada struktur dan pola ruang;
6. Tidak optimalnya pengendalian dan pengawasan yang terstruktur, akurat, dan cepat akibat dari tidak lengkapnya Rencana Tata Ruang Pada Kawasan Sentra Produksi yang berkekuatan hukum;
7. Masih tingginya perubahan alih fungsi lahan dan inkonsistensi kebijakan terhadap rencana tata ruang, keterbatasan database serta informasi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
8. Keterbatasan database serta informasi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
9. Dinamika yang cukup tinggi terutama pada aspek sosial ekonomi di Kalimantan Timur yang dapat dengan mudah mengubah kondisi lingkungan;
10. Rendahnya kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Rekomendasi terhadap pelaksanaan RPJMD 2019-2023 tahun pertama pada misi 4, antara lain :

1. Sinkronisasi mapping dan database kondisi daerah rawan bencana dengan perangkat daerah pengelola kawasan;
2. Perlunya penguatan manajemen pengelolaan dan pemahaman perencanaan berbasis pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi bukan sekedar pengerjaan rutinitas untuk mendukung program kinerja perangkat daerah;
3. Perlunya penambahan penguatan tujuan dan sasaran pada pencapaian Misi 4 melalui Revisi RPJMD 2019-2023,
4. Perlunya penguatan manajemen pengelolaan data pada setiap SKPD yang dikoordinir oleh Bappeda dalam pelaporan hasil capaian kinerja dan juga dilakukan evaluasi oleh gubernur kepada SKPD atas capaian indikator kinerja yang rendah melalui program *reward and punishment*;
5. Evaluasi dilakukan dalam penyusunan perencanaan anggaran dan kebijakan yang harus disesuaikan dengan capaian target;

6. Menyelaraskan kembali antara misi, tujuan, dan sasaran RPJMD dengan program SKPD termasuk menciptakan daya ungkit yang bertujuan mendukung capaian Misi 4.

Misi 5 : Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

Reformasi birokrasi meliputi beberapa aspek tentang pelayanan masyarakat, peningkatan kinerja, dan penegakan hukum. Setidaknya ada Sembilan parameter keberhasilan reformasi birokrasi, yaitu; 1) Tidak ada korupsi; 2) Tidak ada pelanggaran hukum; 3) APBD baik; 4) Semua program pemerintah daerah berjalan dengan baik; 5) Perijinan cepat dan mudah serta tidak ada overlap; 6) Komunikasi dengan publik berjalan baik; 7) Penggunaan waktu efektif dan produktif; 8) Adanya *reward* dan *punishment* terhadap kinerja aparat pemerintah; dan 9) Hasil pembangunan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dalam melakukan reformasi birokrasi, pemerintah provinsi melakukan harmonisasi dengan pemerintahan kabupaten/kota, pembenahan sistem birokrasi, mulai dari penataan kewenangan, prosedur operasi standar, kerjasama, sinergi, dan integrasi organisasi, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Di samping itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga melakukan pembenahan manajemen kepegawaian, serta upaya-upaya terobosan guna meningkatkan kapasitas, mutu, dan kinerja aparatur pemerintah. Upaya untuk mengawal pencapaian tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta peningkatan kualitas pelayanan publik melalui keterbukaan layanan informasi publik dan menguatkan akuntabilitas serta kecepatan layanan perijinan, sehingga tingkat kepuasan masyarakat dapat semakin meningkat.

Berdasarkan analisis capaian program kegiatan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada tahun 2019, dari 8 Program Prioritas dengan 8 indikator capaian kinerja, maka 75 % telah *on-track*, dan 25% masih *off-track*. Atau dengan kata lain bahwa 6 program prioritas telah mencapai sasaran, dan 2 program prioritas belum mencapai sasaran.

Faktor penghambat capaian kinerja pembangunan misi 5, antara lain :

1. Tumpang tindih kewenangan kelembagaan karena regulasi Pemerintah Pusat yang belum sinergi;
2. Belum optimalnya pendidikan dan pelatihan serta pengawasan kinerja sumberdaya aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan;
3. Penempatan/distribusi aparatur Pemerintah yang belum sesuai dengan kebutuhan;

4. Perangkat Daerah masih menerapkan perencanaan berbasis “rutinitas” sehingga orientasi untuk program pembangunan dan peningkatan ekonomi belum terlihat sangat jelas;
5. Masih cukup banyak SOP Perangkat Daerah yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
6. Belum tersosialisasi dokumen pelayanan publik secara lengkap yang ada di setiap Perangkat Daerah;
7. Belum terintegrasinya dalam satu sistem informasi proses pengawasan internal antara Inspektorat, PPNS dan Pimpinan Pemerintah (Gubernur dan Wakil Gubernur) sebagai satu kesatuan pengawasan pegawai provinsi;
8. Sistem Evaluasi Intern Perangkat Daerah Belum Berjalan secara terintegrasi dan *by system* (online);
9. Program perencanaan daerah belum diselaraskan dengan program perencanaan berbasis Geospasial berdasarkan Permendagri No.86 Tahun 2017 dan Permendagri No.90 Tahun 2019.

Rekomendasi terhadap pelaksanaan RPJMD 2019-2023 tahun pertama pada misi 5, antara lain :

1. Perlunya perhatian dalam penentuan indikator program dari aspek Formil dan substansi Revisi Program Perencanaan;
2. Perlunya penguatan manajemen pengelolaan dan pemahaman perencanaan berbasis pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi bukan sekedar pengerjaan rutinitas untuk mendukung program kinerja perangkat daerah;
3. Dibutuhkan program bimbingan teknis dan atau workshop terhadap bidang perencanaan berbasis pengembangan wilayah terutama kesesuaian dalam pencapaian program prioritas RPJMD;
4. Dibutuhkan penataan proses penyelenggaraan pemerintahan yang lebih sederhana, transparan, partisipatif dan berbasis *e-government* terutama pada pengawasan dan pengendalian perangkat daerah;
5. Perlunya pembentukan zona integritas dan wilayah bebas korupsi sebagai bagian reformasi birokrasi;
6. Perlu menyediakan fasilitas/media pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat;
7. Diperlukan program kerja pengawasan/perencanaan pengawasan berbasis risiko sesuai dengan kerangka kerja manajemen yang kualitas.

Berikut hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan Provinsi Kalimantan Timur :

**Tabel 2.44
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Provinsi Kalimantan Timur**

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2020 (tahun n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							K	Rp	K	Rp	
1	2			3	4	5	6		7		8
	1	1		Urusan Wajib Pelayanan Dasar			K	Rp	K	Rp	
	1	1		Pendidikan							
1	1	1	19	Program Pendidikan Luar Biasa	Persentase pelayanan pendidikan luar biasa (%)	60	20	9.447.386.483,00	70	23.793.195.800,00	Disdikbud
2	1	1	20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang telah memenuhi standar kompetensi (%)	95	75	8.238.994.327,00	98,00%	14.770.000.000,00	Disdikbud
3	1	1	23	Program Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat	Penerima Beasiswa KALTIM TUNTAS yang berprestasi (orang)	791	2.178	141.168.265.841,00	13.000	93.570.000.000,00	Disdikbud
4	1	1	38	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pendidikan	Siswa SMA/SMK Miskin penerima beasiswa yang tidak putus sekolah (Siswa)	635	6.952	11.556.406.000,00	2.500	77.943.407.000,00	Disdikbud
5	1	1	39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Murni SMA/MA	68,23	55,03	94.007.336.466,72	72,00%	136.940.000.000,00	Disdikbud
6	1	1	40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Kasar SMK/MAK	68,23	67,89	71.363.511.465,32	72,00%	108.093.000.000,00	Disdikbud
7	1	1	41	Program Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan	Jumlah sekolah yang mengembangk-an ekstrakurikuler berbasis agama (SMA/SMK/SLB)	72	0	0,00	150	10.000.000.000,00	Disdikbud
8	1	1	42	Program Pengembangan Sekolah Kejuruan	Jumlah SMK yang bekerjasama dengan Dunia Usaha dan Industri (SMK)	0	0	0,00	55	20.000.000.000,00	Disdikbud
9	1	1	107	Program Pendidikan Jarak Jauh (Distance Learning System)	Persentase sekolah yang telah menggunakan sistem pendidikan jarak jauh (%)	0	0	0,00	90,00%	20.000.000.000,00	Disdikbud
	1	2		Kesehatan							



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2020 (tahun n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						5	6		7		
1	2			3	4	K	K	Rp	K	Rp	8
10	1	2	17	Program Penganggulangan Kemiskinan Bidang Kesehatan	Persentase Penduduk Miskin dan Kurang Mampu yang memperoleh Jaminan Pelayanan Kesehatan (%)	87,5	10,38	6.823.493.973,00	90	41.500.000.000,00	Dinkes
11	1	2	23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas Minimal Terakreditasi Utama (%)	6	4,8	4.945.673.670,35	43	2.500.000.000,00	Dinkes
12	1	2	56	Program Pengembangan Dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Persentase fasyankes yang dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian tenaga kesehatannya	50	88,5	1.648.338.680,00	70	653.350.000,00	Dinkes
	1	3		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
13	1	3	15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Tingkat kemantapan jalan provinsi (%)	52,85	55	129.881.802.820,00	58,88	994.570.504.517,00	DPUPR&PERA
14	1	3	16	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kapasitas Air Baku (L/detik)	7.922	7.672	35.973.561.604,00	8.322	216.507.097.018,00	DPUPR&PERA
15	1	3	17	Program Pembangunan Infrastruktur Keciaptakarya	Cakupan layanan Air Minum Perpipaan (%)	60,23	65,25	77.027.364.863,00	65,23	223.724.000.251,00	DPUPR&PERA
16	1	3	70	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian RTRW Provinsi dengan RTRW Kabupaten/Kota (%)	63,19	66,46	5.561.132.903,00	75,34	21.650.709.702,00	DPUPR&PERA
	1	4		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman							
17	1	4	15	Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	51.722	47140	6.499.317.556,00	41.722	209.290.193.784,00	DPUPR&PERA
	1	5		Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat							
18	1	5	21	Program pendidikan politik masyarakat	Persentase penggunaan hak-hak politik masyarakat (%)	67,18	74	2.604.075.677,00	69	1.000.000.000,00	Bakesbangpol



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2020 (tahun n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						5	6		7		
1	2			3	4	K	K	Rp	K	Rp	8
19	1	5	49	Program Pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase Peningkatan Responsif Mandiri Daerah dalam Penanganan Bencana (%)	85 Persen	12	144.408.200,00	88 Persen	1.785.920.000,00	BPBD
20	1	5	51	Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	Persentase desa/kelurahan tangguh bencana (%)	60	15,56	256.428.944,00	25 Persen	1.225.000.000,00	BPBD
	1	6		Sosial							
21	1	6	18	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma	Persentase Penyandang Disabilitas yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas (%)	0	17	194.587.100,00	43,1	233.420.000,00	Dinsos
22	1	6	23	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial	Jumlah Keluarga Miskin, Kelompok Rentan dan PMKS Lainnya yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (Orang)	300	200	1.463.296.100,00	1.500	1.375.203.500,00	Dinsos
	2			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar							
	2	1		Tenaga Kerja							
23	2	1	15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja	Persentase Lulusan Pelatihan Yang Terserap di pasar kerja (%)	80,00%	96,4	2.627.251.500,00	80,00%	8.007.500.000,00	Disnakertrans
	2	2		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
24	2	2	20	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Perempuan	Persentase perempuan miskin yang memiliki usaha ekonomi produktif (UEP) (%)	34	15	140.202.200,00	40	650.000.000,00	DKP3A
25	2	2	21	Program peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak	Persentase pemenuhan kebutuhan hak anak (%)	70	70	206.630.596,00	82,00%	200.000.000,00	DKP3A
26	2	2	35	Program Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan Dan Anak	Rasio KDRT	0,066	0	0,00	0,054	200.000.000,00	DKP3A
	2	5		Lingkungan Hidup							
27	2	5	26	Program Tata Lingkungan	Indeks Pencemaran Lingkungan	Tercemar sedang (8)	0	0,00	Tercemar sedang (8)	5.765.090.000,00	DLH



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2020 (tahun n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						5	6		7		
1	2			3	4	K	K	Rp	K	Rp	8
28	2	5	59	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Jumlah aksi mitigasi perubahan iklim yang diinventarisasi dan di PEP kan (aksi)	417	417	791.719.500,00	550	4.600.000.000,00	DLH
	2	6		Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil							
	2	7		Pemberdayaan Masyarakat Desa							
29	2	7	16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Meningkatkan jumlah Bumdes yang aktif (Bumdes)	302	15	110.112.500,00	25	670.000.000,00	DPMPD
30	2	7	28	Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Jumlah desa yang mampu menjalankan pemerintahan desa secara optimal (Desa)	63	14	452.602.550,00	103	1.150.000.000,00	DPMPD
31	2	7	29	Program Pembangunan Desa dan Kawasan	Meningkatkan jumlah desa berkembang (Desa)	289	15	259.210.767,00	25	1.000.000.000,00	DPMPD
32	2	7	30	Program Kampung Iklim	Jumlah kampung/desa (Desa)	28	0	0,00	22	2.000.000.000,00	DPMPD
	2	8		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
	2	9		Perhubungan							
33	2	9	15	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas (Kasus)	854	0,83	892.495.436,00	598	21.800.000.000,00	Dishub
34	2	9	19	Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut dan SDP	Jumlah dan kapasitas prasarana perhubungan laut dan SDP (Unit%)	10 Dermaga SDP – 12 Pelabuhan Laut (83%)	412	1.943.535.834,00	10 Dermaga SDP – 12 Pelabuhan Laut (85%)	30.200.000.000,00	Dishub
	2	10		Komunikasi dan Informatika							
35	2	10	15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	0	2,55	419.529.340,00	2,8	3.601.000.000,00	Diskominfo
	2	11		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
36	2	11	20	Program Penguatan Kelembagaan Dan Pengembangan Koperasi Dan UMKM	Jumlah Koperasi yang berkualitas	0	0	0,00	100 Koperasi	3.424.608.000,00	Disperindagkop
					Jumlah UKM Naik Kelas	0	0		200 UKM		
	2	12		Penanaman Modal							



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2020 (tahun n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						5	6		7		
1	2			3	4	K	K	Rp	K	Rp	8
37	2	12	18	Program Kemudahan pelayanan dan percepatan proses perijinan	Waktu Penyelesaian Proses Perizinan (hari)	15	30	58.408.200,00	13	1.500.000.000,00	DPMPTSP
38	2	12	27	Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi	Jumlah perusahaan industri pada kawasan peruntukan industri (perusahaan industri baru)	0	36	286.419.000,00	7	1.590.000.000,00	DPMPTSP
	2	13		Kepemudaan dan Olah Raga							
39	2	13	33	Program Peningkatan Prestasi Olahraga	Persentase pelaku olahraga daerah yang berprestasi (%)	0,00%	10	630.051.667,00	14,44%	3.500.000.000,00	Dispora
40	2	13	35	Program Peningkatan Upaya Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda	Persentase Pemuda yang Berwirausaha (%)	0,03	0	0,00	0,15	1.478.200.000,00	Dispora
	2	16		Kebudayaan							
41	2	16	15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah sekolah mengembang-kan budaya lokal	17	71	9.999.465.103,69	150	9.200.000.000,00	Disdikbud
	2	17		Perpustakaan							
42	2	17	23	Program Peningkatan Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan	Jumlah masyarakat yang mengakses layanan perpustakaan (on line dan on site) (orang)	2.447	126.337	1.681.852.140,00	4.559	1.000.000.000,00	DPKD
	2	18		Kearsipan							
	3			Urusan Pilihan							
	3	1		Kelautan dan Perikanan							
43	3	1	21	Program Pengembangan Produksi Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	149.039 Ton	155.000	2.228.401.337,00	155.516 Ton	18.157.500.000,00	DKP
44	3	1	25	Program pengembangan perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	151.918 Ton	152.233	4.636.454.350,00	158.055 Ton	5.555.000.000,00	DKP
45	3	1	29	Program Pengelolaan Ruang Laut	Jumlah kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif (Kawasan)	0 Kawasan	1	1.513.354.351,00	1 Kawasan	3.795.000.000,00	DKP



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2020 (tahun n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						5	6		7		
1	2			3	4	K	K	Rp	K	Rp	8
46	3	1	26	Program Peningkatan Penyediaan Benih Ikan dan Ungud Unggulan	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih (ekor)	2,5 Miliar Ekor	2,5	2.549.883.951,00	2,7 Miliar Ekor	4.799.100.000,00	DKP (UPTD. Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar)
	3	2		Pariwisata							
47	3	2	16	Program pengembangan destinasi pariwisata	Jumlah Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di fasilitasi pengembangannya (kawasan)	2 Kawasan	0	1.445.553.850,00	2 Kawasan	2.800.000.000,00	Dispar
	3	3		Pertanian							
48	3	3	41	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	Jumlah produksi tanaman hortikultura (Ton)	226	77.748	2.432.191.050,00	240.245	3.700.000.000,00	DPTPH
49	3	3	51	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan	Jumlah produksi padi (Ton)	383.958	4.504	1.749.182.024,00	423	13.550.000.000,00	DPTPH
50	3	3	58	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Produksi Komoditi Perkebunan (Ton)	13.249.959	14.145.562,06	5.340.921.700,00	16.812.938 Ton	21.805.111.250,00	Disbun
51	3	3	76	Program Peningkatan Mutu Dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Jumlah Penurunan Emisi Sektor Perkebunan (Juta Ton CO2eq)	1,87	0	0,00	4,08	977.500.000,00	Disbun
52	3	3	80	Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Perkebunan	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) (Perusahaan)	98	1,50	198.871.500,00	35	1.010.821.250,00	Disbun
53	3	3	93	Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan	Jumlah Produk Perkebunan yang bersertifikat SNI (Produk)	0	12	384.180.550,00	2	2.251.383.750,00	Disbun
54	3	3	34	Program Pengembangan Usaha Peternakan	Jumlah Miniranch yang Teregister (unit)	0	5	687.695.500,00	35	10.250.000.000,00	Disnakeswan
55	3	3	90	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan	Angka Kelahiran Sapi (%)	19	4,22	1.933.226.157,00	20	24.100.000.000,00	Disnakeswan
	3	4		Kehutanan							
56	3	4	16	Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Realisasi penerimaan PNPB sektor kehutanan (Rp. Miliar)	167	154	1.669.297.426,00	165	3.471.960.000,00	Dishut
57	3	4	39	Program Perlindungan dan KSDAE	Persentase meningkatnya tutupan lahan (%)	218	0,77	305.560.571,00	1.398	1.194.850.000,00	Dishut



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2020 (tahun n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						5	6		7		
1	2			3	4	K	K	Rp	K	Rp	8
58	3	4	41	Program Pengelolaan DAS dan RHL	Persentase kerusakan hutan di dalam kawasan hutan (%)	≤2	5,66	570.350.073,00	≤1,75	782.100.000,00	Dishut
59	3	4	42	Program Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat (Ha)	118	9.491	1.201.038.518,00	32	2.330.970.000,00	Dishut
	3	5		Energi dan Sumber Daya Mineral							
60	3	5	37	Program Pengembangan Ketenagalistrikan	Jumlah KK Berlistrik (KK)	945.607	977.202	915.247.566,00	989.607	11.000.000.000,00	DESDM
61	3	5	47	Program Diversifikasi Energi	Persentase pemanfaatan EBT (%)	3,13	3,13	190.952.030,00	3,63	47.692.828.000,00	DESDM
	3	6		Perdagangan							
	3	7		Perindustrian							
62	3	7	33	Program Peningkatan dan Pengembangan Industri	Persentase Pertumbuhan Industri Olahan (%)	0,23	0,32	1.095.502.651,00	1	4.080.000.000,00	Disperindagkop
	3	8		Transmigrasi							
	4			Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang							
	4	1		Kesekretariatan Daerah							
63	4	1	42	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan survey kepuasan masyarakat (SKM) sesuai standar (%)	49	13,16	538.238.759,00	61	952.266.000,00	Biro Organisasi
64	4	1	60	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah yang memperoleh predikat minimal B (Baik) (%)	71,05	81	1.801.435.230,00	75	2.547.303.400,00	Biro Organisasi
65	4	1	80	Program Penguatan Kelembagaan	Persentase PD yang dibentuk sesuai dengan norma, standar prosedur dan kriteria (%)	86	84	994.420.743,00	90	1.203.216.000,00	Biro Organisasi
66	4	1	81	Program Penataan Tata Laksana Pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun SOP sesuai ketentuan/aturan (%)	52,63	52,08	154.777.000,00	68,42	236.208.000,00	Biro Organisasi
	4	2		Pengawasan							



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2020 (tahun n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						5	6		7		
1	2			3	4	K	K	Rp	K	Rp	8
67	4	2	21	Program pencegahan dan pemberantasan KKN	Level kapasitas APIP	2	65	916.555.950,00	3	2.767.000.000,00	Inspektorat
68	4	2	99	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya pengawasan	Hasil Penilaian Integritas	60	2	2.345.231.650,00	70	2.522.305.000,00	Inspektorat
	4	3		Perencanaan							
69	4	3	48	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase program kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan melalui dokumen anggaran	78,53	95,04	5.186.160.010,00	85	8.585.850.000,00	Bappeda
	4	4		Keuangan							
70	4	4	30	Program Perencanaan Dan Pengembangan Sumber Pendapatan Daerah	Jumlah objek/sumber pendapatan baru	0	0	0,00	4	3.946.999.000,00	Bapenda

Tabel 2.45
Capaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kalimantan Timur Tahun 2019

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2019	
		Target	Realisasi
Tujuan 1: Mewujudkan Masyarakat yang berkarakter berakhlak mulia dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,3	76,61
Sasaran 1: Meningkatnya pengamalan nilai-nilai budaya dan keagamaan di Masyarakat	Indeks Demokrasi Indonesia	73,5	73,88
Sasaran 2: Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	9,4	9,48
	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,89	13,67
Sasaran 3: Meningkatnya kesehatan dan gizi masyarakat	Usia Harapan Hidup (Tahun)	73,72	73,96
Tujuan 2: Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan (%)	6	5,94
Sasaran 4: Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (%)	56,7	57,53



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2019	
		Target	Realisasi
Sasaran 5: Meningkatnya kewirausahaan dan prestasi pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	56,74	56,33
Sasaran 6: Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Persentase Penempatan Tenaga Kerja (%)	51	38,25
Tujuan 3: Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,5±1	4,77
Sasaran 7: Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM	Persentase Sumbangan Koperasi Terhadap PDRB (%)	4,4	4,5
Sasaran 8: Meningkatnya keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal (desa)	503	301
Sasaran 9: Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	0,95	1,02
Tujuan 4: Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi non migas dan Non Batubara (%)	6±1	5,35
Sasaran 10: Meningkatnya kontribusi sektor perindustrian dalam perekonomian daerah	Kontribusi lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB (%)	20	17,77
Sasaran 11: Meningkatnya realisasi investasi	Nilai realisasi investasi (Rp Triliun)	31,5	35,62
Sasaran 12: Meningkatnya kontribusi sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap ekonomi daerah	Kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB (%)	0,53	0,56
	Rasio Pemenuhan Beras (%)	62,46	71,1
Sasaran 13: Meningkatnya kontribusi sektor peternakan terhadap ekonomi daerah	Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	0,33	0,33
Sasaran 14: Meningkatnya kontribusi sektor perkebunan terhadap ekonomi daerah	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	5,1	4,34
Sasaran 15: Meningkatnya kontribusi sektor perikanan terhadap ekonomi daerah	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)	1,52	1,54
Sasaran 16: Meningkatnya kontribusi sektor kehutanan terhadap ekonomi daerah	Kontribusi lapangan usaha sub sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	1	1,12
Sasaran 17: Meningkatnya pendanaan pembangunan daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah (%)	3,84	-



Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2019	
		Target	Realisasi
Tujuan 5 : Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar	Indeks Gini	0,33	0,33
Sasaran 18 : Meningkatnya aksesibilitas wilayah	Jumlah penumpang yang terlayani (orang)	10.705.000	10.721.656
	Jumlah barang (ton)	334.805.000	341.529.897
Sasaran 19 : Meningkatnya konektivitas antar kawasan	Jumlah kawasan strategis provinsi yang terhubung dengan kawasan sentra produksi (kawasan)	2	2
Sasaran 20 : Meningkatnya fungsi pelayanan infrastruktur sumber daya air	Cakupan layanan air minum (%)	73,33	67,23
	Luas lahan pertanian yang beririgasi (Ha)	14.008,50	13874,11
	Luas genangan banjir perkotaan (Ha)	664	641
Sasaran 21 : Menurunnya kawasan kumuh	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	620,06	645,47
Sasaran 22 : Terpenuhinya kebutuhan energi daerah	Rasio elektrifikasi (%)	85,5	88,93
Tujuan 6 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,75	81,68
Sasaran 23 : Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persentase penurunan emisi dari BAU (%)	26,3	25,18
Sasaran 24 : Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	Indeks Resiko Bencana	145	-
Sasaran 25 : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	66,68	64,87
Tujuan 7 : Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	B (69,50)	B (68,93)
Sasaran 26 : Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	Nilai Akuntabilitas Kinerja	77,5	76,55
Sasaran 27 : Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Skor Kepuasan Masyarakat (SKM)	81	82,38
Sasaran 28 : Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Pemda	Level 3	Level 3

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Terdapat enam permasalahan utama pembangunan Provinsi Kalimantan Timur di tahun 2021, yaitu: lambannya transformasi ekonomi menuju sumber daya alam berkelanjutan, masih belum merata dan kuatnya daya saing sumber daya manusia, belum meratanya aksesibilitas dan konektivitas, semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup, serta belum tercapainya pelayanan publik yang optimal. Selain itu, terdapat permasalahan baru yang muncul dan berpengaruh besar terhadap pencapaian target prioritas dan sasaran pembangunan daerah di tahun 2020, yaitu adanya situasi bencana akibat pandemi Covid-19.

1. Belum Merata dan Kuatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia

Belum optimalnya daya saing SDM Kalimantan Timur disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: belum optimalnya kualitas pendidikan masyarakat, belum optimalnya serapan tenaga kerja, derajat kesehatan masyarakat yang masih perlu ditingkatkan, serta belum optimalnya peran pemuda, perempuan dan disabilitas dalam proses pembangunan, serta perlindungan sosial terutama untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang belum komprehensif. Faktor utama yang sangat mempengaruhi daya saing SDM adalah pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Sedangkan sektor-sektor lain yang juga menopang capaian daya saing antara lain berkaitan dengan keagamaan, sosial dan budaya.

Disamping itu, Provinsi Kalimantan Timur masih dihadapkan pada disparitas daya saing SDM antar kabupaten/kota. Maka dari itu, permasalahan daerah yang berkaitan dengan daya saing SDM di Kalimantan Timur lebih dititikberatkan pada disparitas daya saing antar daerah yang sangat tinggi. Terbatasnya lapangan usaha masyarakat yang berimplikasi pada fluktuasi pengangguran terbuka menjadi salah satu penyebab kesenjangan pendapatan masyarakat. Pengembangan usaha perkebunan sawit dan pertambangan yang menjadi unggulan daerah belum mampu memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat sekitarnya. Pembangunan yang diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat masih belum berhasil mengentaskan kemiskinan atau hidup pra-sejahtera.

Belum optimalnya integrasi pendidikan vokasi dengan kebutuhan tenaga kerja industri dan sektor ekonomi lainnya, menjadikan rendahnya penyerapan tenaga kerja produktif oleh dunia kerja. Rendahnya penyerapan tenaga kerja berpengaruh terhadap pemerataan

pendapatan. Tidak meratanya pendapatan mengakibatkan gap kesejahteraan antar masyarakat, khususnya apabila dilihat dari tingginya angka kemiskinan di perdesaan dibandingkan dengan angka kemiskinan di perkotaan. Pembangunan yang tidak dilakukan secara merata dan menyeluruh menimbulkan permasalahan baru di kantong-kantong wilayah miskin dan tertinggal. Kecepatan laju pembangunan di wilayah tertinggal akan semakin sulit dikejar karena pemenuhan kebutuhan infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan peningkatan usaha ekonomi relatif terbatas.

Terkait dengan ketenagakerjaan bahwa perkembangan perluasan kesempatan kerja semakin kompleks dan dinamis, yang membutuhkan tenaga kerja bukan saja terlatih tetapi mampu bersaing di tingkat daerah, nasional dan internasional. maka diperlukan sertifikasi kompetensi bertaraf internasional yang mampu berkreasi untuk melakukan inovasi menghadapi tantangan dan mampu menyesuaikan dengan tantangan yang dihadapi.

2. Lambannya Transformasi Ekonomi Menuju Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan

Perekonomian Kalimantan Timur masing bergantung pada sektor ekstraktif yaitu pertambangan dan penggalian, dengan peran batubara yang masih dominan dalam pergerakan aktivitas perekonomian di Kalimantan Timur. Sementara itu, kontribusi dan pertumbuhan sektor lainnya seperti industri pengolahan dan pertanian mengalami perlambatan.

Disamping itu, dukungan investasi yang diberikan ke Kalimantan Timur lebih dari 50 persen juga masih tertuju pada sektor usaha pertambangan. Namun demikian, sektor tanaman pangan dan perkebunan sebagai salah satu faktor modal percepatan transformasi ekonomi memiliki nilai investasi cukup baik, meskipun masih berada di bawah sektor pertambangan.

3. Belum Meratanya Aksesibilitas dan Konektivitas dari dan ke Sentra Produksi

Rendahnya ketersediaan serta kualitas infrastruktur dasar antara lain prasarana jalan, air bersih, sanitasi layak, perumahan dan permukiman yang layak huni dan ketenaga listrik.

Persoalan lain yang terjadi berkaitan dengan pemenuhan infrastruktur dasar adalah belum optimalnya akses air bersih masyarakat. Sementara itu, akses ketenagalistrikan juga belum memadai.

Persoalan mendasar pada perencanaan penataan ruang dikarenakan masih terdapatnya perbedaan pola ruang dan kurang harmonisnya dokumen perencanaan ruang antara RTRW Provinsi dengan RTRW Kabupaten/Kota dan belum tersedianya rencana rinci tata ruang provinsi maupun kabupaten/kota.

4. **Semakin Menurunnya Kualitas Lingkungan Hidup**

Permasalahan lingkungan hidup di Kalimantan Timur, terutama yang berasal dari alih fungsi lahan dan hutan tidak sepenuhnya diantisipasi kerusakannya sehingga berdampak pada peningkatan jumlah bencana banjir dan tingginya emisi GRK dari pembukaan lahan. Berbagai program rencana pengelolaan kawasan melalui pembinaan perhutanan sosial, kemandirian KPH, program rehabilitasi hutan dan lahan, serta konservasi kawasan bernilai tinggi masih perlu diperkuat. Perlindungan kawasan hutan mangrove dan lahan gambut untuk tidak dialihfungsikan sesuai dengan fungsinya juga perlu mendapatkan ketegasan guna mengurangi tingkat kerusakannya yang dalam jangka panjang akan berujung pada bencana lingkungan termasuk peningkatan emisi karbon yang berasal dari lahan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang dihimpun belum mampu menjadi acuan maupun rambu-rambu dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan. Penurunan kualitas lingkungan hidup jauh lebih mudah dilihat pada dampak yang diakibatkan, khususnya pada kesehatan masyarakat dan bencana hidrometeorologi yang terjadi. Selain itu, tutupan hutan dan lahan sebagai salah satu komponen dalam IKLH mengindikasikan bahwa apabila tutupan hutan semakin berkurang, maka wilayah tangkapan air akan menurun persoalan ini diikuti oleh tingginya kerentanan lahan. Tingginya erosi dan sedimentasi akibat perubahan tutupan hutan, berdampak pada pendangkalan pada alur perairan.

Tutupan lahan bervegetasi semakin berkurang disebabkan oleh semakin meluasnya kawasan galian tambang batu bara yang sebagian menimbulkan lubang-lubang bekas galian tambang, perluasan areal perkebunan dan perluasan kawasan permukiman.

5. **Belum Tercapainya Pelayanan Publik yang Optimal**

Tata kelola pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari dua masalah pokok, yaitu belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik; dan belum optimalnya kualitas demokratis daerah. Hal ini dapat dilihat pada beberapa prinsip pokok *open government* yang belum berjalan optimal, seperti prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan integritas.

2.3.2. **Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah**

Permasalahan per-urusan disusun berdasarkan sebab indikatif dari analisis data gambaran umum kondisi daerah dan berbagai data lain, seperti kesepakatan mengenai Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) dan kebijakan-kebijakan di level nasional yang memiliki keterkaitan langsung dengan tema RKPD Kalimantan Timur tahun 2021.

Tabel 2.46
Permasalahan Pembangunan Per Urusan

NO	URUSAN	SASARAN	MASALAH
1.	Pendidikan	Meningkatnya taraf Pendidikan masyarakat	Masih tingginya disparitas pelayanan Pendidikan
2.	Kesehatan	Meningkatnya kesehatan dan gizi masyarakat	Belum terpenuhinya standar pelayanan minimal di pusat-pusat pelayanan kesehatan
3.	Kepemudaan dan Olahraga	Meningkatnya kewirausahaan dan prestasi pemuda	Belum optimalnya penanganan kepemudaan dan olahraga
4.	Tenaga Kerja	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Belum optimalnya kompetensi tenaga kerja lokal
5.	Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa 2. Belum optimalnya fasilitasi penguatan kapasitas aparatur pemerintahan desa
6.	Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya sarana dan prasarana jaringan komunikasi dan informasi 2. Belum optimalnya layanan informasi publik
7.	Kesekretariatan	Terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan public berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya produktivitas DPRD dalam merumuskan raperda 2. Belum optimalnya integrase pelaksanaan tugas perangkat daerah
8.	Koperasi dan UKM	Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM	Pertumbuhan UMKM masih rendah
9.	Pariwisata	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan destinasi pariwisata belum memadai 2. SDM, sarana dan prasarana di bidang Pariwisata Kalimantan Timur yang masih sedikit, belum terampil dan tersertifikasi
10.	Perindustrian	Meningkatnya kontribusi sektor perindustrian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lambatnya pertumbuhan investasi Industri Kecil Menengah 2. Aksesibilitas kawasan produksi yang belum terkoneksi secara merata dengan kawasan industri di Kaltim



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

11.	Penanaman Modal	Meningkatnya realisasi investasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minat investasi pada sektor sekunder dan tersier masih rendah 2. Promosi investasi kawasan strategis ekonomi belum optimal
12	Pertanian	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya produksi padi 2. Diversifikasi pangan belum optimal
13	Peternakan	Meningkatnya kontribusi sektor peternakan	Masih rendahnya populasi ternak sapi
14	Perkebunan	Meningkatnya kontribusi sektor perkebunan	Produktifitas perkebunan rakyat masih rendah
15	Perikanan	Meningkatnya kontribusi sektor perikanan	Rendahnya produksi perikanan
16	Kehutanan	Meningkatnya kontribusi sektor kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ekspor masih dalam bentuk mentah Kayu Alam 2. Pengolahan hasil hutan belum dilakukan dengan rangkaian yang lebih panjang dan nilai ekonomisnya yang masih rendah
17	Keuangan	Meningkatnya pendanaan pembangunan daerah	Masih rendahnya pendapatan asli daerah (PAD)
18	Energi dan Sumber Daya Mineral	Terpenuhinya kebutuhan energi daerah	Rendahnya akses ketenagalistrikan pada wilayah 3T
19	Lingkungan Hidup	Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Masih tingginya angka emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
20	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya keterhubungan jaringan jalan yang menghubungkan jaringan jalan yang menghubungkan antar wilayah 2. Belum optimalnya kualitas pelayanan perhubungan darat, laut, sungai, danau, dan udara
		Meningkatnya Konektivitas Antar Kawasa	Belum optimalnya kualitas jaringan jalan
		Meningkatnya Fungsi Pelayanan Infrastruktur Sumber Daya Air	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terpenuhinya kebutuhan air baku untuk irigasi 2. Kurangnya akses penyediaan layanan air minum perpipaan 3. Belum terpenuhinya air baku untuk air bersih 4. Infrastruktur pengendali banjir belum memadai
		Meningkatnya kinerja penataan ruang	Belum optimalnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang



GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR

21	Perumahan dan Permukiman	Menurunnya Kawasan Kumuh	<ol style="list-style-type: none">1. Masih rendahnya akses masyarakat miskin terhadap rumah layak huni2. Rendahnya kualitas lingkungan Kawasan Permukiman
----	--------------------------	--------------------------	--

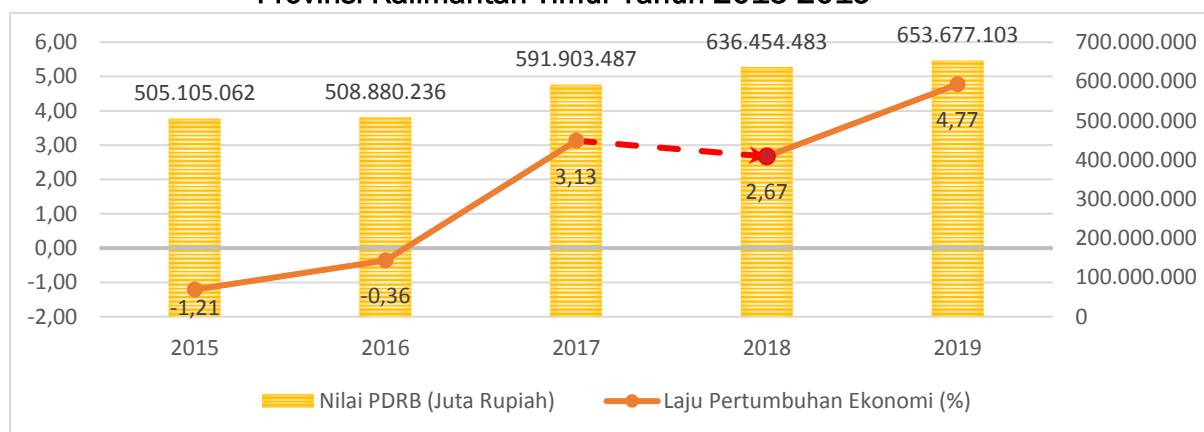
BAB 3

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kondisi ekonomi Kalimantan Timur digambarkan melalui penciptaan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Jika dilihat kondisi lima tahun terakhir, nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan peningkatan. Tahun 2015 nilai PDRB Kalimantan Timur tercatat sebesar Rp 505,11 triliun, nilai ini terus mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 653,68 triliun di tahun 2019.

Jika dibandingkan tahun 2018, nilai PDRB Kalimantan Timur tahun 2019 terutama terjadi pada PDRB tanpa migas yang meningkat sebanyak Rp 24,07 triliun menjadi Rp 542,15 triliun. Sedangkan PDRB tanpa migas dan batubara meningkat sebesar Rp 21,60 triliun menjadi Rp 313,17 triliun. Disamping itu, laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur mengalami akselerasi di tahun 2019 menjadi sebesar 4,77 persen. Kondisi ini merupakan capaian pertumbuhan tertinggi dalam lima tahun terakhir. Pada dasarnya peningkatan terutama terjadi pada PDRB tanpa migas yang meningkat sebanyak Rp 24,07 triliun menjadi Rp 542,15 triliun. Sedangkan PDRB tanpa migas dan batubara meningkat sebesar Rp 21,60 triliun menjadi Rp 313,17 triliun.

Gambar 3.1
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019



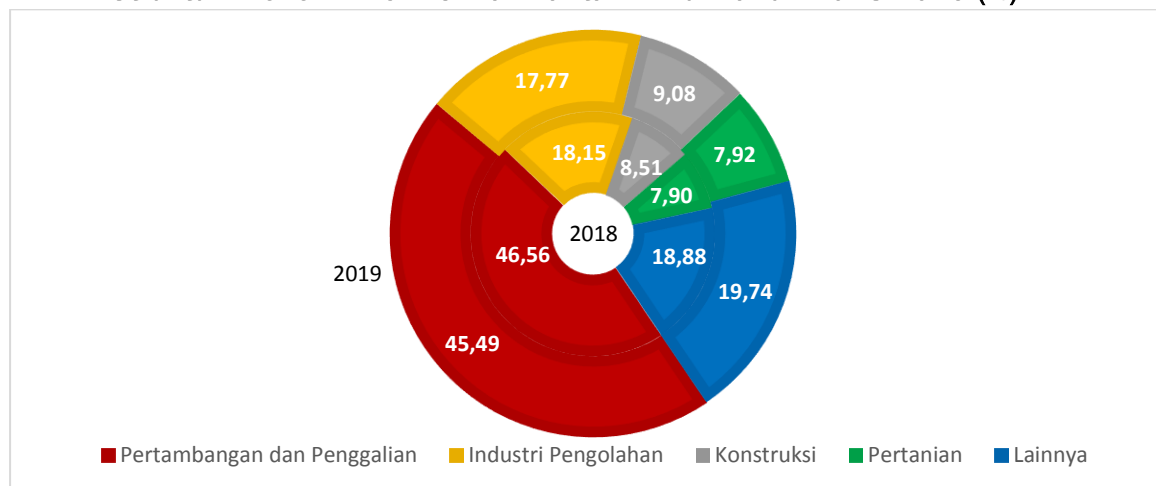
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Struktur PDRB

Struktur perekonomian Kalimantan Timur menurut Lapangan Usaha tahun 2019 masih didominasi oleh pertambangan dan penggalian yaitu sebesar 45,49 persen dan industri pengolahan sebesar 17,77 persen. Kemudian disusul kontribusi sektor konstruksi yang meningkat menjadi sebesar 9,08 persen. Adapun kontribusi sektor pertanian yang diharapkan

mampu menjadi salah satu sektor utama di Kalimantan Timur di masa depan hanya mampu memberikan kontribusi sebesar 7,92 persen, naik tipis dibandingkan kontribusinya tahun lalu.

Gambar 3.2
Struktur Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2019 (%)



Sumber : BPS PProvinsi Kalimantan Timur

Masih besarnya dominasi pertambangan dan penggalian dilatarbelakangi oleh peningkatan produksi batubara. Upaya perusahaan batu bara untuk meningkatkan produksi sebagai kompensasi penurunan harga menjadi faktor utama kenaikan produksi batu bara di Kaltim. Upaya tersebut juga didukung oleh permintaan baik di domestik maupun luar negeri yang masih tinggi dan faktor cuaca yang lebih kondusif di sepanjang tahun 2019.

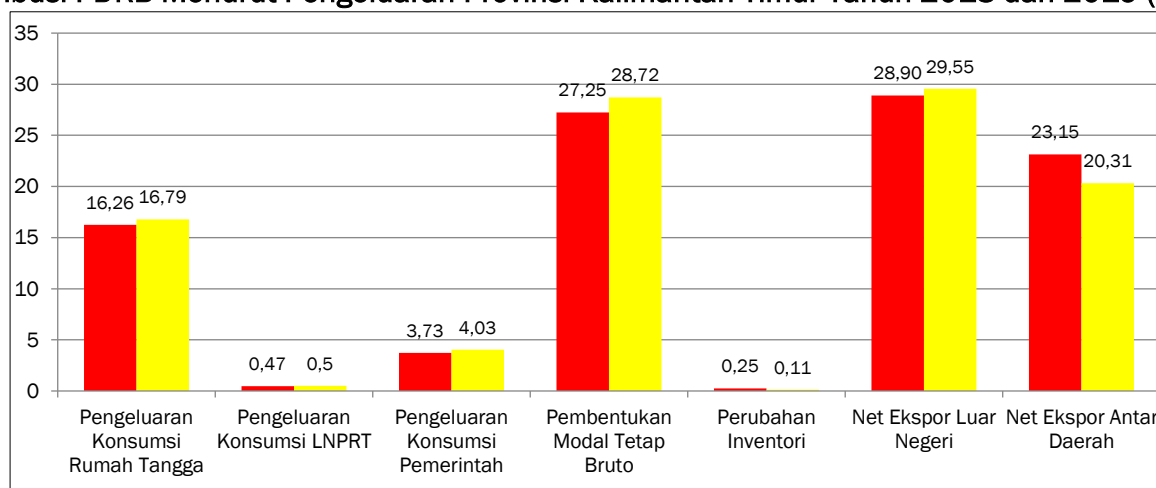
Lapangan usaha industri pengolahan juga memiliki peran yang cukup besar terhadap kinerja perekonomian Kalimantan Timur. Kontribusinya pada tahun 2019 mencapai 19,74 persen. Namun dari sisi pertumbuhan mengalami perlambatan yang dipengaruhi oleh produksi LNG yang terus mengalami penurunan sepanjang tahun 2019. Selain itu, perlambatan juga terjadi pada industri CPO, pupuk, kayu lapis, dan jenis industri olahan lainnya.

Sementara itu, Lapangan Usaha Pertanian (dalam arti luas) masih memiliki kontribusi di bawah 10 persen dari PDRB Kaltim. Disamping itu, pertumbuhannya mengalami perlambatan. Hal ini terutama disebabkan oleh tren penurunan kinerja kelapa sawit yang terjadi pada paruh awal tahun 2019 yang tercermin dari kontraksi harga yang relatif dalam. Selain itu, musim kemarau yang lebih panjang juga membuat musim tanam menjadi terlambat di mana hal tersebut juga terjadi di skala nasional. Terakhir, cuaca yang kurang kondusif pada paruh akhir tahun 2019 menyebabkan banjir di beberapa sentra produksi pangan serta terganggunya kegiatan nelayan dikarenakan gelombang yang relatif tinggi.

Distribusi PDRB menurut komponen pengeluaran pada tahun 2019 di Kalimantan Timur didominasi Komponen Net Ekspor Luar Negeri sebesar 29,55 persen dan Pembentukan Modal

Tetap Bruto sebesar 28,72 persen. Adapun kaitannya dengan perdagangan dalam negeri yang dicerminkan melalui komponen Net Ekspor Antar Daerah mempunyai kontribusi sebesar 20,31 persen lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan menurunnya nilai komoditas ekspor batubara Kalimantan Timur. Sedangkan konsumsi rumah tangga menyumbang sebesar 16,79 persen dari total PDRB Kalimantan Timur.

Gambar 3.3
Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 dan 2019 (%)



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Timur

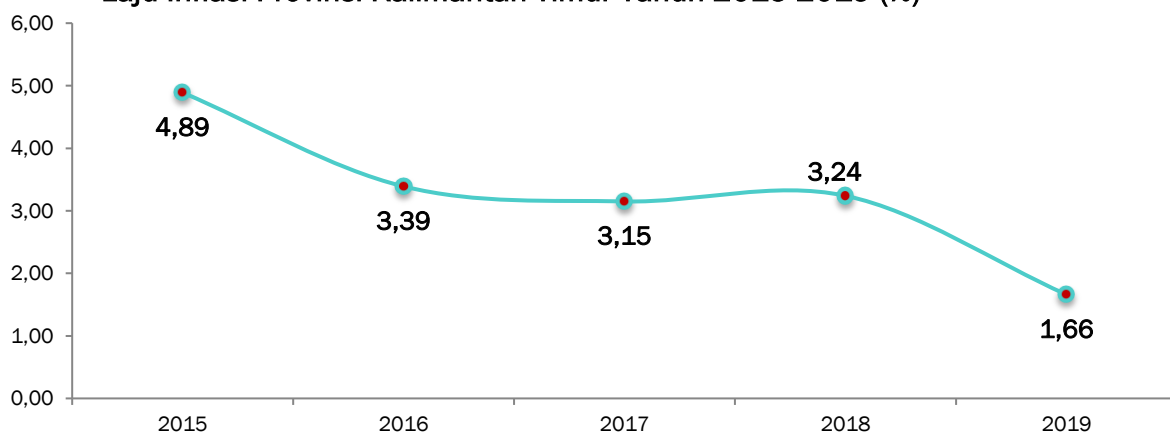
Aktivitas perdagangan Luar Negeri Kalimantan Timur seringkali menyumbangkan porsi yang besar terhadap pembentukan PDRB Kalimantan Timur dari sisi pengeluaran. Berdasarkan golongan barang dalam ekspor luar negeri Kalimantan Timur pada tahun 2019 telah terlihat bahwa hasil industri non migas dan batubara memiliki kontribusi sebesar 10,49 persen dari total ekspor Kalimantan Timur. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam percepatan proses hilirisasi industri sampai dengan pemasarannya mulai menunjukkan hasil. Namun disamping itu, perlu juga dilakukan hilirisasi pada komoditas Batubara untuk optimasi perolehan nilai tambah ekonomi karena selama ini ekspor batubara dari Kalimantan Timur masih dalam bentuk bahan mentah, belum melalui proses pengolahan atau peningkatan nilai tambah.

Inflasi

Tekanan inflasi Kalimantan Timur tahun 2019 tercatat stabil dan rendah, bahkan lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tekanan inflasi Kalimantan Timur yang lebih rendah pada tahun 2019 ini dipengaruhi terutama oleh deflasi yang terjadi pada kelompok transportasi dan komunikasi yang bersumber dari penyesuaian tarif angkutan udara. Hal ini berkaitan dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 106 Tahun 2019 mengenai Tarif Batas Atas (TBA) Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri menjadi faktor utama penurunan tekanan inflasi tarif angkutan udara. Penyesuaian TBA cukup memberikan dampak efektif dalam pengendalian tarif angkutan udara. Operasional

Bandara APT Pranoto di Kota Samarinda yang baru beroperasi pada akhir tahun 2018 juga berperan dalam mengendalikan permintaan tiket penerbangan yang sebelumnya dimonopoli oleh Bandara SAMS Sepinggang di Kota Balikpapan. Dengan terkendalinya permintaan tiket penerbangan, harga tiket penerbangan dari maskapai penerbangan menjadi semakin kompetitif.

Gambar 3.4
Laju Inflasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019 (%)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Terkendalinya inflasi Kaltim pada 2019 juga disebabkan oleh rendahnya inflasi pada kelompok lainnya. Kelompok Makanan & Minuman, Rokok, dan Tembakau pada tahun 2019 mengalami inflasi sebesar 2,75% (yoy), lebih rendah dibandingkan 2,92% (yoy) pada tahun sebelumnya. Bea cukai tembakau dan Harga Jual Eceran (HJE) rokok yang batal naik pada tahun 2019 mendorong inflasi pada kelompok tersebut menjadi relatif stabil. Namun pada akhir 2019, inflasi pada kelompok tersebut mulai menunjukkan peningkatan didorong oleh keputusan pemerintah yang menaikkan cukai tembakau dan HJE rokok.

Investasi

Nilai investasi Kalimantan Timur pada tahun 2019 mengalami peningkatan dari Rp 33,81 triliun menjadi Rp 35,62 triliun yang terdiri atas Penanaman Modal Dalam Negeri sebesar Rp 22,67 triliun dan Penanaman Modal Asing sebesar 12,95 triliun. Adapun sektor usaha yang mampu menarik investasi tertinggi adalah pertambangan, tanaman pangan & perkebunan, serta listrik, gas dan air.

Tantangan dan Peluang Perekonomian Daerah Tahun 2020 dan Tahun 2021

Tantangan

Diperkirakan perekonomian Kalimantan Timur masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian global yang

terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Beragam tantangan dimaksud perlu disikapi secara cermat dan komprehensif serta dengan langkah-langkah yang lebih nyata. Tantangan dimaksud antara lain masih mencakup :

1. Perlambatan pertumbuhan ekonomi Republik Rakyat Tiongkok yang merupakan salah satu mitra dagang utama Kalimantan Timur;
2. Perang dagang yang masih berlangsung antara Amerika Serikat-Republik Rakyat Tiongkok;
3. Tren harga batubara dan CPO diperkirakan akan terus mengalami perlambatan;
4. Tren penurunan harga minyak dunia masih berlanjut;
5. Mulai digalakkannya implementasi energi baru terbarukan di Kawasan Asia Timur menyebabkan permintaan ekspor berpotensi menurun;
6. Berakhirnya kontrak LNG dengan Jepang di akhir 2020;
7. Target kuota produksi pertambangan yang kemungkinan diatur lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya;
8. Berakhirnya kontrak PKP2B di tahun 2021 (Kendilo Coal dan Kaltim Prima Coal);
9. Penurunan lifting migas karena Natural declining mendorong kenaikan impor migas baik crude untuk keperluan bahan baku maupun produk;
10. Berakhirnya beberapa proyek *Multi Years Contract*
11. Penyebaran wabah virus COVID -19 (*Coronavirus Disease 19*)

Peluang

Ekonomi Kaltim Tahun 2020 dan 2019 diperkirakan tetap tumbuh positif namun masih terbatas. Beberapa peluang yang diperkirakan mampu mempertahankan kinerja positif ekonomi Kalimantan Timur sebagai berikut:

1. Momentum dipilihnya Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara mampu mendorong peningkatan investasi dan sentimen bisnis di Kaltim serta inisiasi pembangunan sarana dan prasarana IKN baru;
2. Berlanjutnya proyek peningkatan kapasitas kilang minyak Balikpapan (RDMP RU V Pertamina) dan beberapa proyek swasta lain;
3. Beberapa pabrik industri pengolahan CPO baru akan mulai beroperasi pada tahun 2020;
4. Beroperasinya sumur migas baru akan mendorong kinerja industri pengolahan LNG dengan adanya peningkatan supply bahan baku;
5. Permintaan CPO diperkirakan akan terus mengalami peningkatan seiring dengan implementasi kebijakan B#) dan rencana B40;
6. Berlanjutnya pengerjaan proyek strategis (RDMP RU V, Jembatan Pulau Balang);
7. Pemberian insentif kepada perusahaan yang memberlakukan hilirisasi batubara;

8. Optimalisasi Kebijakan B20 dan B30 dan rencana B40;
9. Optimalisasi sumur-sumur migas baru dan optimalisasi Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus;

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Tema pembangunan tahunan nasional pada RKP tahun 2021 adalah **“Meningkatkan industri dan pariwisata di berbagai wilayah didukung oleh investasi”**. Pada RKP tahun 2021, Kalimantan Timur diharapkan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Adapun sektor yang menjadi kontributor utama adalah sektor pertambangan dan penggalian dan sektor industri pengolahan. Didukung dengan pengembangan sektor lainnya seperti sektor pertanian dan sektor perdagangan besar dan eceran.

Selanjutnya dalam RKP tahun 2021 dijabarkan arah pengembangan wilayah Kalimantan Timur sebagai berikut :

1. Hilirisasi perkebunan sawit dan batubara;
2. Penyiapan pemindahan Ibu Kota Negara baru;
3. Pembangunan kawasan perdesaan, perbatasan dan kawasan pariwisata;
4. Pengembangan Kawasan strategis yang diarahkan menjadi pusat pertumbuhan perekonomian wilayah Kalimantan Timur yaitu KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (industri pengolahan CPO).

3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Kalimantan Timur

Pada tahun 2020, ekonomi makro Kalimantan Timur diharapkan dapat tumbuh positif dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Stabilitas makro sangat penting bagi penciptaan pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati oleh semua pihak atau ekonomi yang inklusif. Sasaran ekonomi makro pada tahun 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut:

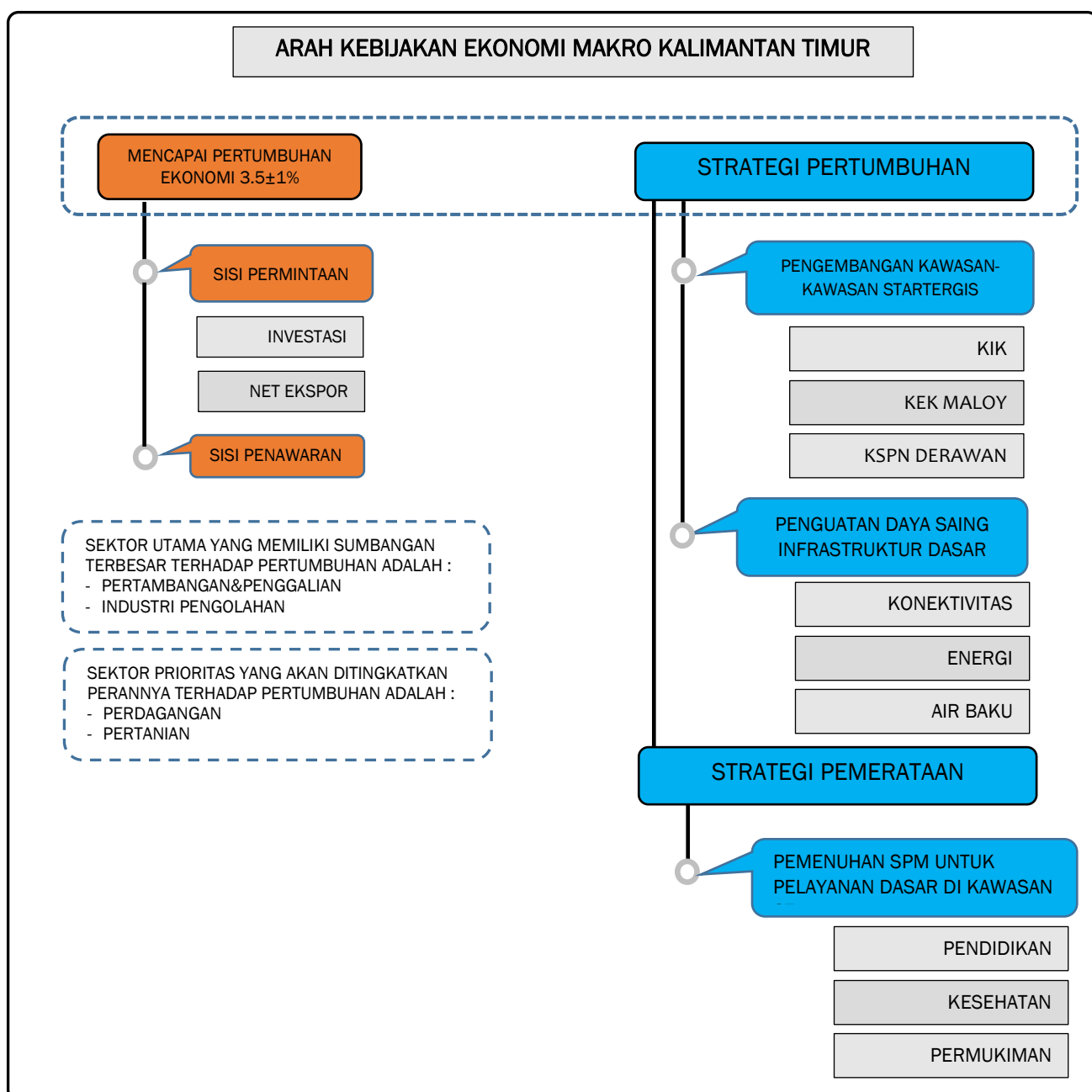
Tabel 3.1.
Sasaran Ekonomi Makro Daerah

Sasaran Ekonomi Makro Daerah		2019	Target 2020	Target 2021
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,77	3.5±1	3.5±1
2	Investasi (trilyun Rp)	35,62	33,08	34,73
4	Indeks Pembangunan Manusia	76,61	75,43	75,56
5	Indeks Gini	0,330	0,329	0,328

Sasaran Ekonomi Makro Daerah		2019	Target 2020	Target 2021
6	Tingkat Kemiskinan	5,94	5,94	5,87

Kerangka besar arah kebijakan ekonomi makro Kalimantan Timur tahun 2021 dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:

Gambar 3.5
Arah Kebijakan Ekonomi Makro Kalimantan Timur Tahun 2021



1. Mencapai Pertumbuhan Ekonomi 3,5 ± 1 Persen

1) Sisi Permintaan

Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 3,5 ± 1 persen membutuhkan reformasi kebijakan yang menyeluruh dan tepat sasaran, serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan untuk menyatukan langkah dalam mencapai target tersebut. Momentum IKN menjadi salah satu pendorong pencapaian target 3,5 ± 1 persen melalui peningkatan Investasi, ditambah dengan aktivitas perdagangan luar negeri melalui net ekspor luar negeri. Kontribusi investasi yang tercermin melalui Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) diharapkan mampu memberikan kontribusi sebesar 29 persen terhadap perekonomian Kalimantan Timur di tahun 2021. Dimana PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya. Untuk itu diarahkan pada pengembangan sarana dan prasarana pendukung nilai tambah pertanian, perkebunan, dan perikanan. Serta peningkatan sarana dan prasarana pendukung industri pengolahan dalam hal ini yang mendukung hilirisasi industri di Kalimantan Timur.

Sementara Net Ekspor Luar Negeri diharapkan mampu memberikan kontribusi sebesar 28,6 persen terhadap perekonomian Kalimantan Timur di tahun 2021. Sementara Net Ekspor Antar Daerah diharapkan mampu memberikan kontribusi sebesar 20,08 persen, guna mendukung penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, serta mengindikasikan adanya peningkatan pada perdagangan domestik Kalimantan Timur. Dimana aktivitasnya diarahkan pada ekspor pada produk perikanan dan perkebunan, untuk itu perlu didukung dengan kegiatan pengembangan produktivitas perikanan dan perkebunan, dan juga pengembangan Kawasan Industri Kariangau-Buluminung dan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan.

2) Sisi Penawaran

Dari sisi penawaran, dua sektor utama yang memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi cukup besar diharapkan mampu menjadi penghela pertumbuhan ekonomi. **Sektor utama yang memiliki kontribusi dominan terhadap perekonomian Kalimantan Timur adalah sektor pertambangan dan penggalian dan sektor industri pengolahan.** Pada tahun 2021 sektor pertambangan dan penggalian diperkirakan masih mendominasi dengan kontribusi sekitar 45 persen. Disamping itu, sangat diharapkan terjadi hilirisasi industri batubara yang diyakini mampu mendongkrak perekonomian Kalimantan Timur karena akan menaikkan nilai tambah produk sehingga memiliki daya ungkit sangat besar mengingat dominasi pertambangan dan penggalian yang besar dalam kurun waktu terakhir.

Disamping sektor pertambangan dan penggalian, sektor utama lainnya adalah industri pengolahan yang memiliki kontribusi terbesar kedua pada pembentukan PDRB Kalimantan Timur. Pada tahun 2021 diharapkan sektor industri pengolahan mampu memberikan kontribusi sebesar 20 persen guna menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada tahun 2021 mendatang. Sektor industri pengolahan merupakan alternatif sumber pertumbuhan tertinggi untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi berkualitas di Kalimantan Timur dan memiliki potensi penyerapan tenaga kerja yang cukup tinggi.

Sektor potensial yang dijadikan prioritas menuju Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas di Kalimantan Timur adalah sektor pertanian dan sektor perdagangan. Sektor pertanian akan menjadi salah satu alternatif sumber pertumbuhan baru, meskipun perannya masih kecil jika dibandingkan sektor pertambangan dan penggalian serta industri pengolahan. Namun, jika melihat *long term* dan potensi wilayah di Kalimantan Timur, sektor ini mempunyai nilai strategis terutama dalam perdagangan domestik. Tahun 2021 sektor pertanian diharapkan mampu memberikan kontribusi sebesar 7,70 persen terhadap perekonomian Kalimantan Timur, tentunya perlu didukung dengan pelaksanaan program Pengembangan Produksi Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan, Pengembangan Kawasan dan Usaha Pertanian, Perikanan dan Peternakan, dalam mendukung peningkatan produktivitas produk pertanian, perikanan dan peternakan.

Pada sektor perdagangan dianggap memiliki potensi sebagai salah satu alternatif pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur karena dianggap mampu bertahan ditengah kontraksi ekonomi global. Disamping itu, menurut catatan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur sektor ini merupakan usaha yang paling banyak digeluti oleh masyarakat. Pada tahun 2021 sektor perdagangan diharapkan mampu memberikan kontribusi sebesar 5,47 persen terhadap perekonomian Kalimantan Timur. Hal ini sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi terutama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkualitas dan relevansi terhadap pengembangan ekonomi kerakyatan.

2. Strategi Pertumbuhan

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur diharapkan mampu menjadi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Dimana, pertumbuhan positif memberikan banyak dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur.

- 1) **Pengembangan Kawasan-Kawasan Strategis** guna mempercepat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang akan berbasis pada sektor-sektor unggulan masing-masing. Dimana didalam mendukung proses pengembangan sekaligus akan dilakukan peningkatan kapasitas SDM

(pendidikan vokasi dan menengah) dan kemudahan berusaha dan insentif investasi. Hal ini dalam rangka menyiapkan tenaga kerja yang siap pakai dan berkualifikasi serta untuk mendorong investasi dalam negeri. Sehingga penciptaan nilai tambah dari kawasan strategis untuk menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dapat terealisasi.

- 2) **Penguatan Daya Saing Infrastruktur Dasar** di Kalimantan Timur mencakup konektivitas, energi, dan air baku. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung konektivitas sentra produksi Kawasan Industri dan Outlet serta penyediaan sarana dan prasarana dasar pendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Pemenuhan kebutuhan energi dan air baku sebagai bagian dari mendukung pengembangan kawasan strategis dalam beroperasi terutama untuk meningkatkan produktivitasnya.

3. Strategi Pemerataan

Mempercepat pengurangan kesenjangan (antar individu dan antar wilayah) melalui peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar dengan mendorong sektor-sektor berbasis ekonomi kerakyatan terutama di daerah 3T.

3.1. Kerangka Keuangan Daerah

3.1.1. Penerimaan Daerah

Penerimaan daerah pada Tahun 2021 dihitung dengan asumsi sebagai berikut :

1. Pendapatan asli daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta prakiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah;
2. Dana perimbangan berupa bagi hasil pajak/bukan pajak dihitung dengan memperhatikan potensi masing-masing jenis pajak. Sedangkan DAU dan DAK mengalami peningkatan;
3. Lain-lain pendapatan yang sah sementara diperhitungkan pada sumber-sumber pendapatan yang dapat dipastikan.

Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah di Kalimantan Timur, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan system informasi data mengenai objek wajib pajak, manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku;
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui peningkatan dan *perluasan* obyek, intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal;
3. Pendayagunaan asset daerah;
4. Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya; dan

5. Mengadakan peninjauan kembali (annual-review) atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.

Selanjutnya, dalam rangka pencapaian target penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun 2021, beberapa kegiatan Intensifikasi yang dilakukan, antara lain:

1. Bidang Pajak Daerah

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan kebijakan:
 - a. Membangun Layanan Publik berbasis IT melalui *system online* se-Kalimantan Timur, khususnya pembayaran PKB pada kantor bersama Samsat.
 - b. Menyediakan sarana mobilitas Samsat Jelajah.
 - c. Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor dengan tarif Progresif sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
 - d. Melakukan intensifikasi dan pemutakhiran data Kendaraan Bermotor pada PDE Dispenda.
 - e. Melakukan Kegiatan operasional/razia lapangan pendataan di seluruh Kab/Kota se-Kalimantan Timur.
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dengan kebijakan:
 - a. Kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi tentang perekonomian khususnya fiskal terkait kendaraan bermotor dan suku cadang serta pembiayaan, sehingga dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk membeli kendaraan baru.
 - b. Hasil evaluasi perkembangan potensi obyek pajak dan hasil evaluasi realisasi penerimaan tahun sebelumnya dan tahun berjalan mengalami perbaikan.
 - c. Kecenderungan masyarakat Kaltim membeli kendaraan Low Cost Green Car (LCGC) baru yang harganya lebih terjangkau.
 - d. Semakin banyaknya layanan transportasi berbasis Online juga berkontribusi besar dengan semakin meningkatnya permintaan masyarakat terhadap kendaraan Roda 4 dan 2 di tahun 2021.
 - e. Perusahaan leasing lebih selektif memilih calon pembeli yang lebih produktif.
 - f. Pertumbuhan ekonomi Kaltim yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro pada Tahun 2021 diperkirakan akan stagnan sehingga berpengaruh terhadap penerimaan di sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
 - g. Mengintensifikasikan penelitian persyaratan untuk menjaring BBN II terhadap kendaraan yang sudah dipindahtangankan.
 - h. Melakukan sosialisasi secara berkelanjutan terhadap penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah kepada para dealer dan agen tunggal pemegang merk termasuk badan leasing.

- i. Melakukan kegiatan penagihan dan pendataan terhadap perusahaan pengguna alat berat/besar yang beroperasi di Kalimantan Timur.
 - j. Membangun Layanan Publik berbasis IT melalui sistem online se-Kalimantan Timur, khususnya pembayaran PKB pada kantor bersama Samsat.
 - k. Melakukan intensifikasi dan pemutakhiran data Kendaraan Bermotor pada PDE Dispenda.
 - l. Melakukan kegiatan operasional/razia lapangan pendataan diseluruh Kab/Kota se-Kalimantan Timur.
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dengan kebijakan:
- a. Memberlakukan tarif tunggal sebesar 7,5 persen secara penuh sesuai Perda Nomor 01 Tahun 2011.
 - b. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat (BPH-Migas, Kemendagri & Kemenkeu) terhadap penyaluran BBM di Kalimantan Timur.
 - c. Menginstruksikan kepada seluruh penyedia BBM yang beroperasi di Kalimantan Timur wajib untuk memiliki izin wajib pungut (WAPU) yang dikeluarkan oleh Gubernur Kalimantan Timur.
 - d. Melakukan audit terhadap seluruh penyedia BBM atas penjualan BBM yang membayar PBBKB.
 - e. Melakukan kegiatan pendataan dan pemberian nomor NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) bagi setiap agen penjualan BBM.
 - f. Melakukan sosialisasi terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan yang berlaku kepada seluruh penyedia BBM secara berkala, termasuk melakukan rekonsiliasi penilaian dan penjualan BBM di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
- 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, dengan kebijakan:
- a. Berkoordinasi dengan pihak Dinas Pertambangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - b. Melakukan kegiatan operasional terpadu secara berkala setiap triwulan.
 - c. Mengaktifkan tim intensifikasi pada tingkat Kabupaten/Kota.
2. **Bidang Retribusi Daerah**, dengan kebijakan:
- 1) Merumuskan seluruh kebijakan yang menjadi dasar pungutan.
 - 2) Mengadakan monitoring dan bimbingan teknis pungutan dalam setiap penyetoran.
 - 3) Memberikan kebijakan yang menyangkut kepentingan publik dalam rangka penertiban pungutan.
 - 4) Melaksanakan koordinasi dan evaluasi atas pungutan bidang Retribusi Daerah dengan instansi.
 - 5) Melakukan sosialisasi pungutan Retribusi Daerah secara terpadu dengan instansi terkait.

- 6) Memotivasi Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana senantiasa meningkatkan pelayanan yang memberikan kontribusi peningkatan Penerimaan Asli Daerah.

Gambaran mengenai perkembangan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur selama kurun waktu tahun 2019 s/d proyeksi Tahun 2021 dapat dilihat pada table berikut dimana perkembangan pendapatan daerah secara umum dapat dilihat. Dari tahun 2015 hingga 2017 rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah mengalami penurunan -5,31%. Ini menunjukkan turunnya pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Lain-Lain PAD Yang Sah.

Tabel 3.2.
Realisasi dan Target Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 s/d Tahun 2021

No.	Uraian	2019	2020	2021
1.1	Pendapatan Asli Daerah	5.452.964.353.550	6.362.974.720.000	6.860.538.503.000
1.1.1	Pajak Daerah	4.420.000.000.000	5.236.700.000.000	5.644.829.000.000
1.1.2	Retribusi Daerah	28.616.725.000	33.239.185.000	22.489.341.200
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	224.523.866.374	227.111.724.398	347.869.891.338
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	779.823.762.176	865.923.810.602	845.350.270.462
1.2	Dana Perimbangan	5.059.832.628.500	5.159.079.507.000	5.273.955.507.000
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan pajak	3.038.477.121.500	3.137.724.000.000	3.252.600.000.000
1.2.2	DAU	815.693.641.000	815.693.641.000	815.693.641.000
1.2.3	DAK	1.205.661.866.000	1.205.661.866.000	1.205.661.866.000
1.2.4	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-	-
1.3	Lain-Lain PD yang sah	36.827.031.200	12.420.000.000	12,607,000,000
1.3.1	Pendapatan Hibah	12.272.000.000	12.420.000.000	12,607,000,000
1.3.2	Dana Penyesuaian	-	-	-
1.3.3	Bantuan Keuangan dari Provinsi Pemerintah Daerah Lainnya	14.671.639.200	-	-
Jumlah Pendapatan Daerah		8.154.749.005.918	10.549.624.013.250	12.147.101.010.000

3.1.2. Belanja Wajib dan Mengikat Daerah

Tabel 3.3.
Pengeluaran Wajib dan Mengikat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

NO	URAIAN BELANJA WAJIB MENGIKAT	PROYEKSI TAHUN 2021
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.526.656.978.075
1	Belanja Pegawai (Gaji & Tunjangan)	2.287.901.347.514
2	Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota Tahun 2021	3.019.125.291.000
3	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota dan Partai Politik	453.911.451.161
4	Belanja Hibah :	730.944.338.400
5	Belanja Bansos	9.774.550.000
6	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000

NO	URAIAN BELANJA WAJIB MENGIKAT	PROYEKSI TAHUN 2021
II	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-
1	Pembayaran Pokok Utang	-
2	Pembentukan Dana Cadangan	-
TOTAL BELANJA WAJIB & MENGIKAT		6.526.656.978.075

3.1.3. Kapasitas Riil Keuangan Daerah

Rencana pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2021 dilakukan dengan mengacu pada potensi dan obyek pendapatan, baik yang bersumber dari PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Perencanaan tersebut merupakan perkiraan yang terukur secara rasional serta memiliki kepastian dan dasar hukum penerimaannya. Pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Timur pada anggaran pendapatan tahun 2020 sangat bergantung dengan kondisi perekonomian Nasional, daerah, regional maupun lokal, serta ekonomi global yang saat ini sedang terjadi keguncangan perekonomian dan cukup berefek pada skala internasional.

Dalam jangka panjang, pembangunan Kalimantan Timur berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan dari dana perimbangan, terutama yang bersumber dari Bagi Hasil Bukan Pajak yang diperoleh dari bagi hasil minyak dan gas alam dan royalti dari sektor pertambangan umum, sedangkan Pendapatan Asli Daerah mengandalkan pada Pajak Daerah, terutama melalui kebijakan pengembangan lapangan usaha dan kesempatan kerja yang seluas-luasnya pada sektor-sektor potensial. Seiring dengan peningkatan pendapatan penduduk, pemerintah juga melakukan penataan pelayanan dan perluasan obyek pajak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap mempertimbangkan suasana kondusif untuk mendukung berkembangnya investasi di Kalimantan Timur.

Berdasarkan data proyeksi pendapatan dan proyeksi data belanja wajib dan mengikat, dapat disusun kapasitas riil keuangan daerah pada tahun 2021 seperti tabel berikut:

Tabel 3.4.
Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

NO	URAIAN	PROYEKSI TAHUN 2021
1	Pendapatan	12.147.101.010.000
2	Pencairan Dana Cadangan	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	-
	Total Penerimaan	12.147.101.010.000
Dikurangi		
4	Belanja Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat	6.526.656.978.075
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan		6.815.561.109.407 1

3.1.4. Belanja Daerah

Dengan ruang fiskal daerah yang semakin terbatas diperlukan penajaman peranan kebijakan fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2021. Pada RKPD 2021 komponen konsumsi pemerintah terhadap PDRB Kalimantan Timur diharapkan dapat berkontribusi sebesar 4,99%. Berdasarkan tema pembangunan RKPD tahun 2021, arah kebijakan belanja difokuskan untuk mendukung kegiatan produktif guna pengembangan kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi & infrastruktur wilayah yang mendukung nilai tambah ekonomi. Untuk dapat mencapai target tersebut maka arah kebijakan belanja daerah diarahkan pada :

- (1) Meningkatkan belanja produktif seperti belanja Pendidikan, kesehatan, pertanian dan pembangunan infrastruktur mendukung konektivitas antar daerah. Pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan, perumahan, sanitasi dan air bersih;
- (2) Meningkatkan efisiensi dan penajaman belanja non-operasional utamanya pada belanja barang untuk meningkatkan ruang fiskal;
- (3) Meningkatkan kualitas dan efektivitas program perlindungan sosial terutama meningkatkan akses pendidikan dan mutu layanan kesehatan khususnya bagi masyarakat miskin;
- (4) Terkait aparatur negara kebijakan belanja negara diarahkan untuk menjaga kesejahteraan aparatur pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik;
- (5) Transfer ke kabupaten/kota dan Dana Bantuan Keuangan kepada kabupaten/kota. diarahkan meningkatkan kualitas layanan publik (SPM) di daerah, menciptakan kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan antar daerah.

Proyeksi belanja daerah digunakan untuk memperkirakan segala kebutuhan belanja daerah terkait pelaksanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur. Berikut penetapan APBD 2020 dan proyeksi 2021 Provinsi Kalimantan Timur:

Tabel 3.5.
APBD Tahun 2019 dan Target Belanja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

NO	Uraian	2019	2020	2021
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.526.656.978.075	6.426.656.978.076	6.526.656.978.075
2.1.1	Belanja Pegawai	1.774.799.167.283	2.187.901.347.513	2.287.901.347.514
2.1.2	Belanja Hibah	765.270.838.400	820.534.954.662	730.944.338.400
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	9.774.550.000	9.774.550.000	9.774.550.000
2.1.4	Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.579.253.034.454	2.977.391.300.000	3.019.125.291.000
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota	1.372.559.387.938	406.054.825.900	453.911.451.161

NO	Uraian	2019	2020	2021
	dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik			
2.1.6	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000
2.2	BELANJA LANGSUNG	4.143.013.021.925	5.007.817.248.925	5.620.444.031.925
2.2.1	Belanja Pegawai	292.637.422.329	449.172.979.451	396.994.227.424
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.419.924.279.524	2.794.712.174.887	3.282.888.299.550
2.2.3	Belanja Modal	1.430.451.320.072	1.763.932.094.587	1.940.561.504.951
Total Jumlah Belanja		8.239.667.069.093	10.696.670.000.000	12.147.101.010.000

3.1.5. Pembiayaan Daerah

Tabel 3.6.
APBD Tahun 2020 dan Proyeksi Pembiayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

NO	Uraian	2019	2020	2021
3	PEMBIAYAAN	120.045.986.750	(100.000.000.000)	0
3.1	Penerimaan Pembiayaan	220.045.986.750	0	0
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000.000	100.000.000.000	0

Dalam rangka mempercepat peran pemerintah dalam menstimulasi pertumbuhan ekonomi di daerah. Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya dalam menggali sumber-sumber pembiayaan yang sesuai dengan potensi daerah yang ada demi tercapainya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Peningkatan sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah dilakukan dengan cara mengoptimalkan dan mengintegrasikan sumber pembiayaan pembangunan yang bersumber dari BUMD, Swasta, maupun masyarakat.

Sejalan dengan kebijakan pendapatan dan belanja daerah. arah kebijakan pembiayaan tahun 2021 diarahkan pada:

- (1) investasi pemerintah melalui penyertaan modal kepada BUMD diutamakan untuk meningkatkan sumber penerimaan daerah kepada BUMD yang memiliki kinerja yang baik;
- (2) membuka akses pembiayaan pembangunan dan investasi bagi masyarakat secara lebih luas.
- (3) pengembangan pembiayaan yang kreatif dan inovatif untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU;
- (4) Optimalisasi dan integrasi sumber pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) untuk mendukung pencapaian target-target program prioritas Kalimantan Timur. Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) adalah upaya dalam rangka



mendorong peningkatan perekonomian, pendidikan, sosial budaya, kesehatan dan lingkungan kehidupan masyarakat.

BAB 4

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

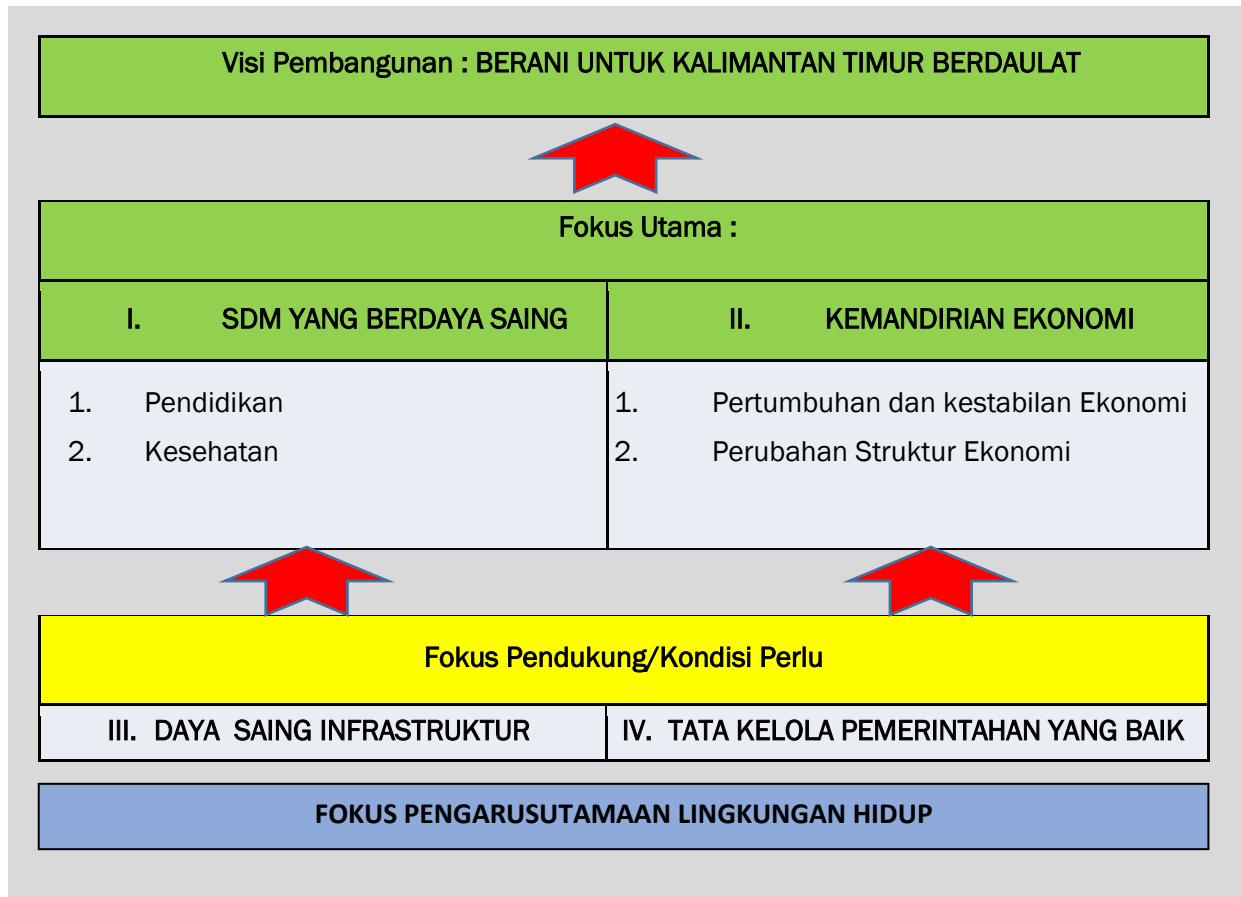
4.1.1 Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

Sesuai dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, maka RKPD tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan pelaksanaan rencana pembangunan tahun ketiga RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan pembangunan, maka penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Adapun Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 adalah **“Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat”**. Visi pembangunan tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam misi pembangunan dalam lima tahun mendatang sebagai berikut:

1. Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;
3. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan;
4. Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

Secara grafis, kerangka kebijakan pembangunan Kalimantan Timur tahun 2019-2023 dapat di lihat seperti pada gambar berikut :

Gambar 4.1
Pola Hubungan Antara Fokus Utama Pembangunan RPJMD Kalimantan Timur
Tahun 2019-2023



Berdasarkan misi di atas, maka disusunlah tujuan dan sasaran pembangunan yang menjadi pedoman penyusunan sasaran dan prioritas pembangunan daerah pada rencana tahunan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Misi, Tujuan, Sasaran dan Target Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur

Tujuan	Sasaran
MISI 1 : BERDAULAT DALAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERAKHLAK MULIA TERUTAMA PEREMPUAN DAN PENYANDANG DISABILITAS	
Tujuan 1 : Mewujudkan Masyarakat yang berkarakter berakhlak mulia dan berdaya saing	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai budaya dan keagamaan di Masyarakat
	Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat
	Meningkatnya kesehatan dan gizi masyarakat
Tujuan 2 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan
	Meningkatnya kewirausahaan dan prestasi pemuda

Tujuan	Sasaran
	Meningkatnya daya saing tenaga kerja
MISI 2 : BERDAULAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI WILAYAH DAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERKEADILAN	
Tujuan 3 : Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM
	Meningkatnya keberdayaan Masyarakat Perdesaan
	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah
Tujuan 4 : Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan	Meningkatnya kontribusi sektor perindustrian dalam perekonomian daerah
	Meningkatnya realisasi investasi
	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap ekonomi daerah
	Meningkatnya kontribusi sektor peternakan terhadap ekonomi daerah
	Meningkatnya kontribusi sektor perkebunan terhadap ekonomi daerah
	Meningkatnya kontribusi sektor perikanan terhadap ekonomi daerah
	Meningkatnya kontribusi sektor kehutanan terhadap ekonomi daerah
	Meningkatnya pendanaan pembangunan daerah
MISI 3 : BERDAULAT DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	
Tujuan 5 : Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar	Meningkatnya aksesibilitas wilayah
	Meningkatnya konektivitas antar kawasan
	Meningkatnya fungsi pelayanan infrastruktur sumber daya air
	Menurunnya kawasan kumuh
	Terpenuhinya kebutuhan energi daerah
MISI 4 : BERDAULAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN	
Tujuan 6 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
	Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang
MISI 5 : BERDAULAT DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG BERSIH, PROFESIONAL DAN BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK	
Tujuan 7 : Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik	Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien
	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas
	Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021

4.2.1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional

Dalam menyusun RKPDP Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021, disamping harus mempedomani dokumen perencanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 juga memperhatikan dokumen perencanaan tahunan nasional (RKP) tahun 2021 yang

mengusung Tema “Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagai Wilayah Didukung oleh SDM, dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”.

Tema/fokus pembangunan Nasional pada tahun 2021, dijabarkan dengan Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2021 sebagai berikut:

- Prioritas 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.**
- Prioritas 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.**
- Prioritas 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.**
- Prioritas 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.**
- Prioritas 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.**
- Prioritas 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim**
- Prioritas 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.**

Adapun prioritas pembangunan wilayah Kalimantan dalam RKP tahun 2021 antarlain :

1. Hilirisasi perkebunan sawit, serta pertambangan nikel dan batubara
2. Pembangunan jalan rel kereta api Kalimantan
3. Pengembangan kawasan industri terpadu pelabuhan Kijing
4. Penyiapan pemindahan IKN
5. Pembangunan Kawasan Perdesaan, Perbatasan, dan Kawasan Pariwisata.

Selanjutnya besaran target pembangunan Kalimantan Timur pada RKP 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Target RKP Tahun 2021 di Kalimantan Timur

No	Sasaran	Target	
		2020	2021
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,80	6,70
2	Tingkat Kemiskinan (%)	5,58	5,25
3	Tingkat Pengangguran (%)	6,20	6,00

Penetapan target makro Kalimantan Timur dalam RKP 2021 sangatlah optimis, terutama didorong oleh adanya pengembangan komoditas unggulan seperti sawit, karet, lada, pala, cengkeh, kelapa, perikanan tangkap, perikanan budidaya minyak dan gas bumi serta batubara. Serta dorongan untuk melakukan hilirisasi komoditas pertanian, perkebunan dan pertambangan. Ditambah lagi kaitannya dengan proses pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur.

4.2.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan RKPD Kalimantan Timur Tahun 2021

Dengan memperhatikan hasil analisa terhadap arah kebijakan RPJMD Kalimantan Timur tahun 2019-2023, arah kebijakan RKP tahun 2021 serta permasalahan, tantangan dan peluang pembangunan tahun 2021, maka tema RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 adalah:

“Menumbuhkan Industri Hilir yang Mendukung Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kawasan”

Tema tersebut merupakan arah kebijakan pembangunan tahunan yang dirumuskan pada RPJMD dan merupakan strategi tahun kedua untuk mewujudkan Visi RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yaitu **“Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat”**. Tema RKPD tahun 2021 merupakan arah kebijakan pembangunan yang merupakan tindak lanjut dari tema tahun sebelumnya, dimana berdasarkan evaluasi capaian kinerja RPJMD periode sebelumnya menunjukkan bahwa setelah Aspek Daya Saing Investasi dibenahi, maka pembangunan di fokuskan pada penumbuhan hilirisasi industri. Semua kata kunci dalam tema RKPD Provinsi Kalimantan Timur merupakan focus pembangunan yang diarahkan pada hilirisasi industri yang mendukung penguatan ekonomi kerakyatan dan berdampak pada ekonomi kawasan. Namun dalam perumusan prioritas pembangunan daerah, aspek kesejahteraan masyarakat selalu menjadi pertimbangan utama.

Alur Pikir dalam perumusan Tema dan Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 4.2
Kerangka Pikir Perumusan Prioritas RKPD Kalimantan Timur Tahun 2021



Prioritas pembangunan Kalimantan Timur tahun 2021 disusun berdasarkan analisis terhadap permasalahan pembangunan dan tujuan pembangunan pada interpretasi/arahan tujuan pembangunan jangka menengah tahun 2019-2023. Prioritas Pembangunan pada RKPD merupakan Prioritas Pembangunan yang bersifat Tematik yang ditujukan pada pencapaian menjadi sasaran utama pada tema RKPD 2021. Sesuai dengan Tema RKPD 2021, ***“Menumbuhkan Industri Hilir yang Mendukung Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kawasan”***, maka kata kunci pada tema tersebut adalah **Industri Hilir, Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kawasan**. Dengan memahami permasalahan pada lambannya transformasi ekonomi di Kaltim maka Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 adalah :

1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan tenaga kerja;
2. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk komoditi unggulan daerah;
3. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, penataan perizinan dan pengendalian investasi;
4. Penguatan konektivitas dan pemerataan pelayanan infrastruktur dasar;
5. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang;

6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021
“Menumbuhkan Industri Hilir yang Mendukung Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kawasan”

Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2021
Tujuan 1 : Mewujudkan Masyarakat yang berkarakter berakhlak mulia dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,56
Meningkatnya pengamalan nilai-nilai budaya dan keagamaan di Masyarakat	Indeks Demokrasi Indonesia	75,5
Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	9,60
	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,34
Meningkatnya kesehatan dan gizi masyarakat	Usia Harapan Hidup (Tahun)	73,76
Tujuan 2 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan (%)	5,87
Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (%)	56,72
Meningkatnya kewirausahaan dan prestasi pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	57,82
Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Persentase Penempatan Tenaga Kerja (%)	0,53
Tujuan 3 : Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,5±1
Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM	Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)	4,70
Meningkatnya keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal (desa)	448
Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	0,99
Tujuan 4 : Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi non migas dan Non Batubara (%)	6±1
Meningkatnya kontribusi sektor perindustrian dalam perekonomian daerah	Kontribusi lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB (%)	20
Meningkatnya realisasi investasi	Nilai realisasi investasi (Rp Triliun)	34,73
Meningkatnya kontribusi sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap ekonomi daerah	Kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB (%)	0,55
	Rasio Pemenuhan Beras (%)	79,94
Meningkatnya kontribusi sektor peternakan terhadap ekonomi daerah	Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	0,35

Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2021
Meningkatnya kontribusi sektor perkebunan terhadap ekonomi daerah	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	5,7
Meningkatnya kontribusi sektor perikanan terhadap ekonomi daerah	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)	1,55
Meningkatnya kontribusi sektor kehutanan terhadap ekonomi daerah	Kontribusi lapangan usaha sub sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	1,1
Meningkatnya pendanaan pembangunan daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah (%)	3,84
Tujuan 5 : Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar	Indeks Gini	0,328
Meningkatnya aksesibilitas wilayah	Jumlah penumpang yang terlayani (orang)	11.536.200
	Jumlah barang (ton)	355.200.000
Meningkatnya konektivitas antar kawasan	Jumlah kawasan strategis provinsi yang terhubung dengan kawasan sentra produksi (kawasan)	3
Meningkatnya fungsi pelayanan infrastruktur sumber daya air	Cakupan layanan air minum (%)	77,00
	Luas lahan pertanian yang beririgasi (Ha)	15.558,5
	Luas genangan banjir perkotaan (Ha)	505
Menurunnya kawasan kumuh	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	459,56
Terpenuhinya kebutuhan energi daerah	Rasio elektrifikasi (%)	89,50
Tujuan 6 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,95
Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persentase penurunan emisi dari BAU (%)	27,75
Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	Indeks Resiko Bencana	135
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	75,09
Tujuan 7 : Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	B (71,50)
Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	Nilai Akuntabilitas Kinerja	78,50
Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Skor Kepuasan Masyarakat (SKM)	82
Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Pemda	Level 3

Selanjutnya, sasaran pembangunan dan arah kebijakan sektoral akan disajikan dalam masing-masing prioritas pembangunan yang terkait. Strategi dan arah kebijakan pada tabel berikut merupakan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran pembangunan pada RKPD tahun 2021 yang tersusun sebagai berikut :

Tabel 4.2
Sasaran, Strategi, Arah kebijakan Pembangunan dan Program Prioritas
RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program		Indikator Program	Target
1. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai budaya dan keagamaan di Masyarakat	Memperkokoh ketahanan budaya dan peningkatan kondusivitas masyarakat	1) Pengembangan Demokrasi di Daerah	1	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase penggunaan hak-hak politik masyarakat (%)	70
		2) Peningkatan pengamalan nilai-nilai agama dan nilai budaya dalam kurikulum pendidikan sebagai muatan lokal	2	Program Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan	Jumlah sekolah yang mengembang-kan ekstrakurikuler berbasis agama (SMA/SMK/SLB)	233
			3	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah sekolah mengembang-kan budaya lokal	233
2. Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat	Peningkatan akses dan mutu pendidikan	1) Meningkatkan kualitas layanan pendidikan vokasi/kejuruan selaras kebutuhan pasar kerja dan perkembangan teknologi dengan penguatan kemitraan swasta/industri (kurikulum, tenaga pendidik dan sarana prasarana)	4	Program Pengembangan Sekolah Kejuruan	Jumlah SMK yang bekerjasama dengan Dunia Usaha dan Industri (SMK)	70
		2) Pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang pendidikan melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan SMA/SMK/MA/SLB, dan Pengembangan SMA/SMK Negeri Terpadu (Boarding School)	5	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Murni SMA/MA	76%
			6	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Kasar SMK/MAK	76%
		3) Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui pemenuhan kualifikasi pendidikan	7	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang telah memenuhi standar kompetensi (%)	99%

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program		Indikator Program	Target
		4) Mempercepat wajib belajar 12 tahun dengan keberpihakan terhadap anak keluarga miskin, disabilitas, pekerja anak dan anak tidak sekolah melalui BOSDA dan beasiswa KALTIM TUNTAS	8	Program Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat	Penerima Beasiswa KALTIM TUNTAS yang berprestasi (orang)	19.500
		5) Penyediaan Beasiswa Pendidikan bagi Masyarakat Miskin	9	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pendidikan	Siswa SMA/SMK Miskin penerima beasiswa yang tidak putus sekolah (Siswa)	2.500
		6) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Jarak Jauh	10	Pendidikan Jarak Jauh (Distance Learning System)	Persentase sekolah yang telah menggunakan sistem pendidikan jarak jauh (%)	95%
		7) Penyediaan Sarana Prasarana Pendidikan Luar Biasa	11	Program Pendidikan Luar Biasa	Persentase pelayanan pendidikan luar biasa (%)	75
		8) Penguatan kapasitas kelembagaan tentang anak	12	Program Peningkatan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak	Persentase pemenuhan kebutuhan hak anak (%)	88%
		9) Pengembangan perpustakaan digital	13	Program Peningkatan Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan	Jumlah masyarakat yang mengakses layanan perpustakaan (on line dan on site) (orang)	5.771
		10) Pemenuhan Bahan Bacaan Perpustakaan				
3. Meningkatnya kesehatan dan gizi masyarakat	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	1) Pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan melalui pemberian tunjangan kemahalan bagi Tenaga Kesehatan yang bertugas di daerah terpencil/perbatasan (3T)	14	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Persentase fasyankes yang dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian tenaga kesehatannya	80
		2) Percepatan pemenuhan standar pelayanan minimal rumah sakit	15	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas Minimal Terakreditasi Utama (%)	64
		3) Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	16	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesehatan	Persentase Penduduk Miskin dan Kurang Mampu yang memperoleh Jaminan Pelayanan Kesehatan (%)	92
		4) Peningkatan Akses dan kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin				

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program		Indikator Program	Target
4. Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan	Optimalisasi pengarusutamaan gender	1) Peningkatan kesadaran keadilan gender di kalangan masyarakat	17	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pemberdayaan Perempuan	Persentase perempuan miskin yang memiliki usaha ekonomi produktif (UEP) (%)	43
		2) Optimalisasi lembaga layanan terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	18	Program Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan Dan Anak	Rasio KDRT	0,048
		3) Peningkatan akses dan keterampilan perempuan dalam berwirausaha	19	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesejahteraan Sosial	Jumlah Keluarga Miskin, Kelompok Rentan dan PMKS Lainnya yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (Orang)	2.500
5. Meningkatnya kewirausahaan dan prestasi pemuda dan penyandang disabilitas	Peningkatan prestasi keolahragaan dan kesempatan pemuda dan penyandang disabilitas berwirausaha	1) Optimalisasi fasilitas keolahragaan dan pengembangan insentif atlet berprestasi	20	Program Peningkatan Prestasi Olahraga	Persentase pelaku olahraga daerah yang berprestasi (%)	15.67%
		2) Pengembangan fasilitas dan pendampingan permodalan usaha pemuda dan penyandang disabilitas	21	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Persentase Penyandang Disabilitas yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas (%)	45
			22	Peningkatan Upaya Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Persentase Pemuda yang Berwirausaha (%)	1
6. Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Peningkatan kompetensi dan keterampilan angkatan kerja sesuai kebutuhan pasar kerja	1) Peningkatan pengembangan Kemitraan sertifikasi keahlian tenaga kerja	23	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Lulusan Pelatihan Yang Terserap di pasar kerja (%)	80%
7. Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM	Optimalisasi pengelolaan UKM melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan	1) Peningkatan kapasitas kelembagaan UKM dengan menumbuhkan penggunaan teknologi informasi bagi UKM serta membangun kemitraan bisnis dengan Usaha Besar melalui inkubasi bisnis	24	Program Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi dan UKM	Jumlah Koperasi yang berkualitas /Jumlah UKM Naik Kelas	100 Koperasi /200 UKM
		2) Fasilitasi pemberian bantuan modal usaha tanpa jaminan bagi UKM dengan pola kemitraan				

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Target	
		dan pendampingan				
		3) Fasilitasi pengembangan kewirausahaan dan keunggukan kompetitif UKM				
		4) Fasilitasi Kewirausahaan Pemuda dengan Penumbuhan Usaha Rintisan (<i>Startup</i>) Industri Kreatif				
		5) Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi untuk perempuan dan keluarga				
		6) Pengembangan Industri Kreatif berbasis potensi dan keunggulan daerah				
8. Meningkatnya keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Peningkatan kualitas pembangunan wilayah perdesaan secara merata	1) Peningkatan kapasitas BUMDES untuk meningkatkan ekonomi desa	25	Program Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Meningkatkan jumlah Bumdes yang aktif (Bumdes)	30
		2) Optimalisasi penggunaan dana desa untuk pembangunan desa	26	Program Pembangunan Desa dan Kawasan	Meningkatkan jumlah desa berkembang (Desa)	30
		3) Pembinaan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam membangun desa berkualitas	27	Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Jumlah desa yang mampu menjalankan pemerintahan desa secara optimal (Desa)	138
		4) Penguatan ketangguhan desa dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim	28	Program Kampung Iklim +	Jumlah kampung/desa (Desa)	25
9. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah	Penguatan aksesibilitas dan daya saing destinasi unggulan pariwisata	1) Pengembangan kualitas destinasi wisata berbasis masyarakat	29	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di fasilitasi pengembangannya (kawasan)	2 Kawasan
		2) Pemanfaatan Anjungan Kaltim di TMII sebagai pusat pelatihan ekonomi kreatif, etalase budaya dan promosi pariwisata Kaltim				
10. Meningkatnya kontribusi sektor perindustrian dalam perekonomian daerah	Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi unggulan daerah	1) Integrasi proses hulu-hilir industri pengolahan khususnya sektor pertanian, migas dan pertambangan	30	Program Peningkatan dan Pengembangan Industri	Presentase Pertumbuhan Industri Olahan (%)	1
		2) Pengembangan industri hilir pertanian dalam arti luas				

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program		Indikator Program	Target
		3) Pengembangan skala ekonomi untuk meningkatkan ekspor				
11. Meningkatnya realisasi investasi	Percepatan proses perizinan dan pengendalian rencana investasi	1) Pengembangan sistem perizinan yang terintegrasi berbasis teknologi informasi	31	Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perizinan	Waktu Penyelesaian Proses Perizinan (hari)	12
		2) Peningkatan efektivitas pengendalian rencana investasi	32	Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi	Jumlah perusahaan industri pada kawasan peruntukan industri (perusahaan industri baru)	7
12. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap ekonomi daerah	Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas sub sektor tanaman pangan dan hortikultura	1) Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan pada lahan kering	33	Program Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan	Jumlah produksi padi (Ton)	444,000
		2) Penerapan Peraturan Daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)				
		3) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Keterampilan Petani				
		4) Peningkatan pemanfaatan teknologi pengolahan produksi pertanian				
		5) Perbaikan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura	34	Program peningkatan produksi dan nilai tambah hortikultura	Jumlah produksi tanaman hortikultura (Ton)	247,698
13. Meningkatnya kontribusi sektor peternakan terhadap ekonomi daerah	Peningkatan populasi dan produktivitas ternak melalui pola kemitraan	1) Pembangunan Miniranch sapi	35	Program Pengembangan Usaha Peternakan	Jumlah Miniranch yang Teregister (unit)	40
		2) Penyediaan Informasi Peternakan				
		3) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan peternak				
		4) Fasilitasi Penyediaan Permodalan bagi Peternak	36	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan	Angka Kelahiran Sapi (%)	20,5
		5) Peningkatan produksi bibit dan benih ternak berkualitas melalui UPSUS SIWAB				
14. Meningkatnya kontribusi sektor	Peningkatan produksi dan nilai tambah	1) Peningkatan produktivitas komoditi perkebunan unggulan	37	Program Peningkatan Produksi	Produksi Komoditi Perkebunan (Ton)	17.136.849

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		Program	Indikator Program	Target	
perkebunan terhadap ekonomi daerah	komoditas sub sektor perkebunan secara berkelanjutan			Perkebunan			
		2) Pengembangan Kebun Rakyat di lahan cadangan carbon rendah melalui kemitraan	38	Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) (Perusahaan)	35	
		3) Peningkatan kemitraan antara petani swadaya dengan industri hilir	39	4) Peningkatan nilai tambah dan stabilitas harga di tingkat petani	Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Jumlah Produk Perkebunan yang bersertifikat SNI (Produk)	2
		5) Pengelolaan areal perkebunan yang bernilai konservasi tinggi					
		6) Peningkatan pemanfaatan limbah biomassa Perkebunan	40	7) Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan	Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Perkebunan	Jumlah Penurunan Emisi Sektor Perkebunan (Juta Ton CO2eq)	4,07
		15. Meningkatnya kontribusi sektor perikanan terhadap ekonomi daerah	Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas sub sektor perikanan secara berkelanjutan	1) Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Usaha Bidang Perikanan	41	Program Pengembangan Produksi Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)
2) Peningkatan Sarana Prasarana Perbenihan dan Produksi Perikanan	42			Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	158.938 Ton	
3) Perlindungan dan pengelolaan zona konservasi kelautan dan perikanan	43			Program Peningkatan Penyediaan Benih Ikan dan Udang Unggulan	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih (ekor)	2,8 Miliar Ekor	
	44			Program Pengelolaan Ruang Laut	Jumlah kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif (Kawasan)	1 Kawasan	
16. Meningkatnya kontribusi sektor kehutanan terhadap ekonomi daerah	Pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan	1) Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas sub sektor kehutanan	45	Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Realisasi penerimaan PNPB sektor kehutanan (Rp. Miliar)	170	
		2) Mengurangi laju deforestasi melalui perlindungan dan pengamanan kawasan hutan	46	Program Perlindungan dan KSDAE	Persentase kerusakan hutan di dalam kawasan hutan (%)	≤1,5	
		3) Pemulihan kawasan hutan yang terdeforestasi	47	Program Pengelolaan DAS	Persentasenya meningkatnya	1398	

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program		Indikator Program	Target
		dan degradasi		dan RHL	tutupan lahan (%)	
		4) Pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat di sekitar hutan	48	Program Penyuluhan, pemberayaan masyarakat hutan dan perhutanan sosial	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat (Ha)	32.000
17. Meningkatnya pendanaan pembangunan daerah	Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah	1) Peningkatan pengawasan sumber-sumber penerimaan daerah dari hasil pengelolaan sumber daya alam	49	Program Perencanaan dan pengembangan Sumber Pendapatan Daerah	Jumlah objek/sumber pendapatan baru	6
18. Meningkatnya aksesibilitas wilayah	Peningkatan fungsi pelayanan infrastruktur dasar perhubungan	1) Optimalisasi pengadaan infrastruktur perhubungan, khususnya infrastruktur pelayanan	50	Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut dan SDP	Jumlah dan kapasitas prasarana perhubungan laut dan SDP (Unit/%)	11 Dermaga SDP - 12 Pelabuhan Laut (85%)
		2) Peningkatan keterhubungan daerah terpencil dengan infrastruktur dan pelayanan dasar kehidupan masyarakat				
		3) Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	51	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas (Kasus)	512
19. Meningkatnya konektivitas antar kawasan	Penguatan konektivitas antar daerah dan kawasan	1) Peningkatan keterhubungan daerah-daerah yang memiliki pertumbuhan signifikan	52	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Tingkat kemandapan jalan provinsi (%)	63,46
		2) Peningkatan keterhubungan sentra-sentra produksi (hinterland) dan daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan daerah				
		3) Peningkatan aksesibilitas ke kawasan strategis pariwisata nasional dan provinsi				
20. Meningkatnya fungsi pelayanan infrastruktur sumber daya air	Peningkatan sarana dan prasarana dan distribusi air bersih	1) Peningkatan infrastruktur pengolahan dan distribusi air baku	53	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kapasitas Air Baku (L/detik)	8.622
		2) Peningkatan infrastruktur layanan air minum	54	Program Pembangunan Infrastruktur Keciptakarya	Cakupan layanan Air Minum Perpipa (%)	67,23
21. Menurunnya kawasan kumuh	Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni	1) Pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi keluarga pra sejahtera pada kawasan kumuh	55	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	36.722

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program		Indikator Program	Target
		2) Pembinaan dan pendampingan dalam penerapan sanitasi sehat				
22. Terpenuhiya kebutuhan energi daerah	Peningkatan Akses ketenagalistrikan dan penggunaan energi berbasis potensi lokal	1) Peningkatan ketersediaan daya dan jaringan energi listrik serta Energi Baru Terbarukan (EBT)	56	Program Diversifikasi & Konservasi Energi	Persentase pemanfaatan EBT (%)	4,13
			57	Program Pengembangan Ketenagalistrikan	Jumlah KK Berlistrik (KK)	1.018.607
23. Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Peningkatan Kualitas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1) Peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta daya dukung dan daya tampung lingkungan	58	Program Tata Lingkungan	Jumlah aksi mitigasi perubahan iklim yang diinventarisasi dan di PEP kan (aksi)	6000
		2) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	59	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Pencemaran Lingkungan	Tercemar sedang (8)
24. Meningkatkan Ketangguhan Menghadapi Bencana	Meningkatkan kapasitas daerah dalam mengurangi risiko bencana	1) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana	60	Program Pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase desa/kelurahan tangguh bencana (%)	50 Persen
			61	Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	Persentase Peningkatan Responsif Mandiri Daerah dalam Penanganan Bencana (%)	89 Persen
25. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang	1) Peningkatan kualitas dokumen rencana tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang	62	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian RTRW Provinsi dengan RTRW Kabupaten/Kota (%)	77,19
26. Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	Peningkatan Tata Kelola dan Kapasitas Pemerintah Daerah	1) Peningkatan kapasitas dan manajemen aparatur	63	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah yang memperoleh predikat minimal B (Baik) (%)	77
		2) Penataan pola hubungan kerjasama pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota	64	Program Penguatan Kelembagaan	Persentase PD yang dibentuk sesuai dengan norma, standar prosedur dan kriteria (%)	92
			65	Program Perencanaan Pembangunan	Persentase program kegiatan dalam dokumen	90

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program		Indikator Program	Target
27. Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel				Daerah	perencanaan yang dilaksanakan melalui dokumen anggaran	
		1) Peningkatan Integritas Pemerintah Daerah	66	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan survey kepuasan masyarakat (SKM) sesuai standar (%)	71
		2) Meningkatnya kapabilitas APIP	67	Program Tata Laksana Pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun SOP sesuai ketentuan/aturan (%)	78,95
			68	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Level kapasitas APIP	3
28. Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Peningkatan efisiensi di berbagai pelayanan publik berbasis elektronik/ teknologi informasi	1) Peningkatan tatakelola pemerintah yang baik	69	Program Pencegahan KKN	Hasil Penilaian Integritas	75
		2) Peningkatan kualitas komunikasi dan teknologi informasi	70	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3

BAB 5

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

5.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten/Kota

Dengan mempertimbangkan sinkronisasi dan sinergi Rencana Tata Ruang Wilayah dan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur, strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah kabupaten/kota diarahkan untuk mendukung : (1) Penguatan konektivitas antar kawasan ekonomi dan pemerataan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang terpadu di seluruh wilayah; (2) Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk komoditi unggulan daerah; (3) Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; serta (4) Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.

Sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021, maka pengembangan kabupaten/kota akan ditujukan pada pembangunan industri hilir guna mendukung ekonomi kerakyatan dan ekonomi kawasan. Peningkatan nilai tambah ekonomi pada tiap kabupaten/kota diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota pada tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif diharapkan dapat terjadi melalui penguatan rantai nilai ekonomi sektor-sektor yang menjadi potensi/unggulan dari masing-masing kabupaten/kota serta lancarnya konektivitas kegiatan ekonomi antar wilayah. Peningkatan rantai nilai dan konektivitas ekonomi antar wilayah tersebut dilakukan dapat diwujudkan dengan rencana pengembangan kawasan-kawasan strategis di masing-masing kabupaten/kota yang telah/diproyeksikan menjadi pendorong pertumbuhan utama pengembangan wilayah. Selain itu, penuntasan permasalahan-permasalahan utama seperti terbatasnya ketersediaan infrastruktur dasar serta penanganan bencana juga menjadi pekerjaan yang perlu diselesaikan guna mewujudkan pembangunan wilayah yang berkualitas.

Kebijakan pembangunan daerah masih difokuskan pada peningkatan daya tarik investasi sektor industri serta sektor turunannya melalui penyediaan dan peningkatan infrastruktur pendukung serta kemudahan berusaha. Kebijakan yang dilakukan salah satunya dengan mendorong akselerasi pembangunan infrastruktur serta mendorong percepatan realisasi investasi di Kawasan Ekonomi Khusus MBTK dan Kawasan Industri Kariangau-Buluminung. Optimasi pengembangan kawasan industri ini diharapkan dapat memberikan

dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah-wilayah disekitarnya, utamanya pada wilayah yang menyediakan bahan baku industri atau pengguna hasil industri. Untuk itu, diperlukan jaringan konektivitas wilayah yang berkualitas guna mendukung penguatan rantai nilai ekonomi tersebut. Selain itu, guna memperkuat dampak bangkitan ekonomi di daerah, juga diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar mampu masuk kedalam pasar kerja industri, sehingga kebutuhan tenaga kerja dapat sebagian besar diserap dari masyarakat lokal Kalimantan Timur. Tidak hanya di 2 (dua) kawasan tersebut, konsep pembangunan kewilayahan ini dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota dengan memperhatikan permasalahan utama pembangunan, target-target pembangunan daerah, serta sektor/lapangan usaha potensial di masing-masing kabupaten/kota.

Tabel 5.1.
Target Pertumbuhan Ekonomi dan Arah Kebijakan
Kabupaten/Kota Tahun 2021

NO	KABUPATEN/KOTA	TARGET PERT. EKONOMI TAHUN 2021 (%)	ARAH KEBIJAKAN
1	Paser	3,80	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Produktifitas Pertanian Pangan 2. Peningkatan Nilai Tambah dan Pengembangan pasar komoditi unggulan 3. Peningkatan pelayanan infrastruktur di kawasan sentra produksi 4. Peningkatan produktifitas budidaya perikanan 5. Pemberdayaan Masyarakat sekitar hutan 6. Pengembangan kawasan peternakan
2	Kutai Barat	5,12	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Nilai Tambah dan Pengembangan pasar komoditi unggulan 2. Peningkatan upaya rehabilitasi Lahan Kritis 3. Pemberdayaan Masyarakat sekitar hutan 4. Pengembangan kawasan peternakan
3	Kutai Kartanegara	2,5 ± 1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan upaya rehabilitasi Lahan Kritis 2. Peningkatan Produktifitas pertanian pangan 3. Peningkatan nilai tambah dan pengembangan pasar komoditi unggulan 4. Peningkatan pelayanan infrasturuktur di kawasan sentra produksi 5. Pengembangan kawasan peternakan 6. Peningkatan produktifitas budidaya perikanan 7. Pengembangan industri pariwisata
4	Kutai Timur	3 ± 1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pelayanan infrastuktur di kawasan industri maloy 2. Peningkatan Nilai Tambah dan Pengembangan pasar Komoditi unggulan 3. Peningkatan produktifitas budidaya perikanan 4. Peningkatan upaya rehabilitasi Lahan Kritis

NO	KABUPATEN/KOTA	TARGET PERT. EKONOMI TAHUN 2021 (%)	ARAH KEBIJAKAN
5	Berau	2,33	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan upaya rehabilitasi lahan kritis 2. Peningkatan produktifitas budidaya perikanan 3. Peningkatan nilai tambah dan pengembangan pasar komoditi unggulan 4. Pengembangan industri pariwisata 5. Peningkatan pelayanan infrastruktur di kawasan sentra produksi 6. Pemberdayaan Masyarakat sekitar hutan
6	Penajam Paser Utara	2,5 ± 1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Nilai Tambah dan Pengembangan pasar komoditi unggulan 2. Peningkatan produktifitas budidaya perikanan 3. Pengembangan Agroindustri
7	Mahakam Ulu	5 ± 1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan Masyarakat sekitar hutan 2. Peningkatan pelayanan infrastruktur di kawasan sentra produksi dan akses ke ibukota kabupaten 3. Pengembangan kawasan peternakan
8	Balikpapan	5,20	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan industri pariwisata 2. Peningkatan produktifitas budidaya perikanan 3. Pengembangan kawasan industry 4. Peningkatan pelayanan infrastruktur di kawasan pusat kegiatan ekonomi
9	Samarinda	5 ± 1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pelayanan infrastruktur di kawasan pusat kegiatan ekonomi 2. Peningkatan upaya rehabilitasi lahan kritis 3. Pengendalian perluasan kawasan pertambangan
10	Bontang	1,5 ± 1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pelayanan infrastruktur di kawasan pusat kegiatan ekonomi 2. Peningkatan produktifitas budidaya perikanan 3. Peningkatan Nilai Tambah dan Pengembangan pasar komoditi unggulan

5.1.1 Kebijakan Pengembangan Kewilayahan Kota Samarinda

Fokus pembangunan wilayah Kota Samarinda yang menyesuaikan dengan tema RKPD tahun 2021 adalah pembangunan jalan akses pendekat Bandara APT Pranoto sepanjang 11,4 km sesuai dengan arah kebijakan peningkatan pelayanan infrastruktur di kawasan pusat kegiatan ekonomi.

**Gambar 5.1.
Jalan Akses APT Pranoto**



Bappeda Prov. Kaltim, 2020

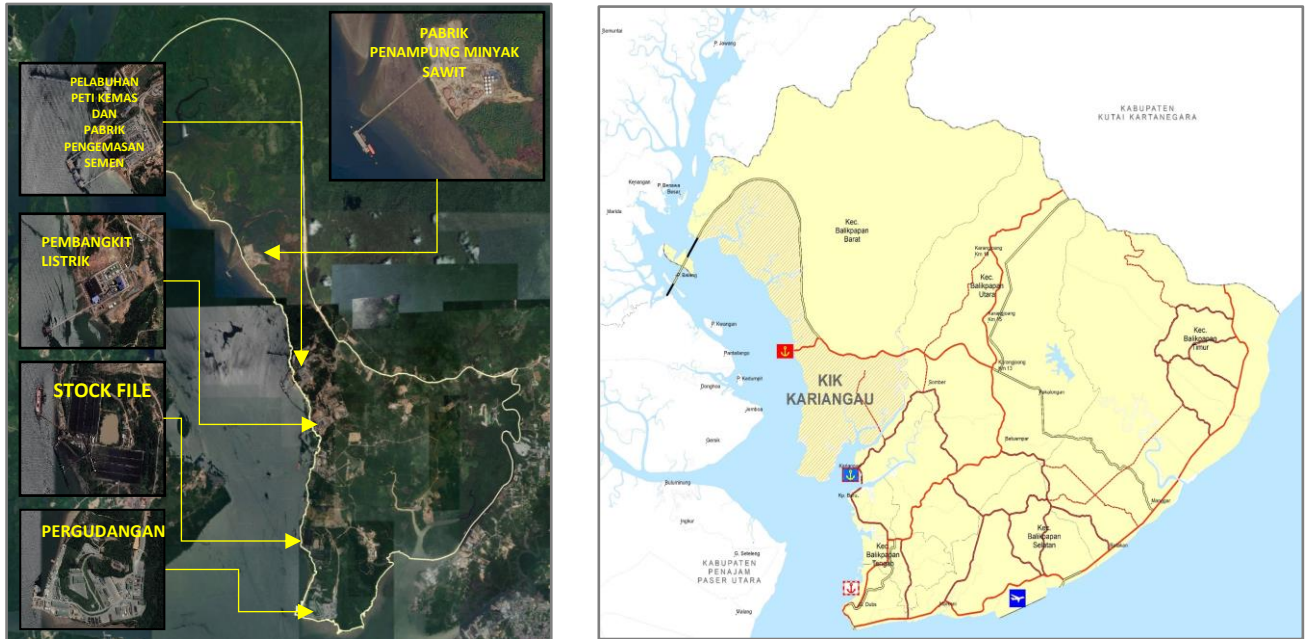
5.1.2 Kebijakan Pengembangan Kewilayahan Kota Balikpapan

Kawasan Industri Kariangau merupakan salah satu Kawasan yang kegiatannya industri telah berjalan cukup baik. Kawasan ini akan diprioritaskan pengembangannya dalam 5 (lima) tahun kedepan. Hal ini diperkuat dengan komitmen Gubernur Kaltim untuk meningkatkan dan mengembangkan kapasitas Pelabuhan Internasional Peti Kemas Kariangau. pengembangan kawasan Industri Kariangau diharapkan dan memberikan peran terhadap perekonomian Kalimantan Timur didorong melalui percepatan pembangunan Jembatan Pulau Balang yang menghubungkan Kawasan Industri Kariangau dan Kawasan Industri Buluminung. Pada sektor transportasi dan pergudangan, arah pembangunan difokuskan pada optimalisasi Pelabuhan Kariangau sebagai outlet maupun inlet pemasaran produk-produk perdagangan dari dan menuju Kalimantan Timur.

Pada tahun 2021 Pemerintah Provinsi tidak hanya fokus pada peningkatan infrastruktur di Kawasan kariangau tetapi juga akan memberi perhatian terhadap aspek ekonomi kawasan. Infrastruktur penunjang aksesibilitas dari dan menuju ke Kawasan Industri Kariangau menjadi fokus pembangunan wilayah di Kota Balikpapan guna meningkatkan daya saing investasi. Bangkitan ekonomi kawasan ini selanjutnya juga harus diiringi dengan serta peningkatan

kapasitas Sumber Daya Manusia melalui penguatan pendidikan-pendidikan vokasi dan balai latihan kerja. Diharapkan kedepannya tenaga kerja lokal yang ada di sekitar wilayah industri dapat memiliki kompetensi yang sesuai standar dan terserap di pasar kerja.

Gambar 5.2.
Pengembangan Kawasan Industri Kariangau di Balikpapan

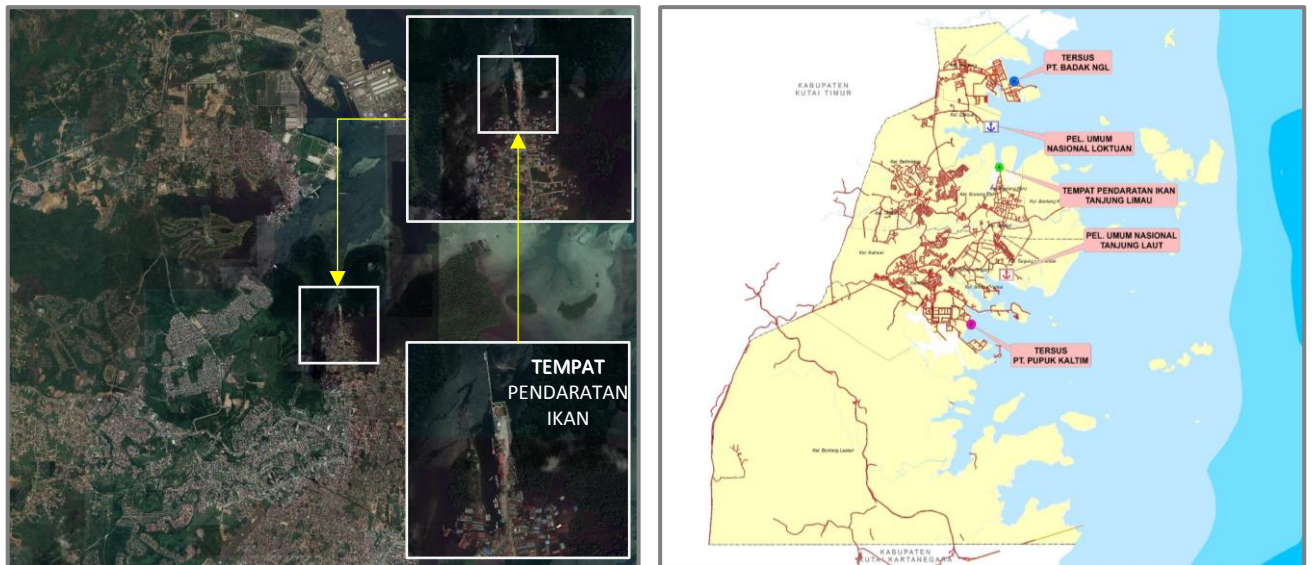


Sumber : Bappeda Prov. Kaltim, 2020

5.1.3. Kebijakan Pengembangan Kewilayahan Kota Bontang

Fokus pengembangan wilayah Kota Bontang pada tahun 2021 yaitu meningkatkan nilai tambah perikanan sesuai dengan arah kebijakan peningkatan produktifitas budidaya perikanan.

Gambar 5.3.
Kawasan Peruntukkan Perikanan di Kota Bontang

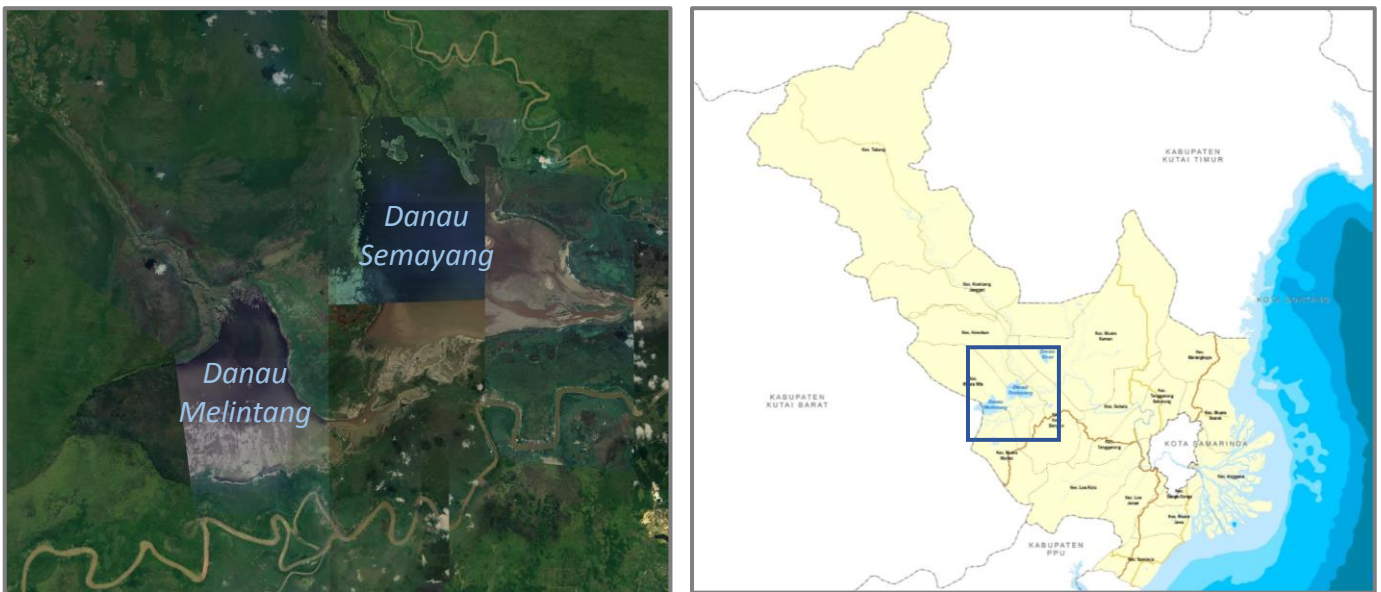


Sumber : Bappeda Prov. Kaltim, 2020

5.1.4. Kebijakan Pengembangan Kewilayahan Kabupaten Kutai Kartanegara

Danau Melintang, Semayang, dan Jempang merupakan 3 (tiga) danau terbesar di Kalimantan Timur yang memiliki beragam potensi, diantaranya pariwisata, perikanan, serta pertanian. Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten Kutai Kartanegara sepakat untuk bersama mengoptimalkan potensi yang dimiliki kawasan tersebut agar dapat membawa manfaat baik bagi lingkungan, masyarakat, dan perekonomian daerah. Kabupaten Kutai Kartanegara akan mempertimbangkan untuk memasukkan isu terkait pengembangan kawasan 3 (tiga) danau ini kedalam dokumen RKPD tahun 2021. Terdapat beberapa sektor yang belum teridentifikasi sebagai potensi pengembangan secara detail, salah satunya potensi perikanan. Kedepannya, sektor perikanan akan dikembangkan hingga memiliki nilai tambah.

**Gambar 5.4.
Kawasan 3 Danau**



Sumber : Bappeda Prov. Kaltim, 2020

Pengembangan kawasan 3 (tiga) danau sebagai kawasan pariwisata tentu memerlukan dukungan dari berbagai sektor, salah satunya adalah sektor perizinan pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang disekitar kawasan 3 (tiga) danau sangat perlu diperhatikan, mengingat kawasan tersebut dikelilingi oleh berbagai perizinan, baik sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan. Selain itu, dukungan dan infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang pariwisata juga diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan sektor pariwisata di kawasan 3 (tiga) danau.

5.1.5. Kebijakan Pengembangan Kewilayahan Kabupaten Kutai Timur

Pembangunan di Kabupaten Kutai Timur dalam RKPD 2021 difokuskan pada percepatan beroperasinya KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan sebagai pusat Outlet produksi CPO yang bersumber dari PKS di sekitar KEK MBTK. Percepatan beroperasinya KEK MBTK ditopang dengan membangun jaringan transportasi dari lokasi PKS menuju KEK MBTK serta membangun sarana dan prasarana pendukung pada lokasi KEK. Pembangunan dan peningkatan jaringan jalan diharapkan dapat meningkatkan keterkaitan antarwilayah, efisiensi ekonomi, serta membuka keterisolasian wilayah. Beroperasinya KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan diharapkan mampu meningkatkan kinerja industri pengolahan yang selama ini memiliki kontribusi kecil di Kutai Timur, dimana KEK MBTK merupakan sentra hilirisasi industri,

berbasis kelapa sawit (*oleokimia*). Selain itu agar dapat segera beroperasi ditargetkan minimal 1 perusahaan dapat berinvestasi di KEK MBTK.

Gambar 5.5.
Lokus Pengembangan KEK Maloy Batuta Trans

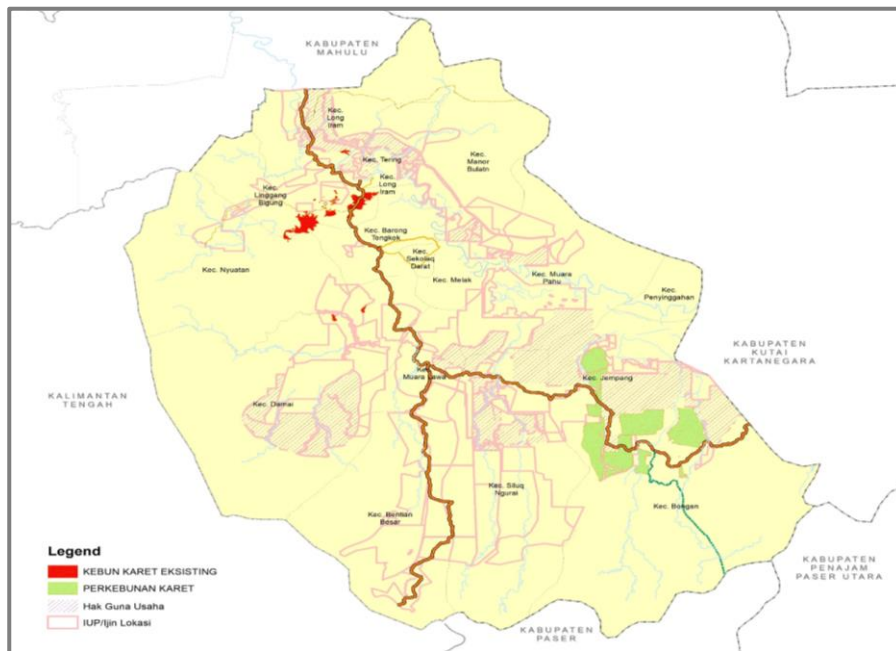


Sumber : Bappeda Prov. Kaltim, 2020

5.1.6. Kebijakan Pengembangan Kewilayahan Kabupaten Kutai Barat

Fokus pembangunan wilayah di Kabupaten Kutai Barat, yakni meningkatkan produktivitas perkebunan terutama produksi karet sebanyak 38.000 ton.

Gambar 5.6.
Areal Pengembangan Kawasan Perkebunan Karet di Kutai Barat



Sumber : Bappeda Prov. Kaltim, 2019

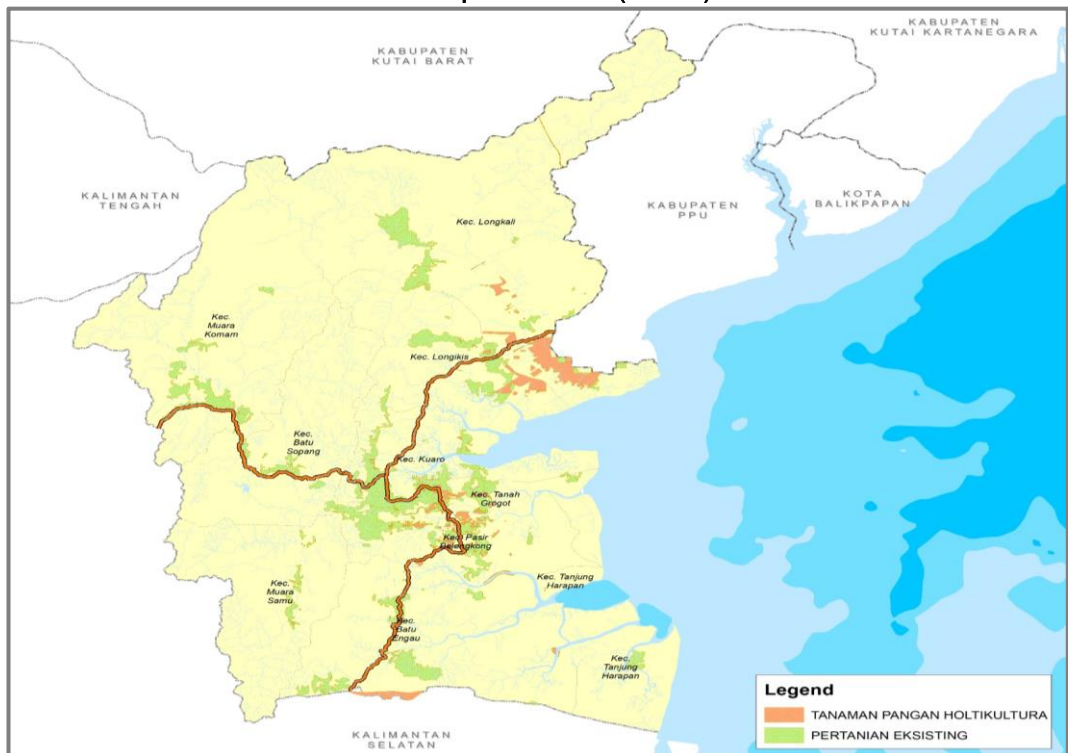
Pembangunan pertanian di Kutai Barat juga perlu didukung dengan ketersediaan infrastruktur jalan guna menjamin konektivitas antara sentra-sentra produksi pertanian dengan pusat pemasaran hasil pertanian. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membangun ruas-ruas jalan baru agar efektifitas dan efisiensi pemasaran hasil pertanian dapat terwujud. Selain itu, fasilitasi pengembangan hortikultura (seperti penyediaan bibit unggul) juga diperlukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian yang sudah ada. Untuk itu perlu adanya kolaborasi antar pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan kewenangannya dalam mendukung peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang pertanian di Kutai Barat.

5.1.7. Kebijakan Pengembangan Kewilayahan Kabupaten Paser

Berdasarkan Rencana Tata Ruang (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur 2016 – 2036, Kabupaten Paser merupakan salah satu dari Kawasan Strategis Provinsi (KSP), yakni kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi, secara khusus pada sektor pertanian. Guna meningkatkan produktivitas pertanian di Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten Paser, terdapat 2 (dua) pembangunan infrastruktur prioritas Bidang Sumber Daya Air yang saat ini tengah dilakukan tahapan awal pembangunannya, yakni Bendungan Lambakan dan Bendung Regulator Telake. Bendungan Lambakan memiliki fungsi utama sebagai penyedia

air baku untuk irigasi dengan potensi layanan hingga mencapai 20.000 Ha. Selain itu, bendungan ini juga dapat dimanfaatkan sebagai prasarana suplai air baku, penyedia listrik, serta pengendali banjir. Untuk mendukung efektivitas pemanfaatan prasarana ini, akan dibangun bendung regulator di bagian hilir. Bendung regulator ini akan mengatur suplai air dari Lambakan menuju ke lokasi layanan potensial.

Gambar 5.7.
Areal Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan
di Kabupaten Paser (kanan)



Sumber : Bappeda Prov. Kaltim, 2020

Saat ini, dokumen kesiapan pembangunan dua prasarana tersebut tengah dalam proses finalisasi oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi. Secara simultan, Pemerintah Pusat telah mulai melaksanakan aktivitas pembangunan, diawali dengan pembenanahan akses dari jalan utama ke Desa Muara Lambakan. Lahan area kerja beserta daerah tangkapannya sebagian besar masuk dalam kawasan hutan sehingga diperlukan proses Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Proses IPPKH sudah berjalan sejak tahun 2018. Tahun 2019 akan dilanjutkan dengan pemasangan tanda batas pada lokasi-lokasi tersebut. Pemerintah Kabupaten Paser juga telah berkomitmen untuk mendukung pembangunan prasarana pendukung sektor pertanian ini. Upaya sosialisasi ke warga/masyarakat setempat terus dilakukan, terutama untuk persiapan relokasi jika kegiatan konstruksi pada desa setempat mulai dilakukan. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 472 tahun 2018 tentang Kawasan Pertanian Nasional telah mencantumkan Kabupaten Paser sebagai Kawasan Sentra Tanaman Sawit. Hal ini menunjukkan bahwa

Pemerintah Pusat memberikan dukungan penuh pada Kabupaten Paser untuk mengembangkan potensi ketersediaan bahan baku di wilayahnya. Dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), luas peruntukan perkebunan adalah sebesar 398.945 Ha. Saat ini, luas yang telah dibebani izin perkebunan telah mencapai 348.144 Ha. Luas perkebunan eksisting saat ini mencapai 200.258 Ha dimana 91% diantaranya telah ditanami.

Arah kebijakan utama pengembangan perkebunan di Kabupaten Paser adalah melakukan peremajaan khususnya untuk komoditi kelapa sawit. Hal ini dilakukan mengingat kelapa sawit merupakan kontributor utama pertumbuhan pertanian di Kabupaten Paser. Kegiatan peremajaan ini diharapkan akan meningkatkan produktivitas kelapa sawit di Kabupaten Paser yang saat ini telah mencapai 14,7 ton/Ha. Selain ditetapkan sebagai kawasan sentra tanaman sawit, KEPMENTAN 472/2018 juga menetapkan Kabupaten Paser sebagai kawasan sentra sapi potong serta sentra padi, cabai, dan bawang merah. Pengembangan sektor peternakan akan diintegrasikan dengan lahan-lahan potensial yang tersedia, misalnya dengan pemanfaatan lahan bekas tambang maupun lahan perkebunan. Saat ini terdapat 540 ekor sapi pada lahan seluas 332 Ha milik PT. Kideco, PT. BHP, PT. DPS, PT. SMG, serta UPTD BHP. Kedepannya, peternakan sapi akan diupayakan melalui pengembangan *miniranch* dengan sistem pertanaman hijauan pakan ternak yang sesuai dengan kondisi daerah yang dikembangkan. Kondisi *miniranch* yang mendukung harus menjamin kebutuhan nutrisi untuk ternak, ketersediaan sumber air, serta harus disertai tata laksana penggembalaan yang terorganisir. Agar konsep ini dapat sukses diimplementasikan, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah dengan perusahaan pertambangan dan perkebunan yang ada di Paser. Untuk mengawalinya, perlu dilakukan inventarisir daerah calon pengembangan *miniranch* melalui data geospasial. Dengan optimalnya pengembangan kawasan peternakan sapi ini, diharapkan pemenuhan kebutuhan daging sapi di Kalimantan Timur dapat tercukupi.

Potensi pengembangan holtikultura di Kabupaten Paser juga cukup menjanjikan. Pada tahun 2015 Gubernur telah menetapkan Kecamatan yang menjadi sentra produksi tanaman pangan dan holtikultura, dimana lokus Kabupaten Paer yakni Tanah Grogot untuk komoditas jeruk, Muara Komam untuk komoditas bawang merah, serta long kali untuk komoditas buah lai. Selain itu, Pemerintah kabupaten juga mencanangkan Kecamatan Kuario sebagai sentra tanaman kelengkeng dimana saat ini tertanam 1.000 pohon dengan produksi 7.000 – 8.000 ton dalam satu kali panen. Kedepannya, kawasan holtikultura akan dikembangkan dengan basis korporasi petani dengan memperhatikan kesinambungan aktivitas di sektor hulu (produksi) hingga sektor hilir (pemasaran). Komoditas baru yang rencana akan dikembangkan di Kalimantan Timur adalah buah kurma. Buah kurma memiliki nilai ekonomi tinggi, dimana dalam 1 hektar lahan kelapa sawit setara dengan budidaya 6 pohon kurma. Untuk mengembangkan komoditas ini, masih diperlukan kajian jenis benih kurma yang sesuai dengan

kondisi geografis Kaltim. Untuk melihat tingkat efektivitas dan potensi keberhasilan pengembangan kurma, perlu dilaksanakan pilot project pada lokasi potensial.

5.1.8. Kebijakan Pengembangan Kewilayahan Kabupaten Penajam Paser Utara

Bersama dengan Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) juga ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan ekonomi, secara khusus untuk aktivitas industri pertanian. Pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 472/2018, Kabupaten PPU juga ditetapkan menjadi lokus sentra tanaman padi, cabai, dan bawang merah. Alokasi luas kawasan pertanian di Kabupaten PPU pada dokumen tata ruang provinsi berkisar 23.488 Ha, dengan kondisi eksisting sawah baik yang sudah maupun belum ditanami padi mencapai 12.205 Ha. Besarnya potensi sektor pertanian di Kabupaten ini sayangnya belum didukung oleh ketersediaan sumber air baku irigasi yang memadai. Hal ini mengakibatkan frekuensi panen belum dapat dimaksimalkan dan beberapa ada yang mengalami gagal panen. Selain itu, alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan sawit juga terjadi cukup masif. Perlu adanya pembatasan konversi/alih fungsi lahan ini agar potensi sektor pertanian dapat membangkitkan ekonomi kabupaten, provinsi, bahkan nasional. Kawasan Industri Buluminung menjadi fokus pembangunan wilayah pada tahun 2021 ini diharapkan sebagai sentra produksi industri hilir pertanian atau perikanan dan ditargetkan 1 perusahaan atau lebih dapat berinvestasi pada kawasan industri tersebut.

Gambar 5.8.
Areal Pengembangan Kawasan Industri Buluminung di Kabupaten Penajam Paser Utara



Sumber : Bappeda Prov. Kaltim, 2020

5.1.9. Kebijakan Pengembangan Kewilayahan Kabupaten Berau

Kabupaten Berau memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor pariwisata. Terlebih dengan telah beroperasinya Bandara Maratua yang diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan asing dan dalam negeri menuju pariwisata bahari Kepulauan Derawan dan sekitarnya. Keindahan alam dan potensi wisata bawah laut yang ada di Kepulauan Derawan telah dikenal sampai dengan wilayah dataran eropa dan afrika. Bahkan pemerintah negara Seychelles yang menjadi salah satu tempat kunjungan wisata terkenal di dunia telah mengajak kerjasama pemerintah daerah untuk pengembangan konsep pariwisata di kedua wilayah yang saling terkoneksi. Terhadap hal tersebut, maka fokus pembangunan Kabupaten Berau pada tahun 2021 masih diarahkan pada pengembangan wisata bahari Kepulauan Derawan dan sekitarnya dan ditargetkan dapat mencapai jumlah wisatawan nusantara 6.500.000 orang dan jumlah wisatawan mancanegara sebanyak 56.000 orang yang berkunjung ke Derawan dan sekitarnya.

Gambar 5.9.
Pengembangan Kawasan Pariwisata di Maratua, Derawan dan Sekitarnya
di Kabupaten Berau



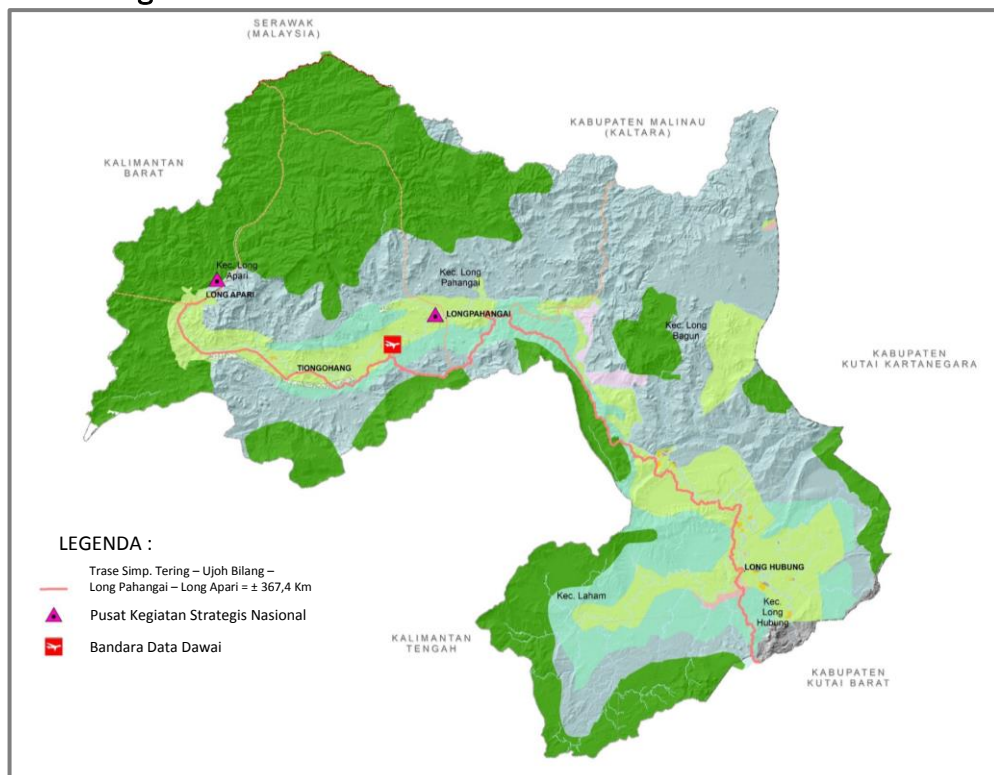
Sumber : Bappeda Prov. Kaltim, 2020

5.1.10. Kebijakan Pengembangan Kewilayahan Kabupaten Mahakam Ulu

Dokumen tata ruang wilayah nasional, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 menetapkan 2 (dua) Pusat Kegiatan Strategis Nasional

(PKSN) di Kabupaten Mahakam Ulu. Kedua PKSN tersebut terletak di Long Pahangai dan Long Apari. Pengembangan berbagai sektor potensial di Kabupaten Mahakam Ulu belum dapat optimal jika aksesibilitas transportasi serta telekomunikasi belum tersedia dengan memadai. Akses menuju Kabupaten termuda di Kaltim ini dapat ditempuh melalui Kutai Barat, dengan rute utama Tering – Long Bagun – Long Pahangai – Long Apari. Rute ini akan menjadi fokus penanganan seluruh tingkatan pemerintahan baik pusat, provinsi, maupun kabupaten. Sehingga aksesibilitas perhubungan darat dengan jalan mantap perbatasan ditargetkan sepanjang 53 km dengan material aspal menjadi fokus pengembangan wilayah pada tahun 2021.

Gambar 5.10.
Peningkatan Aksesibilitas Jalan di Kawasan Perbatasan Mahakam Ulu



Sumber : Bappeda Prov. Kaltim, 2020

BAB 6

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 ini berisikan program dan kegiatan prioritas Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 beserta pendanaannya yang mengimplementasikan penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur secara sinergis.

Pelaksanaan perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur setiap tahunnya memiliki fokus/tema pembangunan yang berbeda. Strategi tahunan ini diterapkan dengan harapan agar pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur dapat dilaksanakan secara optimal, maksimal, serta mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Tema yang diusung pada pelaksanaan pembangunan periode tahun 2021 adalah “Menumbuhkan Industri Hilir yang Mendukung Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kawasan”

Guna merealisasikan fokus/tema pembangunan yang telah dicanangkan, perencanaan pembangunan daerah harus merumuskan program dan kegiatan prioritas daerah sebagai ultimate job dari pelaksanaan pembangunan daerah. Perumusan program dan kegiatan ini merupakan tindakan untuk mencapai visi dan misi gubernur, pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM), serta penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena itu, penyusunan program dan kegiatan pembangunan ini melibatkan stakeholder yang bersangkutan karena subyek pelaksana program dan kegiatan adalah unsur-unsur Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki kepentingan di dalamnya dengan tetap melibatkan masyarakat secara aktif.

Agar hasil pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah dapat menunjukkan capaian kinerja masing-masing prioritas daerah maka dalam setiap arah kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus memberikan arahan dalam penentuan program dan kegiatan yang tepat. Apabila capaian kinerja suatu program atau kegiatan yang telah direncanakan tidak memberikan peningkatan outcome yang positif, pada periode selanjutnya harus dilakukan evaluasi serta kajian ulang atas perencanaan program dan kegiatan prioritas yang tidak tepat sasaran.

Perencanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 merujuk pada program prioritas dalam dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 sehingga alur dokumen RKPD mampu selaras dan tidak tumpang tindih dengan RPJMD. Perencanaan pada dokumen RKPD Tahun 2021, sesuai dengan peruntukannya, dirancang berdasar perencanaan pada masing-masing bidang atau sektor dalam OPD provinsi

maupun kabupaten/kota. Berbagai bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan ini akan dijabarkan dalam indikator kinerja program sehingga dapat dilihat penentuan target capaian kinerja program beserta kerangka pendanaan yang dibutuhkan. Poin terpenting yang harus diperhatikan dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas adalah kemampuan pendanaan (pagu indikatif) Provinsi Kalimantan Timur. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis OPD, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 akan menyajikan daftar program dan kegiatan yang meliputi nama program dan kegiatan prioritas, indikator kinerja program (outcome), target setiap program dan kegiatan prioritas, pendanaan yang dibutuhkan, serta instansi/dinas/OPD penanggungjawab program dan kegiatan prioritas. Prioritas Pembangunan menitikberatkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar (meliputi urusan: Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan Sosial) dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar (meliputi urusan: Tenaga Kerja; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Pangan; Pertanahan; Lingkungan Hidup; Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; Pemberdayaan masyarakat dan desa; Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; Perhubungan; Komunikasi dan informatika; Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; Penanaman Modal; Kepemudaan dan Olahraga; Statistik; Persandian; Kebudayaan; Perpustakaan; dan Kearsipan). Kemudian, Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi 8 urusan, yaitu Kelautan dan perikanan; Pariwisata; Pertanian; Kehutanan; Energi dan Sumber Daya Mineral; Perdagangan; Perindustrian; dan Transmigrasi.

Mengacu pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (urusan wajib dan urusan pilihan) di atas berdasarkan bidang urusan yang menjadi kewenangan OPD. Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur beserta rancangan pagu indikatif sebagai penunjang utama pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun 2021 terlampir pada tabel 6.1:

Tabel 6.1
Program dan Kegiatan Belanja Langsung Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				4.211.240.130.573
1.01	Pendidikan				906.433.507.598
1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				906.433.507.598
1.01.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				872.466.061.118
1.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		86,3	218.346.480.098
1.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran (Laporan)	kk, smd	12	218.346.480.098
1.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		6	8.268.000.000
1.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada skpd dan unit kerja internal SKPD (Unit)	kk, smd	4	6.582.000.000
1.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	jumlah gedung kantor skpd dan unit kerja internal skpd yang dipelihara (Unit)	smd	4	1.686.000.000
1.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		93	6.955.460.000
1.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi (Kali)	smd	50	3.726.460.000
1.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	jumlah aparatur yang dilatih (Orang)	smd	550	3.229.000.000
1.01.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (%)		82	5.132.041.000
1.01.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Dokumen Perencanaan dan Anggaran (Dokumen)	smd	5	2.552.941.000
1.01.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun (Laporan)	smd	12	1.579.100.000
1.01.10.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran (DAK)	Dokumen Perencanaan dan Anggaran (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	1	1.000.000.000
1.01.19	Program Pendidikan Luar Biasa	Persentase pelayanan pendidikan luar biasa (%)		75	27.356.000.000
1.01.19.19	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Luar Biasa Negeri	jumlah penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri (Orang)	smd	1220	19.000.000.000
1.01.19.20	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	jumlah penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri (Orang)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	1220	1.000.000.000
1.01.19.21	Rehabilitasi Prasarana Belajar SLB (DAK)	Jumlah Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah (Sekolah)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	9	1.000.000.000
1.01.19.22	Pembangunan Prasarana Belajar SLB (DAK)	jumlah penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri (Orang)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr,	95	1.000.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
			ppu, bpn, btg, smd		
1.01.19.23	Pengadaan Sarana Belajar SLB (DAK)	jumlah penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri (Orang)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	95	1.000.000.000
1.01.19.61	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Jumlah Peserta Minat, Bakat dan Kreativitas siswa SLB (Orang)	smd	500	4.356.000.000
1.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang telah memenuhi standar kompetensi (%)		98	23.340.000.000
1.01.20.03	pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	Jumlah tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dilatih (Orang)	smd	500	7.568.200.000
1.01.20.08	Pengembangan mutu dan kualitas tenaga pendidik kejuruan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan mutu dan kualitasnya (Orang)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	500	7.155.162.000
1.01.20.09	pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan mutu dan kualitasnya (Orang)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	150	1.665.000.000
1.01.20.40	Pelatihan Bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kompetensi (Kegiatan Kualifikasi Pendidikan Guru)	Jumlah Pendidik yang Memenuhi Standar Kompetensi (Orang)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	400	5.951.638.000
1.01.20.41	Pemenuhan Sarana & Prasarana Tenaga Pendidik	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan mutu dan kualitasnya (Orang)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	200	1.000.000.000
1.01.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Sekolah yang memenuhi standar pelayanan minimal bidang pendidikan menengah dan khusus (%)		81	12.244.922.000
1.01.22.07	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Jumlah laporan yang menerapkan sistem dan informasi manajemen pendidikan (Laporan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, smd	40	6.233.400.000
1.01.22.08	Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan	Jumlah pelatihan, seminar, lokakarya, diskusi ilmiah (Kegiatan)	smd	3	1.240.000.000
1.01.22.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan (Laporan)	smd	24	700.000.000
1.01.22.10	Pelaksanaan Ujian Nasional/Ujian Sekolah	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun (Laporan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	1	1.000.000.000
1.01.22.11	Penerimaan Peserta Didik Baru	Jumlah laporan yang menerapkan sistem dan informasi manajemen pendidikan (Laporan)	smd	1	974.600.000
1.01.22.17	Sosialisasi dan Promosi Pendidikan	Sosialisasi dan Promosi Pendidikan (Kab/kota)	smd	10	2.096.922.000
1.01.23	Program Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat	Penerima Beasiswa KALTIM TUNTAS yang berprestasi (Orang)		19500	90.000.000.000
1.01.23.01	Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan SDM Melalui Beasiswa	Jumlah Penerima Beasiswa (Orang)	smd	40000	90.000.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
1.01.38	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pendidikan	Siswa SMA/SMK Miskin penerima beasiswa yang tidak putus sekolah (Siswa)		2500	53.718.361.600
1.01.38.01	Pemberian beasiswa bagi siswa miskin (SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/SMK/MA)	Jumlah Beasiswa bagi siswa Miskin (Orang)	smd	415	41.718.361.600
1.01.38.02	Pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa miskin di Perguruan Tinggi	Jumlah Mahasiswa Miskin yang Mendapatkan Beasiswa (Orang)	smd	500	12.000.000.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Murni SMA/MA (%)		77	151.847.773.000
1.01.39.02	Penyelenggaraan paket C setara SMU	Penyelenggaraan paket C setara SMU (Orang)	smd	100	1.392.500.000
1.01.39.03	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (Kab/kota)	smd	10	1.271.998.000
1.01.39.05	Pemberian Penghargaan Bagi Siswa Berprestasi	Pemberian Penghargaan Bagi Siswa Berprestasi (kab/kota)	smd	10	7.839.775.000
1.01.39.06	Lomba dan Pertandingan Tingkat SMA	Jumlah kab/kota yang mengikuti lomba jenjang SMA (Kab / Kota)	smd	10	5.323.600.000
1.01.39.08	Pengadaan Meubelair	Jumlah Pengadaan Meubelair Sekolah Menengah Atas (Kab/kota)	smd	10	12.680.000.000
1.01.39.12	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah sekolah penerima Alat Praktik Peraga Siswa (sekolah)	smd	25	10.680.000.000
1.01.39.14	Pembangunan Prasarana Belajar SMA	Jumlah Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah (Sekolah)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	15	1.000.000.000
1.01.39.16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Bantuan Operasional Sekolah Daerah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri (Kab/Kota)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	10	1.000.000.000
1.01.39.17	Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Sekolah	Jumlah Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah (Sekolah)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	15	1.000.000.000
1.01.39.18	Pembangunan Pagar Sekolah	Jumlah Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah (Sekolah)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	15	1.000.000.000
1.01.39.23	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Pembangunan Laboratorium Sekolah Menengah Atas (Sekolah)	smd	1	14.659.900.000
1.01.39.24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Daerah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri (Kab/Kota)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	10	90.000.000.000
1.01.39.25	Rehabilitasi Prasarana Belajar SMA (DAK)	Jumlah Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah (Sekolah)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	15	1.000.000.000
1.01.39.26	Pembangunan Prasarana Belajar SMA (DAK)	Jumlah Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah (Sekolah)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	15	1.000.000.000
1.01.39.27	Pengadaan Sarana Belajar SMA (DAK)	Jumlah Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah (Sekolah)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	15	1.000.000.000
1.01.39.28	Pembangunan Rumah Dinas Guru dan Asrama Siswa SMA (Afirmasi) (DAK)	Jumlah Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah (Sekolah)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr,	15	1.000.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
			ppu, bpn, btg, smd		
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Murni SMK, MAK (%)		77	224.257.023.420
1.01.40.01	Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai Informasi Pendidikan Menengah	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyebar luasan dan sosialisasi informasi pendidikan menengah (Kegiatan)	smd	5	5.815.400.000
1.01.40.02	Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah	Jumlah Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah (Sekolah)	smd	30	60.008.094.710
1.01.40.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan (Paket)	smd	100	58.681.944.710
1.01.40.04	Pembangunan Ruang Praktikum Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pembangunan Ruang Praktikum Sekolah Menengah Kejuruan (Ruang)	smd	30	16.751.584.000
1.01.40.10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	jumlah penerima Bantuan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri (Orang)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	42998	1.000.000.000
1.01.40.11	Pendidikan Penguatan Karakter	Peningkatan mutu siswa dalam rangka SDM berkualitas (Siswa)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	4000	1.000.000.000
1.01.40.18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	jumlah penerima Bantuan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri (Orang)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	42998	75.000.000.000
1.01.40.19	Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Beserta Perabotnya (DAK)	Jumlah Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah (Sekolah)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	15	1.000.000.000
1.01.40.20	Pengadaan Peralatan Praktik Utama/Praktik Produksi (DAK)	Jumlah Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah (Sekolah)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	15	1.000.000.000
1.01.40.21	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta Perabotnya (DAK)	Jumlah Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah (Sekolah)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	15	1.000.000.000
1.01.40.22	Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya (DAK)	Jumlah Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah (Sekolah)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	15	1.000.000.000
1.01.40.23	Rehabilitasi ruang belajar dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya (DAK)	Jumlah Rehabilitasi ruang disekolah kab/kota jenjang SMA (sekolah)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	15	1.000.000.000
1.01.40.24	Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya (DAK)	Jumlah Rehabilitasi ruang disekolah kab/kota jenjang SMA (sekolah)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	15	1.000.000.000
1.01.41	Program Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan	Jumlah Sekolah yang Mengembangkan Ekstrakurikulum Berbasis Agama (Sekolah)		150	11.000.000.000
1.01.41.01	Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Menengah	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyebar luasan dan sosialisasi informasi pendidikan menengah (Kegiatan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	10	1.000.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
1.01.41.02	Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan dan Pendidikan Karakter	Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Ekstrakurikuler Keagamaan (Jumlah Sekolah)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	223	10.000.000.000
1.01.42	Program Pengembangan Sekolah Kejuruan	Jumlah SMK yang bekerjasama dengan Dunia Usaha dan Industri (SMK)		70	21.000.000.000
1.01.42.01	Peningkatan Kerjasama Dengan Dunia Usaha dan Industri	Peningkatan mutu siswa dalam rangka SDM berkualitas (Siswa)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	4000	1.000.000.000
1.01.42.02	Pengembangan sekolah menengah kejuruan	Jumlah Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah (Sekolah)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	70	20.000.000.000
1.01.43	Program Pendidikan Jarak Jauh (Distance Learning System)	Persentase sekolah yang telah menggunakan sistem pendidikan jarak jauh (persen)		95	19.000.000.000
1.01.43.01	Pengembangan Metode Belajar dan Mengajar Dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan untuk belajar mengajar menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (Kegiatan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	10	1.000.000.000
1.01.43.02	Pembelajaran jarak jauh	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan untuk belajar mengajar menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (Kegiatan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	5	18.000.000.000
1.01.01.23 5	UPTD Taman Budaya				2.240.645.000
1.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM) (%)		86,3	1.740.745.000
1.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran (Laporan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	100	1.740.745.000
1.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		6	197.400.000
1.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada skpd dan unit kerja internal SKPD (Unit)	smd	100	197.400.000
1.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		93	302.500.000
1.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi (Kali)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	100	302.500.000
1.01.01.23 6	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan				27.000.000.000
1.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM) (%)		86,3	1.345.150.000
1.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran (Laporan)	smd	0	1.345.150.000
1.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		6	19.932.500.000
1.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada skpd dan unit kerja internal SKPD (Unit)	smd	0	14.760.500.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
1.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun (Laporan)	smd	0	5.172.000.000
1.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		93	1.178.000.000
1.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi (Kali)	smd	0	1.079.000.000
		jumlah aparatur yang dilatih (Orang)		0	
1.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun (Laporan)	smd	0	99.000.000
1.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang telah memenuhi standar kompetensi (%)		93	3.656.750.000
1.01.20.09	pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah laporan yang menerapkan sistem dan informasi manajemen pendidikan (Laporan)	smd	0	3.656.750.000
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Murni SMK, MAK (%)		95	887.600.000
1.01.40.01	Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai Informasi Pendidikan Menengah	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyebar luasan dan sosialisasi informasi pendidikan menengah (Kegiatan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	11	887.600.000
1.01.01.23 7	UPTD Museum Negeri Mulawarman				4.726.801.480
1.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM) (%)		100	4.124.801.480
1.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran (Laporan)	kkp	12	4.124.801.480
1.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		100	602.000.000
1.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi (Kali)	kkp	80	602.000.000
1.02	Kesehatan				887.372.113.150
1.02.01	Dinas Kesehatan				113.936.055.000
1.02.01.00 1	Dinas Kesehatan				60.500.000.000
1.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		87	3.315.381.200
1.02.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	smd	12	3.315.381.200
1.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		5	1.440.746.000
1.02.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah unit kantor yang dilengkapi sarana prasarana (unit)	smd	5	376.500.000
1.02.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah unit kantor yang dipelihara peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana (unit)	smd	5	1.064.246.000
1.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		60	1.782.750.000
1.02.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman (untuk tamu dan rapat) (Bulan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr,	12	1.493.750.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
			ppu, bpn, btg, smd, luarPrv		
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan pembinaan serta pengawasan ke dalam daerah pertahun (Kali)		80	
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah pertahun (Kali)		90	
1.02.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/Bimtek (Orang)	bpn, smd, luarPrv	35	289.000.000
1.02.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (%)		69	1.675.250.000
1.02.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran (Dokumen)	smd	10	981.100.000
1.02.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah dokumen evaluasi kinerja (dokumen)	smd	10	694.150.000
1.02.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan Vaksin esensial di puskesmas (%)		99,5	1.176.788.406
1.02.15.01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase pemenuhan kebutuhan obat , vaksin dan perbekalan kesehatan (buffer stok) (%)	smd	100	907.839.406
1.02.15.02	Pemenuhan Sarana/Prasarana Instalasi Farmasi Provinsi (DAK)	Jumlah obat dan perbekalan kesehatan yang diadakan (Jenis)	smd	150	268.949.000
1.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan antenatal minimal 4 kali (K4) (%)		70	6.697.747.360
1.02.16.05	Perbaikan Gizi Masyarakat	Jumlah kab/kota yang dibina untuk perbaikan gizi (kab/kota)	kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	10	547.140.000
1.02.16.07	Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Jumlah fasyankes yang difasilitasi dan dilakukan kegiatan pemeliharaan alkes (RMC) (fasyankes)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	119	746.500.000
		Jumlah sarana produksi dan distribusi yg mendapatkan izin alat kesehatan (sarana)		19	
		Jumlah Fasyankes yang dibina untuk mampu melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar (fasyankes)		160	
		Jumlah sarana produksi dan distribusi yg mendapatkan izin Kefarmasian (sarana)		23	
1.02.16.09	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Kab/kota yang dilakukan pembinaan, pengawasan dan monitoring evaluasi dalam melaksanakan SPM (Kab/Kota)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	10	772.859.600
		Jumlah masyarakat yang diperiksa kebugarannya (orang)		3150	
1.02.16.14	Penyelenggaraan penyehatan lingkungan	Persentase pembinaan Kab/Kota memenuhi Kualitas Kesehatan Lingkungan (%)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	60	400.000.000
1.02.16.15	Pembinaan upaya kesehatan masyarakat sekunder dan primer (DAK)	Jumlah Kab/Kota yang dikonfirmasi kasus gizi buruk (Kab/Kota)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, ppu, bpn, btg, smd	10	538.672.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
		Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan AMP (kab/kota)		10	
1.02.16.16	Rakontek terpadu tingkat kabupaten dan kota (DAK)	Jumlah Kab/Kota yang dikonfirmasi kasus gizi buruk (Kab/Kota)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	10	549.954.760
		Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan AMP (kab/kota)		10	
1.02.16.17	Pengelolaan Satker (DAK)	Jumlah Kab/Kota yang dikonfirmasi kasus gizi buruk (Kab/Kota)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	10	152.558.000
		Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan AMP (kab/ko6ta)		10	
1.02.16.18	Penurunan Stunting (DAK)	Jumlah Kab/Kota yang didistribusikan PMT sesuai sasaran (Kab/Kota)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	2	2.990.063.000
		Jumlah Kab/Kota yang dikonfirmasi kasus gizi buruk (Kab/Kota)		10	
1.02.17	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesehatan	Persentase penduduk miskin dan tidak mampu yang mempunyai jaminan pelayanan kesehatan (%)		92	34.915.488.000
1.02.17.01	Kemitraan Bagi Pasien Kurang Mampu, Non BPJS	Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan program JKN menuju UHC (Kab/Kota)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	10	34.915.488.000
		Jumlah penduduk miskin dan tidak mampu yang memperoleh jaminan pelayanan kesehatan (orang)		132000	
1.02.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	persentase Kab/Kota yang melaksanakan min. 5 tema kampanye GERMAS (%)		80	1.390.115.000
1.02.19.02	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Jumlah kegiatan penguatan OPD/Lintas Sektor yang mengimplementasikan kebijakan publik berwawasan kesehatan (Kali)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	9	480.000.000
		Jumlah penyebarluasan informasi kesehatan melalui berbagai saluran komunikasi pertahun (Kali)		5	
		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan penilaian (posyandu dan PHBS) dalam setahun (Kab/Kota)		10	
		Jumlah Rumah Sakit di Kalimantan Timur yang dilakukan pembinaan PKRS (Rumah Sakit)		20	
1.02.19.03	Kampanye sosialisasi, advokasi perilaku hidup sehat di tingkat provinsi dan pemberdayaan masyarakat (DAK)	Jumlah kab/ kota yang melaksanakan min 5 tema kampanye Germas hidup sehat (kab/kota)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	8	910.115.000
		Jumlah kegiatan penguatan OPD/Lintas Sektor yang mengimplementasikan kebijakan publik berwawasan kesehatan (Kali)		9	
1.02.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Jumlah Kab/Kota yang berhasil menurunkan kejadian penyakit menular (Kab/Kota)		7	2.830.840.000
1.02.22.05	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2TB	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr,	6	1.316.970.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
		untuk mencapai CDR=>70% dan SR=>90% (kab/kota)	ppu, bpn, btg, smd, luarPrv		
		Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2HIV untuk mencapai presentase ODHA yang mendapatkan ARV => 55% (Kab/Kota)		4	
		Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2 Malaria untuk mencapai persentase pengobatan Malaria Positif sesuai standart =>95% (Kab/Kota)		8	
		Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2 DBD (Kab/Kota)		7	
1.02.22.09	Peningkatan surveillence epidemiologi dan penanggulangan wabah	Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dalam pencapaian IDL (Kab/Kota)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	9	1.478.870.000
		Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dalam pencapaian persentase respon kewaspadaan kejadian luar biasa (Kab/Kota)		10	
		Jumlah Kab/Kota yang melakukan sosialisasi dan membuat rencana kontijensi wabah/bencana (Kab/Kota)		2	
1.02.22.10	Rujukan Spesimen (DAK)	Jumlah Kab/Kota yang memiliki desa/kelurahan yang cakupan IDL tercapai target (desa UCI) (Kab/Kota)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	6	35.000.000
1.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase puskesmas terakreditasi utama (%)		64	2.642.233.794
1.02.23.07	Peningkatan pelayanan kesehatan dasar	jumlah puskesmas yang mendapatkan pendampingan akreditasi (puskesmas)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	119	936.498.794
1.02.23.08	Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan	Jumlah Kab/kota yang memiliki Fasyankes telah mempersiapkan pelayanan telemedicine (kab/kota)	bru, kbr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	2	936.485.000
		Persentase kejadian bencana yang ditangani (%)		100	
		Persentase KLB yang ditangani (%)		100	
		Jumlah RSUD yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan akreditasi SNARS edisi I (RSUD)		11	
1.02.23.11	Peningkatan pelayanan kesehatan Pengembangan	Jumlah kab kota yang telah melakukan pembinaan penyehat tradisional (Kab/Kota)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	8	418.400.000
1.02.23.12	Penguatan program Indonesia sehat melalui pendekatan Keluarga (DAK)	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan AMP (Kab/Kota)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	10	350.850.000
		Jumlah Kab/Kota yang dikonfirmasi kasus gizi buruk (Kab/Kota)		10	
		Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan program JKN menuju UHC (kab/kota)		10	

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
1.02.56	Program Pengembangan Dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Persentase fasyankes yang dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian tenaga kesehatannya (Fasyankes)		80	1.541.760.240
1.02.56.01	Pendidikan teknis kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan bidang kesehatan (orang)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	690	214.700.000
1.02.56.03	Pengembangan/fasilitasi SDM, Prasarana dan teknologi kesehatan (DAK)	Jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	275	788.350.240
1.02.56.04	Standarisasi Tenaga Kesehatan di Fasilitasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah puskesmas daerah DTPK/3T, sangat terpencil dan terpencil yang difasilitasi memiliki tenaga kesehatan sesuai standar (puskesmas)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	30	538.710.000
1.02.59	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Jumlah Kab/Kota yang berhasil menurunkan kejadian penyakit tidak menular (Kab/Kota)		7	1.090.900.000
1.02.59.01	Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular	Jumlah PD provinsi yang dilakukan pembinaan deteksi dini faktor resiko PTM dan implementasi KTR (OPD)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	9	1.090.900.000
		Persentase Kab/Kota yang melaksanakan implementasi KTR minimal di 50% sekolah (%)		70	
		Jumlah Kab/Kota yang mempunyai min 50% Puskesmas yang melaksanakan pelayanan terpadu PTM (kasus Hipertensi & DM) (Kab/Kota)		5	
		Jumlah Kab/Kota yang min 50% Puskesmasnya melaksanakan deteksi dini kanker payudara pada perempuan usia 30-50 tahun (Kab/Kota)		7	
1.02.01.00 2	UPTD Laboratorium Kesehatan (BLUD)				5.500.000.000
1.02.47	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase terpenuhinya layanan BLUD sesuai standar (%)		100	5.500.000.000
1.02.47.01	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Jumlah bulan pelaksanaan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD (Bulan)	smd	12	5.500.000.000
1.02.01.00 3	UPTD Balai Latihan Kesehatan				13.335.578.000
1.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		75	2.537.553.760
1.02.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	smd	12	2.537.553.760
1.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		3	8.999.436.240
1.02.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah unit kantor yang dilengkapi sarana prasarana (unit)	smd	1	7.606.347.340
1.02.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah unit yang dipelihara peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana (unit)	smd	1	1.393.088.900
1.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah (%)		0	714.300.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
		Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		100	
1.02.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan pembinaan serta pengawasan kedalam daerah (Kali)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	25	584.500.000
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah (Kali)		15	
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman (untuk tamu dan rapat) (Bulan)		12	
1.02.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/Bimtek (Orang)	bpn, smd, luarPrv	9	129.800.000
1.02.56	Program Pengembangan Dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Persentase fasyankes yang dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian tenaga kesehatannya (Fasyankes)		80	1.084.288.000
1.02.56.01	Pendidikan teknis kesehatan	Jumlah tenaga yang mengikuti pelatihan bidang kesehatan (orang)	smd	300	1.084.288.000
1.02.01.004	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim				7.000.000.000
1.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		90	3.166.570.080
1.02.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	smd	12	3.166.570.080
1.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		3	1.972.279.920
1.02.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah unit kantor yang dilengkapi sarana prasarana (unit)	smd	1	325.694.812
1.02.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah unit yang dipelihara peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana (unit)	smd	1	1.646.585.108
1.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		75	1.032.050.000
1.02.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan pembinaan serta pengawasan kedalam daerah (Kali)	bpn, smd, luarPrv	30	441.000.000
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah (Kali)		10	
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman (untuk tamu dan rapat) (Bulan)		12	
1.02.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	bpn, smd, luarPrv	10	591.050.000
1.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Unit pelayanan kesehatan yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) (SPM)		90	500.000.000
1.02.26.18	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah unit sarana prasarana dan alat kesehatan yang diadakan (unit)	smd	10	500.000.000
1.02.27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	persentase sarana prasarana dan alat kesehatan yang layak pakai sesuai standar (%)		70	329.100.000
1.02.27.17	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah unit sarana prasarana dan alkes yang dipelihara (unit)	smd	10	304.100.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
1.02.27.19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit	Jumlah unit sarana prasarana dan alkes yang dipelihara (unit)	smd	1	25.000.000
1.02.01.00 5	UPTD Laboratorium Kesehatan				7.475.851.000
1.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		75	1.282.433.280
1.02.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	smd	12	1.282.433.280
1.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		3	6.150.202.720
1.02.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah unit kantor yang dilengkapi sarana prasarana (unit)	smd	1	5.612.151.000
1.02.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah unit yang dipelihara peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana (unit)	smd	1	538.051.720
1.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		75	43.215.000
1.02.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan pembinaan serta pengawasan kedalam daerah (Kali)	bpn, smd, luarPrv	5	43.215.000
1.02.01.00 6	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim (BLUD)				5.000.000.000
1.02.47	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase capaian indikator Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (%)		100	5.000.000.000
1.02.47.01	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Jumlah bulan pelaksanaan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD (Bulan)	bpn, smd, luarPrv	12	5.000.000.000
1.02.01.00 7	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI				12.124.626.000
1.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		75	5.929.300.160
1.02.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Kualitas layanan administrasi RS (%)	smd	100	5.929.300.160
1.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		3	1.436.331.840
1.02.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah unit kantor yang dilengkapi sarana prasarana (unit)	smd	100	751.701.840
1.02.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Alat kesehatan, alat kantor dan gedung terpelihara (Tahun)	smd	1	684.630.000
1.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		85	621.000.000
1.02.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur (%)	smd	100	412.000.000
1.02.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur (%)	smd	75	209.000.000
1.02.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase standar RS terhadap pelayanan obat dan perbekalan kesehatan (%)		85	1.379.860.000
1.02.15.03	Pengadaan Obat dan Bahan Pakai Habis Medis	Ketersediaan obat dan bahan habis pakai medis sesuai standar (%)	smd	85	1.379.860.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
1.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase standar RS terhadap pelayanan kesehatan (%)		100	1.334.900.000
1.02.23.08	Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan	Jumlah RSUD yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan akreditasi SNARS edisi I (RSUD)	smd	1	1.334.900.000
1.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase standar RS terhadap pelayanan kesehatan (%)		95	1.359.234.000
1.02.26.01	Pembangunan Rumah Sakit	Jumlah Gedung yang diadakan (Gedung)	smd	1	4.250.000
1.02.26.18	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah alat kesehatan yang diadakan (Unit/ Set)	smd	20	937.921.500
1.02.26.23	Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	Jumlah bahan logistik RS/ Balai yang diadakan (Bahan)	smd	25	417.062.500
1.02.27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Alat kesehatan rumah sakit berfungsi dengan baik (%)		100	64.000.000
1.02.27.17	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Alat kesehatan, alat kantor dan gedung terpelihara (Tahun)	smd	1	40.000.000
1.02.27.19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit	Jumlah unit sarana prasarana dan alkes yang dipelihara (unit)	smd	1	24.000.000
1.02.01.008	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI (BLUD)				3.000.000.000
1.02.47	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase capaian indikator Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (%)		80	3.000.000.000
1.02.47.01	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Jumlah bulan pelaksanaan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD (Bulan)	bpn, smd, luarPrv	12	3.000.000.000
1.02.02	RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda				490.948.178.600
1.02.02.001	RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda				25.948.178.600
1.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		84	3.204.600.000
1.02.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Kualitas layanan administrasi RS (%)	smd	84	3.204.600.000
1.02.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (%)		71	86.100.000
1.02.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah laporan SAKIP (Laporan)	smd	1	86.100.000
1.02.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Stock out dan stagnansi obat dan bhp medis (%)		4	1.000.000.000
1.02.15.01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Ketersediaan obat dan bahan habis pakai medis sesuai standar (%)	smd	100	1.000.000.000
1.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Ketepatan pengadaan sesuai perencanaan (%)		100	11.441.278.600
1.02.26.01	Pembangunan Rumah Sakit	Kesesuaian sapras RS sesuai standar RS kelas A (%)	smd	90	500.000.000
1.02.26.18	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Kesesuaian peralatan medis sesuai standar RS kelas A (%)	smd	95	4.705.554.467

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
1.02.26.24	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK)	Jumlah alat kesehatan yang diadakan (Unit/ Set)	smd	19	1.030.974.133
1.02.26.28	Pengadaan Peralatan Non Medis	Kesesuaian peralatan non medis sesuai standar kebutuhan (%)	smd	100	5.204.750.000
1.02.27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Sarana dan prasarana RS yang berfungsi dengan baik (%)		100	8.410.000.000
1.02.27.17	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah alat kesehatan yang terpelihara (Paket)	smd	4	8.000.000.000
		Ketepatan waktu pemeliharaan peralatan medis sesuai jadwal pemeliharaan (%)		95	
1.02.27.21	Pemeliharaan Peralatan Non Medis	Ketepatan waktu pemeliharaan peralatan non medis sesuai jadwal pemeliharaan (%)	smd	95	410.000.000
1.02.56	Program Pengembangan Dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Tingkat kepuasan kerja terhadap pengembangan SDM dan pemberdayaan SDM (%)		87	756.000.000
1.02.56.05	Peningkatan Keterampilan SDM	Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan 20 jam per tahun (%)	smd	100	756.000.000
1.02.02	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Tingkat Kepuasan Pasien (%)		91	120.000.000
1.02.02.02	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Terlaksana pengukuran kepuasan masyarakat/pasien (Kali)	smd	2	120.000.000
1.02.04	Program Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit	Persentase capaian indikator standar pelayanan minimal Rumah Sakit (%)		82	156.500.000
1.02.04.05	Penyelenggaraan pelayanan sesuai SPM	Persentase pencapaian SPM 22 Pelayanan Untuk Mencapai Target Indikator (%)	smd	88	156.500.000
1.02.05	Program Rumah Sakit Pendidikan	Peningkatan mutu luaran peserta didik (peningkatan IPK/Tahun)		3,25	182.800.000
1.02.05.01	Pendidikan dan Penelitian di RS. Pendidikan	Jumlah peserta didik yang melaksanakan pendidikan di RS (Jumlah)	smd	60	182.800.000
		Jumlah penelitian yang difasilitasi oleh RS (Penelitian)		350	
		Jumlah Program Studi yang terlibat dalam proses pembelajaran secara Interprofessional education (IPE) (Jenis Program studi)		3	
1.02.06	Program Peningkatan Tata Kelola RS. dan Tata Kelola Klinis	Pencapaian indikator kinerja utama RS (%)		86	516.900.000
1.02.06.01	Pelaksanaan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Nilai hasil penilaian kinerja BLUD (%)	smd	80	199.400.000
1.02.06.02	Pelaksanaan Peningkatan Tata Kelola Klinis	Penerapan clinical pathway & panduan praktik klinis (%)	smd	90	317.500.000
1.02.07	Program Tata Kelola Keuangan	Cost recovery (%)		81	74.000.000
1.02.07.01	Pelaksanaan Kegiatan Keuangan	Nilai Rasio Keuangan (0-19) (Nilai)	smd	13	74.000.000
		Nilai kepatuhan pengelolaan BLUD (0-11) (Nilai)		7	
1.02.02.00 2	RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda (BLUD)				465.000.000.000
1.02.47	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Jenis pelayanan sesuai standar rumah sakit kelas A (%)		100	465.000.000.000
1.02.47.01	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Jumlah pelayanan dan pendukung pelayanan yang diadakan (Jenis belanja BLUD)	smd	3	465.000.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
1.02.03	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan				238.899.364.550
1.02.03.001	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan				22.899.364.550
1.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		79,3	3.592.200.000
1.02.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (Bulan)	bpn	12	3.592.200.000
1.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		90	2.007.050.000
1.02.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan, Kelengkapan sarana dan prasarana yang dipenuhi (unit / stell)	bpn	400	1.907.050.000
1.02.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah perlengkapan dan peralatan RS yang terpelihara secara rutin dan berkala (unit / set)	bpn	130	100.000.000
1.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		100	1.600.000.000
1.02.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegaitan Rapat Koordinasi Ke Dalam Daerah (Orang)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	300	1.000.000.000
		Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Orang)		90	
1.02.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan/Bimtek (orang)	bpn	600	600.000.000
1.02.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (%)		73	98.400.000
1.02.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan (Dokumen)	bpn	4	30.000.000
1.02.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah laporan capaian kinerja (Laporan)	bpn	4	68.400.000
1.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Pelayanan sesuai Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) (%)		100	230.000.000
1.02.23.08	Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan	Akreditasi Rumah Sakit SNARS Versi 1 (Sertifikat)	bpn	1	230.000.000
1.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Prosentase Kelengkapan sarana prasarana dan alkes sesuai standar kelas rumah sakit (%)		85	12.976.114.550
1.02.26.01	Pembangunan Rumah Sakit	Jumlah Pembangunan Gedung (Gedung)	bpn	1	8.223.364.550
1.02.26.18	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah Alat Kesehatan yang diadakan (Unit/Set)	bpn	50	4.254.750.000
1.02.26.19	Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan rumah sakit (DAK)	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Diadakan (Unit)	bpn	1	50.000.000
1.02.26.20	Rehabilitasi sedang / berat gedung rumah sakit (DAK)	Jumlah Gedung/Bangunan yang di Renovasi (Gedung)	bpn	2	100.000.000
1.02.26.24	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK)	Jumlah Peralatan Kesehatan yang dilakukan peliharaan. (Unit)	bpn	85	348.000.000
		Jumlah Alat Kesehatan yang diadakan (Unit/Set)		85	
1.02.27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/	Persentase sarana dan prasarana RS yang berfungsi sesuai standar (%)		93	1.450.100.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
	rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata				
1.02.27.17	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah Peralatan Kesehatan yang dilakukan peliharaan. (Unit)	bpn	700	600.000.000
1.02.27.18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit	Jumlah infrastruktur RS yang terpelihara sarana rutin dan berkala (Gedung)	bpn	2	500.000.000
1.02.27.19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit	Kegiatan (Laporan Kegiatan)	bpn	4	350.100.000
1.02.62	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Prosentase Jejaring dengan Fasilitas Kesehatan (%)		60	220.000.000
1.02.62.63	Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis	Jumlah Faskes yang bekerja sama / Jejaring dengan RSKD (Jejaring)	bpn	10	220.000.000
1.02.02	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Indeks kepuasan pelanggan (%)		79,3	100.000.000
1.02.02.01	Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat	Jumlah Survey (Orang)	bpn	300	100.000.000
1.02.03	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Penilaian proper hijau (Sertifikat)		85	450.000.000
1.02.03.01	Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)	Sertifikat Proper Lingkungan (Sertifikat)	bpn	1	200.000.000
1.02.03.02	Pemusnahan B3 dan Limbah B3, Limbah Medis dan Lain-lain	Sampah B3 (Kg)	bpn	10000	250.000.000
1.02.04	Program Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit	Persentase capaian indikator Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (%)		90	175.500.000
1.02.04.01	Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Rumah sakit	Jumlah pasien kasus KDRT dan kasus lainnya (Orang)	bpn	15	150.500.000
1.02.04.03	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit	Jumlah Kegiatan Penyuluhan/pencegahan Infeksi/Pemeriksaan (Kegiatan)	bpn	5	25.000.000
1.02.03.00 2	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan (BLUD)				216.000.000.000
1.02.47	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Jenis Pelayanan Sesuai Standar Rumah Sakit Kelas B (Instalasi / unit)		19	216.000.000.000
1.02.47.01	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Jumlah Kunjungan Pasien (Orang)	bpn	187332	216.000.000.000
1.02.04	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam				43.588.515.000
1.02.04.00 1	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam				25.938.515.000
1.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (Nilai)		80	12.378.899.120
1.02.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Adminstrasi Perkantoran (Bulan)	smd	12	12.378.899.120
1.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		8	358.650.000
1.02.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan penunjang pelayanan (Jenis)	smd	8	243.150.000
1.02.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan sarana dan prasarana (Bulan)	smd	12	115.500.000
1.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		85	1.301.500.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
1.02.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Bimtek Kompetensi (Orang)	smd	160	1.301.500.000
1.02.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (%)		75	609.000.000
1.02.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan (Dokumen)	smd	12	609.000.000
1.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelaksanaan standar Pelayanan Keperawatan (%)		80	875.800.000
1.02.16.12	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Jumlah Kegiatan Terapi Keperawatan Keluarga (Kegiatan)	smd	120	875.800.000
1.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Capaian Standar Indikator Keselamatan Pasien (%)		70	455.000.000
1.02.23.08	Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan	Jumlah Kegiatan Standarisasi Pelayanan Kesehatan (Kegiatan)	smd	5	455.000.000
1.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Sarana dan Prasarana RS Sesuai Standar (%)		80	3.441.672.650
1.02.26.18	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah alat-alat kesehatan yang diadakan (Jenis)	smd	5	825.150.000
1.02.26.19	Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan rumah sakit (DAK)	Jumlah sarana dan prasarana kesehatan rumah sakit (DAK) yang diadakan (Jenis)	smd	2	1.032.970.900
1.02.26.23	Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	Jumlah jenis Pengadaan logistik Pasien (jenis)	smd	2	129.000.000
1.02.26.25	Pengadaan Meubeler Rumah Sakit	Jumlah meubeler rumah sakit yang diadakan (Jenis)	smd	4	306.700.000
1.02.26.26	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit	Jumlah perlengkapan rumah tangga rumah sakit yang diadakan (Jenis)	smd	5	1.147.851.750
1.02.27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase Sarana dan Prasarana RS Yang Berfungsi dengan Baik (%)		90	835.650.000
1.02.27.17	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah jenis alat-alat kesehatan rumah sakit yang layak pakai dan berfungsi baik (Jenis)	smd	9	256.650.000
1.02.27.19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit	Jumlah instalasi pengolahan limbah rumah sakit yang dipelihara dengan baik (Instalasi)	smd	1	303.000.000
1.02.27.20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Sakit	Jumlah Perlengkapan Rumah Sakit Yang terpelihara (Jenis)	smd	2	276.000.000
1.02.61	Program Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Rumah Sakit	Persentase teknologi/aplikasi yang dapat dimanfaatkan dengan optimal (%)		83,33	476.920.000
1.02.61.61	Pengembangan SIM-RS	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi RS (aplikasi)	smd	30	476.920.000
1.02.62	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Piutang rumah sakit yang telah terbayarkan (Rupiah)		1000000000	615.000.000
1.02.62.62	Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat	Jumlah laporan / Dokumen koordinasi dengan kab/kota (Laporan)	smd	25	615.000.000
1.02.63	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur sesuai dengan aturan yang berlaku (%)		93	703.200.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
1.02.63.12	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Jenis pakaian kerja lapangan yang diadakan (Jenis)	smd	8	152.100.000
1.02.63.63	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah Jenis pakaian dinas yang diadakan (Jenis)	smd	3	551.100.000
1.02.04	Program Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit	Persentase capaian indikator standar pelayanan minimal rumah sakit (%)		90	3.887.223.230
1.02.04.01	Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Rumah sakit	Jumlah fasilitas/bangunan/sarana pelayanan yang diadakan/terpelihara sesuai SPM (Gedung/fasilitas)	smd	2	3.887.223.230
1.02.04.002	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam (BLUD)				17.650.000.000
1.02.47	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat` (%)		95	17.650.000.000
1.02.47.01	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Jumlah Pelayanan dan Pendukung Pelayanan (Jenis)	smd	0	17.650.000.000
		Jumlah Pelayanan dan Pendukung Pelayanan (Bulan)		12	
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				2.100.080.759.602
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat				2.100.080.759.602
1.03.01.001	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat				1.928.683.840.082
1.03.04	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		87	16.877.088.000
1.03.04.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (Bulan)	smd	12	16.877.088.000
		Meningkatnya Kinerja Aparatur (%)		100	
1.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		7	5.747.322.876
1.03.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor (Unit)	smd	14	1.927.900.000
1.03.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya Kinerja Aparatur (%)	smd	0	3.819.422.876
		Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)		12	
		Luas Bangunan yang di Rehabilitasi (m2)		100	
1.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		65	9.775.900.000
1.03.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kinerja Aparatur (%)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	0	8.126.050.000
		Jumlah pelaksanaan koordinasi luar dan dalam daerah (Bulan)		12	
1.03.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kinerja Aparatur (%)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv		1.649.850.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
		Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan (Orang)		40	
1.03.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (%)		80	1.820.000.000
1.03.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran (Dokumen)	smd	4	1.100.000.000
1.03.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	5	720.000.000
1.03.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Tingkat kemantapan jalan provinsi (%)		63,46	1.329.828.399.770
1.03.15.01	Perencanaan dan pengawasan pembangunan jalan dan jembatan	Jumlah Laporan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Jalan dan Jembatan (Dokumen)	smd	46	36.500.000.000
1.03.15.02	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun (Km)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, ppu, bpn, smd	70,99	1.060.156.423.770
1.03.15.03	Pembangunan Jembatan, Pembangunan Turap/Talud/Bronjong dan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Jumlah jembatan yang dibangun (Jembatan Bailey)	kk, ktm, mah	9	164.900.000.000
		Jumlah Turap/Talud/Bronjong yang dibangun (Titik)		3	
		Panjang saluran drainase yang dibangun (Meter)		6000	
1.03.15.04	Peningkatan Jalan (DAK)	Panjang Jalan yang Dibangun (Km)	bru, kkr, ktm, ppu	5,9	68.271.976.000
1.03.16	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kapasitas Air Baku (L/detik)		8622	256.652.331.562
1.03.16.01	Pembangunan Prasarana Air Baku, Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai	Panjang Bangunan Pengaman Pantai (Kilometer)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	1,82	201.255.233.562
		Jumlah lokasi banjir yang ditangani (lokasi)		13	
		Jumlah sarana dan prasarana air baku yang dibangun (Unit)		2	
1.03.16.02	Pembangunan Jaringan Irigasi	Panjang jaringan irigasi yang dibangun (Kilometer)	bru, kkr, ktm, mah, psr	11,25	12.251.450.000
		Jumlah bendung yang dibangun (unit)			
1.03.16.03	Perencanaan, Pengawasan dan Pengelolaan Sumber Daya Air	Jumlah Prasarana SDA yang direncanakan (Unit)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	25	37.954.323.000
		Jumlah Peraturan Gubernur yang Ditetapkan (Pergub)		0	
		Jumlah Pembangunan Prasarana SDA yang Diawasi (Unit)		25	
1.03.16.04	Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK)	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (Bulan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah	0	5.191.325.000
		Luar Daerah Irigasi Yang Terbangun (Hektar)		750	
1.03.17	Program Pembangunan Infrastruktur Keciaptakarya	Cakupan layanan Air Minum Perpipa (%)		67,23	265.207.409.281

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
1.03.17.01	Pembangunan dan Rehabilitasi gedung	Jumlah Gedung yang dibangun/direhabilitasi (Bangunan Gedung)	bpn, smd, luarPrv	10	152.141.600.000
1.03.17.02	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi	Jumlah SPAM (unit) (Unit)	ktm, bpn, btg, smd	4	100.000.000.000
		Jumlah IPAL yang dibangun (Unit) (Unit)		0	
		Jumlah IPLT yang dibangun (Unit) (Unit)		0	
		Jumlah TPA yang dibangun (Unit) (Unit)		1	
1.03.17.03	Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Keciptakarya	Jumlah Gedung yang disusun perencanaannya (unit) (Unit)	ktm, bpn, btg, smd, luarPrv	5	13.065.809.281
		Jumlah SPAM, IPAL, IPLT dan TPA yang disusun Perencanaannya (unit) (Unit)		4	
		Jumlah pembangunan infrastruktur yang dilakukan pengawasan (Unit) (Unit)		5	
1.03.18	Program Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi	Jumlah tenaga kerja jasa konstruksi yang bersertifikat (Orang)		27846	17.110.155.437
1.03.18.01	Penyelenggaraan Pengaturan Jasa Konstruksi	Jumlah Perda dan Pergub pengaturan jasa konstruksi (Perda/Pergub)	smd	1	3.500.000.000
		Jumlah Peraturan/Pedoman Jasa Konstruksi (Dokumen)		1	
		Jumlah Peserta Sosialisasi dan Koordinasi Jasa Konstruksi (Orang)		850	
1.03.18.02	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Jasa Konstruksi	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan fasilitasi sertifikasi (Orang)	bru, kbr, kkr, ktm, psr, ppu, bpn, btg, smd	5780	12.628.155.437
		Jumlah Peserta Pelatihan MTU di Kab/Kota (Orang)		250	
		Jumlah Kegiatan Layanan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (Laporan)		1	
1.03.18.03	Pengawasan Jasa Konstruksi	Jumlah Kegiatan Pengawasan tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Paket)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	80	982.000.000
		Jumlah Kegiatan Pengawasan tertib Usaha Jasa Konstruksi (Lokasi)		30	
		jumlah kegiatan pengawasan tertib pemanfaatan dan kinerja (%)		0	
1.03.70	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Prosentase Kesesuaian RTRW Provinsi dengan RTRW Kabupaten/Kota (%)		77,19	25.665.233.156
1.03.70.01	Perencanaan Penataan Ruang	Prosentase Jumlah RRTR KSP yang mendapat Persetujuan Substansi (%)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	26	15.094.100.000
1.03.70.02	Pemanfaatan Ruang & Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan evaluasi pemanfaatan ruang (Kabupaten/Kota)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	2	3.865.233.156
1.03.70.03	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah lokasi pada Kabupaten/Kota yang dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang (Lokasi)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	150	6.705.900.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
		Operasionalisasi dan Koordinasi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Kegiatan)		1	
1.03.01.00 2	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I				65.000.000.000
1.03.04	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		87	2.690.977.920
1.03.04.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (Bulan)	psr, ppu, bpn	12	2.690.977.920
1.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		3	2.846.075.000
1.03.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor (Unit)	psr, ppu, bpn	1	1.026.200.000
1.03.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	psr, ppu, bpn	12	1.819.875.000
1.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		65	1.028.075.000
1.03.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (Kegiatan)	psr, ppu, bpn, luarPrv	175	774.375.000
		Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah (Kegiatan)		70	
		Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman untuk Rapat dan Tamu (Bulan)		12	
1.03.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang Mengikuti Pelatihan / Bimtek (Orang)	bpn, smd, luarPrv	18	253.700.000
1.03.19	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	Persentase infrastruktur dalam kondisi baik di wilayah I (%)		63	58.434.872.080
1.03.19.01	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah I	Terlaksananya Pemeliharaan Fungsional Jalan (KM)	psr, ppu, bpn	214	49.999.881.443,10
1.03.19.02	Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana & prasarana SDA & CK Wilayah I	Daerah irigasi yang terpelihara (Ha)	psr, ppu, bpn	40	8.434.990.636,90
		Luas Fungsional Daerah Irigasi yang Terpelihara (Ha)		40	
1.03.01.00 3	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II				55.000.000.000
1.03.04	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		87	3.461.002.640
1.03.04.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (Bulan)	smd	12	3.461.002.640
		Meningkatnya Kinerja Aparatur (%)		100	
1.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		3	1.458.344.710
1.03.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya Kinerja Aparatur (%)	smd	100	341.250.000
		Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor (Unit)		53	

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
1.03.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya Kinerja Aparatur (%)	smd	100	1.117.094.710
		Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)		12	
		Luas Bangunan yang di Rehabilitasi (m2)		1245	
1.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		65	805.000.000
1.03.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (Kegiatan)	kbr, kkr, mah, bpn, smd, luarPrv	30	730.000.000
		Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah (Kegiatan)		175	
		Jumlah porsi penyediaan makanan dan minuman untuk rapat dan tamu (Porsi)		800	
1.03.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN dan Non ASN yang mengikuti pelatihan/bimtek/sosialisasi dan kursus-kursus singkat (Orang)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	60	75.000.000
1.03.20	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II	Persentase infrastruktur dalam kondisi baik di wilayah II (%)		63	49.275.652.650
1.03.20.01	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah II	Terlaksananya Pemeliharaan Fungsional Jalan (KM)	kbr, kkr, mah, smd	10	37.076.150.819
		Jumlah Jembatan yang dipelihara efektif (Buah)		10	
1.03.20.02	Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana & prasarana SDA & CK Wilayah II	Luas Fungsional Daerah Irigasi yang Terpelihara (Ha)	kk, smd	55	12.199.501.831
		Jumlah bangunan pengendali banjir yang dipelihara efektif (Lokasi)		10	
1.03.01.004	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III				40.000.000.000
1.03.04	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		87	3.816.811.760
1.03.04.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (Bulan)	bru, ktm	12	3.816.811.760
1.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		3	6.999.575.740
1.03.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor (Unit)	bru, ktm	10	5.653.327.100
1.03.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	bru, ktm	12	1.346.248.640
		Luas bangunan yang dipelihara (M2)		2339	
1.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		65	939.090.000
1.03.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (Kegiatan)	bru, ktm, bpn, btg, smd, luarPrv	25	883.750.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
		Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah (Kegiatan)		120	
		Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman untuk Rapat dan Tamu (Bulan)		10	
1.03.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang Mengikuti Pelatihan / Bimtek (Orang)	bru, ktm, bpn, smd, luarPrv	10	55.340.000
1.03.21	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	Persentase infrastruktur dalam kondisi baik di wilayah III (%)		63	28.244.522.500
1.03.21.01	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah III	Panjang jalan yang dipelihara Fungsional UPTD Wilayah III (KM)	bru, ktm	405	21.833.900.000
		Jumlah jembatan yang dipelihara efektif (Buah)		20	
1.03.21.02	Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana & prasarana SDA & CK Wilayah III	Luas Fungsional Daerah Irigasi yang Terpelihara (Ha)	bru, ktm	13597	6.410.622.500
1.03.01.005	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi				11.396.919.520
1.03.04	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		87	1.953.059.520
1.03.04.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (Bulan)	smd	12	1.953.059.520
1.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		3	4.087.600.000
1.03.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor (Unit)	smd	3	3.109.200.000
1.03.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	smd	12	978.400.000
1.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		65	2.854.860.000
1.03.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kinerja Aparatur (%)	bpn, smd, luarPrv	1600000000	2.526.260.000
1.03.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kinerja Aparatur (%)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	400000000	328.600.000
1.03.22	Program Penyelenggaraan Laboratorium Konstruksi	Tingkat Pemenuhan Standarisasi Mutu Konstruksi (%)		100	2.501.400.000
1.03.22.01	Pelayanan Pengujian Mutu Konstruksi	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Konstruksi (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, bpn, btg, smd, luarPrv	5	1.785.800.000
		Jumlah Dokumen Monitoring Mutu Konstruksi (Dokumen)		4	
1.03.22.02	Penerapan Strandarisasi Konstruksi	Jumlah Dokumen Kaji Ulang Laboratorium (Dokumen)	bpn, smd, luarPrv	4	715.600.000
		Jumlah Dokumen Hasil Audit Laboratorium (Dokumen)		2	
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				248.097.253.843

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat				248.097.253.843
1.03.01.001	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat				248.097.253.843
1.04.15	Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah rumah tidak layak huni (unit)		36722	248.097.253.843
1.04.15.01	Pembangunan Rumah Layak & Prasarana Sarana dan Utilitas	Jumlah perumahan yang mendapat bantuan PSU (unit) (Unit)	kk, ppu, bpn, btg, smd	8	100.000.000.000
		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani (unit)		600	
1.04.15.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Kumuh	Luas kawasan kumuh yang ditangani (ha)	bpn, smd	11	128.097.253.843
1.04.15.03	Perencanaan & pengawasan pembangunan perumahan dan kawasan kumuh	Jumlah perumahan dan kawasan permukiman yang direncanakan (Unit)	kk, ppu, bpn, smd	0	20.000.000.000
		Jumlah pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang dilakukan pengawasan (Unit)		0	
		Jumlah perumahan dan kawasan permukiman yang direncanakan (unit)		33	
		Jumlah pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang dilakukan pengawasan (unit)		39	
1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat				33.487.277.120
1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja				12.000.000.000
1.05.01.001	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)				12.000.000.000
1.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		90	4.838.034.200
1.05.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (bulan)	smd	12	4.838.034.200
1.05.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		4	1.065.694.800
1.05.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana (bulan)	smd	12	631.145.300
1.05.08.03	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor (unit)	smd	45	434.549.500
1.05.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		50	1.470.230.000
1.05.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (kegiatan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	28	898.200.000
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (kegiatan)		60	
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman (bulan)		12	
1.05.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (Kegiatan)	bpn, smd, luarPrv	10	572.030.000
1.05.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (%)		79	364.412.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
	dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan				
1.05.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran (dokumen)	bpn, smd, luarPrv	4	208.600.000
1.05.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan (dokumen)	bpn, smd, luarPrv	23	155.812.000
1.05.60	Program Penegakkan Produk Hukum Daerah	Penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah (%)			1.050.540.000
1.05.60.02	Pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan produk Hukum daerah	Koordinasi pelaksanaan dan kerjasama pembinaan Perda dan Perkada (dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	5	422.800.000
		Koordinasi pelaksanaan dan kerjasama pengawasan Perda dan Perkada (dokumen)		5	
		Penyuluhan Pelanggaran Perda dan perkada (dokumen)		10	
1.05.60.04	Penyelenggaraan Penyelidikan dan Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	Fasilitasi PPNS se Kaltim (dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	5	627.740.000
		Rapat Koordinasi teknis PPNS (dokumen)		2	
		Deteksi Dini pelanggaran perda dan perkada se kaltim (dokumen)		10	
		Pendampingan dan pelaksanaan penegakan perda provinsi kabupaten Kota se Kaltim (dokumen)		10	
1.05.63	Program Penyelenggaraan Ketertarikan Umum dan Ketertarikan masyarakat	Persentase pengamanan Penyelenggaraan Ketertarikan Umum dan Ketertarikan masyarakat serta Penyelenggaraan Penjagaan Pengawasan dan Patroli (%)		86	1.429.020.000
1.05.63.01	Peningkatan Pelaksanaan Operasional dan Pengendalian	Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketertarikan umum dan ketertarikan masyarakat (kegiatan)	kk, smd	279	838.975.000
1.05.63.02	Peningkatan Pengamanan dan Pengawasan Protokol	Jumlah kegiatan pengawasan dan pengamanan protokol (kegiatan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	93	590.045.000
1.05.64	Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan	kapasitas satlinmas daerah (persen)		86	877.609.000
1.05.64.01	Pelaksanaan Bina Potensi masyarakat	pendataan satlinmas Se Kaltim (dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	10	484.540.000
		Bimtek Satlinmas Se Kaltim (dokumen)		2	
		FGD Kelembagaan Satlinmas (dokumen)		1	
1.05.64.02	Pelaksanaan Perlindungan Masyarakat	FGD Kelembagaan Satlinmas (dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	0	393.069.000
		Perbantuan penanganan bencana musibah di daerah (dokumen)		10	

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
		Monitoring Operasional Satlinmas dalam rangka pilpres, pileg, dan pilkada serentak (dokumen)		0	
		Apel Siaga Satlinmas dalam rangka pilpres, pileg, dan pilkada serentak (dokumen)		0	
1.05.65	Program Peningkatan Kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Persentase masyarakat tanggap darurat bencana kebakaran (%)		80	904.460.000
1.05.65.01	Pencegahan dan Pengendalian Bidang Kebakaran	Kordinasi dan fasilitasi pencegahan kebakaran se Kaltim (dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	10	501.100.000
		Pelaksanaan, pengendalian dan Pencegahan kebakaran (dokumen)		24	
		Pemetaan daerah rawan kebakaran dan pendataan sistem proteksi kebakaran se kaltim (dokumen)		10	
1.05.65.02	Pelatihan dan pembinaan bidang kebakaran	Pelatihan petugas pemadam kebakaran se kaltim (dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	2	403.360.000
		Pembinaan Petugas Pemadam Kebakaran dan masyarakat se kaltim (dokumen)		4	
1.05.02	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				11.183.691.400
1.05.02.001	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				11.183.691.400
1.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		61	1.024.230.400
1.05.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Anggaran Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (Bulan)	smd	12	1.024.230.400
1.05.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (Unit)		5	757.700.000
1.05.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana (Bulan)	smd	12	113.500.000
1.05.08.03	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Tersedianya Peralatan dan Kelengkapan ASN Kesbangpol Prov. Kaltim (%)	smd	50	644.200.000
		Tersedianya Peralatan dan Kelengkapan ASN Kesbangpol Prov. Kaltim (Unit)		4	
1.05.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		60	979.150.000
1.05.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah (Kali)	smd	35	888.250.000
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Kali)		35	
1.05.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Aparatur Kesbangpol yang Profesional (Orang)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	150	90.900.000
1.05.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (%)		60	839.812.500

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
1.05.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Dokumen Perencanaan Anggaran (Dokumen)	smd	4	610.837.500
1.05.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Dokumen Laporan (Dokumen)	smd	6	228.975.000
1.05.15	Program Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Lingkungan	Penurunan jumlah konflik sosial di Kalimantan Timur (Konflik)		102	1.661.575.000
1.05.15.01	Pemantauan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terlaksananya Penilaian dan Pemberian Panji Keberhasilan Pembangunan Bidang Kondusifitas Daerah (Orang)	smd	20	496.620.000
		Jumlah Rakor dan Peserta Rakor FKDM (Orang)		300	
1.05.15.05	Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Peserta Revitalisasi (Orang)	smd		646.175.000
		Terlaksananya Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Rencana Aksi)		25	
1.05.15.29	Sosialisasi/Desiminasi/Publikasi Perundang-Undangan Penanganan Konflik dan Peraturan Pelaksanaannya	Meningkatnya SDM Aparatur dalam upaya maksimalisasi keamanan, ketertiban dan ketentraman (Orang)	smd	210	231.117.500
1.05.15.34	Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Intelijen	Tenaga terlatih dan Profesional (Orang)	smd	60	287.662.500
1.05.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase masyarakat Kalimantan Timur khususnya pelajar SLTA yang Memahami Wawasan dan Karakter Bangsa (%) (%)		5	1.621.700.000
1.05.17.07	Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam bela negara guna meredam konflik sosial (Orang)	smd	100	810.850.000
		Tersedianya data informasi perkembangan FPK di Daerah (Dokumen)		10	
		Terlatihnya peserta yang mengikuti Kegiatan Pembauran Kebangsaan (Orang)		100	
1.05.17.08	Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)	Terlatihnya peserta yang mengikuti Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (Orang)	smd	100	810.850.000
1.05.21	Program pendidikan politik masyarakat	Persentase penggunaan hak-hak politik masyarakat (%)		75,5	1.654.217.500
1.05.21.06	Pemantauan perkembangan politik di daerah	Meningkatnya Partisipasi Pemilih pada Pileg/Pilpres 2019 (%)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	77,5	581.475.000
1.05.21.22	Penyusunan IDI	Terselenggaranya Kegiatan IDI bagi Aparatur (Orang)	smd	100	619.397.500
1.05.21.23	Penyusunan data base partai politik	Terselenggaranya kegiatan dan tersusunnya data parpol (Orang)	smd	80	244.545.000
1.05.21.24	Verifikasi Berkas Administrasi Bantuan Partai Politik	Terselenggaranya kegiatan dan verifikasi berkas Administrasi Bantuan Keuangan Parpol (Parpol)	smd	10	208.800.000
1.05.62	Program Pembinaan dan Pengembangan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Penguatan Peran Ormas	Ormas yang berperan aktif dalam kegiatan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (Ormas)		120	2.645.306.000
1.05.62.01	Peningkatan Kapasitas Ormas	Terlatihnya peserta yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang -	smd	150	738.012.200

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
		Undang-undang tentang Organisasi Kemasyarakatan (Orang)			
1.05.62.02	Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Pendaftaran Ormas dan Pengelolaan SIORMAS (%)	smd	100	926.955.000
		Terbentuknya Tim Terpadu Pengawasan Ormas (Tim)		1	
1.05.62.03	Pencegahan dan Penanganan Masalah Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terlaksananya Fasilitas Pelayanan Bahan Pokok ke 10 Kab/Kota (Kab/Kota)	smd	10	772.690.400
1.05.62.09	Forum Diskusi Aktual Agama dan Kepercayaan	Terlaksananya Kegiatan Forum Diskusi Aktual Agama dan Kepercayaan (Orang)	smd	100	207.648.400
1.05.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				10.303.585.720
1.05.03.00 1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				10.303.585.720
1.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		90	2.622.160.720
1.05.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	smd	12	2.622.160.720
		Jumlah tenaga pemeliharaan dan pengamanan alat peringatan dini (O/B)		120	
		Jumlah satuan tenaga penanggulangan bencana (O/B)		182	
1.05.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit Kerja PD yang Memiliki Kinerja Pelayanan Tepat Waktu (Unit)		4	695.560.000
1.05.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	smd	12	441.310.000
1.05.08.03	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah barang peningkatan sarana dan prasarana peralatan kantor (unit)	smd, luarPrv	25	254.250.000
1.05.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		17,39	743.725.000
1.05.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan konsultasi Ke Luar Daerah (Kegiatan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	15	516.875.000
		Jumlah Kegiatan Rapat koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah (Kegiatan)		40	
		Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman (Bulan)		12	
		Jumlah peserta yang mengikuti Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana (Orang)		0	
		Jumlah PNS yang Mengikuti Pelatihan/bimtek (orang)		0	
1.05.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang Mengikuti Pelatihan/bimtek (orang)	smd, luarPrv	44	226.850.000
		Jumlah Pakaian Batik Tradisional (Stel)		53	
		Jumlah Pakaian Dinas Harian (PDH) (stel)		0	
		Jumlah Pakaian Olahraga (Stel)		53	
		Jumlah Pakaian Seragam Tertentu (Stel)		0	

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
		Jumlah Pakaian Seragam Lengkap Satpam (Stel)		0	
		Jumlah Pakaian Kerja Lapangan (Stel)		0	
1.05.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (Nilai)		70	591.720.000
1.05.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran (Dokumen)	smd	10	151.500.000
1.05.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah peserta yang mengikuti Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana (Orang)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	120	440.220.000
		Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan (Dokumen)		5	
		Jumlah BPBD yang dilakukan Penilaian (Kabupaten/Kota)		10	
		Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan (Kabupaten/Kota)		10	
1.05.49	Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana (Persen)		85	1.785.920.000
1.05.49.13	Koordinasi, Evaluasi dan Monitoring Penanggulangan Bencana	Jumlah koordinasi penanggulangan bencana (kali)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	17	569.655.000
		Jumlah laporan monitoring evaluasi penanggulangan bencana (Laporan)		2	
		Jumlah operasi penangan kejadian bencana (kali)		20	
1.05.49.14	Pengembangan Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan	Jumlah Peralatan Penanggulangan Bencana yang Tersedia (Unit)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	75	540.000.000
		Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Pergudangan dan Peralatan Penanggulangan Bencana (Orang)		70	
		Jumlah peserta Simulasi Peralatan Penanggulangan Bencana (Orang)		120	
		Jumlah logistik penanggulangan bencana (barang)		100	
1.05.49.15	Pengembangan SDM dan Informasi Penanggulangan Bencana	Jumlah Peserta Peringatan Bulan PRB (Orang)	ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	10	326.265.000
		Jumlah peserta pelatihan SAR (Orang)		30	
		Jumlah peserta pembekalan Tim Reaksi Cepat (TRC) (Orang)		30	
1.05.49.16	Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB)	Jumlah Pendataan, Kaji Cepat PB dan Penyebaran Informasi Kebencanaan (Kab/Kota)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	10	350.000.000
		Jumlah Laporan Kegiatan PUSDalops PB (Laporan)		12	
		Jumlah laporan pemantauan titik panas (Laporan)		12	
		Jumlah laporan pemantauan early warning system (Laporan)		12	
		Jumlah Laporan Kejadian Kebencanaan (Laporan)		12	

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
1.05.51	Program Pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah desa/kelurahan tangguh bencana yang terbentuk dan memperoleh peringatan dini bencana (Desa / Kelurahan)		15	2.347.900.000
1.05.51.03	Penanggulangan bencana berbasis masyarakat	Jumlah peserta Bimtek Relawan Desa Tangguh Bencana (Destana) (Orang)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	60	### #####
		Jumlah peserta Bimtek Relawan Penanggulangan Bencana (Orang)			
		Jumlah peserta Sosialisasi Desa Tangguh Bencana (Orang)		240	
		Jumlah peserta penyegaran Fasilitator Desa Tangguh Bencana (Orang)		30	
		Jumlah peserta Fasilitasi Pembentukan Relawan Penanggulangan Bencana dan Forum PRB Desa Tangguh Bencana (Orang)		180	
		Jumlah dokumen Kajian dan Pemetaan Risiko Bencana Desa Tangguh Bencana (Dokumen)		6	
				6	
		Jumlah dokumen Rencana Kontinjensi Penanggulangan Bencana Desa Tangguh Bencana (Dokumen)		8	
		Jumlah peserta Pembekalan Teknis Penanggulangan Bencana Relawan Desa Tangguh Bencana (Orang)		240	
		Jumlah Peserta Seminar Hasil Desa Tangguh Bencana (Orang)		210	
		Jumlah Peserta Simulasi Penanggulangan Bencana Desa Tangguh Bencana (Orang)		120	
		Jumlah Peta Jalur evakuasi Destana (Peta)		6	
		Jumlah Rambu-rambu Destana (Buah)		90	
		Laporan perkembangan Desa Tangguh Bencana (Laporan)		1	
		Jumlah orang yang mengikuti Kompetensi Desa Tangguh Bencana tingkat Provinsi dan Nasional (Orang)		15	
1.05.51.04	Penyusunan Data Base dan Pemetaan Rawan Bencana	Jumlah Peta Rawan Bencana (Peta)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	5	1.086.000.000
		Jumlah dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengurangan Risiko Bencana (Dokumen)		0	
		Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)/review (Dokumen)		0	
1.05.51.05	Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengurangan Risiko Bencana (PRB)	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan untuk peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pengurangan risiko bencana (kegiatan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	8	275.000.000
1.05.51.16	Pengembangan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan	Jumlah Lokasi Monitoring Daerah Rawan Bencana (Kabupaten/Kota)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	10	212.450.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
		Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pekan Pengurangan Risiko Bencana (Orang)		0	
		Jumlah peserta yang mengikuti Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (Orang)			
		Jumlah dokumen Kajian Teknis Bencana (Dokumen)		0	
		Jumlah pemasangan peralatan Peringatan Dini (EWS) (Unit)		3	
		Jumlah pemantauan peralatan Peringatan Dini (EWS) (Unit)		12	
		Jumlah dokumen SOP peringatan dini/review (Dokumen)		0	
		Jumlah media penyebaran informasi kebencanaan (Media)		3	
		Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Kebencanaan (Aplikasi)		1	
1.05.51.17	Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Kesiapsiagaan	Jumlah peserta Rapat Teknis Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (Orang)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	100	436.950.000
		Jumlah peserta Jambore Relawan Bencana (Orang)		500	
		Jumlah peserta Peringatan Hari Kesiapsiagaan Nasional (Orang)		250	
		Jumlah dokumen Rencana Kontijensi Bencana dan Simulasi Penanggulangan Bencana (Dokumen)		1	
		Jumlah dokumen review Rencana Kontijensi Bencana dan Simulasi Penanggulangan Bencana (Dokumen)		1	
		Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Apel Siaga (Orang)		500	
		Jumlah lokasi pemasangan Peta dan Rambu Bencana (Kab/Kota)		1	
		Jumlah Kab/kota yang mendapat pelayanan informasi rawan bencana (Kab/Kota)		10	
		Jumlah Satuan Tugas (Satgas) Kesiapsiagaan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) (Orang)		26	
		Jumlah dokumen Profil Kesiapsiagaan (Dokumen)		0	
1.05.55	Program Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Bencana	Persentase Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (Persen)		60	1.516.600.000
1.05.55.01	Sosialisasi dan Rakornis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Jumlah Peserta Sosialisasi (bimtek JITUPASNA) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (orang)	ktm, psr, bpn, btg, luarPrv	40	400.000.000
		Jumlah Peserta Rakornis Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Orang)		40	
		Jumlah Laporan Sosialisasi (Bimtek JITUPASNA) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Laporan)		1	
		Jumlah Laporan Kegiatan Rakornis Bidang Rehabilitasi dan		1	

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
		Rekonstruksi Pascabencana (Laporan)			
1.05.55.02	Penyusunan Rencana Aksi Pasca Bencana	Jumlah Peserta Rapat Pembentukan TIM JITUPASNA Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (orang)	bru, psr, ppu, btg, luarPrv	30	500.000.000
		Jumlah Peserta Workshop JITUPASNA Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (orang)		35	
		Jumlah Dokumen Rapat Pembentukan TIM JITUPASNA Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (dokumen)		1	
		Jumlah Peserta Rakornis Penyusunan JITUPASNA dan Rencana Aksi (orang)		30	
		Jumlah Dokumen Workshop JITUPASNA Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Dokumen)		1	
		Jumlah Dokumen Rakornis Penyusunan JITUPASNA dan Rencana Aksi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Dokumen)		1	
1.05.55.05	Pendampingan/Supervisi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Laporan Pendampingan, Monitoring Dan Evaluasi Serta Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) (Laporan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	10	365.000.000
		Jumlah Kab/Kota Yang Dilaksanakan Pendampingan/Supervisi Kajian Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (Kab/Kota)		10	
		Jumlah Bantuan Bahan Bangunan Seng dan Paku Seng Kepada Masyarakat Pascabencana (Lembar)		1500	
1.05.55.06	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Jumlah Kab/Kota yang dilaksanakan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Kab/Kota)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	10	251.600.000
		Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Bidang dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten/Kota (dokumen)		10	
1.06	Sosial				35.769.219.260
1.06.01	Dinas Sosial				35.769.219.260
1.06.01.001	Dinas Sosial				14.354.857.880
1.06.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayananinya administrasi perkantoran (bulan)		12	3.092.209.880
		Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		100	
1.06.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (Bulan)	smd	12	3.092.209.880
1.06.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhi dan terpeliharanya Sarana /Prasarana Aparatur Dinas Sosial (bulan)		0	1.277.748.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
		Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		12	
1.06.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan kelengkapan kantor (100 Unit)	smd	21	300.500.000
		Jumlah Peralatan dan kelengkapan kantor (Unit)		21	
1.06.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan Peralatan dan kelengkapan kantor (Bulan)	smd	12	977.248.000
1.06.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah (bulan)		0	2.422.450.000
		Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		12	
1.06.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi baik didalam dan keluar daerah (Bulan)	smd	12	1.760.600.000
1.06.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur (Orang)	bpn, smd, luarPrv	136	661.850.000
1.06.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Sikronisasi Program dan Kegiatan yang dilaksanakan (Dokumen)		0	803.050.000
		Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (%)		11	
1.06.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Yang Disusun (Dokumen)	bpn, smd	11	412.900.000
1.06.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dinas (Laporan)	bpn, smd	6	390.150.000
1.06.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi, dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial (Orang)		80	-
1.06.16.02	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	Jumlah Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran terlanjar, KDRT & Korban Trafficking yang mendapatkan penanganan/pelayanan (Orang)	smd	30	-
1.06.17	Program pembinaan anak terlanjar	Jumlah PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi, dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial (Orang)		1320	303.250.000
1.06.17.03	Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlanjar	Jumlah Anak Terlanjar, Anak Jalanan, Anak berhadapan Hukum, Anak dengan Kecacatan dan Balita Terlanjar Luar Panti yang mendapatkan bantuan sosial (Orang)	smd	200	303.250.000
1.06.18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Jumlah Penyandang Disabilitas dan Trauma yang mendapatkan Pembinaan (Orang)		454	1.441.000.000
1.06.18.03	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan bantuan pelayanan (Orang)	bpn, smd	250	1.441.000.000
1.06.20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Jumlah eks penyandang penyakit sosial (Eks. Narapidana, ODHA, Korban NAPZA, Tuna Susila, Waria dan Gepeng) yang mampu mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) (Orang)		135	367.500.000
1.06.20.04	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	Jumlah Eks penyandang penyakit sosial yang diberdayakan (Orang)	bpn, smd	38	367.500.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
1.06.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Menguatnya kelembagaan kesejahteraan sosial yang diberdayakan keberfungsian (Lembaga)		5	529.050.000
1.06.21.01	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Jumlah lembaga sosial yang diberdayakan (Lembaga)	smd	4	279.000.000
1.06.21.03	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah kegiatan dalam rangka pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dilaksanakan (Kegiatan)	smd	3	250.050.000
1.06.23	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial	Jumlah Keluarga Miskin, Kelompok Rentan dan PMKS Lainnya Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar (Orang)		2325	2.796.550.000
1.06.23.01	Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin dan PMKS Lainnya	Jumlah WRSE dan KUBE yang diberdayakan (Orang)	bru, mah, bpn, btg, smd	500	1.298.800.000
1.06.23.02	Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapat bantuan sosial (KPM)	smd	75	1.166.250.000
1.06.23.03	Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	Jumlah Lansia luar panti yang mendapat pelayanan (Orang)	kbr, smd	270	331.500.000
1.06.24	Program Penanganan dan Penanggulangan Korban Bencana	Jumlah korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Orang)		2000	1.039.050.000
1.06.24.01	Penguatan Kesiapsiagaan, Perlindungan Sosial Korban Bencana dan Pemulangan, Permakanan Orang Terlantar	Jumlah kegiatan penanganan Korban bencana dan orang terlantar yang mendapatkan bantuan sosial (Kegiatan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	2000	1.039.050.000
1.06.25	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Tersedianya sarana dan prasana kebutuhan dasar bagi keluarga miskin (unit)		1	283.000.000
1.06.25.01	Pengadaan Sarana dan Prasaran Bagi Keluarga Miskin	Jumlah MCK bagi keluarga miskin KAT yang dibangun (unit)	bru	2	283.000.000
1.06.01.00 2	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri				6.029.144.960
1.06.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		100	1.235.769.960
1.06.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (Bulan)	smd	12	1.235.769.960
1.06.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		90	397.040.000
1.06.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan kelengkapan kantor (Unit)	smd	4	397.040.000
1.06.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		100	194.000.000
		Persentase terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah (%)		0	
1.06.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi baik didalam dan keluar daerah (Bulan)	mah, psr, ppu, bpn, btg	12	194.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
1.06.19	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	Terpenuhinya sarana dan prasarana serta pelayanan/pembinaan bagi panti asuhan/jompo (Panti)		1	4.202.335.000
1.06.19.03	Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo	Jumlah kebutuhan dasar penghuni panti yang dilayani (Panti)	smd	1	4.202.335.000
1.06.01.003	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma				4.630.967.840
1.06.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		100	1.138.017.840
1.06.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (Bulan)	smd	12	1.138.017.840
1.06.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		80	1.482.700.000
1.06.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan kelengkapan kantor (Unit)	smd	5	721.950.000
1.06.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan kelengkapan kantor (Unit)	smd	5	760.750.000
1.06.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		100	172.000.000
1.06.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi baik didalam dan keluar daerah (Bulan)	smd	12	172.000.000
1.06.19	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	Terpenuhinya sarana dan prasarana serta pelayanan/pembinaan bagi panti asuhan/jompo (Panti)		1	1.838.250.000
1.06.19.03	Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo	Jumlah kebutuhan dasar penghuni panti yang dilayani (Panti)	smd	1	1.736.750.000
1.06.19.04	Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo	Jumlah penghuni panti yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Orang)	smd	80	101.500.000
1.06.01.004	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan				4.464.900.380
1.06.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		100	1.202.092.380
1.06.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (Bulan)	smd	12	1.202.092.380
1.06.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		80	667.380.000
1.06.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan kelengkapan kantor (Unit)	smd	5	223.830.000
1.06.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan kelengkapan kantor (Unit)	smd	5	443.550.000
1.06.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		100	222.500.000
		Persentase terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah (%)		0	
1.06.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	smd	12	222.500.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
		baik didalam dan keluar daerah (Bulan)			
1.06.19	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	Terpenuhinya sarana dan prasarana serta pelayanan/pembinaan bagi panti asuhan/jompo (Panti)		1	2.372.928.000
1.06.19.03	Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo	Jumlah kebutuhan dasar penghuni panti yang dilayani (Panti)	smd	1	2.312.928.000
1.06.19.04	Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo	Jumlah penghuni panti yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Orang)	smd	70	60.000.000
1.06.01.005	UPTD Panti Sosial Bina Remaja				3.000.000.000
1.06.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		100	1.131.154.000
1.06.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (Bulan)	smd	12	1.131.154.000
1.06.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		80	540.350.000
1.06.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan Peralatan dan kelengkapan kantor (Bulan)	smd	12	324.850.000
1.06.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan kelengkapan kantor (Unit)	smd	5	215.500.000
1.06.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		100	179.000.000
		Persentase terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah (%)		0	
1.06.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi baik didalam dan keluar daerah (Bulan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg	12	179.000.000
1.06.17	Program pembinaan anak terlantar	Persentase Anak Terlantar dan Berhadapan dengan Hukum yang tertangani (%)		95	1.149.496.000
1.06.17.02	Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	Jumlah Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak berhadapan Hukum, Anak dengan Kecacatan dan Balita Terlantar yang mendapatkan bantuan sosial (Orang)	smd	95	1.149.496.000
1.06.01.006	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia				3.289.348.200
1.06.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayananinya administrasi perkantoran (bulan)		12	921.601.200
1.06.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (Bulan)	smd	12	921.601.200
1.06.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhi dan terpeliharanya Sarana /Prasarana Aparatur Dinas Sosial (bulan)		12	305.550.000
1.06.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan kelengkapan kantor (Unit)	smd	307550000	305.550.000
1.06.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah (bulan)		12	705.372.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
1.06.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi baik didalam dan keluar daerah (Bulan)	smd	705371900	705.372.000
1.06.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi, dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial (Orang)		60	1.356.825.000
1.06.16.02	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	Jumlah Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran terlantar, KDRT & Korban Trafficking yang mendapatkan penanganan/pelayanan (Orang)	smd	60	1.356.825.000
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				381.146.275.867
2.01	Tenaga Kerja				43.310.191.000
2.01.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				43.310.191.000
2.01.01.001	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				33.499.735.000
2.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Administrasi Perkantoran (%)		91	4.242.100.000
2.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	smd	12	4.242.100.000
2.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur (%)		90	5.370.100.000
2.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan Dan Kelengkapan Kantor (unit)	smd	20	1.808.100.000
2.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan Dan Kelengkapan Prasaran Kantor (Bulan)	smd	12	3.562.000.000
2.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah (%)		85	2.854.175.000
2.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Kegiatan)	bpn, btg, smd	75	2.278.000.000
		Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah (Kegiatan)		150	
		Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman (untuk rapat dan tamu) (Bulan)		12	
2.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek (Orang)	smd	10	576.175.000
2.01.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (%)		72,15	2.272.025.000
2.01.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran (Dokumen)	smd	10	1.280.775.000
2.01.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan (Dokumen)	smd	8	991.250.000
2.01.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja	Persentase lulusan pelatihan yang terserap dipasar kerja (%)		80	6.347.000.000
2.01.15.01	pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja	Jumlah Pencari Kerja yang ditingkatkan Keterampilannya (Orang)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	500	4.060.600.000
2.01.15.02	Pengadaan sarana dan prasarana pelatihan	Jumlah Peralatan Gedung Kantor (Unit)	smd		1.202.200.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
2.01.15.03	peningkatan profesionalisme instruktur pelatihan	Jumlah Instruktur yang Dilatih (Orang)	smd	60	995.200.000
2.01.15.04	Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK	Terbentuknya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)	smd	1	89.000.000
2.01.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Presentase Penempatan Tenaga Kerja (%)		31	2.201.000.000
2.01.16.01	Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Informasi bursa Tenaga Kerja (Dokumen)	smd	3	584.025.000
2.01.16.05	Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah Laporan Pencari Kerja yang Dilatih Kewirausahaan (Dokumen)	smd	1	625.700.000
2.01.16.06	Pemberian Fasilitas dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat	Jumlah Laporan pencari kerja yang memiliki keterampilan (Dokumen)	smd	20	98.875.000
2.01.16.09	Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Padat Karya	Jumlah pencari kerja yang mendapat pekerjaan sementara (Orang)	smd	204	892.400.000
2.01.17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	UMP Sama Dengan KHL (%)		100	2.405.200.000
2.01.17.09	Pembinaan Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Jumlah Perusahaan yang Dibina (Perusahaan)	smd	100	142.025.000
2.01.17.14	Peningkatan Fungsi-Fungsi Lembaga-Lembaga Ketenagakerjaan	SK Gubernur Tentang UMP (Dokumen)	smd	3	1.283.375.000
		Jumlah dokumen sesuai PP 78 Tahun 2015 (Dokumen)		3	
2.01.17.15	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur dan Perselisihan Hubungan Industrial	Mencegah Perselisihan Hubungan Industrial (100%)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	50	979.800.000
2.01.24	Program Pengembangan Kewirausahaan Kompetitif	Persentase Wirausahaan Baru dan Pencari Kerja (%)		35	1.100.000.000
2.01.24.01	Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah Pencari Kerja yang dilatih Berwirausaha (Orang)	smd	160	1.100.000.000
2.01.27	Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang Dibina dan Diawasi (Perusahaan)		475	4.098.635.000
2.01.27.01	Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Jumlah Perusahaan yang Dibina (Perusahaan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	130	1.365.000.000
		Riksa Uji Objek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) (Objek K3)		130	
2.01.27.08	Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Norma Kerja, Norma Waktu Kerja Waktu Istirahat dan Norma Perlindungan Pekerja Perempuan dan Anak	Jumlah Perusahaan yang Dibina dan Diawasi (Perusahaan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	120	1.368.635.000
2.01.27.09	Peningkatan Perlindungan dan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang Dibina dan Diawasi (Perusahaan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	60	1.365.000.000
		Penyelesaian Kasus Ketenagakerjaan (Perusahaan)		60	
2.01.29	Program Peningkatan Produktivitas	Persentase Perusahaan yang Meningkatkan Produktivitasnya (%)		80	825.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
2.01.29.01	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja	Jumlah yang Dilatih Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja (Orang)	smd	100	825.000.000
2.01.30	Program Pelatihan Pencari Kerja	Persentase Lulusan Pelatihan yang Ditempatkan (%)		85	1.784.500.000
2.01.30.04	Pengadaan Bahan dan Materi Pendidikan dan Ketrampilan Kerja	Jumlah Kejuruan yang Dipersiapkan Sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) (Jurusan)	bpn	5	825.000.000
2.01.30.05	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang dilatih di Balai Latihan Kerja (Orang)	bpn, btg	320	959.500.000
2.01.01.00 2	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan				4.692.018.960
2.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Administrasi Perkantoran (%)		85	840.708.960
2.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	bpn	12	840.708.960
2.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur (%)		85	476.860.000
2.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan Dan Kelengkapan Kantor (unit)	bpn	21	139.400.000
2.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan Dan Kelengkapan Prasaran Kantor (Bulan)	bpn	12	337.460.000
2.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah (%)		80	228.400.000
2.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Kegiatan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	10	213.400.000
		Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah (Kegiatan)		60	
		Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman (untuk rapat dan tamu) (Bulan)		12	
2.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek (Orang)	bpn, smd	3	15.000.000
2.01.30	Program Pelatihan Pencari Kerja	Persentase Lulusan Pelatihan yang Ditempatkan (%)		85	3.146.050.000
2.01.30.04	Pengadaan Bahan dan Materi Pendidikan dan Ketrampilan Kerja	Jumlah Kejuruan yang Dipersiapkan Sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) (Jurusan)	bpn	10	2.356.500.000
2.01.30.05	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang dilatih di Balai Latihan Kerja (Orang)	bpn	160	789.550.000
2.01.01.00 3	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang				2.250.037.040
2.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Administrasi Perkantoran (%)		86	740.887.040
2.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	btg	12	740.887.040
2.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur (%)		85	249.800.000
2.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan Dan Kelengkapan Kantor (unit)	btg	3	39.100.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
2.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan Dan Kelengkapan Prasaran Kantor (Bulan)	btg	85	210.700.000
2.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah (%)		81	172.750.000
2.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Kegiatan)	btg	5	146.750.000
		Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah (Kegiatan)		5	
		Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman (untuk rapat dan tamu) (Bulan)		12	
2.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek (Orang)	btg	5	26.000.000
2.01.30	Program Pelatihan Pencari Kerja	Persentase Lulusan Pelatihan yang Ditempatkan (%)		86	1.086.600.000
2.01.30.04	Pengadaan Bahan dan Materi Pendidikan dan Ketrampilan Kerja	Jumlah Kejuruan yang Dipersiapkan Sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) (Jurusan)	bpn	10	355.000.000
2.01.30.05	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang dilatih di Balai Latihan Kerja (Orang)	btg	160	731.600.000
2.01.01.004	UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan				2.868.400.000
2.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Administrasi Perkantoran (%)		91	869.400.000
2.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	kbr, psr, smd	12	869.400.000
2.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur (%)		85	150.000.000
2.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan Dan Kelengkapan Kantor (unit)	smd	10	95.000.000
2.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan Dan Kelengkapan Prasaran Kantor (Bulan)	smd	12	55.000.000
2.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah (%)		82	459.000.000
2.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Kegiatan)	smd	8	449.000.000
		Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah (Kegiatan)		15	
		Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman (untuk rapat dan tamu) (Bulan)		12	
2.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek (Orang)	smd	5	10.000.000
2.01.27	Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan Yang diBina dan diAwasi (Perusahaan)		250	1.390.000.000
2.01.27.01	Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Riksa Uji Objek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) (Objek K3)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	35	580.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
2.01.27.08	Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Norma Kerja, Norma Waktu Kerja Waktu Istirahat dan Norma Perlindungan Pekerja Perempuan dan Anak	Jumlah Perusahaan yang Dibina dan Diawasi (Perusahaan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	250	135.000.000
2.01.27.09	Peningkatan Perlindungan dan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan	Penyelesaian Kasus Ketenagakerjaan (Perusahaan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	35	675.000.000
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				9.513.950.000
2.02.01	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				9.513.950.000
2.02.01.001	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				9.513.950.000
2.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		90	2.260.858.500
2.02.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Perkantoran (Bulan)	smd	12	2.260.858.500
2.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Proporsi perempuan yang berada pada posisi jabatan manajerial (%)		2	1.682.670.000
2.02.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	jumlah sarana dan prasarana kantor (Unit)	smd	55	1.682.670.000
2.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Unit kerja Perangkat Daerah yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (%)		60	882.500.000
2.02.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	presentase capaian target kinerja (%)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	90	782.500.000
2.02.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	diklat yang diikuti pegawai (diklat)	smd, luarPrv	7	100.000.000
2.02.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Unit kerja Perangkat Daerah yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (%)		69	937.803.500
2.02.10.01	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	laporan capaian kinerja (dokumen)	smd	5	222.450.000
2.02.10.02	Rakor Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	jumlah kebijakan bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak (rekomendasi)	mah	1	380.100.000
2.02.10.03	Forum RKP Bidang Kependudukan, PP dan PA	Persentase Kab/Kota menuju layak anak (%)	smd	1	132.450.000
2.02.10.04	Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan kesetaraan gender bidang ekonomi (Orang)	smd	2	202.803.500
2.02.20	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Perempuan	presentase perempuan miskin yang memiliki usaha ekonomi produktif (UEP) (%)		76	235.300.000
2.02.20.01	Peningkatan Kewirausahaan Perempuan	jumlah peserta yang mendapatkan keterampilan berwirausaha (orang)	kbr, ppu	250	235.300.000
2.02.21	Program peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak	Pemenuhan hak anak dan penanaman nilai-nilai luhur (%)		88	295.700.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
2.02.21.02	Pemenuhan kebutuhan salah satu cluster hak anak	pemetaan hak anak di bidang pendidikan (dokumen)	ppu, bpn	300	295.700.000
2.02.27	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan (%)		92	328.353.000
2.02.27.01	Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)	Jumlah kebijakan tentang penurunan angka perkawinan anak (Kebijakan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	99,55	328.353.000
2.02.35	Program Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan Dan Anak	Persentase pemenuhan kebutuhan hak anak (%)		0,054	379.450.000
2.02.35.01	Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Jumlah usaha KK perempuan berbasis ICT (Usaha)	smd	70	379.450.000
2.02.36	Program Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		80	997.550.000
2.02.36.01	Tumbuh Kembang Anak	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan tumbuh kembang anak (orang/peserta)	mah, smd	80	555.750.000
2.02.36.02	Perlindungan Anak	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan Perlindungan anak (orang/peserta)	smd	350	221.800.000
2.02.36.03	Perlindungan Perempuan	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan perlindungan perempuan (orang/peserta)	bru, bpn, btg, smd	80	220.000.000
2.02.38	Program Kesetaraan Gender	jumlah kebijakan PUG dalam pembangunan (kebijakan)		3	844.765.000
2.02.38.01	Kesetaraan Gender Bidang Politik dan Hukum	meningkatnya ketersediaan kebijakan keterlibatan perempuan dalam politik (kebijakan)	smd	0	267.425.000
		jumlah peserta yang mengikuti kegiatan kesetaraan gender bidang politik dan hukum (orang/peserta)		125	
2.02.38.02	Kesetaraan Gender Bidang Sosial dan Budaya	peserta yang mengikuti kegiatan Kesetaraan Gender bidang sosial budaya (orang)	smd	125	352.250.000
2.02.38.03	Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Kesetaraan Gender bidang ekonomi (Orang)	bru, ktm, mah, bpn, smd	125	225.090.000
2.02.39	Program Sistem Data Gender dan Anak	persentase data gender dan anak yang digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan (%)		80	669.000.000
2.02.39.01	Data dan Informasi Gender	persentase data gender (%)	smd	20	212.500.000
		Jumlah profil pembangunan berbasis gender (Profil)		20	
2.02.39.02	Data dan Informasi Anak	persentase data anak (%)	smd	40	226.500.000
2.02.39.03	Informasi dan Partisipasi	kebijakan terkait pengembangan SIGA (kebijakan)	smd	1	230.000.000
2.03	Pangan				27.480.101.250
2.03.01	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura				27.480.101.250
2.03.01.00 1	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura				12.900.000.000
2.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		90	2.700.820.000
2.03.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (bulan)	smd	12	2.700.820.000
2.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		5	1.603.080.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
2.03.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Unit)	smd	20	741.131.000
2.03.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana (Bulan)	smd	12	861.949.000
2.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		90	1.824.850.000
2.03.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah (Kegiatan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	5	1.184.850.000
2.03.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek (Orang)	kkk, smd, luarPrv	30	640.000.000
2.03.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (%)		67	1.671.250.000
2.03.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran (dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	10	909.625.000
2.03.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	4	761.625.000
2.03.25	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Jumlah Desa Rawan Pangan yang ditangani (Desa)		414	2.900.000.000
2.03.25.01	Peningkatan Ketersediaan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan	Data ketersediaan dan kerawanan pangan (Laporan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	4	1.167.725.000
2.03.25.04	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	Jumlah cadangan beras provinsi (Ton)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	350	1.250.000.000
2.03.25.07	Pengembangan Sistem Informasi Pasar	Informasi harga pangan yang tersedia (Laporan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	3	482.275.000
2.03.27	Program Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (Skor)		89,1	2.200.000.000
2.03.27.01	Analisis Pola Pangan Harapan	Jumlah laporan analisis PPH Konsumsi (Laporan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	1	350.000.000
2.03.27.02	Pengembangan Pangan Lokal	Jumlah produk olahan pangan lokal yang dikembangkan (Jenis)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	11	1.000.000.000
2.03.27.03	Pengawasan Mutu Pangan Segar	Jumlah Sertifikat mutu pangan segar asal tumbuhan (Sertifikat)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	9	850.000.000
2.03.01.00 2	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura				3.109.953.750

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
2.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		90	1.024.408.750
2.03.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (bulan)	smd	12	1.024.408.750
2.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		3	1.600.295.000
2.03.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana yang tersedia (Unit)	smd	12	1.286.795.000
2.03.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana (Bulan)	smd	12	313.500.000
2.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		90	485.250.000
2.03.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah (Kegiatan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	1	485.250.000
2.03.01.003	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura				2.735.982.500
2.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		90	1.500.000.000
2.03.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (bulan)	smd	12	1.500.000.000
2.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		3	1.080.982.500
2.03.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Unit)	smd	1	816.950.000
2.03.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana (Bulan)	smd	12	264.032.500
2.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		90	155.000.000
2.03.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah (Kegiatan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	1	155.000.000
2.03.01.004	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura				3.596.415.000
2.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		90	1.595.473.000
2.03.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (bulan)	kkr	12	1.595.473.000
2.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		3	1.681.242.000
2.03.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana yang tersedia (Unit)	kkr	1	1.179.350.000
2.03.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana (Bulan)	kkr	12	501.892.000
2.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		90	319.700.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
2.03.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah (Kegiatan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	1	319.700.000
2.03.01.005	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian				5.137.750.000
2.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		90	1.468.750.000
2.03.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (bulan)	smd	12	1.468.750.000
2.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		3	319.000.000
2.03.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana yang tersedia (Unit)	smd	1	90.000.000
2.03.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana yang tersedia (Unit)	smd	12	229.000.000
2.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		90	200.000.000
2.03.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah (Kegiatan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	1	200.000.000
2.03.15	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian	Jumlah Desa yang dibina (Desa)		726	3.150.000.000
2.03.15.02	Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	Jumlah Penyuluh yang dibina (Orang)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	836	2.400.000.000
2.03.15.03	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	Jumlah petani dan pelaku agribisnis yang mengikuti pelatihan (Orang)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	160	750.000.000
2.05	Lingkungan Hidup				21.020.500.000
2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup				21.020.500.000
2.05.01.001	Dinas Lingkungan Hidup				21.020.500.000
2.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		90	4.691.874.000
2.05.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	smd	12	4.691.874.000
2.05.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		5	1.400.000.000
2.05.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana (Bulan)	smd	12	1.400.000.000
2.05.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		90	1.347.500.000
2.05.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Kali)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	40	1.000.000.000
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (Kali)		45	

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman (Bulan)		12	
2.05.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang terlatih (orang)	bpn, smd, luarPrv	20	347.500.000
2.05.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (Nilai AKIP)		61	1.411.500.000
2.05.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran, Rapat Koordinasi, Hari Lingkungan Hidup (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	7	696.500.000
2.05.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, Profil LH Sekaltim, SPM (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	4	715.000.000
2.05.30	Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Indeks Pencemaran (Indeks (Tercemar Sedang))		8	3.422.248.000
2.05.30.01	Pemantauan lingkungan	Frekuensi pemantauan kualitas lingkungan (Frekuensi)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	308	1.275.150.000
2.05.30.02	Pengendalian pencemaran lingkungan	Penurunan beban pencemaran (%)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	10	907.000.000
2.05.30.03	Pengendalian kerusakan lingkungan	Luas Kerusakan Lingkungan (Juta Ha)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	7,24	631.600.000
2.05.30.04	Pemantauan Air Sungai Mahakam (DAK)	Alat Pemantauan Kualitas Air Sungai Mahakam Metode Onlimo (Alat)	smd	1	608.498.000
2.05.58	Program Penataan, Penanganan Pengaduan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup	Persentase ketaatan dalam pengelolaan lingkungan hidup (%)		100	2.858.500.000
2.05.58.01	Penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti (%)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	100	769.000.000
2.05.58.02	Pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup	Persentase pengawasan terhadap penanggungjawab dan/atau usaha kegiatan yang diberi izin (%)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	100	667.500.000
2.05.58.03	Peningkatan kapasitas lingkungan hidup	Jumlah lembaga/orang yang memenuhi kriteria untuk diusulkan dalam penilaian lingkungan hidup (Lembaga)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	70	1.422.000.000
2.05.59	Program Tata Lingkungan	Jumlah aksi mitigasi perubahan iklim yang diinventarisasi dan di PEP kan (Kegiatan)		600	3.895.000.000
2.05.59.01	Penyusunan, evaluasi dan pelaporan dokumen lingkungan	Persentase dokumen lingkungan yang dintegrasikan kebijakan pembangunan daerah (%)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	100	1.366.000.000
2.05.59.02	Koordinasi penyusunan dan penilaian kajian dampak lingkungan	Persentase dokumen lingkungan yang dinilai/diperiksa (%)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	100	1.129.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
2.05.59.03	Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Persentase Jumlah Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim diintegrasikan dengan dokumen RAD GRK (%)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	89,13	1.400.000.000
2.05.60	Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Persentase sampah dan limbah B3 yang dimanfaatkan (%)		13	1.993.878.000
2.05.60.01	Pengelolaan sampah	Persentase timbulan sampah yang dikelola (%)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	63	873.378.000
2.05.60.02	Pengelolaan limbah B3	Jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai peraturan (Ton)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	12000	479.000.000
2.05.60.03	Pengembangan fasilitas teknis dan penerapan teknologi ramah lingkungan	Jumlah Kab/Kota yang telah menerapkan teknologi pengelolaan sampah (Kab/Kota)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	2	641.500.000
2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa				11.520.500.000
2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa				11.520.500.000
2.07.01.001	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa				11.520.500.000
2.07.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		75	2.378.510.000
2.07.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (bulan)	smd	12	2.378.510.000
2.07.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		5	688.426.000
2.07.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana (Bulan)	smd	12	688.426.000
2.07.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		45	1.003.250.000
2.07.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Kegiatan)	bru, smd	75	1.003.250.000
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (kegiatan)		100	
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman (bulan)		12	
2.07.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (%)		68	233.964.000
2.07.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	8	193.964.000
2.07.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan (Dokumen)	smd	5	40.000.000
2.07.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang Berperan Aktif Dalam pembangunan		35	819.600.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
		Desa dan Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan Desa)			
2.07.15.01	Pengembangan dan Monitoring Lembaga serta Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah Pelaksanaan BBGRM yang dibina (Kabupaten/Kota)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	10	279.200.000
		Jumlah PKK yang dibina (Kabupaten/Kota)		10	
		Jumlah LPM yang dibina (Kota)		10	
		Jumlah Posyandu yang dibina (Posyandu)		6	
2.07.15.03	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	Penyebaran informasi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa secara optimal (%)	smd	70	65.000.000
2.07.15.08	Pengembangan Kapasitas Masyarakat	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Yang dibina (Orang)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	150	250.200.000
2.07.15.09	Pengembangan dan Monitoring Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat	Jumlah Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang dibina (MHA)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	5	225.200.000
2.07.16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Jumlah Bumdes Yang Aktif (Bumdes)		390	680.000.000
2.07.16.01	Peningkatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat	Persentase BUMDesa Aktif (Unit)	smd	30	680.000.000
2.07.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa (%)		80	80.000.000
2.07.17.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Kabupaten/Kota yang di Movev (%)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	80	80.000.000
2.07.21	Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemberdayaan masyarakat	Rekomendasi Sinkronisasi Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemberdayaan masyarakat (Dokumen)		1	290.050.000
2.07.21.01	Sinkronisasi dan penyerasian kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa (Kali)	bru, bpn, smd	1	290.050.000
		Jumlah kabupaten/ Kota (Kabupaten/ Kota)		10	
2.07.22	Program Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Kelompok Masyarakat Desa Pengelola Sarana dan Prasarana dan pemanfaatan TTG Yang Mempunyai Daya Saing Pasar (Unit)		18	526.340.000
2.07.22.01	Pemasyarakatan dan Pengembangan Penerapan Teknologi Tepat Guna	jumlah posyantek yang aktif (unit)	ktm	30	331.900.000
2.07.22.02	Pengembangan Prasarana dan Sarana Sosial Dasar Masyarakat	Jumlah Alat TTG untuk Pengolahan Sanitasi (Unit)	smd	10	194.440.000
2.07.26	Program Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya	PKK yang berperan aktif dalam pemberdayaan/ pembinaan masyarakat dan keluarga desa/ kelurahan (PKK)		180	1.575.600.000
2.07.26.01	Pengembangan dan Monitoring ketahanan keluarga dan pelestarian nilai-nilai kegotong-royongan	Jumlah TP.PKK yang dibina (Orang)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	130	1.165.600.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
2.07.26.02	Penguatan Kapasitas kesejahteraan keluarga	Kader PKK yang dilatih (Orang)	kk, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	150	130.000.000
2.07.26.03	Peningkatan usaha ekonomi keluarga	Jumlah Keluarga/Kader PKK yang dibina (Orang)	kk, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	160	130.000.000
2.07.26.04	Pengembangan dan Monitoring hidup sehat keluarga yang ramah lingkungan	Kader PKK dan Masyarakat yang dibina (Orang)	kk, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	300	150.000.000
2.07.27	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kelompok masyarakat pemanfaat TTG dalam rangka penanggulangan kemiskinan (Unit)		20	34.560.000
2.07.27.01	Peningkatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat miskin melalui pemanfaatan teknologi tepat guna	Posyantek Percontohan yang Dibina (Posyantek)	ktm	20	34.560.000
2.07.28	Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa Yang Memiliki Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran (Desa)		393	1.161.600.000
2.07.28.01	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Data aparaturnya Desa/kelurahan dan badan Permusyawaratan Desa yang belum dilakukan peningkatan Kapasitas (Kabupaten/Kota)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	10	431.700.000
2.07.28.02	Monitoring Penyaluran Keuangan Desa	Data penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dan dari RKUD ke RKD dan pengelolaan keuangan Desa (Kabupaten)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu	7	298.200.000
2.07.28.03	Peningkatan Penataan administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa	Desa dan Kelurahan di Provinsi Kalimantan Timur yang mengikuti Perlombaan Desa/Kampung dan Kelurahan Tingkat Provinsi Tahun 2019 (Kabupaten/Kota)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	10	431.700.000
2.07.29	Program Pembangunan Desa dan Kawasan	Jumlah Desa berkembang (Desa)		359	999.600.000
2.07.29.01	Pengembangan dan Monitoring Pembangunan Desa	Kabupaten yang dibina (Kabupaten)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, smd, luarPrv	0	451.600.000
		Pendamping Desa yang dibina (Orang)		0	
2.07.29.02	Pengembangan dan Monitoring Pembangunan Antar Desa	Laporan Penguatan Pengembangan dan Pembangunan Antar Desa (Laporan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, smd, luarPrv	1	274.000.000
2.07.29.03	Penguatan Informasi Pembangunan	Informasi Pembangunan Desa dan Antar Desa (kali)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	1	274.000.000
2.07.30	Program Kampung Iklim +	Jumlah Kampung/Desa Iklim (Desa)		70	1.049.000.000
2.07.30.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Emisi Rendah Desa / Village Low Emission Development / VLED	Jumlah Kampung/Desa/Kelurahan iklim (Kampung/Desa/Kelurahan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	30	1.049.000.000
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				1.486.050.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
2.02.01	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				1.486.050.000
2.02.01.001	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				1.486.050.000
2.08.23	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan Perangkat Daerah (SKM) (%)		80	767.550.000
2.08.23.01	Pengendalian Penduduk	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan perlindungan perempuan Kaltim (Orang)	ppu, smd, luarPrv	330	317.050.000
2.08.23.02	Kualitas Keluarga	Dokumen laporan capaian kinerja (Laporan)	kkp, smd, luarPrv	10	200.000.000
		Jumlah kebijakan PUG (Kebijakan)		200	
2.08.23.03	Keluarga Berencana	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan kesetaraan gender bidang politik dan hukum (Orang)	ktm, bpn, btg	330	250.500.000
2.08.24	Program Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase kekerasan terhadap perempuan (%)		80	718.500.000
2.08.24.01	Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk	Jumlah pameran yang diikuti (Pameran)	ktm, smd	100	262.500.000
2.08.24.02	Bina Aparatur Pencatatan Sipil	Jumlah perangkat daerah FGD perlindungan anak dalam penanggulangan bencana (Perangkat Daerah)	ktm, smd	100	256.000.000
2.08.24.03	Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi	Persentase pelayanan perlindungan terpadu (%)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	100	200.000.000
2.09	Perhubungan				121.000.000.000
2.09.01	Dinas Perhubungan				121.000.000.000
2.09.01.001	Dinas Perhubungan				74.470.425.985
2.09.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		100	7.813.907.120
2.09.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	ktm, bpn, smd	12	7.813.907.120
2.09.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		4	3.194.484.000
2.09.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang laik (%)	smd	90	1.674.900.000
2.09.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Terlaksananya Kebersihan Gedung Kantor dan Taman, Pemeliharaan Gedung, Peralatan & Perlengkapan Kantor, Pemeliharaan Kendaraan Operasional & Jabatan (%)	smd	90	1.519.584.000
2.09.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		35	2.421.775.000
2.09.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kegiatan Publikasi, Tersedianya Makan dan Minum Terkait Pelaksanaan Pekerjaan dan Terlaksananya Rapat Koordinasi & Konsultasi (%)	smd	100	2.050.375.000
2.09.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Kualifikasi SDM Perhubungan (%)	smd	35	371.400.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
2.09.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (%)		71,5	2.688.225.000
2.09.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Tersusunnya Renja, RKA, DPA (Dokumen)	smd	5	2.216.425.000
2.09.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian Evaluasi Kegiatan (Dokumen)	smd	20	471.800.000
2.09.15	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas (Kasus)		512	38.723.772.250
2.09.15.01	Pengadaan Fasilitas Pengamanan Lalu Lintas Jalan	Panjang jalan yang dipasang fasilitas keselamatan jalan (km)	smd, luarPrv	120	36.061.172.250
2.09.15.02	Pembinaan Pelayanan Angkutan Jalan	Jumlah badan usaha angkutan umum yang dibina (Badan Usaha)	smd, luarPrv	24	1.730.910.000
2.09.15.03	Pembinaan dan Pengendalian Keselamatan Sarana dan Prasarana Jalan	Persentase sarana angkutan darat yang laik uji dan prasarana yang laik fungsi (%)	bpn, smd, luarPrv	55	931.690.000
2.09.16	Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut dan SDP	Jumlah dan kapasitas prasarana perhubungan laut dan SDP (Unit/%)		88	15.130.907.615
2.09.16.01	Pembinaan, Pembangunan dan Peningkatan Pelabuhan	Jumlah dan Progres Pelabuhan/Dermaga/Fasilitas yang dibangun ((Unit/%)	ktm	2	13.619.845.115
2.09.16.02	Pembinaan Penyelenggaraan SDP dan Pelayaran Rakyat	Persentase sarana dan prasarana angkutan perairan memenuhi standar kelaikan berlayar (%)	ktm, bpn	85	1.194.852.500
2.09.16.03	Pembinaan Badan Usaha dan Perizinan Angkutan Pelayaran	Jumlah badan usaha angkutan pelayaran yang dibina (Badan Usaha)	smd	100	316.210.000
2.09.17	Program Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah simpul transportasi yang terintegrasi dan terpadu (Simpul)		3	4.497.355.000
2.09.17.01	Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perekreteriaan	Jumlah lintasan/trase kereta api yang direncanakan (Lintasan)	smd	3	1.148.205.000
2.09.17.02	Perumusan Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah perencanaan kebijakan pengembangan bidang perhubungan (Perencanaan)	kk, smd	2	2.508.490.000
2.09.17.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemadu Moda	Jumlah perencanaan angkutan pemadu moda (Perencanaan)	smd	2	840.660.000
2.09.01.00 2	UPTD Terminal				46.529.574.015
2.09.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		100	1.524.049.040
2.09.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	smd	12	1.524.049.040
2.09.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		3	735.790.000
2.09.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang laik (%)	bru, kkr, ktm, ppu, btg, smd	90	280.260.000
2.09.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Terlaksananya pemeliharaan peralatan, perlengkapan kantor, kebersihan gedung dan halaman kantor dan terminal tipe B (%)	bru, kkr, psr, btg, smd	90	455.530.000
2.09.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		65	225.000.000
2.09.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kegiatan Publikasi, Tersedianya Makan dan Minum Terkait Pelaksanaan Pekerjaan dan	kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu,	100	225.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
		Terlaksananya Rapat Koordinasi & Konsultasi (%)	bpn, btg, smd, luarPrv		
2.09.18	Program Pembangunan dan Peningkatan Terminal Tipe B	Jumlah penumpang terminal yang terlayani (Penumpang)		750000	44.044.734.975
2.09.18.01	Pembangunan dan Peningkatan Terminal Type B Wilayah I	Jumlah Terminal Tipe B Wilayah I yang dibangun/ditingkatkan (Terminal)	bru, ktm, btg, smd	3	34.488.896.975
2.09.18.02	Pembangunan dan Peningkatan Terminal Type B Wilayah II	Jumlah Terminal Tipe B Wilayah II yang dibangun/ditingkatkan (Terminal)	kbr, kkr, mah, psr, ppu	2	9.555.838.000
2.10	Komunikasi dan Informatika				20.868.616.800
2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika				20.868.616.800
2.10.01.001	Dinas Komunikasi dan Informatika				20.868.616.800
2.10.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		80	3.760.616.800
2.10.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (Bulan)	smd	12	3.760.616.800
2.10.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		4	1.085.450.000
2.10.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor (Unit)	smd	60	106.000.000
2.10.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	smd	12	979.450.000
2.10.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		85	2.427.350.000
2.10.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Paket)	bru, kbr, kkr, ktm, psr, ppu, bpn, btg, smd		1.595.850.000
		Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah (Paket)			
		Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah (Bulan)		12	
		Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman (Bulan)		12	
2.10.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek (orang)	smd, luarPrv	20	831.500.000
		Jumlah Pakaian Dinas Aparatur (Stel)		121	
2.10.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (%)		80	325.625.000
2.10.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran (Dokumen)	smd	8	152.250.000
2.10.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan (Dokumen)	smd	4	173.375.000
2.10.11	Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Persentase Siswa sekolah dan mahasiswa yang memiliki sertifikat kompetensi dibidang TIK (Persen)		50	700.000.000
2.10.11.01	Peningkatan Sumber Daya TIK	1. Jumlah pelatihan untuk siswa (SD/SMP/SMA/Sederajat) 2. Jumlah Bimbingan teknis Pranata komputer (Sekolah, Kegiatan)	smd	32	500.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
2.10.11.07	Penguatan Internet Sehat dan Aman	Jumlah Kab/Kota mendapat penguatan Internet Sehat dan Aman (Kab/Kota)	smd	3	200.000.000
2.10.12	Program Penguatan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah	Jumlah lembaga yang mengembangkan media center informasi publik (Lembaga)		2	1.152.900.000
2.10.12.01	Koordinasi Bidang Kominfo Antar Lintas SKPD, Lintas Vertikal di Daerah, BUMN dan Swasta Lokal Provinsi, Kab/Kota	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi Bidang Kominfo (Laporan)	smd	1	262.900.000
2.10.12.02	Revitalisasi Pendayagunaan Media Center Daerah	Workshop, bimtek, sarana dan prasaran kegiatan jurnalistik dll (Orang)	bpn, smd	70	140.000.000
2.10.12.03	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Jumlah Kerjasama Publikasi Informasi Pembangunan Daerah Melalui RRI, TVRI, Radio Swasta dan TV Swasta, Lokal dan Nasional serta melalui media cetak untuk penerbitan buletin advertorial (Kerjasama)	smd	2	500.000.000
2.10.12.04	Penguatan Manajemen Tata Kelola TIK	Jumlah Kab/Kota dalam Pemeringkatan e-Government (Kab/Kota)	smd	10	250.000.000
2.10.13	Program Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informatika	Persentase Indeks Kepuasan Pelayanan Informasi Publik (%)		86	2.350.000.000
2.10.13.01	Pelayanan informasi kebijakan daerah melalui poster, leaflet, baliho dll	Jumlah poster, leaflet, buletin, baliho yang menginformasikan kebijakan pemerintah daerah serta pembangunan dan perawatan baliho (Kegiatan)	bpn, smd	55	200.000.000
2.10.13.02	Komunikasi publik melalui dialog interaktif radio dan televisi	Jumlah dialog interkatif di radio dan televisi (Dialog)	bpn, smd	96	100.000.000
2.10.13.03	Pengolahan dan inventarisasi data dan penyajian informasi kebijakan pemerintah daerah	jumlah laporan hasil inventarisasi data dan hasil survei IKM (Laporan)	smd	2	1.500.000.000
2.10.13.04	Dokumentasi dan publikasi program/kegiatan perangkat daerah	Jumlah laporan dokumentasi dan publikasi program/kegiatan perangkat daerah (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	1	350.000.000
2.10.13.05	Partisipasi pada pameran/expo/pekan kebudayaan daerah dan diluar daerah	Jumlah event keikutsertaan pada pameran/expo/peka kebudayaan daerah (Pameran)	smd, luarPrv	4	200.000.000
2.10.14	Program Pengembangan Informasi, dan Komunikasi Publik	Cakupan Masyarakat yang memiliki akses terhadap pelayanan informasi (Persen)		86	350.000.000
2.10.14.06	Pengembangan Sumber Informasi Publik	Jumlah PPID Pembantu di Badan Pemerintah Pemprov. Kaltim dan PPID Kab/kota yang dikoordinasikan dalam jejaring pengelolaan pelayanan dan informasi (PD)	ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	30	350.000.000
2.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)		2,8	3.721.100.000
2.10.15.02	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Jumlah Penggunaan Cloud Computing (OPD)	smd	0	1.057.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
		Jumlah Penggunaan Aplikasi MOD (OPD)		0	
		Jumlah Penggunaan Secure Socket Layer Pada Website dan Aplikasi Resmi OPD (OPD)		0	
		Kapasitas Bandwidth Internet (Bandwidth (Mbps))		100	
2.10.15.03	Interkoneksi jaringan intra pemerintah	Jumlah OPD Terhubung dalam jaringan (Perangkat Daerah)	smd	30	1.064.100.000
2.10.15.04	Pengembangan Integrasi Sistem Informasi di Pemrov Kaltim dan Kab/Kota Kaltim (Interoperabilitas)	Jumlah Aplikasi/Sistem Informasi yang terintegrasi (Aplikasi)	smd	4	350.000.000
2.10.15.09	Pembinaan dan Pengembangan Telecenter	Jumlah Jaringan terpasang di Desa Kab/Kota (Kab/Kota)	smd	10	250.000.000
2.10.15.10	Penguatan SPBE	Jumlah Dokumen Laporan peyelenggaraan SPBE (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	1	1.000.000.000
2.10.16	Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kominfo	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki sistem pengamanan data elektronik (Persen)		80	4.845.575.000
2.10.16.04	Pengembangan dan penyelenggaraan DC dan DRC	Jumlah Hosting Aplikasi DC dan DRC (Aplikasi)	smd	20	1.205.575.000
2.10.16.06	Government cloud computing	Jumlah Penggunaan Cloud Computing (OPD)	smd	10	90.000.000
2.10.16.07	Pelaksanaan audit TIK	Terstandarisasinya Audit TIK (Dokumen)	smd	1	150.000.000
2.10.16.08	Penangan Insiden Keamanan Informasi	Jumlah Penggunaan Secure Socket Layer Pada Website dan Aplikasi Resmi OPD (OPD)	smd	20	100.000.000
2.10.16.09	Penyediaan sarana dan prasarana komunikasi pemerintah	Tersedianya Sarana Pendukung Layanan (Perangkat)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	1	2.200.000.000
2.10.16.10	Peningkatan penyediaan informasi dan data KPU/USO di kaltim	Terlayannya informasi dan data KPU/USO (dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	1	200.000.000
2.10.16.11	Penyediaan dan pengumpulan data informasi mitra telekomunikasi dan penyiaran (radio & televisi)	Tersedianya data dan informasi telekomunikasi dan penyiaran (dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	1	200.000.000
2.10.16.12	Pengawasan dan pengendalian pengamanan informasi, persandian, pos dan telekomunikasi	Tersedianya data dan informasi yang ter-enkripsi (dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	1	200.000.000
2.10.16.13	Pengelolaan Aplikasi (Sistem Informasi Website) Perangkat Daerah di Prov. Kaltim	Jumlah Aplikasi/Sistem Informasi yang terintegrasi (Aplikasi)	smd	5	500.000.000
		Jumlah Sub Domain Perangkat Daerah yang dikelola (sub domain)		30	
2.10.18	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	Persentase Program/kegiatan dari hasil rekomendasi penelitian TIK yang dilaksanakan (Persen)		100	150.000.000
2.10.18.01	Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah Dokumen RIPTIK Rencana Induk Pengembangan TIK yang dihasilkan (Dokumen)	smd	1	150.000.000
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				37.679.776.995

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
2.11.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				37.679.776.995
2.11.01.001	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				28.828.237.195
2.11.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		88	4.013.258.140
2.11.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan administrasi Perkantoran (bulan)	smd	12	4.013.258.140
2.11.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		5	14.048.409.855
2.11.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor (unit)	smd	30	11.913.759.855
2.11.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan kantor (bulan)	smd	12	2.134.650.000
2.11.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		60	3.327.900.000
2.11.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah (kegiatan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	198	2.718.900.000
2.11.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek (orang)	smd, luarPrv	20	609.000.000
		Jumlah Seragam Pegawai (orang)		189	
2.11.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (Nilai AKIP)		76	1.705.061.200
2.11.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran (Dokumen)	kbr, smd, luarPrv	6	894.400.000
2.11.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	4	810.661.200
2.11.20	Program Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi dan UKM	Jumlah UKM Naik Kelas (UKM)		200	5.733.608.000
		Jumlah koperasi berkualitas (Koperasi)		100	
2.11.20.01	Pembinaan Lembaga Koperasi dan UKM	Jumlah Koperasi dan UKM yang Mendapatkan Pembinaan (KUKM)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	300	894.876.000
2.11.20.02	Produksi, Pembiayaan dan Pemasaran	Jumlah Koperasi dan UKM yang difasilitasi pembiayaan dan Pemasaran (KUKM)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	525	1.863.146.000
2.11.20.03	Pengawasan Koperasi	jumlah Koperasi yang dilakukan pengawasan (Koperasi)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	100	975.586.000
2.11.20.04	Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi (DAK)	Jumlah KUKM yang mendapatkan Pelatihan (KUKM)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	1050	2.000.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
2.11.01.00 2	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang				3.146.060.000
2.11.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		88	1.501.350.000
2.11.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan administrasi Perkantoran (bulan)	smd	12	1.501.350.000
2.11.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		3	799.310.000
2.11.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor (unit)	smd	39	301.100.000
2.11.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan kantor (bulan)	smd	12	498.210.000
2.11.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		50	845.400.000
2.11.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah (kegiatan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	10	469.400.000
2.11.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek (orang)	smd, luarPrv	20	376.000.000
2.11.01.00 3	UPTD Pelatihan Koperasi				5.705.479.800
2.11.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		88	1.598.439.800
2.11.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan administrasi Perkantoran (bulan)	smd	12	1.598.439.800
2.11.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		3	1.470.850.000
2.11.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor (unit)	smd	8	625.750.000
2.11.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan kantor (bulan)	smd	12	845.100.000
2.11.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		50	716.450.000
2.11.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah (kegiatan)	smd	20	477.950.000
2.11.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek (orang)	smd	7	238.500.000
2.11.19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro dan Menengah	Jumlah KUKM terlatih (Orang)		300	1.919.740.000
2.11.19.01	Pengkajian Pengembangan Pelatihan Koperasi & UMKM	Jumlah Dokumen Kajian & Pengembangan Pelatihan Koperasi & UMKM (dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	10	662.000.000
2.11.19.02	Penyelenggaraan Pelatihan Koperasi dan UMKM	Jumlah Pelatihan Koperasi dan UMKM yang dilaksanakan (pelatihan)	smd	15	1.257.740.000
2.12	Penanaman Modal				16.000.000.000
2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				16.000.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
2.12.01.00 1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				16.000.000.000
2.12.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		73	4.252.210.080
2.12.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (bulan)	smd	12	4.252.210.080
2.12.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		6	3.116.589.920
2.12.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah sarana dan prasarana di lingkungan DPMPSTP Prov. Kaltim (paket)	smd	8	2.222.900.000
2.12.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (bulan)	smd	12	893.689.920
2.12.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		93	4.383.500.000
2.12.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah, Jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman dan jumlah belanja publikasi (bulan)	bru, kkr, ktm, psr, ppu, bpn, smd	12	4.383.500.000
2.12.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (Nilai AKIP)		65	406.550.000
2.12.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran (Dokumen)	smd	0	240.100.000
		Jumlah Dokumen Perencanaan, Kinerja, dan Anggaran (Dokumen)		9	
2.12.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan (Laporan)	smd	4	166.450.000
2.12.18	Program Kemudahan pelayanan dan percepatan proses perizinan	Jumlah izin berusaha yang diterbitkan (Izin/ Non Izin)		0	959.000.000
		Waktu Penyelesaian Proses Perizinan (Hari)		12	
2.12.18.02	Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan perizinan sektor primer	Jumlah izin investasi sektor primer yang diterbitkan (Izin/ Non Izin)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	1150	263.000.000
2.12.18.03	Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan perizinan sektor sekunder dan tersier	Jumlah izin investasi sekunder dan tersier yang diterbitkan (Izin/ Non Izin)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	1550	108.000.000
2.12.18.04	Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah izin investasi sekunder dan tersier yang diterbitkan (Izin/ Non Izin)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	0	218.000.000
		Jumlah NIB (Nomor Induk Berusaha) yang diterbitkan (NIB)		200	
2.12.18.05	Penguatan Kelembagaan PTSP Kab/Kota	Jumlah PTSP Kab/Kota yang memperoleh predikat bintang (PTSP)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	0	370.000.000
		Jumlah PTSP Kab/Kota yang memperoleh kualifikasi bintang dari BKPM RI (PTSP)		4	

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
2.12.27	Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi	Jumlah perusahaan industri pada kawasan peruntukan industri (perusahaan industri baru)		7	428.500.000
2.12.27.02	Pemantauan dan evaluasi Penanaman Modal	Jumlah Pemantauan perusahaan PMA/ PMDN di Kaltim (Perusahaan)	bru, kbr, kkr, ktm, psr, ppu, bpn, btg, smd	0	78.000.000
		Jumlah LKPM yang dilaporkan perusahaan secara daring (online) (LKPM)		6	
2.12.27.03	Penyusunan informasi penanaman modal	Jumlah laporan realisasi investasi dan kegiatan penanaman modal (Laporan)	smd	0	23.650.000
		Jumlah dokumen realisasi investasi Kalimantan Timur (Dokumen)		5	
2.12.27.04	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Investasi	Jumlah pembinaan dan pengawasan perusahaan PMA/ PMDN di Kaltim (Perusahaan)	bru, kbr, ktm, psr, ppu, bpn, btg, smd	0	326.850.000
		Jumlah Perusahaan yang dibina dan diawasi (Perusahaan)		6	
2.12.28	Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah kajian kebijakan penanaman modal (Kebijakan)		2	1.298.000.000
2.12.28.01	Penyusunan Perencanaan dan Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah kajian kebijakan penanaman modal (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	0	648.000.000
		Jumlah Pergub tentang Penanaman Modal yang disusun (dokumen)		2	
2.12.28.02	Penyusunan Kajian Pengembangan Potensi Daerah	Jumlah kajian potensi unggulan daerah (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	3	650.000.000
2.12.29	Program Layanan Advokasi dan Informasi Perizinan	Tingkat kepuasan layanan advokasi dan informasi perizinan (%)		100	320.000.000
2.12.29.02	Pelayanan informasi perizinan	Jumlah layanan aplikasi perizinan yang dihasilkan (Aplikasi)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	1	155.000.000
2.12.29.03	Pelayanan Advokasi Perizinan	persentase pengaduan yang diselesaikan (%)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	0	165.000.000
		Jumlah pengaduan yang diselesaikan (kasus)		15	
2.12.30	Program Penyelenggaraan Promosi dan Pemberdayaan Dunia Usaha	Jumlah perjanjian kerjasama penanaman modal (MoU)		3	835.650.000
2.12.30.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	Jumlah event promosi (Event)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	10	720.650.000
2.12.30.02	Peningkatan Kerjasama Penanaman Modal	Jumlah pertemuan bisnis (Pertemuan Bisnis)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	5	115.000.000
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga				46.067.945.440
2.13.01	Dinas Pemuda dan Olah Raga				46.067.945.440
2.13.01.001	Dinas Pemuda dan Olah Raga				31.967.945.440

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
2.13.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		89,35	5.968.095.440
2.13.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Adiministrasi Perkantoran (Bulan)	smd	12	5.968.095.440
2.13.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		5	2.812.450.000
2.13.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana (Bulan)	smd	12	2.812.450.000
2.13.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		93	3.020.000.000
2.13.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Kegiatan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	25	3.020.000.000
2.13.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (%)		58,8	565.000.000
2.13.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran (Dokumen)	bru, bpn, smd, luarPrv	4	315.000.000
2.13.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	10	250.000.000
2.13.30	Program Pemberdayaan Kepemudaan	Persentase Pemuda Yang Difasilitasi Dalam Peningkatan Wawasan, Kapasitas Tenaga Sumberdaya Pemuda, Iptek dan Imtaq serta Kreativitas Pemuda (Persen)		0,35	3.850.000.000
2.13.30.09	Apresiasi Kreativitas Pemuda	Jumlah Kreatifitas Pemuda (Orang)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	1333	1.000.000.000
2.13.30.10	Seleksi Jambore Pemuda Daerah	Jumlah pemuda yang mengikuti seleksi Jambore Pemuda Daerah (Orang)	kkkr	100	1.047.040.000
2.13.30.11	Pelaksanaan Jambore Pemuda Indonesia	Jumlah Pemuda yang dikirim mengikuti Jambore Pemuda Indonesia (Orang)	luarPrv	20	262.560.000
2.13.30.12	Sosialisasi dan Pelatihan Pemuda Anti Narkoba dan HIV/AIDS	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan pelatihan pemuda anti narkoba dan HIV/AIDS (Orang)	smd	1000	840.400.000
2.13.30.16	Pelatihan Peningkatan IPTEK dan IMTAQ Pemuda	Persentase jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan (%)	smd	20	700.000.000
2.13.31	Program Pengembangan Kepemudaan	Persentase Pemuda Kader Kepanduan, Kepeloporan, Keterlibatan dalam Pembinaan Sosial, Politik, Ekonomi, Kewirausahaan, Budaya dan Hukum (%)		0,08	2.676.225.000
2.13.31.04	Paskibraka Tingkat Provinsi dan Nasional	Jumlah peserta, panitia, pelatih dan pembina yang terlibat dalam Paskibraka (orang)	smd, luarPrv	440	2.376.225.000
		Jumlah pemuda yang mengikuti seleksi dan pelatihan Paskibraka Tingkat Provinsi dan Nasional (Orang)		188	
2.13.31.06	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Jumlah pemuda yang terlibat dalam organisasi kepemudaan (Orang)	smd	500	300.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
2.13.32	Program Pembudayaan Keolahragaan	Persentase masyarakat yang berolahraga (%)		5,86	7.485.475.000
2.13.32.01	Pembinaan Olahragawan Berbakat	Jumlah atlet yang dibina (Orang)	smd	30	926.500.000
2.13.32.02	Pemassalan Olahraga bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat	Jumlah pelajar mahasiswa dan masyarakat yang berpartisipasi (Orang)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	2800	1.916.625.000
2.13.32.03	Pemberian Penghargaan bagi Pelaku Olahraga Berdedikasi dan Berprestasi	Jumlah Olahragawan Penerima Penghargaan (Orang)	smd	677	4.642.350.000
2.13.33	Program Peningkatan Prestasi Olahraga	Persentase Pelaku Olahraga Prestasi (%)		15,67	3.585.700.000
2.13.33.04	Partisipasi Event dan Multi Event olahraga	Jumlah kontingen kaltim dalam mengikuti event dan multi event olahraga (Orang)	luarPrv	1200	1.375.700.000
2.13.33.05	Peningkatan SDM Pelatih dan Wasit Olahraga	Jumlah SDM pelatih dan wasit olahraga yang berkompeten (Orang)	smd	140	747.100.000
2.13.33.06	Pelaksanaan Even dan Multi Even Olahraga	Jumlah peserta yang mengikuti event dan multi event olahraga (Orang)	smd	230	1.290.300.000
2.13.33.18	workshop Iptek Olahraga	Jumlah peserta yang mengikuti workshop (Orang)	smd	400	172.600.000
2.13.35	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Tercapainya pemuda Kaltim dalam berwirausaha (Persen)		1	2.005.000.000
2.13.35.01	Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda	Jumlah pemuda yang mengikuti peningkatan kompetensi berwirausaha (Orang)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	400	1.400.000.000
2.13.35.02	Pelatihan Kecakapan Hidup	Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kecakapan hidup (Orang)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	100	605.000.000
2.13.01.00 2	UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga				14.100.000.000
2.13.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPT (SKM) (%)		89,35	9.973.800.000
2.13.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Adiministrasi Perkantoran (Bulan)	smd	12	9.973.800.000
2.13.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (Unit)		1	425.000.000
2.13.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana (Bulan)	smd	12	425.000.000
2.13.34	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah even olahraga yang memanfaatkan fasilitas olahraga di Stadion Utama dan Madya (Event)		35	3.701.200.000
2.13.34.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara (Gedung)	smd	3	3.701.200.000
2.14	Statistik				1.500.000.000
2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika				1.500.000.000
2.10.01.00 1	Dinas Komunikasi dan Informatika				1.500.000.000
2.14.16	Program penguatan dan evaluasi data dan statistik	jumlah Kajian yang diselesaikan (Buku)		1	1.500.000.000
2.14.16.01	Pengumpulan data statistik daerah	Tersedianya data pembangunan daerah dan data pertumbuhan	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr,	1	1.500.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
		ekonomi yang akurat dan kredibel (buku)	ppu, bpn, btg, smd, luarPrv		
2.16	Kebudayaan				14.918.637.382
1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				14.918.637.382
1.01.01.001	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				9.147.682.382
2.16.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah sekolah mengembang-kan budaya loka (Sekolah)		233	9.147.682.382
2.16.15.01	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Terselenggaranya Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah (Kab/Kota)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	10	2.251.504.182
2.16.15.06	Pengembangan nilai budaya seni dan film	Terselenggaranya Pengembangan nilai budaya seni dan film (Kab / Kota)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	10	4.341.375.000
2.16.15.07	Pengembangan industri ekonomi kreatif berbasis seni budaya dan iptek	Terselenggaranya industri ekonomi kreatif berbasis seni budaya dan iptek (Kab/Kota)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	10	2.554.803.200
1.01.01.235	UPTD Taman Budaya				2.759.355.000
2.16.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pembinaan dan Pelestarian Seni dan Budaya Prov. Kaltim (Orang)		150	2.759.355.000
2.16.15.01	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Terselenggaranya Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah (Kab/Kota)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	100	1.869.505.000
2.16.15.06	Pengembangan nilai budaya seni dan film	Terselenggaranya Pengembangan nilai budaya seni dan film (Kab / Kota)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	100	889.850.000
1.01.01.237	UPTD Museum Negeri Mulawarman				3.011.600.000
2.16.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pembinaan dan Pelestarian Seni dan Budaya Prov. Kaltim (Orang)		100	3.011.600.000
2.16.15.01	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Terselenggaranya Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah (Kab/Kota)	kkp	100	1.350.955.000
2.16.15.06	Pengembangan nilai budaya seni dan film	Terselenggaranya Pengembangan nilai budaya seni dan film (Kab / Kota)	kkp	100	1.660.645.000
2.17	Perpustakaan				7.380.007.000
2.17.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah				7.380.007.000
2.17.01.001	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah				7.380.007.000
2.17.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		86,3	2.400.000.000
2.17.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (bulan)	smd	12	2.400.000.000
2.17.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		6	925.000.000
2.17.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Terpenuhinya sarana dan prasarana Aparatur (%)	smd	100	125.000.000
2.17.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (bulan)	smd	12	800.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
2.17.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		93	975.000.000
2.17.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman (bulan)	kbr, ktm, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	12	700.000.000
		Jumlah koordinasi dan konsultasi ke kelembagaan (kegiatan)		45	
2.17.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek (ASN)	smd	40	275.000.000
2.17.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (%)		96	172.732.000
2.17.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran (dokumen)	smd	15	97.732.000
2.17.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan (dokumen)	smd	7	75.000.000
2.17.23	Program Peningkatan Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan	Jumlah masyarakat yang mendayagunakan perpustakaan (Pemustaka)		206600	1.575.000.000
2.17.23.01	Pengembangan Layanan Perpustakaan	Jumlah Pemustaka perpust. Konvensional (pemustaka)	smd	0	1.200.000.000
		Jumlah Pemustaka perpust. Digital (pemustaka)		0	
		Jumlah Kerjasama Perpustakaan (MoU)		0	
		.Peningkatan Jumlah pemustaka Onsite (Pemustaka)		197800	
2.17.23.02	Pengembangan Sistem Otomasi Perpustakaan	Jumlah Kerjasama Perpustakaan (MoU)	smd	0	175.000.000
		Terbentuknya sistem otomasi perpustakaan dan kearsipan yang terintegrasi dan On-line (Anggota Jaringan)		0	
		.Peningkatan Jumlah pemustaka Online (Pemustaka)		8800	
2.17.23.03	Pengembangan Kerjasama Perpustakaan	Jumlah Kerjasama Perpustakaan (MoU)	smd	0	200.000.000
		Jumlah dokumen MoU dan PKS dibidang Perpustakaan dan Kearsipan (Mou/PKS)		10	
2.17.24	Program Depository, Pelestarian, Pengembangan dan Pengolahan Bahan Perpustakaan	Jumlah pengembangan koleksi bahan perpustakaan (Judul)		4100	832.275.000
2.17.24.01	Pengelolaan Depository dan Alih Media Konten Lokal	Jumlah konten lokal yang berhasil dikumpulkan (Judul)	smd	0	132.275.000
		Jumlah konten lokal yang diolah (Judul)		0	
		Jumlah konten lokal yang dilestarikan (alihmedia) (Judul)		30	
2.17.24.02	Pengembangan Koleksi dan Pelestarian Bahan Perpustakaan	Jumlah koleksi lokal yang berhasil dikumpulkan dan di alih mediakan (judul)	smd	0	350.000.000
		Jumlah Bahan Perpustakaan Yang dikembangkan dan dilestarikan (judul)		0	
		Jumlah Bahan Perpustakaan yang diolah (judul)		0	

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
		Jumlah bahan perpustakaan yang dikembangkan (judul)		3500	
		Jumlah bahan pustaka yang dikonservasi (eksemplar)		56098	
2.17.24.03	Pengolahan dan Perawatan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang diolah (judul)	smd	450	100.000.000
		Jumlah perbaikan buku rusak (judul)		0	
		Jumlah penjilidan majalah (bundel)		0	
		Jumlah penjilidan surat kabar (bundel)		0	
2.17.24.04	Pengembangan Koleksi dan Penyediaan Bahan Pustaka (DAK)	Jumlah bahan perpustakaan yang dikembangkan (judul)	ktm, smd	400	250.000.000
2.17.26	Program Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca	Jumlah Perpustakaan yang memenuhi standar (Perpustakaan)		20	500.000.000
2.17.26.01	Pembinaan, Pengembangan Kelembagaan dan Tenaga Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang dibina (perpustakaan)	smd	0	500.000.000
		jumlah Perpustakaan yang dikembangkan (perpustakaan)		0	
		Jumlah Tenaga Perpustakaan yang mengikuti Diklat (orang)		0	
		Jumlah Tenaga Fungsional Dan Tenaga Perpustakaan yg dibina dan dikembangkan (orang)		30	
		Jumlah Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca (Kegiatan)		6	
		Jumlah Perpustakaan yang dibina dan dikembangkan (Perpustakaan)		20	
2.18	Kearsipan				1.400.000.000
2.17.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah				1.400.000.000
2.17.01.001	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah				1.400.000.000
2.18.19	Program pengelolaan Arsip	Jumlah Arsip statis dan arsip hasil akuisisi yang terkelola dengan baik (berkas)		1100	675.000.000
2.18.19.01	Akuisi dan Pengelolaan Arsip	Laporan hasil Akuisisi dan Pengelolaan Arsip (laporan)	smd	0	250.000.000
		Jumlah akuisisi arsip statis (berkas)		100	
		Jumlah Arsip Inaktif yang disusutkan (berkas)		1000	
2.18.19.02	Pemeliharaan dan Pelestarian Arsip	Jumlah arsip yang dipelihara (lembar)	smd	700	175.000.000
2.18.19.03	Peningkatan Kualitas Layanan Kearsipan	Meningkatnya Jumlah Pengunjung Kearsipan (orang)	smd	60	250.000.000
2.18.25	Program Pembinaan Kearsipan	Jumlah lembaga instansi yang dibina (Lembaga/Intansi)		50	725.000.000
2.18.25.01	Pembinaan Internal dan Supervisi	Laporan pembinaan terhadap SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (laporan)	smd	0	250.000.000
		jumlah dokumen Peraturan/Kebijakan mengenai kearsipan (dokumen)		2	
		Jumlah pembinaan internal dan supervisi lembaga / instansi (Lembaga/Intansi)		40	
2.18.25.02	Pembinaan Eksternal dan Supervisi	Jumlah Pembinaan Eksternal, Supervisi dan Tata Kelola LKD Kab /Kota (LKD)	smd	10	250.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
2.18.25.03	Pembinaan, Pengembangan Kelembagaan dan Tenaga Kearsipan	Jumlah Tenaga Fungsional Dan Tenaga Kearsipan yg dibina dan dikembangkan (orang)	smd	20	225.000.000
3	Urusan Pilihan				756.111.605.315
3.01	Kelautan dan Perikanan				57.437.250.000
3.01.01	Dinas Kelautan Dan Perikanan				57.437.250.000
3.01.01.001	Dinas Kelautan Dan Perikanan				47.000.000.000
3.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		82	9.064.400.000
3.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (Bulan)	smd	12	9.064.400.000
3.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		5	2.746.100.000
3.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Unit)	smd	40	1.066.600.000
3.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	smd	12	1.679.500.000
3.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		20	2.786.000.000
3.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar Maupun Dalam daerah (Kali)	smd	210	2.111.000.000
3.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek (Orang)	smd	35	675.000.000
		Jumlah Pakaian Dinas untuk PNS dan Non PNS (Stel)		225	
3.01.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran (Dokumen)		0	2.278.000.000
		Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (Nilai)		65	
3.01.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran (Dokumen)	bpn, smd	8	1.396.000.000
3.01.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan (Dokumen)	bpn, smd	4	882.000.000
3.01.21	Program pengembangan perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)		158938	16.121.500.000
3.01.21.08	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan dan Kenelayan	Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB) Perikanan Tangkap yang Dibina (KUB)	bru, kbr, kkr, ktm, psr, ppu, bpn, btg, smd	60	4.053.500.000
		Indeks Kesejahteraan Nelayan (NTN)		100	
3.01.21.09	Kegiatan Pengendalian Penangkapan Ikan	Jumlah Perizinan Kapal Ikan (Izin)	bpn, smd	200	1.179.750.000
3.01.21.10	Kegiatan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Pangkalan Pendaratan Ikan yang Operasional (Unit)	bru, ktm, ppu, bpn, btg, smd	6	4.000.000.000
3.01.21.11	Pembangunan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Pokok dan Fungsional Pelabuhan Perikanan (DAK)	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Pokok dan Fungsional Sarpras Pelabuhan Perikanan (PPI)	bru, ktm, ppu, bpn, btg, smd	1	6.888.250.000
3.01.25	Program Pengembangan Produksi Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)		161216	6.110.500.000
		Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita)		54	

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.01.25.01	Kegiatan Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Jumlah Unit Pembenihan yang bersertifikat CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) (Unit)	bru, kkr, bpn, btg, smd	5	2.601.500.000
		Jumlah Unit Pembudidayaan Ikan yang bersertifikat CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) skala kecil dan skala besar (Unit)		65	
		Jumlah Sampel Produk Perikanan Budidaya yang diuji minimal 96% bebas residu (Sampel)		60	
3.01.25.02	Kegiatan pengembangan usaha perikanan dan kelautan	Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya (Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN))	bpn, smd	16	1.996.500.000
		Jumlah Bidang Lahan Budidaya yang disiapkan sertifikatnya (Bidang)		250	
		Indeks Kesejahteraan Pembudidaya Ikan (NTPi)		100	
3.01.25.03	Kegiatan peningkatan dan pengembangan pengelolaan produksi perikanan	Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan dan Sertifikasi (UKM)	ktm, psr, ppu, smd	20	907.500.000
		Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Pengolahan dan Pemasaran (Izin)		40	
3.01.25.04	Kegiatan Pemasaran Produksi Perikanan	Jumlah Fasilitas (Promosi) Pendukung Pemasaran Produksi Perikanan (Promosi)	smd	4	605.000.000
		Volume Ekspor Perikanan (Ton)		2950	
3.01.26	Program Pengelolaan Ruang Laut	Jumlah Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif (Kawasan yang di restorasi)		1	4.174.500.000
3.01.26.01	Kegiatan Pendayagunaan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Lokasi Kawasan Laut & Wilayah Pesisir yang memiliki Rencana Zonasi dan Ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Dokumen)	bru, kkr, ktm, psr, ppu, bpn, btg	0	2.075.000.000
		Jumlah Wilayah Pesisir yang Memiliki Dokumen Perencanaan (Dokumen)		2	
		Kawasan Laut dan Wilayah Pesisir yang Memiliki Rencana Pemanfaatan dan Pengelolaan yang Ditetapkan menjadi Pergub (Dokumen)		1	
		Jumlah Kelompok Masyarakat Pesisir yang Dibina/Difasilitasi (Kelompok Masyarakat)		3	
3.01.26.02	Kegiatan Reklamasi dan Jasa Kelautan	Jumlah Pelaku Investasi Jasa Kelautan yang difasilitasi (Pelaku Investasi)	bru, bpn, btg	3	1.124.500.000
3.01.26.03	Kegiatan Konservasi Kelautan dan Perikanan	Jumlah Kawasan yang direhabilitasi (Hektare)	kkk, psr, ppu	4	975.000.000
3.01.27	Program Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persentase Cakupan wilayah laut sampai dengan 12 mil yang diawasi dai IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan (Persen)		40,74	3.719.000.000
3.01.27.01	Kegiatan Pengawasan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Penangkapan Ikan	Jumlah Pengawasan Wilayah Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Penangkapan Ikan (Operasi)	bru, kkr, ktm, psr, bpn, btg, smd	10	1.524.750.000
3.01.27.02	Kegiatan Pengawasan, Pembudidayaan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Pengawasan Pembudidayaan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Operasi)	bru, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	10	1.407.750.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.01.27.03	Kegiatan Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan	Jumlah Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan yang Ditangani (Dokumen)	smd	2	786.500.000
3.01.01.00 2	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan				1.482.250.000
3.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (%)		82	648.500.000
3.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (Bulan)	smd	12	648.500.000
3.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit Kerja UPTD yang Memiliki Kinerja Pelayanan Tepat Waktu (Unit)		3	321.750.000
3.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Unit)	smd	12	216.750.000
3.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	smd	12	105.000.000
3.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		20	337.000.000
3.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar Maupun Dalam daerah (Kali)	smd	19	245.000.000
3.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek (Orang)	smd	7	92.000.000
3.01.28	Program Pengembangan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Jumlah Hasil Bahan Uji Perikanan yang Dilakukan Pemeriksaan (Sampel)		220	175.000.000
3.01.28.01	Kegiatan Pengujian Mutu Hasil Perikanan	Jumlah Sampel yang Dilakukan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (Sampel)	smd	220	150.000.000
3.01.28.02	Penerapan Mutu Hasil Perikanan	Jumlah Sampel yang Menerapkan Mutu Hasil Perikanan sesuai Standar (Sampel)	smd	220	25.000.000
3.01.01.00 3	UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar				6.656.000.000
3.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (%)		82	695.750.000
3.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (Bulan)	bpn	12	695.750.000
3.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit Kerja UPTD yang Memiliki Kinerja Pelayanan Tepat Waktu (Unit)		3	584.100.000
3.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Unit)	bpn	12	311.850.000
3.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	bpn	12	272.250.000
3.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		20	485.500.000
3.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah (Kali)	bpn	19	425.000.000
3.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek (Orang)	bpn	7	60.500.000
3.01.29	Program Peningkatan Penyediaan Benih Ikan dan Udang Unggulan	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang Windu/Ikan Air Laut (Ekor)		28000000 00	4.890.650.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.01.29.01	Peningkatan Kualitas Mutu Benih	Jumlah Komoditas benih udang windu/ ikan air laut yang berkualitas (komoditas)	bpn	5	296.450.000
3.01.29.02	Pengembangan dan Peningkatan Penyediaan Benih Ikan Air Payau dan Laut serta Udang	Jumlah Unit Pembenihan udang windu/ ikan air laut yang Operasional (Unit)	bpn	11	2.515.300.000
3.01.29.04	Rehab sarana dan prasarana perbenihan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang di Rehab (Unit)	bpn	2	2.078.900.000
3.01.01.004	UPTD Sentra Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu				2.299.000.000
3.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (%)		82	877.492.800
3.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (Bulan)	kkp	12	877.492.800
3.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit Kerja UPTD yang Memiliki Kinerja Pelayanan Tepat Waktu (Unit)		3	375.686.200
3.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Unit)	kkp	12	38.750.000
3.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	kkp	12	336.936.200
3.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		20	394.370.000
3.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah (Kali)	kkp	19	273.170.000
3.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek (Orang)	kkp	7	121.200.000
3.01.31	Program Peningkatan Penyediaan Benih Ikan Air Payau / Air Laut	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang Galah /Ikan Air Laut (Ekor)		75000	651.451.000
3.01.31.01	Peningkatan Kualitas Mutu Benih	Jumlah Komoditas Spesifik Benih Udang Galah/ Ikan yang berkualitas (Komoditas)	kkp	2	606.621.000
3.01.31.02	Pengembangan dan Peningkatan Penyediaan Benih Ikan Air Payau / Laut	Jumlah Unit Pembenihan Udang Galah dan Ikan Air Payau/Laut yang Operasional (Unit)	kkp	2	44.830.000
3.02	Pariwisata				26.324.342.040
3.02.01	Dinas Pariwisata				26.324.342.040
3.02.01.001	Dinas Pariwisata				26.324.342.040
3.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		100	2.986.897.440
3.02.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	smd	12	2.986.897.440
3.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		5	1.562.650.000
3.02.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Item)	smd	20	805.050.000
3.02.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	smd	12	757.600.000
3.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		60	1.294.200.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.02.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat, koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (Orang/Tahun)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	215	1.294.200.000
3.02.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (nilai AKIP)		80	1.256.057.000
3.02.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran (Dokumen)	bru, kkr, ktm, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	6	1.060.242.000
3.02.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan (Laporan)	bru, kbr, kkr, ktm, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	4	195.815.000
3.02.16	Program pengembangan destinasi pariwisata	Jumlah Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di fasilitasi pengembangannya (Kawasan)		2	3.365.000.000
3.02.16.01	Peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Jumlah infrastruktur yang dibangun di destinasi pariwisata (Unit)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	5	1.580.000.000
3.02.16.02	Pengembangan destinasi unggulan alam dan buatan	Jumlah wisata alam dan buatan yang dikembangkan (Destinasi)	kk, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	4	795.000.000
3.02.16.04	Pengembangan destinasi unggulan bahari dan minat khusus	Jumlah wisata bahari dan khusus yang dikembangkan (Destinasi)	smd	3	990.000.000
3.02.17	Program Pengembangan Pemasaran dan Kerjasama Pariwisata	Jumlah Destinasi Unggulan Provinsi yang dipromosikan (Destinasi)		10	6.753.962.600
3.02.17.01	Penguatan analisa pasar pariwisata	Jumlah laporan analisa pasar pariwisata (Laporan)	smd	2	1.226.240.000
3.02.17.02	Penguatan data dan informasi pariwisata	Jumlah data dan informasi pariwisata yang di umumkan (Jenis)	smd	10	824.000.000
3.02.17.03	Pengembangan promosi dan kerjasama pariwisata	Jumlah kerjasama dan promosi yang dilakukan (Kegiatan)	smd	9	4.703.722.600
3.02.18	Program Pengembangan Industri dan Kelembagaan Pariwisata	Jumlah pelaku usaha jasa pariwisata yang dikembangkan (Orang)		660	2.903.275.000
3.02.18.01	Pemberdayaan masyarakat sadar wisata dan kampanye Sapta Pesona	Jumlah anggota kelompok sadar wisata (pokdarwis) yang dilatih (Orang)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	250	896.010.000
3.02.18.02	Pengembangan pengendalian usaha sarana pariwisata	Jumlah pelaku usaha sarana pariwisata yang dibina (Orang)	smd	230	647.265.000
3.02.18.03	Peningkatan SDM dan profesionalisme usaha jasa pariwisata	Jumlah pelaku usaha jasa pariwisata yang dibina (Orang)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	180	1.360.000.000
3.02.19	Program Pengembangan Karya Seni Budaya dan Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif (orang)		350	6.202.300.000
3.02.19.01	Peningkatan kualitas dan kreatifitas seni budaya pertunjukan	Jumlah pelaku ekraf seni pertunjukan yang dilatih (Orang)	smd	100	4.010.000.000
3.02.19.02	Pengembangan pengelolaan karya seni budaya	Jumlah pelaku seni budaya yang ditingkatkan karyanya (Orang)	smd	120	1.056.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.02.19.03	Pengembangan wisata budaya	Jumlah fasilitasi kegiatan dan peningkatan SDM bagi pelaku ekraf wisata budaya (Kegiatan)	smd	130	1.136.300.000
2.03.01	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura				21.657.648.750
2.03.01.00 1	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura				17.100.000.000
3.03.41	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura (Ton)		247698	5.250.000.000
3.03.41.01	Peningkatan Produksi Hortikultura	Produktivitas tanaman hortikultura (Ton/Ha)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	2,17	3.550.000.000
3.03.41.02	Penanganan Pasca Panen dan Promosi Atas Hasil Pertanian Hortikultura	Jumlah produksi tanaman hortikultura yang disertifikasi (Unit)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	17	850.000.000
3.03.41.03	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Hortikultura	Jumlah kelompok tani yang mendapat bantuan (Kelompok Tani)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	150	850.000.000
3.03.51	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan	Jumlah produksi padi (Ton)		444000	11.850.000.000
3.03.51.03	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Luas tanam padi (Ha)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	25000	9.000.000.000
3.03.51.04	Penanganan Pasca Panen dan Promosi Atas Hasil Pertanian Tanaman Pangan	Rata-rata percepatan penanganan pasca panen padi (Hari/Ha)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	8	850.000.000
3.03.51.05	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Tanaman Pangan	Peningkatan indeks pertanaman (IP)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	1,6	2.000.000.000
2.03.01.00 2	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura				1.390.046.250
3.03.49	Program Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	Luas Lahan yang Menggunakan Benih Unggul Tanaman Pangan dan Hortikultura yang bersertifikat (Ha)		180	1.390.046.250
3.03.49.01	Sertifikasi Benih Unggul Pertanian	Jumlah sertifikat/label benih unggul (Label)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	6000	724.245.000
3.03.49.03	Monitoring dan Pengawasan Peredaran Benih	Jumlah rekomendasi produsen benih yang dikeluarkan (Rekomendasi)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	25	665.801.250
3.03.49.04	Pembangunan/Perbaikan UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Penyediaan Sarana Pendukungnya (DAK)	Jumlah UPTD yang mendapat Pembangunan/Perbaikan dan Penyediaan Sarana Pendukungnya (DAK) (Unit)	smd	1	-
2.03.01.00 3	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura				1.264.017.500
3.03.48	Program Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Luas Serangan OPT (Ha)		6112	1.264.017.500

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.03.48.02	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	Luas lahan yang dilaksanakan pengendalian OPT (Ha)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	25000	909.065.000
3.03.48.03	Perbanyak Agens Hayati dan Petisida Ramah Lingkungan	Jumlah pos pelayanan agens hayati (PPAH) yang dikembangkan dan dilayani (Unit)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	72	354.952.500
3.03.48.04	Pembangunan/Perbaikan UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Penyediaan Sarana Pendukungnya (DAK)	Jumlah UPTD yang mendapat Pembangunan/Perbaikan dan Penyediaan Sarana Pendukungnya (DAK) (Unit)	smd	1	-
2.03.01.00 4	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura				1.903.585.000
3.03.46	Program Peningkatan Produksi Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura	Rata-rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Benih Bersertifikat (%)		82	1.903.585.000
3.03.46.01	Peningkatan Produksi Benih Tanaman Pangan	Jumlah produksi benih dasar dan pokok tanaman pangan yang bersertifikat (Ton)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	35	1.207.185.000
3.03.46.03	Peningkatan Produksi Benih Hortikultura	Jumlah Produksi Benih dasar dan pokok tanaman hortikultura yang bersertifikat (Batang)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	6000	696.400.000
3.03.46.04	Pembangunan/Perbaikan UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Penyediaan Sarana Pendukungnya (DAK)	Jumlah UPTD yang mendapat Pembangunan/Perbaikan dan Penyediaan Sarana Pendukungnya (DAK) (Unit)	kk, smd	1	-
3.03	Pertanian				106.324.001.990
3.03.01	Dinas Perkebunan				41.666.353.240
3.03.01.00 1	Dinas Perkebunan				30.025.871.000
3.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		86	3.155.014.000
3.03.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	kk, smd	12	3.155.014.000
3.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		5	2.412.825.000
3.03.08.01	Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan (Unit)	smd	21	698.250.000
3.03.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana (Bulan)	smd	12	1.714.575.000
3.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		20	2.397.050.000
3.03.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Kegiatan)	smd	4	1.917.050.000
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (Kegiatan)		4	
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman (Bulan)		12	

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.03.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek (Orang)	smd	50	480.000.000
		Jumlah pakaian dinas (Stel)		460	
3.03.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (Nilai)		70	1.087.737.000
3.03.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran (Dokumen)	smd	10	485.800.000
3.03.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan (Dokumen)	smd	4	601.937.000
3.03.58	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Produksi Komoditi Perkebunan (karet) (Ton)		77763	16.717.791.000
		Produksi Komoditi Perkebunan (kelapa sawit) (ton)		17036402	
		Produksi Komoditi Perkebunan (kakao) (ton)		3771	
		Produksi Komoditi Perkebunan (Lada) (ton)		6434	
		Produksi Komoditi Perkebunan (Kelapa) (Ton)		12479	
		Produksi komoditas perkebunan (Ton)		17136849	
3.03.58.04	Kegiatan Peningkatan Produktivitas Perkebunan	Produktivitas komoditas perkebunan (Kelapa Sawit) (Ton/Ha)	bru, kbr, kkr, ktm, ppu, bpn, smd	20	5.852.110.000
		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Karet) (Ton/Ha)		1,4	
		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kelapa) (Ton/Ha)		0,82	
		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kakao) (Ton/Ha)		0,75	
		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Lada) (Ton/Ha)		1,18	
3.03.58.05	Kegiatan Perluasan Komoditas Perkebunan	Jumlah luas kebun yang di perluas (Kelapa Sawit) (Ha)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, smd	200	9.232.100.000
		Jumlah luas kebun yang di perluas (Lada) (Ha)		100	
		Jumlah luas kebun yang di perluas (Kelapa) (Ha)		20	
		Jumlah luas kebun yang di perluas (Kakao) (Ha)		100	
		Jumlah luas kebun yang di perluas (Karet) (Ha)		200	
3.03.58.06	Pengembangan Kelembagaan Perkebunan	Jumlah kelembagaan pekebun yang dibentuk (unit)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, smd	24	1.633.581.000
3.03.76	Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Perkebunan	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan (Juta ton CO2eq)		4,07	977.500.000
3.03.76.04	Pengembangan EBT pada sektor Perkebunan	Jumlah perusahaan yang mengembangkan bioenergi (PMS)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	3	345.000.000
3.03.76.05	Perlindungan Lahan Konservasi di Areal Perkebunan	Luas lahan NKT di areal perkebunan yang dilindungi (Ha)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	102000	287.500.000
3.03.76.06	Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan	Jumlah KTPA yang dibentuk dan dibina (KTPA)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr,	15	345.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
			ppu, bpn, btg, smd		
3.03.80	Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP) (Perusahaan)		35	1.026.571.000
3.03.80.04	Peningkatan Kemitraan Usaha Perkebunan	Jumlah kelembagaan pekebun yang dimitrakan (koperasi)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	40	293.990.000
3.03.80.05	Penanganan Konflik Usaha Perkebunan	jumlah konflik perkebunan yang terselesaikan (konflik)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	5	242.331.000
3.03.80.06	Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Usaha Perkebunan	Jumlah pelaku usaha yang dibina (perusahaan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	52	490.250.000
3.03.93	Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Jumlah produk perkebunan yang bersertifikat SNI (Produk)		2	2.251.383.000
3.03.93.01	Pembinaan Pasca Panen Perkebunan	Jumlah kelompok tani yang produknya memenuhi SNI (Kelompok Tani)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	4	852.638.000
3.03.93.02	Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah jenis olahan hasil perkebunan (Produk)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	3	763.600.000
3.03.93.03	Kegiatan Promosi Produksi Perkebunan	Jumlah promosi yang diikuti (event)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	10	635.145.000
3.03.01.00 2	UPTD Pengawasan Benih Pekebunan				2.800.000.000
3.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		86	397.350.000
3.03.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	smd	12	397.350.000
3.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		3	993.550.000
3.03.08.01	Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan (Unit)	smd	21	770.000.000
3.03.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana (Bulan)	smd	12	223.550.000
3.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		20	536.240.000
3.03.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Kegiatan)	kk, ktm, bpn, smd, luarPrv	4	313.240.000
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (Kegiatan)		4	
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman (Bulan)		12	
3.03.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek (Orang)	luarPrv	50	223.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.03.94	Program Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih	Jumlah benih yang beredar (Benih)		2945176	872.860.000
3.03.94.01	Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Benih	Persentase peredaran benih yang illegitim (%)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	2,58	465.525.000
3.03.94.02	Pengujian dan Sertifikasi Benih	Jumlah benih yang disertifikasi (Benih)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	2000000	407.335.000
3.03.01.003	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan				3.000.000.000
3.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		86	626.749.600
3.03.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	smd	12	626.749.600
3.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		3	800.435.300
3.03.08.01	Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan (Unit)	smd	9	224.692.750
3.03.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana (Bulan)	smd	12	575.742.550
3.03.08.04	Rehabilitasi sedang/berat Gedung (DAK)	Jumlah Gedung di Rehab Berat/Sedang (Unit)	smd	2	-
3.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		20	353.385.300
3.03.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Kegiatan)	kk, ppu, bpn, smd, luarPrv	16	280.647.800
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (Kegiatan)		28	
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman (Bulan)		12	
3.03.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek (Orang)	luarPrv	7	72.737.500
3.03.95	Program Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	Jumlah Taksasi Kerugian Akibat Serangan OPT (Rupiah)		1047138860	1.219.429.800
3.03.95.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	Jumlah Lahan yang di Kendalikan (Ha)	bru, kkr, ktm, psr, ppu, bpn, smd	220	598.090.000
3.03.95.02	Perbanyak Agens Pengendali Hayati (APH) dan Bio Pesticida (BP)	Jumlah APH yang Diperbanyak (Kg)	bru, kkr, ktm, bpn, smd	5000	621.339.800
		Jumlah APH yang Diperbanyak (Liter)		500	
3.03.01.004	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan				5.840.482.240
3.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		86	616.627.240
3.03.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	12	616.627.240

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		3	455.350.000
3.03.08.01	Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan (Unit)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	3	29.750.000
3.03.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana (Bulan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	12	425.600.000
3.03.08.04	Rehabilitasi sedang/berat Gedung (DAK)	Jumlah Gedung di Rehab Berat/Sedang (Unit)	kk, smd	2	-
3.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		20	421.750.000
3.03.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Kegiatan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	4	291.750.000
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (Kegiatan)		4	
3.03.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek (Orang)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	50	130.000.000
3.03.88	Program penyediaan bahan tanaman	Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat (%)		90	4.346.755.000
3.03.88.03	Penyediaan Benih Tanaman Tahunan dan Penyegar	Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (benih)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	132000	3.391.160.000
		Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (kelapa sawit) (benih)		50000	
		Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (karet) (benih)		50000	
		Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (kelapa) (benih)		2000	
		Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (kakao) (benih)		20000	
		Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (aren) (benih)		10000	
3.03.88.04	Penyediaan Benih Tanaman Semusim dan Rempah	Jumlah benih tanaman semusim dan rempah (benih)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	45000	955.595.000
		Jumlah benih tanaman semusim dan rempah (lada) (benih)		25000	
		Jumlah benih tanaman semusim dan rempah (pala) (benih)		10000	
		Jumlah benih tanaman semusim dan rempah (sereh wangi) (benih)		10000	
3.03.02	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan				43.000.000.000
3.03.02.001	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan				32.000.000.000
3.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		82	3.000.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.03.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah surat yang diproses (Surat)	smd	2700	3.000.000.000
3.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		5	3.470.000.000
3.03.08.01	Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor yang disediakan (Unit)	smd	135	470.000.000
3.03.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara dan diperbaiki (Unit)	smd	80	3.000.000.000
		Luas gedung dan taman yang disediakan jasa kebersihannya (M2)		4427	
3.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		13	1.710.000.000
3.03.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi (Kegiatan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	164	1.400.000.000
3.03.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek (orang)	ppu, smd, luarPrv	18	310.000.000
3.03.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai)		79,36	1.300.000.000
3.03.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran (Dokumen)	smd, luarPrv	12	750.000.000
3.03.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan (Laporan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	17	550.000.000
3.03.23	Program Hilirisasi Produk Peternakan	Peningkatan usaha yang bersertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) (%)		12	1.300.000.000
3.03.23.02	Peningkatan Mutu Produk Olahan Peternakan	Jumlah usaha pengolahan hasil peternakan yang dilakukan pendampingan (Unit usaha)	kbr, ktm, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	2	300.000.000
3.03.23.03	Peningkatan Pemasaran Hasil Peternakan	Jumlah omset pemasaran produk peternakan dalam pameran/bazar (Rp)	bru, kbr, ktm, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	17500000 0	650.000.000
3.03.23.04	Peningkatan Jaminan Keamanan Pangan Asal Ternak	Jumlah unit usaha yang dilakukan pengawasan dan pembinaan (Unit usaha)	bru, kbr, kkr, ktm, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	30	350.000.000
3.03.34	Program Pengembangan Usaha Peternakan	Nilai Tukar Usaha Peternakan (NTUP) (Konstanta)		118,5	11.670.000.000
		Jumlah Miniranch yang terregister (Unit)		40	
3.03.34.02	Pengembangan Kawasan Peternakan	Jumlah bibit hijauan Pakan Ternak (HPT) (Stek/Pols)	bru, kbr, kkr, ktm, psr, btg, smd, luarPrv	100000	10.470.000.000
3.03.34.03	Pengembangan Informasi Peternakan	Jumlah Database, Statistik, NBM dan Data fungsi peternakan (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	4	600.000.000
3.03.34.04	Pengembangan Agribisnis Peternakan	Jumlah peternak debitur sektor peternakan (KTS, KUR, KKPE,dll) (Orang)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	55	600.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.03.89	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Jumlah kompartemen yang berstatus bebas penyakit jembrana (Unit)		40	2.450.000.000
3.03.89.01	Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan	Jumlah hewan yang divaksinasi (ekor)	bru, kbr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	10000	550.000.000
3.03.89.02	Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Hewan	Jumlah Kab/kota yang dilakukan pengawasan lalu lintas hewan (Kab/Kota)	bru, kbr, kkr, ktm, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	10	1.250.000.000
3.03.89.03	Penguatan Pelayanan Kesehatan Hewan	Jumlah hewan/ternak yang dilakukan pelayanan kesehatan hewan (ekor)	bru, kbr, kkr, ktm, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	1450	650.000.000
3.03.90	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan	Angka Kelahiran Sapi (%)		20,5	7.100.000.000
		Calving Interval (Bulan)		17	
3.03.90.01	Pengembangan Perbibitan Ternak	Jumlah ternak sapi bibit yang memiliki SKLB (Surat Keterangan Layak Bibit) (Ekor)	bru, kbr, kkr, ktm, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	120	5.500.000.000
		Service per Conception (Indeks)		1,7	
3.03.90.02	Pengembangan Teknologi Peternakan Tepat Guna	Jumlah kelompok Budidaya yang dilakukan pendampingan (Kelompok)	bru, kkr, ktm, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	2	1.100.000.000
3.03.90.03	Peningkatan Kelembagaan Peternak	Jumlah proposal permohonan bantuan yang diverifikasi (Proposal)	bru, kbr, kkr, ktm, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	16	500.000.000
3.03.02.00 2	UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak				6.000.000.000
3.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		82	1.200.000.000
3.03.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah surat yang diproses (Surat)	ppu	250	1.200.000.000
3.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		3	1.960.000.000
3.03.08.01	Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor yang disediakan (Unit)	ppu	20	260.000.000
3.03.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara dan diperbaiki (Unit)	ppu	5	1.700.000.000
		Luas gedung dan taman yang disediakan jasa kebersihannya (M2)		1000	
3.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		13	540.000.000
3.03.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi (Kegiatan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	140	290.000.000
3.03.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek (orang)	ppu, smd, luarPrv	3	250.000.000
3.03.92	Program Peningkatan Mutu Genetik Ternak	Peningkatan produksi bibit ternak (%)		10	2.300.000.000
		Persentase produksi bibit ternak berkualitas (%)		12	

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.03.92.03	Pembangunan/Perbaikan UPTD PIB Api-Api dan Penyediaan Sarana Pendukungnya (DAK)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung (Unit)	ppu	1	1.000.000.000
3.03.92.04	Peningkatan Produksi Bibit dan Benih Ternak	Jumlah Kelahiran Sapi Bibit dan Rusa Bibit (Ekor)	kk, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	40	650.000.000
3.03.92.05	Peningkatan Produksi dan Bibit Hijauan Pakan Ternak	Produksi HPT (Ton)	ppu, smd, luarPrv	750	650.000.000
		Jumlah bibit HPT yang diproduksi (Stek/Pol)		5000	
3.03.02.003	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				5.000.000.000
3.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		82	900.000.000
3.03.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah surat yang diproses (Surat)	smd	270	900.000.000
3.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		3	460.000.000
3.03.08.01	Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor yang disediakan (Unit)	smd	8	160.000.000
3.03.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara dan diperbaiki (Unit)	smd	49	300.000.000
		Luas gedung dan taman yang disediakan jasa kebersihannya (M2)		686	
3.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		13	340.000.000
3.03.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi (Kegiatan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	47	260.000.000
3.03.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek (Orang)	smd, luarPrv	7	80.000.000
3.03.91	Program Penyidikan dan Pengujian Keswan dan Kesmavet	Peningkatan pemeriksaan sampel penyidikan penyakit hewan dan produk asal hewan (%)		13	3.300.000.000
3.03.91.01	Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan	Jumlah sampel penyakit hewan (sampel)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	5224	1.600.000.000
3.03.91.02	Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah sampel produk asal hewan (sampel)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	851	1.600.000.000
3.03.91.03	Pembangunan/Perbaikan UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet dan Penyediaan Sarana Pendukungnya (DAK)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung (Unit)	smd	1	100.000.000
3.04	Kehutanan				463.610.875.720
3.04.01	Dinas Kehutanan				463.610.875.720
3.04.01.001	Dinas Kehutanan				80.238.403.520
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		90	3.844.900.020

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	bru, kbr, kkr, ktm, psr, ppu, bpn, smd	12	3.844.900.020
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		5	3.218.411.000
3.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	smd	12	1.749.850.000
3.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	smd	12	1.468.561.000
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		90	2.820.550.000
3.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah (Bulan)	bru, kbr, kkr, ktm, psr, bpn, btg, smd, luarPrv	12	2.332.750.000
3.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Pakaian dinas beserta perlengkapannya (Stell)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	177	487.800.000
3.04.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (Nilai AKIP)		70	1.508.775.000
3.04.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran (dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, psr, ppu, bpn, smd, luarPrv	10	693.275.000
3.04.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	5	815.500.000
3.04.16	Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Realisasi Penerimaan PNPB Sektor Kehutanan (Milyar Rupiah)		170	3.471.960.000
3.04.16.01	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan	Persentase realisasi produksi hasil hutan kayu (realisasi/target) (%)	bru, kbr, kkr, ktm, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	70	1.104.950.000
3.04.16.02	Pendampingan Penerapan RIL/RIL C pada IUPHHK-HA	Jumlah IUPHHK-HA yang menerapkan RIL / RIL C (IUPHHK-HA)	bru, kbr, ktm, mah, ppu, bpn, smd, luarPrv	2	750.000.000
3.04.16.03	Perencanaan dan Tata Hutan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Tata Hutan (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, psr, bpn, smd, luarPrv	9	820.500.000
3.04.16.05	Pengolahan Hasil Hutan, Pemasaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak	Persentase penanganan tertib Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) pada Unit Manajemen (%)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	80	796.510.000
3.04.39	Program Pengelolaan DAS dan RHL	Persentase tutupan lahan Meningkat (%)		13,98	1.194.850.000
3.04.39.05	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas lahan kritis yang direhabilitasi (Ha)	bru, kbr, kkr, ktm, psr, bpn, smd, luarPrv	38500	220.000.000
3.04.39.15	Pengelolaan DAS	Jumlah DAS/SUB DAS yang dimonitoring (DAS/SUB DAS)	bru, kbr, kkr, ktm, psr, ppu, bpn, smd, luarPrv	4	660.850.000
3.04.39.16	Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah Laporan Peredaran dan Pengadaan Bibit (Laporan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr,	10	314.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
			ppu, smd, luarPrv		
3.04.41	Program Perlindungan dan KSDAE	Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan (%)		1,5	782.100.000
3.04.41.24	Pengendalian dan Pengamanan Hutan	luas hutan yang dimanfaatkan tanpa Izin yang semakin berkurang (Ha)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	1050	153.900.000
3.04.41.25	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Luas Areal Kebakaran Hutan yang Semakin Menurun (Ha)	bru, kbr, psr, bpn, smd, luarPrv	24000	108.900.000
3.04.41.26	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya	Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi yang Meningkatkan (Ha)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	5000	519.300.000
3.04.42	Program Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan Hutan Yang Dikelola Masyarakat (Ha)		32000	2.330.970.000
3.04.42.36	Penyuluhan Kehutanan	Jumlah KTH/KUPS terregistrasi (KTH)	bru, kbr, kkr, ktm, psr, bpn, smd, luarPrv	5	955.650.000
3.04.42.37	Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial	Luas permohonan HD, HKm, HTR dan Kemitraan Kehutanan (Ha)	bru, kbr, kkr, ktm, smd, luarPrv	35000	955.320.000
		Unit Usaha Masyarakat Hutan (Unit)		10	
3.04.42.38	Pembinaan Hutan Hak dan Hutan Adat	Luas pembinaan wilayah Hutan Adat/Hutan Hak (Ha)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	48,85	420.000.000
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH (Unit Usaha)		5	2.331.250.000
3.04.43.04	Metode dan Materi Penyuluhan	Jumlah kegiatan temu teknis KTH, Sekolah Lapangan, Pemberdayaan KTH, Lomba Wana Lestari (Laporan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	4	1.073.025.000
		Jumlah laporan metode dan materi penyuluhan (Laporan)		4	
3.04.43.06	Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Penyuluh	Jumlah laporan movev kegiatan penyuluh (Laporan)	kbr, kkr, ktm, psr, ppu, smd	15	374.050.000
3.04.43.09	Pemberdayaan KTH Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha (DBH DR)	Jumlah Peserta Pemberdayaan KTH Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha (Peserta)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	77302500 0	563.025.000
		Jumlah Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (Unit Usaha)		5	
		Terbentuk dan Terbinanya Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (Unit Usaha)		5	
3.04.43.10	Penyusunan program (DBH SDA DR)	Jumlah dokumen program identifikasi dan penyuluhan (dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	1	321.150.000
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat dan Perhutanan Sosial (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial (Jumlah Usulan)		35	2.918.750.000
3.04.44.01	Penyiapan Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, pendampingan dan Fasilitas (Laporan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, bpn, smd, luarPrv	4	1.750.750.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.04.44.02	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (Laporan)	bru, kbr, kkr, ktm, psr, bpn, smd, luarPrv	6	1.168.000.000
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun (%)		0,25	5.040.726.000
3.04.45.02	Pelatihan/Pembekalan/Inhouse training/ Penyegaran/Bimbingan Teknis PKHL (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Pelatihan/ Pembekalan/ Inhouse Training/ penyegaran/bimbingan teknis PKHL (Kegiatan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	3	668.500.000
3.04.45.08	Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal Bekas Terbakar (DBH SDA DR)	Jumlah dokumen kegiatan rekomendasi pelaksanaan rehabilitasi areal bekas terbakar (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	15	594.000.000
3.04.45.12	Monitoring dan Evaluasi Operasional Pemadaman dan Penanganan Paska Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah monev operasional pemadaman dan penanganan paska kebakaran hutan dan lahan (Laporan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	50	671.550.000
3.04.45.19	Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Laporan)	mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	4	559.510.000
3.04.45.20	Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah laporan kegiatan patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Laporan)	mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	67	1.002.551.000
3.04.45.21	Pemadaman Langsung (DBH SDA DR)	Jumlah Pemadaman Langsung (Laporan)	mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	20	1.003.765.000
3.04.45.25	Perencanaan Strategi dan Ketatausahaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah dokumen perencanaan strategi dan ketatausahaan (dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	3	540.850.000
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani (kasus Tindak Pidana)		39	2.528.400.000
3.04.46.02	Koordinasi	Jumlah Laporan Koordinasi (Laporan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	13	532.620.000
3.04.46.04	Patroli Pengamanan	Jumlah laporan patroli (Laporan)	bru, kbr, kkr, ktm, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	36	1.995.780.000
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi (Hektar)		200	13.200.872.500
3.04.47.01	Perencanaan	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman dan Luas Penanaman (Hektar)	kkp, ppu, smd, luarPrv	500	809.100.000
3.04.47.02	Pelaksanaan	Luas Penanaman (Hektar)	kkp, ppu, smd, luarPrv	350	8.739.472.500
3.04.47.03	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Monev RHL (Laporan)	kkp, ppu, smd, luarPrv	25	3.652.300.000
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah SK pengada dan pengedar benih/bibit, Sertifikasi Sumber Benih (SK/Sertifikat)		5	2.765.207.500
		Jumlah Bibit (Bibit)		15800	
3.04.48.09	Pembuatan/pengadaan bibit (DBH DR)	jumlah Pembuatan/pengadaan bibit (bibit)	smd	15800	874.375.000
3.04.48.10	Penyelenggaraan sertifikasi perbenihan (DBH DR)	Jumlah penyelenggaraan sertifikasi perbenihan (sertifikasi)	mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	5	201.970.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.04.48.11	Pembinaan perbenihan tanaman hutan (bimtek, money, pelayanan perijinan dan peningkatan kualitas SDM) (DBH DR)	Jumlah Pembinaan perbenihan tanaman hutan (bimtek, money, pelayanan perijinan dan peningkatan kualitas SDM) (Kegiatan)	mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	3	1.688.862.500
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Jumlah unit usaha produktif kehutanan oleh KPH dan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari (Unit Usaha)		36	31.025.264.725
		Persentase kerusakan kawasan hutan yang menurun (%)		1,95	
3.04.51.07	Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (DBH DR)	Luas Kawasan Hutan yang di kelola (Hektar)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	1611386,4 3	31.025.264.725
3.04.52	Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (DBH SDA DR)	Persentase Realisasi Keuangan DBH SDA DR meningkat (%)		27,5	1.255.416.775
3.04.52.01	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (DBH SDA DR)	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (Laporan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	3	1.255.416.775
3.04.01.00 2	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto				17.525.146.000
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM) (%)		90	1.089.216.000
3.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	smd	12	1.089.216.000
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (Unit)		3	592.606.000
3.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	smd	12	209.830.000
3.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	smd	12	382.776.000
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		90	223.100.000
3.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah (Bulan)	kk, smd, luarPrv	12	115.000.000
3.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Pakaian dinas beserta perlengkapannya (Stell)	bpn, smd, luarPrv	114	108.100.000
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH (Unit Usaha)		4	762.360.000
3.04.43.04	Metode dan Materi Penyuluhan	Jumlah laporan metode dan materi penyuluhan (Laporan)	kk, smd, luarPrv	8	762.360.000
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat dan Perhutanan Sosial (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial (Jumlah Usulan)		5	1.693.850.000
3.04.44.01	Penyiapan Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, pendampingan dan Fasilitasi (Laporan)	kk, ppu, smd, luarPrv	10	1.693.850.000
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun (%)		0,25	6.426.538.000
3.04.45.13	Investigasi Sebab-Sebab Kebakaran (DBH SDA DR)	Jumlah investigasi sebab-sebab kebakaran hutan dan lahan (Laporan)	kk, ppu, smd, luarPrv	8	512.540.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.04.45.15	Pengembangan Sarana Prasarana Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarpras Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Unit)	kk, smd	6	402.000.000
3.04.45.16	Pengembangan Sarana Prasarana Penanggulangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarpras Penanggulangan (Unit)	kk, smd	50	504.650.000
3.04.45.18	Penaksiran Luas (DBH SDA DR)	Jumlah luas penaksiran kebakaran (Hektar)	kk, ppu, smd, luarPrv	50	618.800.000
3.04.45.19	Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Laporan)	kk, ppu, smd, luarPrv	5	795.806.000
3.04.45.20	Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah laporan kegiatan patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Laporan)	kk, ppu, smd, luarPrv	72	1.405.182.000
3.04.45.21	Pemadaman Langsung (DBH SDA DR)	Jumlah Pemadaman Langsung (Laporan)	kk, ppu	70	1.015.500.000
3.04.45.22	Pendampingan (pembentukan/pembinaan) masyarakat peduli api (DBH SDA DR)	Jumlah pendampingan (Laporan)	kk, ppu	5	473.380.000
3.04.45.24	Penetapan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Penetapan Posko Kebakaran Hutan dan Lahan (Kegiatan)	kk, ppu	24	698.680.000
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani (kasus Tindak Pidana)		2	2.032.000.000
3.04.46.01	Sosialisasi	Jumlah Laporan Kegiatan Sosialisasi (Laporan)	kk, ppu	8	715.300.000
3.04.46.04	Patroli Pengamanan	Jumlah laporan patroli (Laporan)	kk, ppu, smd, luarPrv	25	1.316.700.000
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi (Hektar)		86	4.085.252.000
3.04.47.01	Perencanaan	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman dan Luas Penanaman (Hektar)	kk, ppu, smd, luarPrv	300	215.802.000
3.04.47.02	Pelaksanaan	Luas Penanaman (Hektar)	kk, ppu, smd, luarPrv	300	3.478.950.000
3.04.47.03	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Monev RHL (Laporan)	kk, ppu, smd, luarPrv	7	390.500.000
3.04.50	Program Pengelolaan Tahura	Luas Kawasan Hutan Tahura yang dikelola (Hektar)		150	620.224.000
3.04.50.01	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Luas penataan kawasan hutan konservasi di tingkat tapak dan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan secara lestari (Ha)	smd, luarPrv	150	521.724.000
3.04.50.02	Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	Luas Penanganan degradasi dan deforestasi serta konflik tenurial (Hektar)	kk, ppu, smd, luarPrv	150	98.500.000
3.04.01.003	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat				25.347.242.200
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM) (%)		90	814.269.250
3.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	bru, smd, luarPrv	12	814.269.250
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (Unit)		3	501.992.950

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	bru	12	243.992.950
3.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	bru	12	258.000.000
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		90	580.950.000
3.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah (Bulan)	bru, bpn, smd, luarPrv	12	460.150.000
3.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Pakaian dinas beserta perlengkapannya (Stell)	bru	42	120.800.000
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH (Unit Usaha)		5	291.025.000
3.04.43.02	Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH)	Jumlah kelompok tani hutan yang diberikan pendampingan, pembentukan dan peningkatan kelembagaan kelompok tani hutan (Kelompok Tani Hutan)	bru, smd, luarPrv	5	291.025.000
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat dan Perhutanan Sosial (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial (Jumlah Usulan)		4	833.175.000
3.04.44.01	Penyiapan Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, pendampingan dan Fasilitasi (Laporan)	bru, bpn, smd, luarPrv	6	393.355.000
3.04.44.02	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (Laporan)	bru, smd, luarPrv	10	439.820.000
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun (%)		0,25	5.476.120.000
3.04.45.16	Pengembangan Sarana Prasarana Penanggulangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarpras Penanggulangan (Unit)	bru, bpn, smd, luarPrv	305	1.976.000.000
3.04.45.18	Penaksiran Luas (DBH SDA DR)	Tersusunnya Laporan Penaksiran Luas Areal Kebakaran Hutan dan Lahan dan Investigasi Penyebab Kebakaran (Laporan)	bru, bpn, smd, luarPrv	10	169.250.000
		Jumlah luas penaksiran kebakaran (Hektar)		300	
3.04.45.19	Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Tersusunnya laporan pelaksanaan sosialisasi/kampanye pencegahan (Laporan)	bru, bpn, smd	8	342.100.000
		Jumlah Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Laporan)		8	
3.04.45.20	Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah laporan kegiatan patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Laporan)	bru, bpn, smd	30	1.002.350.000
		Jumlah patroli pencegahan PKHL (Laporan)		30	
3.04.45.21	Pemadaman Langsung (DBH SDA DR)	Terlaksananya Posko Siaga, dan Pemadaman (Laporan)	bru, bpn, smd	24	1.086.750.000
		Jumlah Pemadaman Langsung (Laporan)		24	
3.04.45.22	Pendampingan (pembentukan/pembinaan)	Jumlah pendampingan (Laporan)	bru, bpn, smd, luarPrv	8	431.970.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
	masyarakat peduli api (DBH SDA DR)				
3.04.45.23	Deteksi Dini (DBH SDA DR)	Jumlah Dokumen Perencanaan (Dokumen)	bru, bpn, smd, luarPrv	1	353.200.000
3.04.45.24	Penetapan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Penetapan Posko Darkarhutla (Kegiatan)	bru	8	114.500.000
		Terselenggaranya Kegiatan Penetapan Posko Darkarhutla (Kegiatan)		8	
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani (kasus Tindak Pidana)		5	1.390.000.000
3.04.46.01	Sosialisasi	Jumlah Laporan Kegiatan Sosialisasi (Laporan)	bru, smd	12	421.600.000
3.04.46.02	Koordinasi	Jumlah Laporan Koordinasi (Laporan)	bru, smd, luarPrv	12	294.150.000
3.04.46.04	Patroli Pengamanan	Jumlah laporan patroli (Laporan)	bru, smd	24	674.250.000
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi (Hektar)		200	3.907.300.000
3.04.47.01	Perencanaan	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman (Hektar)	bru, smd, luarPrv	200	347.750.000
3.04.47.02	Pelaksanaan	Luas Penanaman (Hektar)	bru, smd, luarPrv	200	3.307.800.000
3.04.47.03	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Monev RHL (Laporan)	bru, smd, luarPrv	1	251.750.000
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah SK pengada dan pengedar benih/bibit, Sertifikasi Sumber Benih (SK/Sertifikat)		8	582.600.000
		Jumlah Bibit (Bibit)		25000	
3.04.48.09	Pembuatan/pengadaan bibit (DBH DR)	jumlah Pembuatan/pengadaan bibit (bibit)	bru, smd, luarPrv	16000	582.600.000
		Terselenggaranya Pembuatan/pengadaan bibit (bibit)		16000	
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Jumlah unit usaha produktif kehutanan oleh KPH dan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari (Unit Usaha)		8	10.969.810.000
		Persentase kerusakan kawasan hutan yang menurun (%)		1,9	
3.04.51.01	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Luas pengelolaan Wilayah Tertentu (WT) di KPHP (Ha)	bru, smd, luarPrv	20	480.330.000
		Jumlah pembinaan/pemantauan unit manajemen pemegang izin di dalam kawasan KPHP (Unit Manajemen)		8	
3.04.51.02	Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	luas kerusakan hutan dan konflik tenurial di tingkat tapak (Ha)	bru, smd, luarPrv	100	227.850.000
		jumlah unit usaha produktif masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lestari di tingkat tapak (Unit Usaha)		4	
3.04.51.07	Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (DBH DR)	Luas Kawasan Hutan yang di kelola (Hektar)	bru, bpn, smd, luarPrv	786021	10.261.630.000
3.04.01.004	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongkan				17.662.271.100
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM) (%)		90	1.062.406.100
3.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	bpn	12	1.062.406.100

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (Unit)		3	745.710.000
3.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	bpn	12	285.900.000
3.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	bpn	12	459.810.000
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		90	410.450.000
3.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah (Bulan)	bpn	12	363.500.000
3.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Pakaian dinas beserta perlengkapannya (Stell)	bpn	45	46.950.000
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH (Unit Usaha)		2	1.086.800.000
3.04.43.01	Pendampingan Kegiatan RHL	Jumlah Pendampingan Kegiatan RHL (Laporan)	kbr, bpn, luarPrv	4	320.625.000
3.04.43.02	Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH)	Jumlah Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH) (Laporan)	kbr, luarPrv	6	419.525.000
3.04.43.09	Pemberdayaan KTH Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha (DBH DR)	Jumlah Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (Unit Usaha)	kbr, psr, ppu	5	346.650.000
		Terbentuk dan Terbinanya Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (Unit Usaha)		5	
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat dan Perhutanan Sosial (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial (Jumlah Usulan)		3	696.300.000
3.04.44.01	Penyiapan Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, pendampingan dan Fasilitas (Laporan)	kbr, bpn, luarPrv	5	696.300.000
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun (%)		0,25	5.021.859.500
3.04.45.02	Pelatihan/Pembekalan/Inhouse training/Penyegaran/Bimbingan Teknis PKHL (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Pelatihan/ Pembekalan/ Inhouse Training/penyegaran/bimbingan teknis PKHL (Kegiatan)	kbr, bpn, luarPrv	4	685.520.000
3.04.45.16	Pengembangan Sarana Prasarana Penanggulangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarpras Penanggulangan (Unit)	kbr	4	335.832.000
3.04.45.18	Penaksiran Luas (DBH SDA DR)	Jumlah luas penaksiran kebakaran (Hektar)	kbr	100	158.250.000
3.04.45.19	Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Laporan)	kbr, psr, ppu	15	851.525.000
3.04.45.20	Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Laporan)	kbr, psr, ppu	20	1.000.562.500
3.04.45.21	Pemadaman Langsung (DBH SDA DR)	Jumlah Pemadaman Langsung (Laporan)	kbr, psr, ppu	5	1.001.625.000
3.04.45.22	Pendampingan (pembentukan/pembinaan)	Jumlah pendampingan (Laporan)	kbr, psr, ppu	9	556.525.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
	masyarakat peduli api (DBH SDA DR)				
3.04.45.24	Penetapan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Penetapan Posko Kebakaran Hutan dan Lahan (Kegiatan)	kbr, psr, ppu	5	432.020.000
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani (kasus Tindak Pidana)		6	1.280.214.300
3.04.46.01	Sosialisasi	Jumlah Laporan Kegiatan Sosialisasi (Laporan)	kbr, psr, ppu, bpn, smd	5	422.924.300
3.04.46.04	Patroli Pengamanan	Jumlah laporan patroli (Laporan)	ppu, bpn	6	857.290.000
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi (hektar)		100	3.387.557.000
3.04.47.01	Perencanaan	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman dan Luas Penanaman (Hektar)	kbr, bpn, smd, luarPrv	300	142.150.000
3.04.47.02	Pelaksanaan	Luas Penanaman (Hektar)	kbr, bpn, smd, luarPrv	300	2.983.200.000
3.04.47.03	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan (Dokumen)	kbr, bpn, luarPrv	9	262.207.000
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah SK pengada dan pengedar benih/bibit, Sertifikasi Sumber Benih (SK/Sertifikat)		1	809.150.000
		Jumlah Bibit (Bibit)		12000	
3.04.48.09	Pembuatan/pengadaan bibit (DBH DR)	jumlah Pembuatan/pengadaan bibit (bibit)	kbr, psr, ppu	38500	809.150.000
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Jumlah unit usaha produktif kehutanan oleh KPH dan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari (Unit Usaha)		2	3.161.824.200
		Persentase kerusakan kawasan hutan yang menurun (%)		1,9	
3.04.51.01	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Luas pengelolaan Wilayah Tertentu (WT) di KPHP (Ha)	kbr, psr, ppu, bpn, smd, luarPrv	75	201.550.000
		Jumlah pembinaan/pemantauan unit manajemen pemegang izin di dalam kawasan KPHP (Unit Manajemen)		8	
3.04.51.02	Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	luas kerusakan hutan dan konflik tenurial di tingkat tapak (Ha)	ppu, bpn, smd, luarPrv	300	242.155.000
		jumlah unit usaha produktif masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lestari di tingkat tapak (Unit Usaha)		4	
3.04.51.07	Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (DBH DR)	Luas Kawasan Hutan yang di kelola (Hektar)	kbr, psr, ppu	350	2.718.119.200
3.04.01.00 5	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus				17.738.929.300
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM) (%)		90	969.452.100
3.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	bpn, smd, luarPrv	12	969.452.100
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (Unit)		3	573.350.000
3.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	bpn	12	32.200.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	bpn	12	541.150.000
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		90	494.000.000
3.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah (Bulan)	bpn, smd, luarPrv	12	398.000.000
3.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Pakaian dinas beserta perlengkapannya (Stell)	bpn, luarPrv	38	96.000.000
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH (Unit Usaha)		5	916.800.300
3.04.43.01	Pendampingan Kegiatan RHL	Jumlah Pendampingan Kegiatan RHL (Laporan)	kbr, kkr, ppu, bpn, luarPrv	5	438.700.300
3.04.43.09	Pemberdayaan KTH Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha (DBH DR)	Jumlah Peserta Pemberdayaan KTH Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha (Peserta)	bru	500	478.100.000
		Jumlah Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (Unit Usaha)		5	
		Terbentuk dan Terbinanya Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (Unit Usaha)		5	
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat dan Perhutanan Sosial (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial (Jumlah Usulan)		2	869.775.000
3.04.44.01	Penyiapan Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, pendampingan dan Fasilitas (Laporan)	kbr, kkr, ppu, bpn, smd, luarPrv	8	313.250.000
3.04.44.02	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (Laporan)	kbr, kkr, ppu, smd, luarPrv	8	556.525.000
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun (%)		0,25	5.977.546.000
3.04.45.02	Pelatihan/Pembekalan/Inhouse training/Pyenyegaran/B imbingan Teknis PKHL (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Pelatihan/ Pembekalan/ Inhouse Training/penyegaran/bimbingan teknis PKHL (Kegiatan)	kbr, kkr, ppu, bpn, luarPrv	2	909.500.000
3.04.45.09	Gerakan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Gerakan Pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Kegiatan)	kbr, kkr, ppu, smd, luarPrv	2	827.000.000
3.04.45.10	Penerapan Agroforestry, Agrosilvopastura, Silvopastura dan Kegiatan Sejenisnya (DBH SDA DR)	Luas Kegiatan Agroforestry, Agrosilvopastura, Silvopastura (Hektar)	kk, ppu	70	929.626.000
3.04.45.20	Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah laporan kegiatan patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Laporan)	kbr	20	1.211.550.000
3.04.45.21	Pemadaman Langsung (DBH SDA DR)	Jumlah Pemadaman Langsung (Laporan)	kbr	5	1.568.220.000
3.04.45.24	Penetapan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Penetapan Posko Kebakaran Hutan dan Lahan (Kegiatan)	kbr	6	531.650.000
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani (kasus Tindak Pidana)		6	2.005.244.100
3.04.46.01	Sosialisasi	Jumlah Laporan Kegiatan Sosialisasi (Laporan)	kbr, ppu, smd, luarPrv	10	441.900.000
3.04.46.04	Patroli Pengamanan	Jumlah laporan patroli (Laporan)	kbr, kkr, ppu, bpn, luarPrv	36	1.563.344.100

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi (Hektar)		100	2.873.762.600
3.04.47.01	Perencanaan	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman (Hektar)	kbr, kkr, ppu, smd, luarPrv	360	354.817.600
3.04.47.02	Pelaksanaan	Luas Penanaman (Hektar)	kbr, kkr, ppu, bpn, smd, luarPrv	360	2.282.895.000
3.04.47.03	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Monev RHL (Laporan)	kbr, kkr, psr, ppu, bpn	7	236.050.000
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah SK pengada dan pengedar benih/bibit, Sertifikasi Sumber Benih (SK/Sertifikat)		1	451.700.000
		Jumlah Bibit (Bibit)		10000	
3.04.48.09	Pembuatan/pengadaan bibit (DBH DR)	jumlah Pembuatan/pengadaan bibit (bibit)	kbr	50000	451.700.000
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Jumlah unit usaha produktif kehutanan oleh KPH dan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari (Unit Usaha)		2	2.607.299.200
		Persentase kerusakan kawasan hutan yang menurun (%)		1,9	
3.04.51.01	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Luas pengelolaan Wilayah Tertentu (WT) di KPHP (Ha)	kbr, kkr, psr, ppu, smd	200	207.802.200
		Jumlah pembinaan/pemantauan unit manajemen pemegang izin di dalam kawasan KPHP (Unit Manajemen)		5	
3.04.51.02	Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	luas kerusakan hutan dan konflik tenurial di tingkat tapak (Ha)	kbr, kkr, ppu, smd	50	494.325.000
		jumlah unit usaha produktif masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lestari di tingkat tapak (Unit Usaha)		2	
3.04.51.07	Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (DBH DR)	Luas Kawasan Hutan yang di kelola (Hektar)	kbr	5032922000	1.905.172.000
3.04.01.006	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo				34.364.265.000
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM) (%)		90	1.046.164.000
3.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	psr	12	1.046.164.000
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (Unit)		3	555.000.000
3.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	psr	12	148.900.000
3.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	psr	12	406.100.000
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		90	446.000.000
3.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah (Bulan)	psr	12	376.000.000
3.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Pakaian dinas beserta perlengkapannya (Stell)	psr	42	70.000.000
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH (Unit Usaha)		4	827.980.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.04.43.04	Metode dan Materi Penyuluhan	Jumlah laporan metode dan materi penyuluhan (Laporan)	psr	5	394.050.000
3.04.43.09	Pemberdayaan KTH Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha (DBH DR)	Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH) (Laporan)	psr	1	433.930.000
		Jumlah Peserta Pemberdayaan KTH Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha (Peserta)		450	
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat dan Perhutanan Sosial (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial (Jumlah Usulan)		10	751.600.000
3.04.44.01	Penyiapan Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Pendampingan dan Fasilitas Perhutanan Sosial (Laporan)	psr	5	251.950.000
3.04.44.02	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (Laporan)	psr	4	499.650.000
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun (%)		0,25	5.147.497.000
3.04.45.02	Pelatihan/Pembekalan/Inhouse training/Penyegaran/Bimbingan Teknis PKHL (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Pelatihan/ Pembekalan/ Inhouse Training/penyegaran/bimbingan teknis PKHL (Kegiatan)	psr	4	212.700.000
3.04.45.17	Pembuatan Sekat Kanal, Embung dan Kantong Air (DBH SDA DR)	Tersedianya Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan (Unit)	psr	2	2.219.792.000
		Jumlah sekat kanal, embung dan kantong air (Unit)		2	
3.04.45.19	Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Terlaksananya sosialisasi, sylvopastura, kampanye, dan patroli (Laporan)	psr	8	205.500.000
		Jumlah Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Laporan)		8	
3.04.45.20	Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Patroli Pengamanan Hutan (laporan)	psr	30	1.087.925.000
		Terselenggaranya kegiatan gerakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Kegiatan)		30	
3.04.45.21	Pemadaman Langsung (DBH SDA DR)	Terlaksananya Posko Siaga, dan Pemadaman (Laporan)	psr	10	1.188.250.000
		Jumlah Pemadaman Langsung (Laporan)		10	
3.04.45.22	Pendampingan (pembentukan/pembinaan) masyarakat peduli api (DBH SDA DR)	Terselenggaranya kegiatan pembentukan regu perbantuan DALKARHUTLA (Regu/MPA)	psr	4	93.130.000
		Jumlah pendampingan (Laporan)		4	
3.04.45.24	Penetapan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Terselenggaranya Kegiatan Penetapan Posko Darkarhutla (Kegiatan)	psr	4	140.200.000
		Jumlah Kegiatan Penetapan Posko Kebakaran Hutan dan Lahan (Kegiatan)		4	
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani (kasus Tindak Pidana)		1	798.925.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.04.46.01	Sosialisasi	Jumlah Laporan Kegiatan Sosialisasi (Laporan)	psr	6	187.300.000
3.04.46.02	Koordinasi	Jumlah Laporan Koordinasi (Laporan)	psr	5	94.475.000
3.04.46.04	Patroli Pengamanan	Jumlah laporan patroli (Laporan)	psr	41	517.150.000
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi (Hektar)		100	3.292.011.000
3.04.47.01	Perencanaan	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman (Hektar)	psr	500	234.660.000
3.04.47.02	Pelaksanaan	Luas Penanaman (Hektar)	psr	500	2.734.581.000
3.04.47.03	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah monev deforestasi dan degradasi hutan dalam Rangka Mitigasi Perubahan Iklim (Laporan)	psr	12	322.770.000
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Jumlah unit usaha produktif kehutanan oleh KPH dan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari (Unit Usaha)		6	21.499.088.000
		Persentase kerusakan kawasan hutan yang menurun (%)		1,9	
3.04.51.01	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Luas pengelolaan Wilayah Tertentu (WT) di KPHP (Ha)	psr	20	233.600.000
		Jumlah pembinaan/pemantauan unit manajemen pemegang izin di dalam kawasan KPHP (Unit Manajemen)		2	
3.04.51.02	Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	luas kerusakan hutan dan konflik tenurial di tingkat tapak (Ha)	psr	200	194.670.000
		jumlah unit usaha produktif masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lestari di tingkat tapak (Unit Usaha)		6	
3.04.51.07	Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (DBH DR)	Terkelolanya Wilayah Tertentu (WT) di KPHP (Hektar)	psr	300	21.070.818.000
		Luas Kawasan Hutan yang di kelola (Hektar)		100	
3.04.01.00 7	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan				17.780.009.000
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM) (%)		90	722.996.120
3.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	smd	12	722.996.120
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (Unit)		3	287.070.000
3.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah penyediaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	smd	12	116.400.000
		Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)		12	
3.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	smd	12	170.670.000
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		90	449.050.000
3.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah (Bulan)	bru, kkr, ktm, bpn	12	334.250.000
3.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Pakiaian dinas beserta perlengkapannya (Stell)	smd, luarPrv	45	114.800.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH (Unit Usaha)		3	1.388.350.000
3.04.43.01	Pendampingan Kegiatan RHL	Jumlah Pendampingan Kegiatan RHL (Laporan)	ktm, btg	3	175.940.000
3.04.43.02	Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH)	Jumlah Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH) (Laporan)	kk, ktm, btg, smd	4	150.290.000
3.04.43.04	Metode dan Materi Penyuluhan	Jumlah Kegiatan Temu Teknis KTH, Sekolah Lapang, Pemberdayaan KTH, Lomba Wana Lestari (Laporan)	kk, ktm, btg	3	97.250.000
		Jumlah laporan metode dan materi penyuluhan (Laporan)		3	
3.04.43.06	Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Penyuluh	Jumlah laporan monev kegiatan penyuluh (Laporan)	kk, ktm, btg, smd	6	155.925.000
3.04.43.07	Pembangunan unit percontohan penyuluhan kehutanan/demplot (DBH DR)	Jumlah Pembangunan unit percontohan penyuluhan kehutanan/demplot (Unit/Demplot)	kk, ktm, btg	2	280.210.000
3.04.43.08	Pemenuhan kebutuhan saps penyuluhan kehutanan (DBH DR)	Jumlah Pemenuhan kebutuhan saps penyuluhan kehutanan (Unit/Demplot)	kk, ktm, btg	2	126.875.000
3.04.43.09	Pemberdayaan KTH Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha (DBH DR)	Jumlah Peserta Pemberdayaan KTH Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha (Peserta)	kk, ktm, btg	30	172.610.000
		Jumlah Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (Unit Usaha)		3	
		Terbentuk dan Terbinanya Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (Unit Usaha)		3	
3.04.43.10	Penyusunan program (DBH SDA DR)	Jumlah dokumen program identifikasi dan penyuluhan (dokumen)	kk, ktm, btg	1	229.250.000
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat dan Perhutanan Sosial (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial (Jumlah Usulan)		10	965.200.000
3.04.44.01	Penyiapan Perhutanan Sosial	Jumlah kegiatan sosialisasi, pendampingan, dan fasilitasi (Laporan)	kk, ktm, btg	7	301.950.000
3.04.44.02	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Sosial (Laporan)	kk, ktm, btg	12	663.250.000
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun (%)		0,25	4.651.950.000
3.04.45.02	Pelatihan/Pembekalan/Inhouse training/Pyegaran/B imbingan Teknis PKHL (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Pelatihan/ Pembekalan/ Inhouse Training/penyegaran/bimbingan teknis PKHL (Kegiatan)	kk, smd	3	475.650.000
3.04.45.16	Pengembangan Sarana Prasarana Penanggulangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarpras Penanggulangan (Unit)	smd, luarPrv	5	1.650.625.000
3.04.45.18	Penaksiran Luas (DBH SDA DR)	Jumlah luas penaksiran kebakaran (Hektar)	bru	50	126.250.000
3.04.45.19	Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Laporan)	bru	4	296.625.000
3.04.45.20	Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah patroli pencegahan PKHL (Laporan)	kk, ktm, btg, smd	24	1.079.450.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.04.45.21	Pemadaman Langsung (DBH SDA DR)	Jumlah Pemadaman Langsung (Laporan)	bru, kkr, ktm, btg, smd	20	1.023.350.000
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani (kasus Tindak Pidana)		1	899.375.000
3.04.46.01	Sosialisasi	Jumlah Laporan Kegiatan Sosialisasi (Laporan)	kk, ktm, btg, smd, luarPrv	4	202.875.000
3.04.46.02	Koordinasi	Jumlah Laporan Koordinasi (Laporan)	kk, ktm, btg, smd, luarPrv	5	118.000.000
3.04.46.04	Patroli Pengamanan	Jumlah laporan patroli (Laporan)	kk, smd	13	578.500.000
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi (Hektar)		300	4.551.825.000
3.04.47.01	Perencanaan	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman (Hektar)	ktm, btg	300	339.800.000
3.04.47.02	Pelaksanaan	Luas Penanaman (Hektar)	kk, ktm, btg	300	3.949.675.000
3.04.47.03	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Monev RHL (Laporan)	kk, ktm, btg	8	262.350.000
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah Bibit (Bibit)		10000	218.250.000
3.04.48.09	Pembuatan/pengadaan bibit (DBH DR)	jumlah Pembuatan/pengadaan bibit (bibit)	kk, btg, smd	10000	218.250.000
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Presentase Pengelolaan Kawasan Hutan (%)		1,9	3.645.942.880
		Jumlah unit usaha produktif kehutanan oleh KPH dan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari (Unit Usaha)		1	
3.04.51.01	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Luas pengelolaan Wilayah Tertentu (WT) di KPHP (Ha)	kk, ktm, btg, smd	60	1.187.850.000
		Jumlah pembinaan/pemantauan unit manajemen pemegang izin di dalam kawasan KPHP (Unit Manajemen)		11	
3.04.51.02	Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	luas kerusakan hutan dan konflik tenurial di tingkat tapak (Ha)	kk, smd	250	133.042.880
		jumlah unit usaha produktif masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lestari di tingkat tapak (Unit Usaha)		1	
3.04.51.07	Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (DBH DR)	Luas Kawasan Hutan yang di kelola (Hektar)	kk, ktm, btg, smd	121730 4	2.325.050.000
3.04.01.008	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan				17.791.476.000
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM) (%)		90	1.404.867.600
3.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	kk	12	1.404.867.600
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (Unit)		3	593.400.000
3.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah penyediaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	kk	12	120.100.000
3.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	kk	12	473.300.000
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		90	333.700.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah (Bulan)	kk	12	265.200.000
3.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Pakaian dinas beserta perlengkapannya (Stell)	kk	140	68.500.000
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH (Unit Usaha)		2	758.900.000
3.04.43.08	Pemenuhan kebutuhan sapsras penyuluhan kehutanan (DBH DR)	Jumlah Pemenuhan kebutuhan sapsras penyuluhan kehutanan (Unit/Demplot)	kk	9	183.500.000
3.04.43.09	Pemberdayaan KTH Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha (DBH DR)	Jumlah Peserta Pemberdayaan KTH Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha (Peserta)	kk	300	575.400.000
		Jumlah Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (Unit Usaha)		2	
		Terbentuk dan Terbinanya Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (Unit Usaha)		2	
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat dan Perhutanan Sosial (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial (Jumlah Usulan)		5	1.518.460.000
3.04.44.01	Penyiapan Perhutanan Sosial	Jumlah kegiatan sosialisasi, pendampingan, dan fasilitasi (Laporan)	kk	10	930.550.000
3.04.44.02	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (Laporan)	kk	11	587.910.000
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun (%)		0,25	3.876.500.000
3.04.45.02	Pelatihan/Pembekalan/Inhouse training/Penyegaran/Bimbingan Teknis PKHL (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Pelatihan/ Pembekalan/ Inhouse Training/penyegaran/bimbingan teknis PKHL (Kegiatan)	kk	12	172.325.000
3.04.45.09	Gerakan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Gerakan Pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Kegiatan)	kk	11	280.475.000
3.04.45.13	Investigasi Sebab-Sebab Kebakaran (DBH SDA DR)	Jumlah investigasi sebab-sebab kebakaran hutan dan lahan (Laporan)	kk	2	161.550.000
3.04.45.15	Pengembangan Sarana Prasarana Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarpras Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Unit)	kk	4	288.800.000
3.04.45.18	Penaksiran Luas (DBH SDA DR)	Jumlah luas penaksiran kebakaran (Hektar)	kk	200	162.650.000
3.04.45.19	Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Laporan)	kk	5	283.375.000
3.04.45.20	Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah patroli pencegahan PKHL (Laporan)	kk	36	1.017.250.000
3.04.45.21	Pemadaman Langsung (DBH SDA DR)	Jumlah Pemadaman Langsung (Laporan)	kk	39	1.006.150.000
3.04.45.22	Pendampingan (pembentukan/pembinaan) masyarakat peduli api (DBH SDA DR)	Jumlah pendampingan (Laporan)	kk	5	285.475.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.04.45.24	Penetapan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Penetapan Posko Kebakaran Hutan dan Lahan (Kegiatan)	kk	10	218.450.000
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani (kasus Tindak Pidana)		5	1.239.250.000
3.04.46.02	Koordinasi	Jumlah Laporan Koordinasi (Laporan)	kk	10	224.500.000
3.04.46.04	Patroli Pengamanan	Jumlah laporan patroli (Laporan)	kk	40	1.014.750.000
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi (Hektar)		340	2.715.300.000
3.04.47.01	Perencanaan	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman dan Luas Penanaman (Hektar)	kk	400	430.000.000
3.04.47.02	Pelaksanaan	Luas Penanaman (Hektar)	kk	400	2.130.750.000
3.04.47.03	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Monev RHL (Laporan)	kk	4	154.550.000
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah Bibit (Bibit)		100000	436.400.000
3.04.48.09	Pembuatan/pengadaan bibit (DBH DR)	jumlah Pembuatan/pengadaan bibit (bibit)	kk	100000	436.400.000
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Jumlah unit usaha produktif kehutanan oleh KPH dan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari (Unit Usaha)		4	4.914.698.400
		Persentase kerusakan kawasan hutan yang menurun (%)		1,9	
3.04.51.01	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Luas pengelolaan Wilayah Tertentu (WT) di KPHP (Ha)	kk	20	273.658.400
		Jumlah pembinaan/pemantauan unit manajemen pemegang izin di dalam kawasan KPHP (Unit Manajemen)		8	
3.04.51.02	Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	luas kerusakan hutan dan konflik tenurial di tingkat tapak (Ha)	kk	200	185.850.000
		jumlah unit usaha produktif masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lestari di tingkat tapak (Unit Usaha)		2	
3.04.51.07	Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (DBH DR)	Luas Kawasan Hutan yang di kelola (Hektar)	kk	998119,49	4.455.190.000
3.04.01.009	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon				23.024.730.000
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM) (%)		90	828.256.500
3.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	ktm	12	828.256.500
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (Unit)		3	756.309.000
3.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	ktm	12	183.400.000
3.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	ktm	12	572.909.000
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		90	670.200.000
3.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah (Bulan)	ktm, smd, luarPrv	12	516.200.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya (Stell)	ktm	65	154.000.000
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH (Unit Usaha)		5	247.700.000
3.04.43.02	Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH)	Jumlah Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH) (Laporan)	ktm, smd, luarPrv	3	94.120.000
3.04.43.06	Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Penyuluh	Jumlah laporan monev kegiatan penyuluh (Laporan)	ktm, smd, luarPrv	2	60.000.000
3.04.43.09	Pemberdayaan KTH Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha (DBH DR)	Jumlah Peserta Pemberdayaan KTH Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha (Peserta)	ktm, smd, luarPrv	60	93.580.000
		Jumlah Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (Unit Usaha)		3	
		Terbentuk dan Terbinanya Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (Unit Usaha)		3	
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat dan Perhutanan Sosial (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial (Jumlah Usulan)		2	431.065.000
3.04.44.01	Penyiapan Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, pendampingan dan Fasilitasi (Laporan)	ktm, smd, luarPrv	2	284.065.000
3.04.44.02	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (Laporan)	ktm, smd, luarPrv	2	147.000.000
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun (%)		0,25	5.055.781.500
3.04.45.02	Pelatihan/Pembekalan/Inhouse training/Penyegaran/Bimbingan Teknis PKHL (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Pelatihan/ Pembekalan/ Inhouse Training/penyegaran/bimbingan teknis PKHL (Kegiatan)	ktm, smd, luarPrv	7	326.535.000
3.04.45.15	Pengembangan Sarana Prasarana Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarpras Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Unit)	ktm, smd, luarPrv	10	258.312.500
3.04.45.16	Pengembangan Sarana Prasarana Penanggulangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarpras Penanggulangan (Unit)	ktm, smd, luarPrv	11	1.662.650.000
3.04.45.18	Penaksiran Luas (DBH SDA DR)	Jumlah luas penaksiran kebakaran (Hektar)	ktm, smd, luarPrv	300	222.525.000
3.04.45.19	Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Laporan)	ktm, smd, luarPrv	8	373.225.000
3.04.45.20	Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah patroli pencegahan PKHL (Laporan)	ktm, smd, luarPrv	12	1.027.200.000
3.04.45.21	Pemadaman Langsung (DBH SDA DR)	Jumlah Pemadaman Langsung (Laporan)	ktm, smd, luarPrv	15	1.009.934.000
3.04.45.22	Pendampingan (pembentukan/pembinaan) masyarakat peduli api (DBH SDA DR)	Jumlah pendampingan (Laporan)	bru	4	175.400.000
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani (kasus Tindak Pidana)		4	1.238.130.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.04.46.01	Sosialisasi	Jumlah Laporan Kegiatan Sosialisasi (Laporan)	ktm, smd, luarPrv	4	237.280.000
3.04.46.04	Patroli Pengamanan	Jumlah laporan patroli (Laporan)	ktm, smd, luarPrv	4	1.000.850.000
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi (Hektar)		600	6.954.600.000
3.04.47.02	Pelaksanaan	Luas Penanaman (Hektar)	ktm, smd, luarPrv	600	6.764.500.000
3.04.47.03	Monitoring dan Evaluasi	jumlah kegiatan monev (laporan)	ktm, smd, luarPrv	5	190.100.000
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah Bibit (Bibit)		50000	530.998.000
3.04.48.09	Pembuatan/pengadaan bibit (DBH DR)	Terselenggaranya Pembuatan/pengadaan bibit (bibit)	ktm, smd, luarPrv	23500	530.998.000
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Jumlah unit usaha produktif kehutanan oleh KPH dan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari (Unit Usaha)		2	6.311.690.000
		Persentase kerusakan kawasan hutan yang menurun (%)		1,9	
3.04.51.01	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Luas pengelolaan Wilayah Tertentu (WT) di KPHP (Ha)	ktm, smd, luarPrv	100	249.150.000
		Jumlah pembinaan/pemantauan unit manajemen pemegang izin di dalam kawasan KPHP (Unit Manajemen)		10	
3.04.51.02	Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	luas kerusakan hutan dan konflik tenurial di tingkat tapak (Ha)	ktm, smd, luarPrv	100	246.390.000
		jumlah unit usaha produktif masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lestari di tingkat tapak (Unit Usaha)		1	
3.04.51.07	Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (DBH DR)	Luas Kawasan Hutan yang di kelola (Hektar)	ktm, smd, luarPrv	50	5.816.150.000
3.04.01.01.0	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau				17.760.650.400
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM) (%)		90	684.700.000
3.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	kbr	12	684.700.000
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (Unit)		3	695.954.400
3.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	kbr	12	31.700.000
3.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	kbr	12	664.254.400
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		90	734.196.000
3.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah (Bulan)	bru, kbr, mah, bpn, smd, luarPrv	12	378.320.000
3.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Pakaian dinas beserta perlengkapannya (Stell)	bru, kbr, mah, bpn, smd, luarPrv	24	355.876.000
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH (Unit Usaha)		5	2.447.610.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.04.43.01	Pendampingan Kegiatan RHL	Jumlah Pendampingan kegiatan RHL (Laporan)	kbr, mah, smd	10	174.825.000
3.04.43.02	Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH)	Jumlah Laporan Pendampingan, Pembentukan, Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani Hutan (Laporan)	kbr, mah, smd	5	174.400.000
3.04.43.04	Metode dan Materi Penyuluhan	Jumlah Kegiatan Temu Teknis KTH, Sekolah Lapang, Pemberdayaan KTH, Lomba Wana Lestari (Laporan)	bru, kbr, mah, ppu, bpn, smd, luarPrv	4	825.925.000
		Jumlah laporan metode dan materi penyuluhan (Laporan)		20	
3.04.43.06	Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Penyuluh	Jumlah laporan movev kegiatan penyuluh (Laporan)	kbr, mah, smd	40	354.380.000
3.04.43.07	Pembangunan unit percontohan penyuluhan kehutanan/demplot (DBH DR)	Jumlah Pembangunan unit percontohan penyuluhan kehutanan/demplot (Unit/Demplot)	mah, smd, luarPrv	4	241.060.000
3.04.43.09	Pemberdayaan KTH Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha (DBH DR)	Jumlah KTH/KUPS terregistrasi (KTH)	bru, mah, bpn, smd, luarPrv	6	315.830.000
		Jumlah Peserta Pemberdayaan KTH Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha (Peserta)		150	
		Jumlah Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (Unit Usaha)		5	
		Terbentuk dan Terbinanya Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (Unit Usaha)		5	
3.04.43.10	Penyusunan program (DBH SDA DR)	Jumlah dokumen program identifikasi dan penyuluhan (dokumen)	mah, bpn, smd	6	361.190.000
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat dan Perhutanan Sosial (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial (Jumlah Usulan)		5	1.937.927.500
3.04.44.01	Penyiapan Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, pendampingan dan Fasilitas (Laporan)	mah, bpn, smd, luarPrv	10	918.727.500
3.04.44.02	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (Laporan)	mah, bpn, smd, luarPrv	4	536.900.000
3.04.44.03	Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	Jumlah Kegiatan Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat (Laporan)	kbr, mah, bpn, luarPrv	10	482.300.000
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun (%)		0,25	3.183.750.000
3.04.45.11	Pembentukan dan Pembinaan Brigade Pengendalian PKHL (DBH SDA DR)	Jumlah Dokumen Pembentukan & Pembinaan Brigade (Dokumen)	mah, smd	1	136.700.000
3.04.45.19	Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Laporan)	mah, bpn, smd, luarPrv	8	587.880.000
3.04.45.20	Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah patroli pencegahan PKHL (Laporan)	mah, bpn, smd, luarPrv	30	1.012.100.000
3.04.45.21	Pemadaman Langsung (DBH SDA DR)	Jumlah Pemadaman Langsung (Laporan)	mah, bpn, smd, luarPrv	10	1.000.000.000
3.04.45.24	Penetapan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Penetapan Posko Kebakaran Hutan dan Lahan (Kegiatan)	mah, bpn, smd	5	447.070.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani (kasus Tindak Pidana)		10	1.690.850.000
3.04.46.01	Sosialisasi	Jumlah Laporan Kegiatan Sosialisasi (Laporan)	mah, bpn, smd	10	471.250.000
3.04.46.02	Koordinasi	Jumlah Laporan Koordinasi (Laporan)	kbr, mah, bpn, smd, luarPrv	10	190.000.000
3.04.46.04	Patroli Pengamanan	Jumlah laporan patroli (Laporan)	mah, bpn, smd, luarPrv	60	1.029.600.000
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi (Hektar)		64	2.959.800.000
3.04.47.01	Perencanaan	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman (Hektar)	kbr, mah, bpn, smd, luarPrv	100	259.800.000
3.04.47.02	Pelaksanaan	Luas Penanaman (Hektar)	kbr, smd	100	2.200.000.000
3.04.47.03	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Monev RHL (Laporan)	mah, bpn, smd	10	500.000.000
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Jumlah unit usaha produktif kehutanan oleh KPH dan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari (Unit Usaha)		9	3.425.862.500
		Persentase kerusakan kawasan hutan yang menurun (%)		1,9	
3.04.51.01	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Luas pengelolaan Wilayah Tertentu (WT) di KPHP (Ha)	mah, bpn, smd, luarPrv	200,895	345.796.000
		Jumlah pembinaan/pemantauan unit manajemen pemegang izin di dalam kawasan KPHP (Unit Manajemen)		3	
3.04.51.02	Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	luas kerusakan hutan dan konflik tenurial di tingkat tapak (Ha)	kbr, mah, smd	10	300.004.000
		jumlah unit usaha produktif masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lestari di tingkat tapak (Unit Usaha)		4	
3.04.51.07	Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (DBH DR)	Luas Kawasan Hutan yang di kelola (Hektar)	bru, mah, bpn, smd, luarPrv	200000	2.780.062.500
3.04.01.01 1	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara				17.605.392.200
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM) (%)		85	720.100.200
3.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	bru	12	720.100.200
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (Unit)		1	631.507.000
3.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah penyediaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	bru, smd, luarPrv	12	440.675.000
		Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)		12	
3.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	bru	12	190.832.000
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		85	733.660.000
3.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah (Bulan)	bru, smd, luarPrv	12	504.100.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Pakaian dinas beserta perlengkapannya (Stell)	bru, smd, luarPrv	41	229.560.000
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH (Unit Usaha)		5	409.450.000
3.04.43.01	Pendampingan Kegiatan RHL	Jumlah Pendampingan Kegiatan RHL (Laporan)	bru	5	151.250.000
3.04.43.02	Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH)	Jumlah Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH) (Laporan)	bru	6	208.200.000
3.04.43.08	Pemenuhan kebutuhan sapras penyuluhan kehutanan (DBH DR)	Jumlah Pemenuhan kebutuhan sapras penyuluhan kehutanan (Unit/Demplot)	bru	3	50.000.000
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat dan Perhutanan Sosial (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial (Jumlah Usulan)		4	526.730.000
3.04.44.01	Penyiapan Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, pendampingan dan Fasilitas (Laporan)	bru	12	233.340.000
3.04.44.02	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Sosial (Laporan)	bru, smd, luarPrv	3	293.390.000
		Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (Laporan)		3	
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun (%)		0,25	7.697.845.000
3.04.45.01	Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan (Unit)	bru	30	477.660.000
3.04.45.16	Pengembangan Sarana Prasarana Penanggulangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarpras Penanggulangan (Unit)	bru	112	3.346.200.000
3.04.45.18	Penaksiran Luas (DBH SDA DR)	Jumlah luas penaksiran kebakaran (Hektar)	bru	2000	387.250.000
3.04.45.19	Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Laporan)	bru	12	458.380.000
3.04.45.20	Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah patroli pencegahan PKHL (Laporan)	bru	20	1.259.780.000
3.04.45.21	Pemadaman Langsung (DBH SDA DR)	Jumlah Pemadaman Langsung (Laporan)	bru	30	1.275.750.000
3.04.45.22	Pendampingan (pembentukan/pembinaan) masyarakat peduli api (DBH SDA DR)	Jumlah pendampingan (Laporan)	bru	8	234.975.000
3.04.45.24	Penetapan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Penetapan Posko Kebakaran Hutan dan Lahan (Kegiatan)	bru	10	257.850.000
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani (kasus Tindak Pidana)		5	1.604.750.000
3.04.46.01	Sosialisasi	Terselenggaranya Patroli Pengamanan Hutan (Laporan)	bru	10	294.950.000
		Jumlah Laporan Kegiatan Sosialisasi (Laporan)		10	
3.04.46.02	Koordinasi	Jumlah Laporan Koordinasi (Laporan)	bru, smd, luarPrv	20	329.500.000
3.04.46.04	Patroli Pengamanan	Jumlah laporan patroli (Laporan)	bru	20	980.300.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi (Hektar)		50	3.602.600.000
3.04.47.01	Perencanaan	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman (Hektar)	bru	200	104.750.000
3.04.47.02	Pelaksanaan	Luas Penanaman (Hektar)	bru	200	3.497.850.000
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Presentase Pengelolaan Kawasan Hutan (%)		1,95	1.678.750.000
		Jumlah unit usaha produktif kehutanan oleh KPH dan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari (Unit Usaha)		8	
3.04.51.01	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Luas pengelolaan Wilayah Tertentu (WT) di KPHP (Ha)	bru	300	337.140.000
		Jumlah pembinaan/pemantauan unit manajemen pemegang izin di dalam kawasan KPHP (Unit Manajemen)		6	
3.04.51.02	Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	luas kerusakan hutan dan konflik tenurial di tingkat tapak (Ha)	bru, smd, luarPrv	1000	182.985.000
		jumlah unit usaha produktif masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lestari di tingkat tapak (Unit Usaha)		1	
3.04.51.07	Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (DBH DR)	Luas Kawasan Hutan yang di kelola (Hektar)	bru	300000	1.158.625.000
3.04.01.01 2	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah				17.605.392.200
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		90	741.050.200
3.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	bru	5	741.050.200
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (Unit)		3	574.649.000
3.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah penyediaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	bru	8	466.649.000
3.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	bru, smd, luarPrv	12	108.000.000
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		90	608.660.000
3.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah (Bulan)	bru, bpn, smd, luarPrv	12	499.860.000
3.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya (Stell)	bru, bpn, smd, luarPrv	30	108.800.000
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH (Unit Usaha)		5	484.420.000
3.04.43.02	Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH)	Jumlah Kelompok Tani yang diberikan Pendampingan, pembentukan dan peningkatan kelembagaan kelompok tani hutan (Kelompok Tani Hutan (KTH))	bru	2	216.080.000
3.04.43.08	Pemenuhan kebutuhan sapsas penyuluhan kehutanan (DBH DR)	Jumlah Pemenuhan kebutuhan sapsas penyuluhan kehutanan (Unit/Demplot)	bru	4	136.700.000
3.04.43.10	Penyusunan program (DBH SDA DR)	Jumlah dokumen program identifikasi dan penyuluhan (dokumen)	bru	4	131.640.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat dan Perhutanan Sosial (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial (Jumlah Usulan)		4	432.470.000
3.04.44.01	Penyiapan Perhutanan Sosial	Jumlah kegiatan sosialisasi, pendampingan, dan fasilitasi (Laporan)	bru	6	198.210.000
3.04.44.02	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (Laporan)	bru	2	234.260.000
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun (%)		0,25	8.302.790.000
3.04.45.16	Pengembangan Sarana Prasarana Penanggulangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarpras Penanggulangan (Unit)	bru	84	5.595.650.000
3.04.45.18	Penaksiran Luas (DBH SDA DR)	Jumlah luas penaksiran kebakaran (Hektar)	bru	100	112.740.000
3.04.45.19	Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Laporan)	bru	6	250.780.000
3.04.45.20	Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah patroli pencegahan PKHL (Laporan)	bru	8	1.005.940.000
3.04.45.21	Pemadaman Langsung (DBH SDA DR)	Jumlah Pemadaman Langsung (Laporan)	bru	8	1.047.780.000
3.04.45.22	Pendampingan (pembentukan/pembinaan) masyarakat peduli api (DBH SDA DR)	Jumlah pendampingan (Laporan)	bru	8	289.900.000
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani (kasus Tindak Pidana)		5	1.249.000.000
3.04.46.01	Sosialisasi	Jumlah Laporan Kegiatan Sosialisasi (Laporan)	bru, bpn, smd	6	264.390.000
3.04.46.02	Koordinasi	Jumlah Laporan Koordinasi (Laporan)	bru, smd	10	388.840.000
3.04.46.04	Patroli Pengamanan	Jumlah laporan patroli (Laporan)	bru	12	595.770.000
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi (Hektar)		50	780.090.000
3.04.47.01	Perencanaan	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman (Hektar)	bru	50	163.920.000
3.04.47.02	Pelaksanaan	Luas Penanaman (Hektar)	bru	50	616.170.000
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah SK pengada dan pengedar benih/bibit, Sertifikasi Sumber Benih (SK/Sertifikat)		8	503.045.000
		Jumlah Bibit (Bibit)		250000	
3.04.48.06	Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Benih	Jumlah bimbingan dan pengawasan (Laporan)	bru	6	91.065.000
3.04.48.09	Pembuatan/pengadaan bibit (DBH DR)	jumlah Pembuatan/pengadaan bibit (bibit)	bru	4000	411.980.000
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Jumlah unit usaha produktif kehutanan oleh KPH dan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari (Unit Usaha)		8	3.929.218.000
		Persentase kerusakan kawasan hutan yang menurun (%)		1,95	
3.04.51.01	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Luas pengelolaan Wilayah Tertentu (WT) di KPHP (Ha)	bru, bpn, smd, luarPrv	25	466.250.000
		Jumlah pembinaan/pemantauan unit manajemen pemegang izin di		2	

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
		dalam kawasan KPHP (Unit Manajemen)			
3.04.51.02	Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	luas kerusakan hutan dan konflik tenurial di tingkat tapak (Ha)	bru, smd, luarPrv	25	214.783.000
		jumlah unit usaha produktif masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lestari di tingkat tapak (Unit Usaha)		1	
3.04.51.07	Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (DBH DR)	Luas Kawasan Hutan yang di kelola (Hektar)	bru	100	3.248.185.000
3.04.01.01 3	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai				17.605.392.200
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM) (%)		85	380.721.120
3.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	bru	12	380.721.120
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (Unit)		3	713.898.000
3.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	bru	12	601.398.000
3.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	bru	12	112.500.000
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		85	394.700.000
3.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah (Bulan)	bru	12	201.000.000
3.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Pakaian dinas beserta perlengkapannya (Stell)	bru	36	193.700.000
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH (Unit Usaha)		5	361.500.000
3.04.43.02	Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH)	Jumlah Kelompok Tani yang diberikan Pendampingan, pembentukan dan peningkatan kelembagaan kelompok tani hutan (Kelompok Tani Hutan (KTH))	bru	8	294.700.000
3.04.43.08	Pemenuhan kebutuhan sarpras penyuluhan kehutanan (DBH DR)	Tersedianya kebutuhan sarpras penyuluhan kehutanan (Unit/Demplot)	bru	4	66.800.000
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat dan Perhutanan Sosial (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial (Jumlah Usulan)		4	845.280.000
3.04.44.01	Penyiapan Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, pendampingan dan Fasilitasi (Laporan)	bru	12	444.210.000
3.04.44.02	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (Laporan)	bru	15	401.070.000
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun (%)		0,25	7.050.085.000
3.04.45.16	Pengembangan Sarana Prasarana Penanggulangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarpras Penanggulangan (Unit)	bru	341	4.120.900.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.04.45.18	Penaksiran Luas (DBH SDA DR)	Jumlah luas penaksiran kebakaran (Hektar)	bru	100	281.440.000
3.04.45.19	Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Laporan)	bru	8	294.248.600
3.04.45.20	Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah patroli pencegahan PKHL (Laporan)	bru	20	1.005.348.000
3.04.45.21	Pemadaman Langsung (DBH SDA DR)	Jumlah Pemadaman Langsung (Laporan)	bru	20	1.019.868.400
3.04.45.22	Pendampingan (pembentukan/pembinaan) masyarakat peduli api (DBH SDA DR)	Jumlah pendampingan (Laporan)	bru	8	328.280.000
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani (kasus Tindak Pidana)		5	1.677.915.000
3.04.46.01	Sosialisasi	Jumlah Laporan Kegiatan Sosialisasi (Laporan)	bru	8	238.310.000
3.04.46.02	Koordinasi	Jumlah Laporan Koordinasi (Laporan)	bru	12	398.965.000
3.04.46.04	Patroli Pengamanan	Jumlah laporan patroli (Laporan)	bru	24	1.040.640.000
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi (Hektar)		200	2.841.865.000
3.04.47.02	Pelaksanaan	Luas Penanaman (Hektar)	bru	200	2.841.865.000
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah SK pengada dan pengedar benih/bibit, Sertifikasi Sumber Benih (SK/Sertifikat)		6	1.173.855.000
		Jumlah Bibit (Bibit)		4000	
3.04.48.06	Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Benih	Jumlah bimbingan dan pengawasan (Laporan)	bru	6	109.775.000
3.04.48.09	Pembuatan/pengadaan bibit (DBH DR)	jumlah Pembuatan/pengadaan bibit (bibit)	bru	4000	1.064.080.000
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Jumlah unit usaha produktif kehutanan oleh KPH dan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari (Unit Usaha)		2	2.165.573.080
		Persentase kerusakan kawasan hutan yang menurun (%)		0,25	
3.04.51.01	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Luas pengelolaan Wilayah Tertentu (WT) di KPHP (Ha)	bru, smd, luarPrv	20	718.573.080
		Jumlah pembinaan/pemantauan unit manajemen pemegang izin di dalam kawasan KPHP (Unit Manajemen)		8	
3.04.51.02	Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	luas kerusakan hutan dan konflik tenurial di tingkat tapak (Ha)	bru	100	397.500.000
		jumlah unit usaha produktif masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lestari di tingkat tapak (Unit Usaha)		4	
3.04.51.07	Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (DBH DR)	Luas Kawasan Hutan yang di kelola (Hektar)	bru	14651553	1.049.500.000
3.04.01.01.4	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar				17.750.305.500
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM) (%)		90	806.796.500
3.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	ktm	12	806.796.500

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (Unit)		3	477.525.000
3.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah penyediaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	ktm	12	256.700.000
3.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	ktm	12	220.825.000
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		90	551.100.000
3.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah (Bulan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	12	397.500.000
3.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Pakaian dinas beserta perlengkapannya (Stell)	ktm, bpn, smd, luarPrv	22	153.600.000
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH (Unit Usaha)		5	338.560.000
3.04.43.02	Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH)	Jumlah kelompok tani yang diberikan pendampingan, pembentukan, peningkatan kelembagaan kelompok tani hutan dan kelompok tani yang dilakukan pembinaan pengelolaan Usaha Perhutanan Sosial dan Kemitraan (Kelompok Tani Hutan)	ktm	4	130.900.000
3.04.43.06	Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Penyuluh	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penyuluh (Laporan)	kbr	5	93.480.000
3.04.43.09	Pemberdayaan KTH Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha (DBH DR)	Jumlah Peserta Pemberdayaan KTH Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha (Peserta)	bru	60	114.180.000
		Jumlah Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (Unit Usaha)		4	
		Terbentuk dan Terbinanya Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (Unit Usaha)		4	
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat dan Perhutanan Sosial (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial (Jumlah Usulan)		2	513.910.000
3.04.44.01	Penyiapan Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Pendampingan dan Fasilitas Perhutanan Sosial (Laporan)	ktm	10	307.185.000
3.04.44.02	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (Laporan)	ktm	5	206.725.000
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun (%)		0,25	6.539.087.000
3.04.45.02	Pelatihan/Pembekalan/Inhouse training/Penyegaran/Bimbingan Teknis PKHL (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Pelatihan/ Pembekalan/ Inhouse Training/penyegaran/bimbingan teknis PKHL (Kegiatan)	ktm, bpn, smd, luarPrv	2	126.402.500
3.04.45.15	Pengembangan Sarana Prasarana Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarpras Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Unit)	ktm	2	94.295.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.04.45.16	Pengembangan Sarana Prasarana Penanggulangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarpras Penanggulangan (Unit)	ktm	714	3.903.759.500
3.04.45.18	Penaksiran Luas (DBH SDA DR)	Jumlah luas penaksiran kebakaran (Hektar)	ktm	50	228.480.000
3.04.45.19	Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Laporan)	bru	2	116.100.000
3.04.45.20	Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah patroli pencegahan PKHL (Laporan)	bru	20	1.001.750.000
3.04.45.21	Pemadaman Langsung (DBH SDA DR)	Jumlah Pemadaman Langsung (Laporan)	ktm	30	1.036.000.000
3.04.45.24	Penetapan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Penetapan Posko Kebakaran Hutan dan Lahan (Kegiatan)	ktm	3	32.300.000
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani (kasus Tindak Pidana)		2	440.390.000
3.04.46.01	Sosialisasi	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi (Laporan)	ktm	2	127.815.000
3.04.46.04	Patroli Pengamanan	Jumlah Kegiatan Patroli Pengamanan Hutan (laporan)	ktm	12	312.575.000
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi (Hektar)		100	3.720.928.000
3.04.47.01	Perencanaan	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman (Hektar)	ktm	100	162.650.000
3.04.47.02	Pelaksanaan	Luas Penanaman (Hektar)	ktm	100	3.439.978.000
3.04.47.03	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah movev deforestasi dan degradasi hutan dalam Rangka Mitigasi Perubahan Iklim (Laporan)	ktm	3	118.300.000
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah Bibit (Bibit)		16300	264.450.000
3.04.48.09	Pembuatan/pengadaan bibit (DBH DR)	jumlah Pembuatan/pengadaan bibit (bibit)	ktm	23500	264.450.000
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Jumlah unit usaha produktif kehutanan oleh KPH dan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari (Unit Usaha)		2	4.097.559.000
3.04.51.01	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Luas pengelolaan Wilayah Tertentu (WT) di KPHP (Ha)	ktm	100	497.074.000
		Jumlah pembinaan/pemantauan unit manajemen pemegang izin di dalam kawasan KPHP (Unit Manajemen)		2	
3.04.51.02	Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	luas kerusakan hutan dan konflik tenurial di tingkat tapak (Ha)	ktm	50	417.810.000
		jumlah unit usaha produktif masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lestari di tingkat tapak (Unit Usaha)		2	
3.04.51.07	Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (DBH DR)	Luas Kawasan Hutan yang di kelola (Hektar)	ktm	50	3.182.675.000
3.04.01.01 5	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau				17.700.009.000
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM) (%)		85	712.509.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	ktm, smd	12	712.509.000
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (Unit)		3	617.650.000
3.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	ktm, smd	12	340.050.000
3.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	ktm, smd	12	277.600.000
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		85	509.150.000
3.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah (Bulan)	ktm, smd	12	291.750.000
3.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Pakaian dinas beserta perlengkapannya (Stell)	ktm, smd	40	217.400.000
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH (Unit Usaha)		3	534.695.000
3.04.43.02	Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH)	Jumlah Kelompok Tani yang diberikan Pendampingan, pembentukan dan peningkatan kelembagaan kelompok tani hutan (Kelompok Tani Hutan (KTH))	ktm	4	144.450.000
3.04.43.04	Metode dan Materi Penyuluhan	Jumlah laporan metode dan materi penyuluhan (Laporan)	ktm	4	81.530.000
3.04.43.06	Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Penyuluh	Jumlah laporan movev kegiatan penyuluh (Laporan)	ktm	14	75.775.000
3.04.43.08	Pemenuhan kebutuhan sapsras penyuluhan kehutanan (DBH DR)	Jumlah Pemenuhan kebutuhan sapsras penyuluhan kehutanan (Unit/Demplot)	ktm	5	71.000.000
3.04.43.09	Pemberdayaan KTH Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha (DBH DR)	Jumlah Peserta Pemberdayaan KTH Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha (Peserta)	ktm	225	161.940.000
		Jumlah Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (Unit Usaha)		3	
		Terbentuk dan Terbinanya Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (Unit Usaha)		3	
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat dan Perhutanan Sosial (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial (Jumlah Usulan)		10	649.825.000
3.04.44.01	Penyiapan Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, pendampingan dan Fasilitasi (Laporan)	ktm	10	316.650.000
3.04.44.02	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (Laporan)	ktm	5	333.175.000
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun (%)		0,25	7.344.943.550
3.04.45.01	Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan (Unit)	ktm	5	779.475.000
3.04.45.02	Pelatihan/Pembekalan/Inhouse training/Penyegaran/B	Jumlah Kegiatan Pelatihan/ Pembekalan/ Inhouse	ktm	5	337.606.050

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
	imbinan Teknis PKHL (DBH SDA DR)	Training/penyegaran/bimbingan teknis PKHL (Kegiatan)			
3.04.45.15	Pengembangan Sarana Prasarana Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarpras Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Unit)	ktm	40	297.900.000
3.04.45.16	Pengembangan Sarana Prasarana Penanggulangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarpras Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Unit)	ktm	1510	1.972.250.000
3.04.45.17	Pembuatan Sekat Kanal, Embung dan Kantong Air (DBH SDA DR)	Jumlah sekat kanal, embung dan kantong air (Unit)	ktm	1	196.000.000
3.04.45.18	Penaksiran Luas (DBH SDA DR)	Jumlah luas penaksiran kebakaran (Hektar)	ktm	50	105.250.000
3.04.45.19	Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Laporan)	ktm	12	286.000.000
3.04.45.20	Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah patroli pencegahan PKHL (Laporan)	ktm	24	1.009.475.000
3.04.45.21	Pemadaman Langsung (DBH SDA DR)	Jumlah Pemadaman Langsung (Laporan)	ktm	20	1.004.850.000
3.04.45.22	Pendampingan (pembentukan/pembinaan) masyarakat peduli api (DBH SDA DR)	Jumlah pendampingan (Laporan)	ktm	10	294.612.500
3.04.45.23	Deteksi Dini (DBH SDA DR)	Jumlah dokumen perencanaan (dokumen)	ktm	1	274.200.000
3.04.45.24	Penetapan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Penetapan Posko Kebakaran Hutan dan Lahan (Kegiatan)	ktm	10	787.325.000
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani (kasus Tindak Pidana)		2	1.030.425.000
3.04.46.01	Sosialisasi	Jumlah Laporan Kegiatan Sosialisasi (Laporan)	ktm	10	250.875.000
3.04.46.02	Koordinasi	Jumlah Laporan Koordinasi (Laporan)	ktm	10	193.000.000
3.04.46.04	Patroli Pengamanan	Jumlah laporan patroli (Laporan)	ktm	24	586.550.000
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi (Hektar)		350	1.378.170.000
3.04.47.01	Perencanaan	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman (Hektar)	ktm	550	155.750.000
3.04.47.02	Pelaksanaan	Luas Penanaman (Hektar)	ktm	400	1.074.970.000
3.04.47.03	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah monev deforestasi dan degradasi hutan dalam Rangka Mitigasi Perubahan Iklim (Laporan)	ktm	15	147.450.000
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah Bibit (Bibit)		200000	306.854.500
3.04.48.09	Pembuatan/pengadaan bibit (DBH DR)	jumlah Pembuatan/pengadaan bibit (bibit)	ktm	35000	157.250.000
3.04.48.11	Pembinaan perbenihan tanaman hutan (bimtek, monev, pelayanan perijinan dan peningkatan kualitas SDM) (DBH DR)	Jumlah Pembinaan perbenihan tanaman hutan (bimtek, monev, pelayanan perijinan dan peningkatan kualitas SDM) (Kegiatan)	ktm	5	149.604.500
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Jumlah unit usaha produktif kehutanan oleh KPH dan masyarakat		1	4.615.786.950

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
		melalui pengelolaan hutan lestari (Unit Usaha)			
		Persentase kerusakan kawasan hutan yang menurun (%)		1,95	
3.04.51.01	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Luas pengelolaan Wilayah Tertentu (WT) di KPHP (Ha)	kbr, kkr, ktm, bpn, smd, luarPrv	60	697.200.000
		Jumlah pembinaan/pemantauan unit manajemen pemegang izin di dalam kawasan KPHP (Unit Manajemen)		11	
		Terkelolanya Wilayah Tertentu (WT) di KPHP (Hektar)		60	
		Terlaksananya pembinaan/pemantauan unit manajemen pemegang izin di dalam kawasan KPHP (Unit Manajemen)		11	
3.04.51.02	Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	luas kerusakan hutan dan konflik tenurial di tingkat tapak (Ha)	kbr, ktm, bpn, smd, luarPrv	250	163.500.000
		jumlah unit usaha produktif masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lestari di tingkat tapak (Unit Usaha)		1	
3.04.51.07	Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (DBH DR)	Luas Kawasan Hutan yang di kelola (Hektar)	ktm	100	3.755.086.950
3.04.01.01 6	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam				17.747.595.000
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM) (%)		85	1.292.216.500
3.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	smd	12	1.292.216.500
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (Unit)		3	688.400.000
3.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	smd	12	342.100.000
3.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	smd	12	346.300.000
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		85	322.050.000
3.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah (Bulan)	luarPrv	12	246.500.000
3.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Pakaian dinas beserta perlengkapannya (Stell)	smd	70	75.550.000
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH (Unit Usaha)		2	352.070.000
3.04.43.02	Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH)	Jumlah Kelompok Tani yang diberikan Pendampingan, pembentukan dan peningkatan kelembagaan kelompok tani hutan (Kelompok Tani Hutan (KTH))	kkr	2	172.535.000
3.04.43.09	Pemberdayaan KTH Melalui Peningkatan Kelola	Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH) (Laporan)	kkr	2	179.535.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
	Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha (DBH DR)				
		Jumlah Peserta Pemberdayaan KTH Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha (Peserta)		2	
		Jumlah Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (Unit Usaha)		2	
		Terbentuk dan Terbinanya Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (Unit Usaha)		2	
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat dan Perhutanan Sosial (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial (Jumlah Usulan)		3	1.115.160.000
3.04.44.01	Penyiapan Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, pendampingan dan Fasilitasi (Laporan)	kk	6	536.010.000
3.04.44.02	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (Laporan)	kk	3	579.150.000
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun (%)		0,25	5.966.149.200
3.04.45.02	Pelatihan/Pembekalan/Inhouse training/Penyegaran/Bimbingan Teknis PKHL (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Pelatihan/ Pembekalan/ Inhouse Training/penyegaran/bimbingan teknis PKHL (Kegiatan)	kk	3	219.490.000
3.04.45.15	Pengembangan Sarana Prasarana Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarpras Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Unit)	kk	11	320.624.200
3.04.45.16	Pengembangan Sarana Prasarana Penanggulangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarpras Penanggulangan (Unit)	kk	2	2.516.025.000
3.04.45.18	Penaksiran Luas (DBH SDA DR)	Jumlah luas penaksiran kebakaran (Hektar)	kk	6	88.780.000
3.04.45.19	Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Tersusunnya laporan hasil kegiatan sosialisasi (Laporan)	kk	4	337.340.000
		Jumlah Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Laporan)		4	
3.04.45.20	Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Tersusunnya Laporan kegiatan patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Laporan)	kk	21	1.000.000.000
		Jumlah patroli pencegahan PKHL (Laporan)		21	
3.04.45.21	Pemadaman Langsung (DBH SDA DR)	Jumlah Pemadaman Langsung (Laporan)	kk	10	1.000.000.000
3.04.45.22	Pendampingan (pembentukan/pembinaan) masyarakat peduli api (DBH SDA DR)	Jumlah pendampingan (Laporan)	kk	2	205.100.000
3.04.45.24	Penetapan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Terselenggaranya Kegiatan Penetapan Posko Darkarhutla (Kegiatan)	kk	3	278.790.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
		Jumlah Kegiatan Penetapan Posko Kebakaran Hutan dan Lahan (Kegiatan)		3	
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani (kasus Tindak Pidana)		2	556.140.000
3.04.46.02	Koordinasi	Jumlah Laporan Koordinasi (Laporan)	kkk	6	121.010.000
3.04.46.04	Patroli Pengamanan	Jumlah laporan patroli (Laporan)	kkk	12	435.130.000
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi (Hektar)		100	1.466.339.000
3.04.47.01	Perencanaan	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman (Hektar)	kkk	50	196.539.000
3.04.47.02	Pelaksanaan	Luas Penanaman (Hektar)	kkk	100	1.269.800.000
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah Bibit (Bibit)		50000	244.250.000
3.04.48.09	Pembuatan/pengadaan bibit (DBH DR)	jumlah Pembuatan/pengadaan bibit (bibit)	kkk	50000	244.250.000
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Presentase Pengelolaan Kawasan Hutan (%)		20	5.744.820.300
		Jumlah unit usaha produktif kehutanan oleh KPH dan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari (Unit Usaha)		2	
3.04.51.01	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Luas pengelolaan Wilayah Tertentu (WT) di KPHP (Ha)	kkk	100	243.420.000
		Jumlah pembinaan/pemantauan unit manajemen pemegang izin di dalam kawasan KPHP (Unit Manajemen)		2	
3.04.51.02	Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	luas kerusakan hutan dan konflik tenurial di tingkat tapak (Ha)	kkk, btg, smd, luarPrv	200	201.508.500
		jumlah unit usaha produktif masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lestari di tingkat tapak (Unit Usaha)		2	
		Tertanganinya kerusakan hutan dan konflik tenurial di tingkat tapak (Hektar)		200	
3.04.51.07	Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (DBH DR)	Terlaksananya pengawasan, pengendalian pengelolaan hutan, pemanfaatan (Laporan)	kkk	2	5.299.891.800
		Jumlah laporan inventarisasi potensi kawasan hutan yang tidak dibebani perizinan (Laporan)		1	
		Luas Kawasan Hutan yang di kelola (Hektar)		200	
3.04.01.01 7	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai				17.753.654.000
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM) (%)		90	920.169.010
3.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	kbr, kkk, mah, smd, luarPrv	12	920.169.010
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (Unit)		3	397.198.400
3.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah penyediaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	kbr, smd, luarPrv	12	208.098.400
3.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	kbr	12	189.100.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		85	650.080.000
3.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah (Bulan)	kbr	12	319.580.000
3.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Pakaian dinas beserta perlengkapannya (Stell)	kbr	32	330.500.000
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH (Unit Usaha)		5	1.119.910.000
3.04.43.01	Pendampingan Kegiatan RHL	Jumlah Pendampingan Kegiatan RHL (Laporan)	kbr, mah, smd, luarPrv	11	369.260.000
3.04.43.02	Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH)	Jumlah Kelompok Tani yang diberikan Pendampingan, pembentukan dan peningkatan kelembagaan kelompok tani hutan (Kelompok Tani Hutan (KTH))	kbr, mah, smd, luarPrv	10	189.500.000
3.04.43.04	Metode dan Materi Penyuluhan	Jumlah laporan metode dan materi penyuluhan (Laporan)	kbr, mah, smd, luarPrv	5	447.150.000
		Tersusunnya laporan metode dan materi penyuluhan (Laporan)		5	
3.04.43.10	Penyusunan program (DBH SDA DR)	Jumlah dokumen program identifikasi dan penyuluhan (dokumen)	kbr, mah	1	114.000.000
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat dan Perhutanan Sosial (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial (Jumlah Usulan)		5	836.200.000
3.04.44.01	Penyiapan Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Pendampingan dan Fasilitas Perhutanan Sosial (Laporan)	kbr, mah, smd, luarPrv	10	412.100.000
3.04.44.02	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (Laporan)	kbr, mah, smd, luarPrv	10	424.100.000
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun (%)		0,25	5.775.620.000
3.04.45.01	Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan (Unit)	kbr, mah, psr, smd, luarPrv	204	2.235.750.000
3.04.45.02	Pelatihan/Pembekalan/Inhouse training/ Penyegaran/Bimbingan Teknis PKHL (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Pelatihan/ Pembekalan/ Inhouse Training/ penyegaran/bimbingan teknis PKHL (Kegiatan)	kbr, kkr, mah, psr, ppu, bpn, smd, luarPrv	5	507.600.000
3.04.45.18	Penaksiran Luas (DBH SDA DR)	Jumlah luas penaksiran kebakaran (Hektar)	kbr, mah	100	166.970.000
3.04.45.19	Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Laporan)	kbr, mah	10	483.600.000
3.04.45.20	Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah patroli pencegahan PKHL (Laporan)	kbr, mah	16	1.006.350.000
3.04.45.21	Pemadaman Langsung (DBH SDA DR)	Jumlah Pemadaman Langsung (Laporan)	kbr, mah	10	1.375.350.000
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani (kasus Tindak Pidana)		10	1.843.150.000
3.04.46.01	Sosialisasi	Jumlah Laporan Kegiatan Sosialisasi (Laporan)	kbr, mah, smd, luarPrv	15	481.600.000
3.04.46.02	Koordinasi	Jumlah Laporan Koordinasi (Laporan)	kbr, mah, smd, luarPrv	10	291.700.000
3.04.46.04	Patroli Pengamanan	Jumlah laporan patroli (Laporan)	kbr, mah, smd, luarPrv	15	1.069.850.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi (Hektar)		250	970.850.000
3.04.47.02	Pelaksanaan	Luas Penanaman (Hektar)	kbr, mah, smd, luarPrv	250	970.850.000
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Jumlah unit usaha produktif kehutanan oleh KPH dan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari (Unit Usaha)		9	5.240.476.590
		Persentase kerusakan kawasan hutan yang menurun (%)		1,95	
3.04.51.01	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Luas pengelolaan Wilayah Tertentu (WT) di KPHP (Ha)	kbr, mah, bpn, smd, luarPrv	15	492.201.590
		Jumlah pembinaan/pemantauan unit manajemen pemegang izin di dalam kawasan KPHP (Unit Manajemen)		15	
		Terkelolanya Wilayah Tertentu (WT) di KPHP (Hektar)		15	
		Terlaksananya pembinaan/pemantauan unit manajemen pemegang izin di dalam kawasan KPHP (Unit Manajemen)		15	
3.04.51.02	Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	luas kerusakan hutan dan konflik tenurial di tingkat tapak (Ha)	kbr, mah, bpn, smd, luarPrv	10	294.005.000
		jumlah unit usaha produktif masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lestari di tingkat tapak (Unit Usaha)		4	
		Tertanganinya kerusakan hutan dan konflik tenurial di tingkat tapak (Hektar)		10	
		Tersedianya unit usaha produktif masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lestari di tingkat tapak (Unit Usaha)		4	
3.04.51.07	Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (DBH DR)	Luas Kawasan Hutan yang di kelola (Hektar)	kbr, mah, bpn, smd, luarPrv	181,037	4.454.270.000
		Tereselenggaranya pengelolaan kawasan hutan (Hektar)		181,037	
3.04.01.01 8	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn				17.753.654.000
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM) (%)		90	949.703.000
3.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	kbr	12	949.703.000
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (Unit)		3	573.452.000
3.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	kbr, mah, smd	12	341.952.000
3.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	kbr	12	231.500.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		90	672.850.000
3.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah (Bulan)	kbr	12	332.450.000
3.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Pakaian dinas beserta perlengkapannya (Stell)	kbr	32	340.400.000
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH (Unit Usaha)		10	278.350.000
3.04.43.01	Pendampingan Kegiatan RHL	Jumlah Pendampingan Kegiatan RHL (Laporan)	kbr, mah, bpn, smd, luarPrv	10	278.350.000
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat dan Perhutanan Sosial (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial (Jumlah Usulan)		4	637.350.000
3.04.44.01	Penyiapan Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, pendampingan dan Fasilitasi (Laporan)	kbr, mah, bpn, smd, luarPrv	10	391.125.000
3.04.44.02	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (Laporan)	kbr, mah, bpn, smd, luarPrv	6	246.225.000
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun (%)		0,25	6.308.944.650
3.04.45.02	Pelatihan/Pembekalan/Inhouse training/Pyenyegaran/B imbingan Teknis PKHL (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Pelatihan/ Pembekalan/ Inhouse Training/penyegaran/bimbingan teknis PKHL (Kegiatan)	kbr, mah, bpn, smd, luarPrv	1	279.625.000
3.04.45.16	Pengembangan Sarana Prasarana Penanggulangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarpras Penanggulangan (Unit)	kbr, ktm, mah, psr, smd, luarPrv	226	2.692.239.650
3.04.45.18	Penaksiran Luas (DBH SDA DR)	Jumlah luas penaksiran kebakaran (Hektar)	kbr, mah, psr, smd, luarPrv	400	221.100.000
3.04.45.19	Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Laporan)	kbr, mah, psr, smd, luarPrv	10	422.950.000
3.04.45.20	Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah patroli pencegahan PKHL (Laporan)	kbr, mah, bpn, smd, luarPrv	15	1.008.830.000
3.04.45.21	Pemadaman Langsung (DBH SDA DR)	Jumlah Pemadaman Langsung (Laporan)	kbr, mah, bpn, smd, luarPrv	10	1.007.750.000
3.04.45.22	Pendampingan (pembentukan/pembinaan) masyarakat peduli api (DBH SDA DR)	Jumlah pendampingan (Laporan)	kbr, mah, psr, smd, luarPrv	10	477.750.000
3.04.45.24	Penetapan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Penetapan Posko Kebakaran Hutan dan Lahan (Kegiatan)	kbr, mah, bpn, smd, luarPrv	10	198.700.000
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani (kasus Tindak Pidana)		10	2.884.100.000
3.04.46.01	Sosialisasi	Jumlah Laporan Kegiatan Sosialisasi (Laporan)	kbr, mah, bpn, smd, luarPrv	15	468.500.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.04.46.02	Koordinasi	Jumlah Laporan Koordinasi (Laporan)	kbr, mah, bpn, smd, luarPrv	15	426.250.000
3.04.46.04	Patroli Pengamanan	Jumlah laporan patroli (Laporan)	kbr, mah, bpn, smd, luarPrv	20	1.989.350.000
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi (Hektar)		250	2.077.300.000
3.04.47.01	Perencanaan	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman (Hektar)	kbr, mah, bpn, smd, luarPrv	250	422.950.000
3.04.47.02	Pelaksanaan	Luas Penanaman (Hektar)	kbr, mah, bpn, smd, luarPrv	250	1.388.600.000
3.04.47.03	Monitoring dan Evaluasi	jumlah kegiatan money (laporan)	kbr, mah, bpn, smd, luarPrv	6	265.750.000
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah Bibit (Bibit)		10000	982.750.000
3.04.48.09	Pembuatan/pengadaan bibit (DBH DR)	jumlah Pembuatan/pengadaan bibit (bibit)	kbr, mah, bpn, smd, luarPrv	10000	982.750.000
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Jumlah unit usaha produktif kehutanan oleh KPH dan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari (Unit Usaha)		9	2.388.854.350
		Persentase kerusakan kawasan hutan yang menurun (%)		1,95	
3.04.51.01	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Luas pengelolaan Wilayah Tertentu (WT) di KPHP (Ha)	kbr, mah, bpn, smd, luarPrv	15	324.325.000
		Jumlah pembinaan/pemantauan unit manajemen pemegang izin di dalam kawasan KPHP (Unit Manajemen)		15	
		Terkelolanya Wilayah Tertentu (WT) di KPHP (Hektar)		15	
		Terlaksananya pembinaan/pemantauan unit manajemen pemegang izin di dalam kawasan KPHP (Unit Manajemen)		15	
3.04.51.02	Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	luas kerusakan hutan dan konflik tenurial di tingkat tapak (Ha)	kbr, mah, bpn, smd, luarPrv	10	233.324.000
		jumlah unit usaha produktif masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lestari di tingkat tapak (Unit Usaha)		4	
3.04.51.07	Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (DBH DR)	Luas Kawasan Hutan yang di kelola (Hektar)	kbr, mah, bpn, smd, luarPrv	64,726	1.831.205.350
3.04.01.01.9	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake				17.450.434.000
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM) (%)		90	903.185.680
3.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	psr, ppu	12	903.185.680
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (Unit)		1	736.998.320

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah penyediaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	psr, ppu, smd, luarPrv	12	312.650.000
		Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)		12	
3.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	psr, ppu, bpn, smd, luarPrv	12	424.348.320
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		90	455.000.000
3.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah (Bulan)	psr, ppu, bpn, smd, luarPrv	12	318.000.000
3.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Pakaian dinas beserta perlengkapannya (Stell)	psr, ppu, bpn, smd, luarPrv	70	137.000.000
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH (Unit Usaha)		2	1.116.152.500
3.04.43.01	Pendampingan Kegiatan RHL	Jumlah Pendampingan Kegiatan RHL (Laporan)	psr, ppu, bpn, smd, luarPrv	5	173.865.000
3.04.43.06	Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Penyuluh	Jumlah laporan movev kegiatan penyuluh (Laporan)	psr, ppu, luarPrv	10	158.062.500
3.04.43.08	Pemenuhan kebutuhan sapsras penyuluhan kehutanan (DBH DR)	Jumlah Pemenuhan kebutuhan sapsras penyuluhan kehutanan (Unit/Demplot)	psr, ppu, bpn, smd, luarPrv	42	502.350.000
3.04.43.09	Pemberdayaan KTH Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha (DBH DR)	Jumlah Peserta Pemberdayaan KTH Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha (Peserta)	psr, ppu, bpn, smd, luarPrv	150	281.875.000
		Jumlah Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (Unit Usaha)		2	
		Terbentuk dan Terbinanya Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (Unit Usaha)		2	
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat dan Perhutanan Sosial (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial (Jumlah Usulan)		2	392.025.000
3.04.44.01	Penyiapan Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, pendampingan dan Fasilitasi (Laporan)	psr, ppu, bpn, smd, luarPrv	5	392.025.000
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun (%)		0,25	6.669.967.500
3.04.45.01	Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan (Unit)	psr, ppu, bpn, smd, luarPrv	1	878.200.000
3.04.45.02	Pelatihan/Pembekalan/Inhouse training/ Penyegaran/Bimbingan Teknis PKHL (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Pelatihan/ Pembekalan/ Inhouse Training/ penyegaran/bimbingan teknis PKHL (Kegiatan)	psr, ppu, bpn, smd, luarPrv	2	409.225.000
3.04.45.15	Pengembangan Sarana Prasarana Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarpras Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Unit)	psr, ppu, bpn, smd, luarPrv	36	729.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.04.45.16	Pengembangan Sarana Prasarana Penanggulangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarpras Penanggulangan (Unit)	psr, ppu, bpn, smd, luarPrv	25	1.121.780.000
3.04.45.18	Penaksiran Luas (DBH SDA DR)	Jumlah luas penaksiran kebakaran (Hektar)	psr, ppu, bpn, smd, luarPrv	100	102.000.000
3.04.45.19	Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Laporan)	psr, ppu, bpn, smd	8	324.350.000
3.04.45.20	Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah patroli pencegahan PKHL (Laporan)	psr, ppu, bpn, smd, luarPrv	20	1.159.450.000
3.04.45.21	Pemadaman Langsung (DBH SDA DR)	Jumlah Pemadaman Langsung (Laporan)	psr, ppu, bpn, smd, luarPrv	10	1.138.262.500
3.04.45.22	Pendampingan (pembentukan/pembinaan) masyarakat peduli api (DBH SDA DR)	Jumlah pendampingan (Laporan)	psr, ppu, bpn, smd, luarPrv	8	531.650.000
3.04.45.24	Penetapan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Penetapan Posko Kebakaran Hutan dan Lahan (Kegiatan)	psr, ppu, bpn, smd, luarPrv	5	276.050.000
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani (kasus Tindak Pidana)		2	2.232.500.000
3.04.46.01	Sosialisasi	Terselenggaranya Patroli Pengamanan Hutan (Laporan)	psr, ppu, bpn, luarPrv	10	790.880.000
3.04.46.02	Koordinasi	Jumlah Laporan Koordinasi (Laporan)	psr, ppu, bpn, smd, luarPrv	10	351.995.000
3.04.46.04	Patroli Pengamanan	Jumlah laporan patroli (Laporan)	psr, ppu	12	1.089.625.000
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi (Hektar)		100	1.841.450.000
3.04.47.01	Perencanaan	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman (Hektar)	psr, ppu, bpn, smd, luarPrv	100	262.675.000
3.04.47.02	Pelaksanaan	Luas Penanaman (Hektar)	psr, ppu, smd, luarPrv	100	985.925.000
3.04.47.03	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Monev RHL (Laporan)	psr, ppu, bpn, smd, luarPrv	10	592.850.000
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Jumlah unit usaha produktif kehutanan oleh KPH dan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari (Unit Usaha)		4	3.103.155.000
		Persentase kerusakan kawasan hutan yang menurun (%)		1,9	
3.04.51.01	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Luas pengelolaan Wilayah Tertentu (WT) di KPHP (Ha)	psr, ppu, smd, luarPrv	50	187.850.000
		Jumlah pembinaan/pemantauan unit manajemen pemegang izin di dalam kawasan KPHP (Unit Manajemen)		5	
3.04.51.02	Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	luas kerusakan hutan dan konflik tenurial di tingkat tapak (Ha)	psr, ppu, bpn, smd, luarPrv	100	167.400.000
		jumlah unit usaha produktif masyarakat dalam pengelolaan hutan		2	

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
		secara lestari di tingkat tapak (Unit Usaha)			
3.04.51.07	Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (DBH DR)	Luas Kawasan Hutan yang di kelola (Hektar)	mah, psr, ppu, bpn, smd, luarPrv	294,694	2.747.905.000
3.04.01.020	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan				17.652.271.100
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM) (%)		90	1.241.171.600
3.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	bpn	12	1.241.171.600
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (Unit)		3	858.274.500
3.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	bpn	12	537.014.500
3.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	bpn, smd, luarPrv	12	321.260.000
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		90	208.475.000
3.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah (Bulan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	12	156.375.000
3.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya (Stell)	bpn, smd, luarPrv	30	52.100.000
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH (Unit Usaha)		5	419.775.000
3.04.43.01	Pendampingan Kegiatan RHL	Jumlah Pendampingan Kegiatan RHL (Laporan)	bpn	5	130.950.000
3.04.43.02	Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH)	Jumlah Laporan Pendampingan, Pembentukan, Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani Hutan (Laporan)	bpn	4	126.825.000
3.04.43.09	Pemberdayaan KTH Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha (DBH DR)	Jumlah Peserta Pemberdayaan KTH Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha (Peserta)	bpn	5	162.000.000
		Jumlah Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (Unit Usaha)		4	
		Terbentuk dan Terbinanya Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (Unit Usaha)		4	
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat dan Perhutanan Sosial (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial (Jumlah Usulan)		2	194.075.000
3.04.44.01	Penyiapan Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, pendampingan dan Fasilitas (Laporan)	bpn	5	194.075.000
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun (%)		0,25	9.475.300.000
3.04.45.02	Pelatihan/Pembekalan/Inhouse training/Pyenyegaran/Bimbingan Teknis PKHL (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Pelatihan/ Pembekalan/ Inhouse Training/penyegaran/bimbingan teknis PKHL (Kegiatan)	bpn	5	200.700.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.04.45.09	Gerakan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Gerakan Pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Kegiatan)	bpn	3	172.062.500
3.04.45.15	Pengembangan Sarana Prasarana Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarpras Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Unit)	bpn	70	1.490.862.500
3.04.45.16	Pengembangan Sarana Prasarana Penanggulangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarpras Penanggulangan (Unit)	bpn	444	4.485.000.000
3.04.45.18	Penaksiran Luas (DBH SDA DR)	Jumlah luas penaksiran kebakaran (Hektar)	bpn	5	112.775.000
3.04.45.19	Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi (Laporan)	bpn	10	417.187.500
3.04.45.20	Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah kegiatan patroli kebakaran (Kegiatan)	bpn	40	1.000.000.000
3.04.45.21	Pemadaman Langsung (DBH SDA DR)	Jumlah Pemadaman Langsung (Laporan)	bpn	50	1.000.000.000
3.04.45.22	Pendampingan (pembentukan/pembinaan) masyarakat peduli api (DBH SDA DR)	Jumlah pendampingan (Laporan)	bpn	8	357.000.000
3.04.45.24	Penetapan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Penetapan Posko Darkarhutla (Kegiatan)	bpn	10	239.712.500
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani (kasus Tindak Pidana)		5	448.187.500
3.04.46.01	Sosialisasi	Jumlah Laporan Kegiatan Sosialisasi (Laporan)	bpn	4	129.875.000
3.04.46.04	Patroli Pengamanan	Jumlah laporan patroli (Laporan)	bpn	4	318.312.500
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi (Hektar)		50	636.750.000
3.04.47.01	Perencanaan	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman dan Luas Penanaman (Hektar)	bpn	50	107.000.000
3.04.47.02	Pelaksanaan	Luas Penanaman (Hektar)	bpn	50	439.000.000
3.04.47.03	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Monev RHL (Laporan)	bpn	10	90.750.000
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah SK pengada dan pengedar benih/bibit, Sertifikasi Sumber Benih (SK/Sertifikat)		1	791.775.000
		Jumlah Bibit (Bibit)		50000	
3.04.48.09	Pembuatan/pengadaan bibit (DBH DR)	jumlah Pembuatan/pengadaan bibit (bibit)	bpn	34800	791.775.000
3.04.53	Program Pengelolaan KPH Lindung	Luas Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung (Ha)		10000	3.378.487.500
3.04.53.11	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Luas Penataan Kawasan Hutan Lindung di Tingkat Tapak dan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan Secara Lestari (Ha)	bpn, smd, luarPrv	10000	172.175.000
3.04.53.12	Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	Luas Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung di Tingkat Tapak Secara Lestari (Ha)	bpn, smd, luarPrv	10000	172.175.000
3.04.53.13	Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) (DBA SDA DR)	Luas Kawasan Hutan yang di kelola (Hektar)	kbr, bpn, smd, luarPrv	15	3.034.137.500

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.04.01.02 1	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook				17.753.654.000
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM) (%)		85	699.894.000
3.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	kbr	12	699.894.000
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (Unit)		3	374.950.000
3.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	kbr	12	217.100.000
3.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Bulan)	kbr, smd, luarPrv	12	157.850.000
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		85	750.700.000
3.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah (Bulan)	mah, smd, luarPrv	12	442.500.000
3.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Pakaian dinas beserta perlengkapannya (Stell)	kbr, bpn, smd, luarPrv	21	308.200.000
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH (Unit Usaha)		5	1.660.500.000
3.04.43.01	Pendampingan Kegiatan RHL	Jumlah Pendampingan Kegiatan RHL (Laporan)	mah	6	213.000.000
3.04.43.02	Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH)	Jumlah Kelompok Tani yang diberikan Pendampingan, pembentukan dan peningkatan kelembagaan kelompok tani hutan (Kelompok Tani Hutan (KTH))	mah	5	213.000.000
3.04.43.04	Metode dan Materi Penyuluhan	Jumlah laporan metode dan materi penyuluhan (Laporan)	mah	10	912.400.000
3.04.43.07	Pembangunan unit percontohan penyuluhan kehutanan/demplot (DBH DR)	Jumlah Pembangunan unit percontohan penyuluhan kehutanan/demplot (Unit/Demplot)	mah	1	143.350.000
3.04.43.08	Pemenuhan kebutuhan sapsras penyuluhan kehutanan (DBH DR)	Jumlah Pemenuhan kebutuhan sapsras penyuluhan kehutanan (Unit/Demplot)	mah	4	178.750.000
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat dan Perhutanan Sosial (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial (Jumlah Usulan)		6	1.131.580.000
3.04.44.01	Penyiapan Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, pendampingan dan Fasilitas (Laporan)	mah, smd, luarPrv	20	665.780.000
3.04.44.02	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Sosial (Laporan)	mah, smd, luarPrv	10	465.800.000
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun (%)		0,25	5.547.115.000
3.04.45.01	Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kebakaran Hutan dan Lahan (Unit)	kbr, mah, smd, luarPrv	140	1.452.550.000
3.04.45.11	Pembentukan dan Pembinaan Brigade Pengendalian PKHL (DBH SDA DR)	Jumlah Dokumen Pembentukan & Pembinaan Brigade (Dokumen)	kbr, mah	3	290.015.000
3.04.45.18	Penaksiran Luas (DBH SDA DR)	Jumlah luas penaksiran kebakaran (Hektar)	mah	30	247.120.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.04.45.19	Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Laporan)	mah	10	469.700.000
3.04.45.20	Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah patroli pencegahan PKHL (Laporan)	mah	10	1.000.150.000
3.04.45.21	Pemadaman Langsung (DBH SDA DR)	Jumlah Pemadaman Langsung (Laporan)	mah	10	1.004.800.000
3.04.45.22	Pendampingan (pembentukan/pembinaan) masyarakat peduli api (DBH SDA DR)	Jumlah pendampingan (Laporan)	mah	10	797.750.000
3.04.45.24	Penetapan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Penetapan Posko Kebakaran Hutan dan Lahan (Kegiatan)	mah	10	285.030.000
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani (kasus Tindak Pidana)		10	1.238.200.000
3.04.46.01	Sosialisasi	Jumlah Laporan Kegiatan Sosialisasi (Laporan)	mah	10	340.600.000
3.04.46.02	Koordinasi	Jumlah Laporan Koordinasi (Laporan)	mah, smd, luarPrv	10	336.550.000
3.04.46.04	Patroli Pengamanan	Jumlah laporan patroli (Laporan)	mah, smd, luarPrv	20	561.050.000
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi (Hektar)		30	1.491.055.000
3.04.47.01	Perencanaan	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman (Hektar)	mah	30	170.715.000
3.04.47.02	Pelaksanaan	Luas Penanaman (Hektar)	mah	30	750.000.000
3.04.47.03	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Monev RHL (Laporan)	mah	6	570.340.000
3.04.53	Program Pengelolaan KPH Lindung	Luas Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung (Ha)		15	4.859.660.000
3.04.53.11	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Luas Penataan Kawasan Hutan Lindung di Tingkat Tapak dan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan Secara Lestari (Ha)	mah, bpn, smd, luarPrv	15	705.350.000
3.04.53.12	Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	Luas Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung di Tingkat Tapak Secara Lestari (Ha)	kbr, mah, bpn, smd, luarPrv	10	222.760.000
3.04.53.13	Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) (DBA SDA DR)	Luas kawasan hutan lindung yang dikelola (Hektar)	kbr, mah, bpn, smd, luarPrv	200	3.931.550.000
3.05	Energi dan Sumber Daya Mineral				86.059.706.565
3.05.01	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral				86.059.706.565
3.05.01.001	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral				86.059.706.565
3.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran (%)		0	3.640.066.515
		Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		90	
3.05.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	smd	12	3.640.066.515
3.05.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tercapainya disiplin aparatur (%)		0	1.924.807.800
		Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur (%)		0	
		Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		5	

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.05.08.01	Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor (Unit)	smd	5	1.495.588.800
3.05.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana (Bulan)	smd	12	429.219.000
		Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana (Unit)		100	
3.05.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah (%)		90	2.125.924.900
		Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		90	
3.05.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat konsultasi keluar daerah (Kali)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	28	1.675.925.000
		Jumlah kegiatan rapat/koordinasi/konsultasi ke dalam daerah (Kali)		12	
3.05.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek (Orang)	bpn, smd, luarPrv	35	449.999.900
3.05.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah (%)		0	1.460.497.800
		Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (Nilai AKIP)		69	
3.05.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	8	586.497.800
3.05.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan (Kali)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, smd, luarPrv	12	874.000.000
		Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan (Laporan)		12	
3.05.37	Program Pengembangan Ketenagalistrikan	Jumlah KK berlistrik (KK)		1018607	23.337.194.550
		Persentase Rasio Desa Berlistrik (RD) (%)		0	
3.05.37.01	Pembangunan Ketenagalistrikan	Penambahan Desa/Kelurahan berlistrik (Desa)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	2	20.741.504.550
3.05.37.06	Pembinaan Usaha Ketenagalistrikan	Jumlah perusahaan yang mendapat Rekomendasi teknis (Perusahaan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	50	900.000.000
3.05.37.07	Pengawasan Usaha Ketenagalistrikan	Jumlah perusahaan yang menerapkan Keselamatan ketenagalistrikan (Perusahaan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	50	1.695.690.000
3.05.45	Program Pengembangan Sumberdaya Geologi dan Tata Lingkungan	Persentase perusahaan yang mengikuti kaidah perhitungan sumberdaya dan cadangan (%)		74	2.574.862.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.05.45.01	Pemetaan dan perhitungan Sumberdaya Geologi	Jumlah Inventarisasi dan verifikasi Sumberdaya dan Cadangan Batubara, Mineral yang CnC (Perusahaan)	bru, kkr, ktm, ppu, bpn	515	1.124.862.000
3.05.45.02	Pembinaan dan Pengawasan Air Tanah	Jumlah rekomendasi teknis perizinan pemanfaatan air tanah (Rekomtek)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	100	450.000.000
		Jumlah sosialisasi (kali)		0	
		Jumlah sumur yang diawasi (Sumur)		100	
3.05.45.03	Pengawasan Mutu dan Muka Air Tanah	Jumlah peta konservasi air tanah CAT (Peta)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	0	1.000.000.000
		Data mutu/muka air tanah (Kab/Kota)		10	
		Sumur Pantau (Sumur)		2	
		Peta zona konservasi air tanah (CAT)		2	
3.05.46	Program Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik	Jumlah perusahaan yang memenuhi standar dalam pelaksanaan dokumen RKAB (Perusahaan)		50	3.292.850.000
3.05.46.01	Pembinaan dan Pengawasan Teknis Minerba	Ketaatan perusahaan dalam melaksanakan K3, pemantauan dan pengelolaan lingkungan dan Teknis Pertambangan (Perusahaan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, smd	0	1.396.250.000
		Jumlah perusahaan yang memenuhi standar K3 dan Lingkungan (Perusahaan)		70	
3.05.46.02	Pembinaan dan Pengawasan perusahaan minerba	Jumlah perusahaan CnC yang menerapkan efisiensi bahan bakar dan penggunaan biodiesel 20% (Perusahaan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, smd	40	698.250.000
3.05.46.03	Pembinaan dan Pengawasan Produksi Minerba	Jumlah perusahaan yang melaksanakan keteknikan yang baik (Perusahaan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, smd	0	1.198.350.000
		Jumlah perusahaan yang memenuhi kewajiban pembayaran Royalty (Perusahaan)		120	
3.05.47	Program Diversifikasi dan Konservasi Energi	% Pemanfaatan EBT (%)		6,08	47.703.503.000
3.05.47.01	Pengembangan dan pemanfaatan Bioenergi	Jumlah Rumah Tangga yang dibangun Instalasi biogas (Rumah)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	30	1.500.000.000
3.05.47.02	Pengembangan dan Pemanfaatan Aneka Energi	Desa yang dialiri listrik Energi Terbarukan (Desa)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	3	45.604.828.000
3.05.47.03	Konservasi Energi dan Air	Jumlah penyalur BBM bersubsidi (penyalur)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	50	598.675.000
		Jumlah penyalur LPG bersubsidi (penyalur)		50	
		Jumlah instansi yang melakukan upaya efisiensi listrik dan air (Instansi)		26	
3.06	Perdagangan				9.471.304.000
2.11.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				9.471.304.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
2.11.01.00 1	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				7.366.914.000
3.06.15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Barang Beredar SNI wajib Yang Diawasi. (%)		5	4.000.000.000
3.06.15.01	Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen	jumlah konsumen yang tereduksi (orang)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	1000	1.900.000.000
3.06.15.03	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Jumlah Barang dan Jasa yang sesuai Ketentuan (Barang/Jasa)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	22	1.215.000.000
3.06.15.08	Koordinasi penyelesaian permasalahan pengaduan konsumen	jumlah pengaduan Konsumen yang dapat diselesaikan (pengaduan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	30	885.000.000
3.06.34	Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan	Nilai ekspor produk non migas dan non batubara (milyar US\$dollar)		1,57	3.366.914.000
3.06.34.01	Perdagangan Dalam Negeri	Rata- rata Rentang Waktu Kecukupan Stok Barang dan Barang Penting (bulan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	5	1.136.130.000
3.06.34.02	Perdagangan Luar Negeri	Jumlah Eksportir yang mendapatkan fasilitasi (Eksportir)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	70	1.105.984.000
3.06.34.03	Kerjasama Perdagangan	jumlah UKM yang menjalin Kerjasama Perdagangan (UKM)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	12	1.124.800.000
2.11.01.00 2	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang				2.104.390.000
3.06.33	Program Penerapan Standarisasi Mutu Barang	Presentasi peningkatan jumlah customer yang dilayani (%)		10	2.104.390.000
3.06.33.01	Penerapan dan Pengamanan Standarisasi Jaminan Mutu Barang	Peningkatan Kapasitas laboratorium Pengujian, Kalibrasi dan lembaga Sertifikasi (Komoditi dan Ruang lingkup)	smd	20	1.355.190.000
3.06.33.02	Pelayanan Jasa teknis pengujian, Kalibrasi dan Sertifikasi	Peningkatan, Pelayanan jasa teknis pengujian, kalibrasi dan sertifikasi (Sertifikat)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	1968	749.200.000
3.07	Perindustrian				4.692.000.000
2.11.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				4.692.000.000
2.11.01.00 1	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				4.692.000.000
3.07.33	Program Peningkatan dan Pengembangan Industri	Pertumbuhan industri olahan (%)		1	4.692.000.000
3.07.33.03	Perencanaan Pembangunan Industri	Jumlah perusahaan industri di kawasan peruntukan industri/ kawasan industri (Perusahaan)	bru, ktm, ppu, bpn, btg, smd	2	1.150.000.000
3.07.33.04	Pengembangan dan Pembinaan Industri	jumlah industri yg difasilitasi pengembangan (unit)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	32	2.909.500.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
3.07.33.05	Pengembangan Informasi Industri	Jumlah Data dan Informasi yang tersedia (data)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	10500	632.500.000
3.08	Transmigrasi				2.192.125.000
2.01.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				2.192.125.000
2.01.01.001	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				2.192.125.000
3.08.15	Program pengembangan wilayah transmigrasi	Kawasan Transmigrasi (Kimtrans)		4	2.192.125.000
3.08.15.02	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	Kesepakatan Bersama dengan provinsi lain (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, smd	3	160.200.000
3.08.15.03	Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi	Jumlah Pemukiman Transmigrasi yang Disediakan Sarana dan Prasarana Sosial (Kimtrans)	kk, ktm, mah, psr, ppu	1	708.500.000
3.08.15.11	Sinkronisasi dan Integrasi Rencana Kawasan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur	Terciptanya Perencanaan dan Dokumen Usulan Program Transmigrasi se Kalimantan Timur (Orang)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu	3	799.925.000
3.08.15.12	Koordinasi Ketransmigrasian	Terciptanya Perencanaan dan Dokumen Usulan Program Transmigrasi se Kalimantan Timur (Orang)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu	100	323.500.000
3.08.15.14	Evaluasi Penyediaan Tanah Transmigrasi	Tersedianya Lahan Transmigrasi (Dokumen)	mah, psr, smd, luarPrv	3	200.000.000
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				562.836.195.528
4.01.03	Sekretariat Daerah				193.138.003.310
4.01.03.001	Biro Umum				110.026.300.000
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		80	24.721.900.560
4.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (Bulan)	smd		24.721.900.560
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		3	38.107.693.440
4.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor (Unit)	smd		12.885.800.000
4.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan Sarana dan Prasarana (Bulan)	smd		25.221.893.440
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		70	31.682.590.000
4.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Dalam dan Luar Daerah (Kegiatan)	smd		30.182.090.000
4.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti Sosialisasi (Orang)	smd		1.500.500.000
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (%)		74	181.175.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
4.01.12.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran (Dokumen)	smd		106.175.000
4.01.12.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja dan Anggaran (Dokumen)	smd		75.000.000
4.01.30	Program Pelayanan Tata Usaha Umum	jumlah bulan pelaksanaan administrasi tata usaha umum (bulan)			4.622.166.000
4.01.30.01	Pelayanan Administrasi Biro	jumlah PNS (orang)	smd		1.033.351.000
4.01.30.02	Pengelolaan Arsip dan Dokumen Setda	jumlah arsip/dokumen inaktif yang telah ditata dengan baik (dokumen)	smd		685.300.000
4.01.30.03	Pelayanan Tata Usaha Pimpinan	Jumlah surat pimpinan yang terdistribusi tepat waktu (Dokumen)	smd		603.050.000
4.01.30.04	Pengelolaan Administrasi Keuangan Setda	Jumlah Dokumen Rapergub dan Kepgub yang disusun (dokumen)	smd, luarPrv	2	1.807.165.000
		jumlah laporan rekonsiliasi belanja pegawai (dokumen)		12	
		jumlah laporan rekonsiliasi perjadi (dokumen)		12	
4.01.30.05	Pelayanan Verifikasi dan Pelaporan Keuangan Setda	jumlah laporan realisasi anggaran dan register SPM (dokumen)	smd, luarPrv	11	493.300.000
		jumlah ASN yang mengikuti di lingkup SETDA (orang)		45	
4.01.40	Program Pelayanan Sarana Prasarana Rumah Tangga Setda	jumlah sarana dan prasarana untuk pelayanan rumah tangga (buah)		220	10.710.775.000
4.01.40.01	Pengelolaan Barang Aset Setda	jumlah gedung yang terkelola dengan baik (buah)	smd		1.875.000.000
		Jumlah Gedung Aset Setda Yang Dikelola (Gedung)		8	
4.01.40.02	Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan	jumlah kegiatan pimpinan yang terlaksana dengan baik (acara)	smd		8.835.775.000
4.01.03.00 2	Biro Hubungan Masyarakat				16.254.192.920
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		95	2.560.934.280
4.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (Bulan)	smd	12	2.560.934.280
		Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)		19633251 20	
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		3	579.250.000
4.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor (Unit)	smd	12	518.750.000
4.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan Sarana dan Prasarana (Bulan)	smd	12	60.500.000
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		90	1.460.500.000
4.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Dalam dan Luar Daerah (Kegiatan)	smd	12	1.184.000.000
4.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kontribusi BIMTEK (Kegiatan)	smd	24	276.500.000
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (%)		75	72.600.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
4.01.12.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Dokumen perencanaan dan anggaran (Dokumen)	smd	2	12.100.000
4.01.12.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja dan Anggaran (Dokumen)	smd	4	60.500.000
4.01.37	Program Peningkatan dan Pembinaan Kerjasama	Persentase Kerja Sama Yang Ditindaklanjuti (Persen)		90	1.372.155.550
4.01.37.01	Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah	Laporan kerjasama dengan lembaga non perintah (Laporan)	smd	24	358.700.000
4.01.37.02	Peningkatan dan Pembinaan Administrasi Kerjasama	Jumlah Administrasi Kerjasama yang Terdokumentasi (Dokumen)	smd	24	435.622.730
4.01.37.03	Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah	Laporan kerjasama antar perintah (laporan)	smd	24	577.832.820
4.01.88	Program Peningkatan Komunikasi Kehumasan	Persentase Penurunan Berita Negatif (Persen)		5	8.451.407.680
4.01.88.02	Kerjasama media	Jumlah kerjasama media (Media Massa)	smd	24	531.560.000
4.01.88.03	Penyelenggaraan Peliputan dan Publikasi	Jumlah berita positif yang terpublikasi (Berita)	smd	1210	7.256.989.370
4.01.88.04	Penyediaan Data dan Informasi	Jumlah sistem penyedia data dan Informasi (2)	smd	27	662.858.310
4.01.90	Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan	Persentase pelayanan Keprotokolan sesuai dengan SOP Keprotokolan (%)		95	1.757.345.410
4.01.90.03	Pelayanan Tamu dan Pimpinan Keprotokolan	Jumlah Tamu Pemda (Instansi)	smd	109	690.940.000
4.01.90.04	Penatacaraan kegiatan Pemda	Jumlah Kepenatacaraan kegiatan pemda yang terjadwalkan (Kegiatan)	smd	121	1.066.405.410
4.01.03.003	Biro Hukum				12.705.875.000
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		83	4.129.100.000
4.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (Bulan)	smd	12	4.129.100.000
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		3	192.500.000
4.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Kendaraan, alat kantor (Unit)	smd		145.100.000
		Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor (Unit)			
4.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor (Unit)	smd		47.400.000
		Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan Sarana dan Prasarana (Bulan)			
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		70	577.500.000
4.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Dalam dan Luar Daerah (Kegiatan)	smd		552.500.000
4.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur (Jumlah)	smd		25.000.000
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (%)		75	12.650.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
4.01.12.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Dokumen perencanaan dan anggaran (Dokumen)	smd		7.000.000
4.01.12.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja dan Anggaran (Dokumen)	smd		5.650.000
4.01.26	Program Peningkatan Pembentukan Peraturan Daerah	Peraturan Daerah yang mendorong peningkatan perekonomian daerah (Perda) (perda)		10	1.163.750.000
4.01.26.01	Peningkatan Penyusunan dan Penetapan Rancangan Perda Provinsi	Terwujudnya Penyusunan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Perda)	smd	10	1.163.750.000
4.01.28	Program Peningkatan Produk Hukum Daerah Provinsi	Peraturan Gubernur yang Diterapkan (Pergub) (pergub)		9	1.567.750.000
4.01.28.01	Peningkatan Penyusunan dan Penetapan Rancangan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur	Terwujudnya Peningkatan Penyusunan dan Penetapan Rancangan Produk Hukum Daerah (Produk Hukum)	smd	650	1.392.750.000
4.01.28.02	Evaluasi Peraturan Gubernur yang ditetapkan	Jumlah Peraturan Gubernur yang di Evaluasi (Pergub)	smd	5	175.000.000
4.01.29	Program Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Persentase masyarakat yang memperoleh akses informasi hukum (%) (%)		70	561.375.000
4.01.29.01	Peningkatan Jaringan Informasi Hukum dan Publikasi Produk Hukum Daerah	Terlaksananya Penyebar Luasan Publikasi Informasi Hukum (Jumlah)	smd	660	561.375.000
4.01.32	Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum Kabupaten/Kota yang ditetapkan (peraturan)		260	1.785.000.000
4.01.32.01	Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota	Jumlah Fasilitas, Evaluasi dan Pengkajian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota (Jumlah)	smd	250	1.785.000.000
4.01.33	Program Pelayanan Bantuan Hukum	Persentase kasus hukum yang diselesaikan (%)		90	1.821.750.000
4.01.33.01	Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum	Advice dan pertimbangan hukum Penyelesaian Sengketa yang diberikan kepada OPD/Masyarakat dengan cepat dan sesuai aturan yang berlaku (%)	smd		1.287.750.000
4.01.33.02	Peningkatan Penyelesaian Sengketa	Terpenuhinya Kepuasan masyarakat terhadap Kepastian Hukum, penyelesaian Perkara dengan cepat (%)	smd	76	534.000.000
4.01.36	Program Peningkatan Penyuluhan Hukum dan HAM	Persentase lembaga di Kabupaten/Kota Peduli HAM (%)		90	783.500.000
4.01.36.01	Peningkatan Penyuluhan Hukum dan HAM	Pembinaan Kab/Kota Peduli HAM dan Sadar akan Hukum dan HAM (%)	smd	84	783.500.000
4.01.45	Program Identifikasi dan Evaluasi Produk Hukum	Peraturan Daerah yang diterapkan (Perda) (perda)		20	111.000.000
4.01.45.01	Pengkajian dan Evaluasi Produk Hukum Daerah yang telah ditetapkan	Terwujudnya Identifikasi dan Evaluasi Peraturan Daerah yang telah ditetapkan (Perda)	smd	10	111.000.000
4.01.03.004	Biro Organisasi				9.521.792.000
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		95	733.917.000
4.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Laporan Administrasi Perkantoran (Laporan)	smd	23	733.917.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		3	370.500.000
4.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor (Unit)	smd	3	329.500.000
4.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan / Kelengkapan Kantor yang dipelihara (Unit)	smd	3	41.000.000
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		90	1.885.000.000
4.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi yang telah dilakukan (Laporan)	smd, luarPrv	1	1.735.000.000
4.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang telah mengikuti bimbingan teknis/diklat (Orang)	smd, luarPrv	8	150.000.000
4.01.42	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase PD yang telah melakukan Survey Kepuasan Masyarakat (%)		71	1.182.000.000
4.01.42.02	Pembinaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Jumlah SPM (SPM)	smd, luarPrv		-
		Dokumen Monev SPM (Dokumen)		1	
4.01.42.03	Penerapan Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Survey (Laporan)	smd, luarPrv	1	460.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Survey yang direviu (Laporan)		1	
4.01.42.04	Peningkatan Tata Laksana Pelayanan Publik	Jumlah Nominasi (Nominasi)	smd, luarPrv	3	722.000.000
4.01.51	Program Peningkatan Manajemen Kepegawaian Setda	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan sesuai aturan (%)		100	200.000.000
4.01.51.01	Penataan Administrasi Kepegawaian Setda	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Setda (Dokumen)	smd, luarPrv	1	200.000.000
4.01.53	Program Peningkatan Reformasi Birokrasi	Nilai Reformasi Birokrasi (Skor)		71,5	1.408.875.000
4.01.53.01	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Laporan)	smd, luarPrv	1	1.208.875.000
		Dokumen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Dokumen)		1	
4.01.53.02	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah PD yang difasilitasi pembentukan kelompok Budaya Kerja (PD)	smd, luarPrv	38	200.000.000
		Laporan hasil evaluasi dan penilaian penerapan budaya kerja (Laporan)		1	
		Dokumen Hasil Evaluasi dan Penilaian Penerapan Budaya Kerja (Dokumen)		1	
4.01.60	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang memperoleh predikat minimal B (BAIK) (%)		77	1.470.000.000
4.01.60.01	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Laporan Kinerja Pemerintah Prov. Kaltim (Laporan)	smd, luarPrv	1	1.470.000.000
		Laporan Kinerja Setda Prov. Kaltim (Laporan)		0	
		Laporan Fasilitasi Evaluasi AKIP (Laporan)		1	

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
		Pergub Penyusunan Indikator Kinerja Utama (Pergub)		0	
		Pergub Penyusunan Petunjuk Teknis PK dan LKJIP (Pergub)		0	
		Laporan Capaian Kinerja berdasarkan PK (Laporan)		1	
		Jumlah PD yang terfasilitasi pelaksanaan SAKIP (PD)		38	
4.01.60.04	Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Laporan Kinerja Pemerintah Prov. Kaltim (Laporan)	smd, luarPrv	1	-
		Laporan Fasilitasi Evaluasi AKIP (Laporan)		0	
		Pergub Penyusunan Indikator Kinerja Utama (Pergub)		0	
		Pergub Penyusunan Petunjuk Teknis PK dan LKJIP (Pergub)		0	
		Laporan Capaian Kinerja berdasarkan PK (Laporan)		0	
4.01.80	Program Penguatan Kelembagaan	Prosentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai dengan NSPK (%)		92	1.671.500.000
4.01.80.05	Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi	Perangkat Daerah yang dilakukan evaluasi kelembagaan (PD)	smd, luarPrv	0	676.500.000
		Perangkat Daerah yang dilakukan asistensi kelembagaan (PD)			
		Perangkat Daerah yang dilakukan asistensi/evaluasi kelembagaan (PD)		38	
4.01.80.07	Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota	Kab/Kota yang dilakukan Fasilitasi kelembagaannya (Kab/Kota)	smd, luarPrv		550.000.000
		Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi penguatan kelembagaan (Kab/Kota)		10	
4.01.80.08	Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Laporan Analisis Jabatan (Laporan)	smd, luarPrv	0	445.000.000
		Laporan Analisis Beban Kerja (Laporan)		0	
		Dokumen Analisis Jabatan yang disusun (Dokumen)		1	
		Dokumen Analisis Beban Kerja yang disusun (Dokumen)		1	
4.01.81	Program Penataan Tata Laksana Pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah yg telah Menyusun SOP Sesuai Ketentuan / Aturan (%)		78,95	600.000.000
4.01.81.02	Peningkatan Tata Laksana Pemerintahan	Laporan SOP (Laporan)	smd, luarPrv		600.000.000
		Laporan Evaluasi (Laporan)			
		Jumlah SOP Perangkat Daerah yang diverifikasi (SOP)		2400	
4.01.03.005	Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah				7.378.325.070
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		85	990.730.320
4.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	smd	12	990.730.320
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		3	262.650.000
4.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Kendaraan, alat kantor (Unit)	smd	0	227.650.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
4.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Kendaraan, alat kantor (Unit)	smd		35.000.000
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		60	698.112.500
4.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Belanja makanan dan minuman, Publikasi, Perjalanan Dinas dalam dan luar daerah, Bimtek (Bulan)	smd		640.112.500
4.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kontribusi BIMTEK (Kegiatan)	smd		58.000.000
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (%)		77	99.450.000
4.01.12.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Dokumen perencanaan dan anggaran (Dokumen)	smd		98.400.000
4.01.12.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Dokumen pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan (Dokumen)	smd		1.050.000
4.01.16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Persentase Pelayanan KDH Sesuai SOP (%)		100	506.047.500
4.01.16.16	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kedinasan Pej. Negara, PAW Anggota DPRD Prov. Dan Kab/Kota	Laporan kedinasan pejabat negara (Dokumen)	smd		506.047.500
4.01.27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase Tapal Batas Wilayah Kabupaten/Kota Yang Ditetapkan (%)		100	1.166.999.250
4.01.27.04	Perencanaan Penataan Administrasi Pemerintahan Daerah	Terlaksananya proses pembentukan daerah persiapan (Dokumen)	kk, ktm, smd		353.718.750
4.01.27.10	Pembakuan nama rupabumi	Terlaksananya Pembakuan nama Rupabumi di wilayah Kaltim (Dokumen)	smd	1	407.346.500
4.01.27.11	Percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah	Jumlah penegasan Batas Daerah Provinsi dan kabupaten/Kota Se Kalimantan timur secara jelas dan pasti (Dokumen)	smd		405.934.000
4.01.31	Program Penyempurnaan Perangkat Daerah dan Pengembangan Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	Persentase Aspirasi Masyarakat Yang Ditindaklanjuti (%)		100	1.304.958.500
4.01.31.04	Penataan Masalah Pertanahan	Terwujudnya pelaksanaan Kebijakan Pertanahan, laporan Koordinasi Pertanahan (Dokumen)	smd		469.833.500
4.01.31.05	Pembinaan Kamtibmas	Terlaksananya keamanan dan ketertiban di Provinsi Kalimantan Timur (Dokumen)	smd		835.125.000
4.01.34	Program Pembinaan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase Kabupaten/Kota Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan (%)		100	1.752.577.000
4.01.34.10	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Laporan Koordinasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Dokumen)	smd		1.752.577.000
4.01.35	Program Penataan dan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Daerah	Persentase Perangkat Daerah Provinsi Yang Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Sesuai Ketentuan (%)		100	596.800.000
		Persentase Kabupaten/Kota Yang Memiliki Predikat LPPD "ST" (%)		70	

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
4.01.35.10	Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Informasi laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (Dokumen/Laporan)	smd		596.800.000
4.01.03.006	Biro Kesejahteraan Rakyat				9.839.200.000
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		80	871.050.000
4.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (Bulan)	smd, luarPrv	12	871.050.000
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		3	191.155.000
4.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor (Unit)	smd	20	90.155.000
4.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan Sarana dan Prasarana (Bulan)	smd	12	101.000.000
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		50	759.000.000
4.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv		689.000.000
		Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (Dokumen)			
		Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman (Bulan)			
4.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Aparatur (Orang)	smd, luarPrv		70.000.000
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (%)		75	90.620.000
4.01.12.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran (Dokumen)	smd	6	44.570.000
4.01.12.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan (Dokumen)	smd	14	46.050.000
4.01.17	Program Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Keagamaan dan Kesehatan	Presentase Hasil Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian Bidang Keagamaan dan Kesehatan yang ditindaklanjuti (Persen)		85	2.195.100.000
4.01.17.01	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Keagamaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian bidang keagamaan (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	14	1.557.100.000
4.01.17.02	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian bidang Kesehatan (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	14	638.000.000
4.01.18	Program Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Persentase Hasil Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (Persen)		85	1.478.100.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
4.01.18.01	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	14	880.000.000
4.01.18.02	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian bidang Kepemudaan dan Olahraga (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	14	324.000.000
4.01.18.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Perpustakaan dan Kearsipan	Dokumen Hasil Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian bidang Perpustakaan dan Kearsipan (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	14	274.100.000
4.01.19	Program Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Persentase Hasil Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian bidang Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Persen)		85	1.657.000.000
4.01.19.01	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian bidang kesejahteraan sosial (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	14	400.000.000
4.01.19.02	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian bidang tenaga kerja dan transmigrasi (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	14	341.500.000
4.01.19.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian bidang Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	14	915.500.000
4.01.79	Program Peningkatan Pelayanan dan Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase hibah bansos yang tepat sasaran (%)		100	2.597.175.000
4.01.79.01	Pelayanan Administrasi Hibah dan Bantuan Sosial	Jumlah Dokumen Hibah dan Bantuan Sosial yang tersusun (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	4	2.261.450.000
4.01.79.02	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen hasil Rapat Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat (Dokumen)	smd	1	202.725.000
4.01.79.03	Penyusunan Perumusan Kebijakan Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Hasil Rumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Dokumen)	smd	3	133.000.000
4.01.03.007	Biro Perekonomian				4.500.000.000
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		85	619.900.000
4.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (Bulan)	smd	12	619.900.000
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		3	103.850.000
4.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor (Unit)	smd	12	71.400.000
4.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan / Kelengkapan Kantor yang dipelihara (Unit)	smd	1	32.450.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		60	1.070.050.000
4.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (kegiatan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	50	1.070.050.000
		jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (kegiatan)		50	
		jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman (untuk rapat dan tamu) (bulan)		12	
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (%)		75	8.000.000
4.01.12.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Dokumen pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	4	8.000.000
4.01.48	Program Kebijakan Pengembangan Produksi Daerah	Persentase kebijakan pengembangan bidang produksi daerah yang ditindaklanjuti/terlaksana (%)		100	767.750.000
4.01.48.01	Koordinasi Kebijakan Ekonomi Pertanian	Jumlah koordinasi pengembangan potensi ekonomi pertanian dalam arti luas (kali)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	3	284.750.000
4.01.48.02	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kelautan dan Perikanan	Jumlah koordinasi pengembangan potensi ekonomi kelautan dan perikanan (kali)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	1	111.000.000
4.01.48.03	Koordinasi Peningkatan Ekonomi Kehutanan dan Perkebunan	jumlah koordinasi pengembangan potensi kehutanan dan perkebunan (kali)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	1	234.000.000
4.01.48.04	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Hidup Berkelanjutan	Jumlah koordinasi kebijakan peningkatan daya dukung lingkungan hidup (kali)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	1	138.000.000
4.01.49	Program Kebijakan Peningkatan Investasi Daerah, Tata Kelola dan Kinerja BUMD	Persentase kebijakan peningkatan investasi daerah dan kinerja BUMD yang ditindaklanjuti/terlaksana (%)		100	1.014.500.000
4.01.49.01	Koordinasi Kebijakan Penanaman Modal, Perijinan dan Non Perijinan Daerah	Dokumen Kebijakan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Daerah (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	1	376.000.000
4.01.49.03	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Tata Kelola dan Kinerja BUMD	Jumlah koordinasi perusda dan lembaga keuangan (kali)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	7	411.000.000
4.01.49.04	Koordinasi Promosi Sarana dan Prasarana Perekonomian Daerah	Bahan Promosi Sarana dan Prasarana Perekonomian Daerah (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	1	227.500.000
4.01.50	Program Peningkatan Sinergitas Bidang Industri dan Jasa	Persentase Kebijakan Bidang Industri dan Jasa yang Ditindaklanjuti/Terlaksana (Persen)		100	915.950.000
4.01.50.01	Peningkatan Sinergi Kebijakan Perekonomian Daerah	Hasil Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (Laporan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr,	3	522.950.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
			ppu, bpn, btg, smd, luarPrv		
4.01.50.02	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Pariwisata dan Perhotelan	Koordinasi bidang pariwisata dan perhotelan (kali)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	2	198.000.000
4.01.50.03	Peningkatan Koordinasi dan Sinergi Bidang Koperasi dan UKM	jumlah koordinasi dan pembinaan koperasi (kali)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	2	195.000.000
4.01.03.008	Biro Administrasi Pembangunan				18.412.318.320
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		90	1.552.928.320
4.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (Bulan)	smd	12	1.552.928.320
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		3	2.084.700.000
4.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor (Unit)	smd	15	1.891.100.000
4.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Kendaraan, alat kantor (Unit)	smd	18	193.600.000
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		85	1.918.600.000
4.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Belanja makanan dan minuman, Publikasi, Perjalanan Dinas dalam dan luar daerah, Bimtek (Bulan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	12	1.529.600.000
4.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kontribusi BIMTEK (Kegiatan)	luarPrv	20	389.000.000
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (%)		75	6.400.000
4.01.12.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Dokumen perencanaan dan anggaran (Dokumen)	bpn, smd, luarPrv	9	4.000.000
4.01.12.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Dokumen pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	6	2.400.000
4.01.25	Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Persentase Layanan Pengadaan Barang/Jasa Yang Tepat Waktu (Persen)		100	5.317.100.000
4.01.25.01	Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah pengadaan langsung yang dilayani (Pengadaan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	700	1.015.600.000
		Jumlah pengadaan yang dilayani (Pengadaan)		431	
4.01.25.02	Evaluasi dan Pembinaan SDM Pengadaan	Jumlah SDM Pokja yang mengikuti pembinaan/peningkatan kapasitas aparatur (Orang)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	5	2.179.800.000
4.01.25.03	Pengembangan dan Layanan Sistem Informasi Pengadaan	Jumlah pengadaan elektronik yang dilayani (paket)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	431	2.121.700.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
4.01.46	Program Koordinasi dan Pembinaan Monitoring serta Evaluasi Pembangunan	Persentase permasalahan program/kegiatan yang ditindaklanjuti (%)		80	2.386.000.000
4.01.46.01	Monitoring dan Evaluasi APBD	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	12	739.600.000
4.01.46.02	Monitoring dan Evaluasi Sektoral	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Sektoral (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	3	754.500.000
4.01.46.03	Administrasi dan Evaluasi Pembangunan	jumlah dokumen evaluasi pelaporan pembangunan (dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	3	891.900.000
4.01.47	Program Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan serta Pengendalian Program	Persentase rencana kerja anggaran sesuai ketentuan (%)		100	5.146.590.000
4.01.47.01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Administrasi Pembangunan	Dokumen Rakor Administrasi Pembangunan (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	1	738.600.000
4.01.47.02	Perencanaan dan Pengendalian Program	Rencana Kerja Anggaran yang diasistensi dalam 1 tahun (RKA)	bru, bpn, smd, luarPrv	46	3.367.690.000
		Dokumen Pelaksanaan Anggaran pergeseran yang difasilitasi (Dokumen)		1	
		Jumlah Dokumen Petunjuk Teknis Rencana Kerja Anggaran Provinsi Kalimantan Timur Yang Disusun (Dokumen)		1	
4.01.47.03	Pengembangan Kebijakan Program Pembangunan	Dokumen Laporan Setda (Dokumen)	bpn, smd, luarPrv	2	1.040.300.000
4.01.03.009	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya				4.500.000.000
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		85	472.100.000
4.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (Bulan)	smd	12	472.100.000
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		3	287.000.000
4.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor (Unit)	smd	1	237.000.000
4.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan Sarana dan Prasarana (Bulan)	smd	12	50.000.000
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		70	1.420.900.000
4.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Dalam dan Luar Daerah (Kegiatan)	bru, kbr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	15	1.420.900.000
4.01.67	Program Koordinasi Infrastruktur Fisik dan Bangunan	Persentasi Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Perhubungan yang ditindaklanjuti/terlaksana (%)		85	860.000.000
4.01.67.01	Koordinasi Pengembangan Bidang Perhubungan	Dokumen hasil Koordinasi Kebijakan Bidang Perhubungan (Dokumen)	bru, kbr, ktm, mah, psr, ppu,	1	260.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
			bpn, btg, smd, luarPrv		
4.01.67.02	Koordinasi Pengembangan Bidang Pekerjaan Umum	Dokumen hasil Koordinasi Kebijakan Bidang Pekerjaan umum (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	1	340.000.000
4.01.67.03	Koordinasi Pengembangan Bidang Perumahan dan Permukiman	Dokumen hasil Koordinasi Kebijakan Bidang Perumahan dan Permukiman (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	1	260.000.000
4.01.68	Program Koordinasi Perencanaan Daerah dan Pengembangan Kawasan	Persentase Kebijakan Bidang Perencanaan Daerah dan Pengembangan Kawasan yang ditindaklanjuti/ terlaksana (%)		85	860.000.000
4.01.68.02	Koordinasi Kebijakan Kawasan Industri	Dokumen hasil Koordinasi Kebijakan Kawasan Industri (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	1	300.000.000
4.01.68.03	Koordinasi Pengembangan Kawasan	Dokumen hasil Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Kawasan (Dokumen)	bru, kbr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	1	300.000.000
4.01.68.04	Koordinasi Kebijakan Perencanaan Daerah	Dokumen hasil Koordinasi Kebijakan Perencanaan Daerah (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	1	260.000.000
4.01.69	Program Koordinasi Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase kebijakan pengembangan energi dan sumber daya mineral yang ditindaklanjuti/terlaksana (%)		85	600.000.000
4.01.69.01	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Energi	Data Infrastruktur Energi Kalimantan Timur (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	1	300.000.000
		Dokumen hasil koordinasi kebijakan pengembangan energi (Dokumen)		1	
4.01.69.02	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Mineral	Data Pengembangan Sumber Daya Mineral (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	1	300.000.000
		Dokumen hasil koordinasi kebijakan Pengembangan Sumber Daya Mineral (Dokumen)		1	
4.01.04	Sekretariat DPRD				96.025.000.000
4.01.04.001	Sekretariat DPRD Provinsi				96.025.000.000
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		77	24.101.953.160
4.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	smd	12	24.101.953.160
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		1	12.315.997.238
4.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan yang tersedia (Unit)	smd	334	226.000.000
4.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana (Bulan)	smd	12	9.346.497.238

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
4.01.08.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD	Jumlah bulan penyediaan kebutuhan rumah tangga pimpinan DPRD (bulan)	smd	12	2.743.500.000
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		75	12.229.000.000
4.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan terlaksananya koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah (bulan)	smd, luarPrv	12	8.033.500.000
4.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS dan Anggota DPRD yang mengikuti pelatihan (orang)	smd	100	4.195.500.000
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (%)		75	2.725.550.000
4.01.12.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran (Dokumen)	smd	9	639.000.000
4.01.12.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan (dokumen)	smd, luarPrv	21	819.550.000
4.01.12.03	Penyusunan dan verifikasi laporan pelaksanaan anggaran	jumlah verifikasi laporan (laporan)	smd	12	1.267.000.000
4.01.15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persentase pelayanan terhadap kegiatan Anggota DPRD yang sesuai SOP (%)		78	44.652.499.602
4.01.15.02	Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Penyusunan dan Pembahasan Raperda yang telah dikoordinasi (kegiatan)	bpn, smd	10	778.600.000
4.01.15.05	Kegiatan Reses	Jumlah Reses Anggota DPRD (kali)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	3	10.780.000.000
4.01.15.09	Pengkajian Kasus-Kasus Hukum Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah kasus Hukum yang dikaji (Kasus)	bru, kbr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	4	499.500.000
4.01.15.10	Kemitraan Advokasi Hukum Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah kasus Hukum yang diadvokasi (kasus)	smd	1	335.000.000
4.01.15.15	Pelayanan Acara-acara Persidangan dan Kehumasan Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim	Jumlah acara-acara persidangan dan Kehumasan Sekretariat DPRD yang terselenggara dengan baik (Kali)	smd, luarPrv	850	4.180.999.602
4.01.15.16	Rapat - rapat Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah rapat Alat Kelengkapan Dewan (Kali)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	224	28.078.400.000
4.01.05	Badan Penghubung Provinsi				14.467.860.000
4.01.05.001	Badan Penghubung Provinsi				14.467.860.000
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		80	4.931.750.000
4.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	smd	12	4.931.750.000
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		3	5.439.760.000
4.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor (Jenis)	smd	48	3.262.160.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
4.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana (Bulan)	smd	12	2.177.600.000
		Luas bangunan yang direhab (M2)		0	
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		55	1.714.400.000
4.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Kegiatan)	smd	100	1.179.150.000
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman (Bulan)		12	
4.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti diklat/bimtek (Orang)	smd	25	535.250.000
		Jumlah pakaian dinas (Stel)		234	
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (%)		75	163.687.500
4.01.12.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran (Dokumen)	smd	10	95.287.500
4.01.12.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan (Laporan)	smd	4	68.400.000
4.01.38	Program informasi pembangunan, potensi dan peluang investasi	Jumlah kunjungan wisatawan pada Anjungan Kaltim di TMII (Orang)		25000	1.238.812.500
4.01.38.01	Promosi di Anjungan Kaltim dan TMII	Jumlah kegiatan promosi di Anjungan Kaltim dan TMII dalam setahun (Kegiatan)	smd		614.825.000
4.01.38.02	Promosi dalam daerah DKI Jakarta	Jumlah kegiatan promosi dalam daerah DKI Jakarta dalam setahun (Kegiatan)	smd	11	79.650.000
4.01.38.04	Propaganda penerangan	Jumlah laporan kegiatan propaganda penerangan (Laporan)	smd	1	544.337.500
4.01.39	Program Peningkatan Manajemen Kerja	Tingkat kepuasan pelayanan Badan Penghubung (%)		90	979.450.000
4.01.39.01	Keprotokolan dan fasilitasi pejabat daerah/ pusat	Jumlah kunjungan pejabat daerah/pusat yang difasilitasi (Kunjungan)	smd		389.100.000
4.01.39.02	Pelayanan mess	Jumlah laporan kegiatan pelayanan mess (Laporan)	smd	1	293.900.000
4.01.39.04	Pengelolaan administrasi keuangan	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang selesai tepat waktu (Dokumen)	smd		296.450.000
4.01	Sekretariat Daerah				305.865.863.310
4.05.02	Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur				2.235.000.000
4.05.02.001	Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur				2.235.000.000
4.01.41	Program Kegiatan KORPRI	Prosentase Kesejahteraan ASN / Anggota KORPRI dan Keluarganya (%)		15	2.235.000.000
4.01.41.06	Pembinaan olah raga, seni dan budaya	Terlaksananya kegiatan Olahraga Seni dan Budaya anggota KORPRI (Kegiatan)	smd		450.000.000
4.01.41.07	Pembinaan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya pembinaan dan sosialisasi peraturan perundang-	smd	4	350.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
	bagi anggota KORPRI dan keluarganya	undangan bagi anggota KORPRI (Paket)			
4.01.41.12	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Perumahan PNS	Tersedianya jaminan kesehatan (Tahun)	smd	12	135.000.000
4.01.41.13	Pelaksanaan Musyawarah Rakerja, Rakerja dan Rakor DP KORPRI	Terlaksananya Musyawarah Rakerja, Rakor DP KORPRI (4 Kegiatan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	3	400.000.000
4.01.41.14	Pelaksanaan BP BAPOR KORPRI	Terlaksananya BP BAPOR KORPRI se Kaltim (Kegiatan)	smd, luarPrv	7	500.000.000
4.01.41.15	Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan bagi ASN/Anggota KORPRI dan keluarganya	Terlaksananya Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan bagi ASN / Anggota KORPRI dan keluarganya (Kegiatan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	5	400.000.000
4.02	Pengawasan				24.486.917.560
4.02.01	Inspektorat				24.486.917.560
4.02.01.001	Inspektorat				24.486.917.560
4.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		90	1.850.532.560
4.02.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah administrasi perkantoran yang dilaksanakan (Tahun)	bpn, smd, luarPrv	1	1.850.532.560
		Jumlah kegiatan administrasi perkantoran yang dilaksanakan (bulan)		12	
4.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		3	1.276.805.000
4.02.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah sarana dan prasarana aparatur (unit)	smd	5	896.805.000
4.02.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah sarana dan prasarana aparatur (unit)	smd	10	380.000.000
		Jumlah peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana yang terpelihara (unit)		10	
4.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		90	3.178.850.000
4.02.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kapasitas kelembagaan pemda yang dilaksanakan (kegiatan)	bpn, smd, luarPrv	60	1.173.800.000
		Jumlah koordinasi dan konsultasi kelembagaan Pemda yang dilaksanakan (Kegiatan)		60	
4.02.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah kapasitas Sumber Daya Aparatur (orang)	bpn, smd, luarPrv	102	2.005.050.000
4.02.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (Skor)		80	679.500.000
4.02.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan (dokumen)	bpn, smd, luarPrv	9	679.500.000
4.02.97	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki akuntabilitas kinerja baik (PD)		32	612.700.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
4.02.97.01	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi	Jumlah akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan (perangkat daerah)	bpn, smd, luarPrv	38	612.700.000
		Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Laporan)		38	
4.02.98	Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan keuangan Perangkat Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (PD)		17	517.150.000
4.02.98.02	Reviu atas laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan pemprov dan perangkat daerah yang sesuai standar akuntansi pemerintah (laporan)	smd, luarPrv	14	517.150.000
		Jumlah Reviu atas laporan Keuangan yang diterbitkan (Laporan)		14	
4.02.99	Program pencegahan KKN	Hasil Penilaian Integritas (Nilai)		75	3.545.800.000
4.02.99.04	Pemeriksaan Khusus/Investigatif	Jumlah laporan hasil pemeriksaan khusus/investigasi yang diterbitkan (Laporan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	20	658.800.000
4.02.99.05	Pembangunan Zona Integritas	Jumlah perangkat daerah yang ditetapkan sebagai pilot project pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM (perangkat daerah)	bpn, smd, luarPrv	1	188.500.000
4.02.99.06	Aksi Pencegahan Korupsi	Jumlah kegiatan pencegahan korupsi yang dilaksanakan (kegiatan)	smd, luarPrv	4	128.400.000
4.02.99.07	Pengendalian Gratifikasi	Jumlah laporan gratifikasi yang ditangani (Laporan)	bpn, smd, luarPrv	30	171.200.000
4.02.99.08	Pengendalian Whistle Blower System (WBS) dan Benturan Kepentingan	Jumlah Laporan WBS dan Benturan Kepentingan yang ditangani (Laporan)	bpn, smd, luarPrv	5	144.700.000
4.02.99.09	Monev LHKPN dan LHKASN	Persentase kepatuhan LHKPN dan LHKASN (Persentase)	bpn, smd, luarPrv	75	240.300.000
4.02.99.10	Koordinasi Tim Pengawasan dan Pengamanan Pemerintah (TP4D), APIP dan APH	Jumlah kegiatan koordinasi TP4D, APIP dan APH yang dilaksanakan (Kegiatan)	bpn, smd, luarPrv	4	363.000.000
4.02.99.11	Operasional SABERPUNGLI	Jumlah kegiatan operasional Saberpungli yang dilaksanakan (Kegiatan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	4	1.059.000.000
4.02.99.12	Survey Penilaian Integritas	Jumlah kegiatan survey penilaian integritas yang dilaksanakan (Kegiatan)	bpn, smd, luarPrv	1	290.500.000
4.02.99.13	Pembangunan Budaya Integritas	Jumlah kegiatan budaya integritas yang dilaksanakan (kegiatan)	bpn, smd, luarPrv	2	301.400.000
4.02.00	Program Peningkatan Kapabilitas APIP	Meningkatkan profesional tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan (orang) (Orang)		55	3.009.050.000
4.02.00.01	Pelatihan di Kantor Sendiri	Jumlah kegiatan Pelatihan di Kantor Sendiri (Kegiatan)	bpn, smd	12	173.400.000
4.02.00.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengawasan	Jumlah kegiatan peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengawasan yang dilaksanakan (Kegiatan)	bpn, smd, luarPrv	6	2.073.250.000
4.02.00.03	Peningkatan Level Kapabilitas APIP	Jumlah kegiatan peningkatan kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP (Kegiatan)	bpn, smd, luarPrv	2	762.400.000
4.02.01	Program Peningkatan Sistem Pengendalian Internal	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemda Kab/Kota (Kegiatan)		10	7.700.480.000
4.02.01.01	Pemeriksaan Operasional OPD	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang diterbitkan (laporan)	bpn, smd, luarPrv	30	1.423.700.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
4.02.01.02	Pemeriksaan Kinerja OPD	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang diterbitkan (laporan)	bpn, smd	8	402.900.000
4.02.01.03	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang diterbitkan (laporan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	3	984.600.000
		Jumlah laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang diterbitkan. (Laporan)		3	
4.02.01.04	Reviu, Monitoring dan Evaluasi Pengawasan	Jumlah laporan hasil reviu, monitoring dan evaluasi pengawasan yang diterbitkan (Laporan)	bpn, smd, luarPrv	8	3.835.480.000
4.02.01.05	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pengawasan yang dilaksanakan (kegiatan)	bpn, smd, luarPrv	4	470.300.000
4.02.01.06	Pemberian Advis dan Konsultasi	Jumlah advis dan konsultasi yang dilaksanakan. (Laporan)	bpn, smd, luarPrv	20	288.000.000
4.02.01.07	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Jumlah kegiatan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan (Kegiatan)	bpn, smd	2	295.500.000
4.02.02	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kab/Kota	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemda Kab/Kota (Kegiatan)		10	2.116.050.000
4.02.02.01	Evaluasi EKPPD Kab/kota	Jumlah laporan hasil evaluasi EKPPD Pemda Kab/Kota yang dilaksanakan (Laporan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	10	1.079.750.000
4.02.02.02	Evaluasi SAKIP Kab/Kota	Jumlah laporan hasil evaluasi SAKIP Pemda Kab/Kota (Laporan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	10	602.000.000
4.02.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan Pemda Lab/Kota yang dilaksanakan (Kab/Kota)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	10	434.300.000
4.03	Perencanaan				45.787.600.000
4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				45.787.600.000
4.03.01.001	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				45.787.600.000
4.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		87	7.691.564.000
4.03.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Instansi/Lembaga Provinsi, Kabupaten/Kota, Veritikal yang Dilayani (Jumlah Instansi/Lembagai)	smd	71	7.691.564.000
4.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		4	3.746.944.500
4.03.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah penambahan aset sarana dan prasarana aparatur (unit)	smd	192	768.623.000
4.03.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah aset sarana prasarana aparatur yang berfungsi baik (unit)	smd	130	2.978.321.500
4.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi perencana (%)		20	5.568.875.000
4.03.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi (Rapat)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	40	5.171.875.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
4.03.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek (Orang)	bpn, smd, luarPrv	50	397.000.000
4.03.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (%)		79	5.033.466.500
4.03.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	4	670.950.000
4.03.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	4	363.516.500
4.03.10.03	Pengawasan Percepatan Pembangunan Daerah	Laporan Hasil Pengawasan Percepatan Pembangunan (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	5	3.999.000.000
4.03.30	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian (Persen)		75	5.324.900.000
4.03.30.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid SDA LH (Laporan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	4	1.507.600.000
4.03.30.04	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Perikanan	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid Pertanian dan Perikanan (Laporan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	4	1.147.000.000
		Dokumen RAD Pangan dan Gizi (RAD-PG) (Dokumen)		5	
4.03.30.05	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi, Investasi dan Pariwisata	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid Indagkop, Investasi dan Pariwisata (Laporan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	4	2.670.300.000
4.03.42	Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Hasil Pelaksanaan Pembangunan (%)		70	3.972.160.000
4.03.42.01	Monitoring dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan	Dokumen Laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan APBD/APBN, Laporan TEPR dan LKPJ (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	3	2.038.160.000
4.03.42.03	Pengendalian rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD	Laporan Triwulan Evaluasi Renja SKPD dan Laporan Semester RKPD Kab/Kota (Laporan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	6	1.934.000.000
		Dokumen Evaluasi RKPD (Dokumen)		1	
4.03.46	Program Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya (Persen)		70	3.064.300.000
4.03.46.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Pengembangan Sumber Daya Manusia (Laporan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	1	905.000.000
		Laporan Kondisi Pembangunan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur (Laporan)		1	

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
4.03.46.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Kesejahteraan Sosial (Laporan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	1	910.000.000
		Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) (Laporan)		1	
4.03.46.03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Pemerintahan (Laporan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	1	1.249.300.000
		Jumlah laporan anugerah Pangripta Nusantara (Laporan)		0	
		Jumlah laporan IPK (Indeks Persepsi Korupsi) (Laporan)		0	
		Jumlah laporan RAD PPK (Rencana Aksi Daerah Pencegahan Pemberantasan Korupsi) (Laporan)		0	
		Jumlah Laporan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) (Laporan)		1	
4.03.47	Program Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Prasarana Wilayah (Persen)		75	3.350.000.000
4.03.47.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan	Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Prasarana Perhubungan (Laporan)	kk, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	2	1.425.900.000
4.03.47.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air dan Tata Ruang	Laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Sumber Daya Air dan Tata Ruang (Laporan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	1	1.012.700.000
		Laporan Identifikasi Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Pusat - Pusat Pertumbuhan (Dokumen)		0	
		Profil Pembangunan Bidang Sumber Daya Air & Tata Ruang (Dokumen)		1	
4.03.47.03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Cipta Karya Perumahan dan Pemukiman	Laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Prasarana perumahan dan Pemukiman (Laporan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	1	911.400.000
		Profil Pembangunan Bidang Keciaptakarya, Bina Konstruksi, Perumahan dan Permukiman (Laporan)		1	
4.03.48	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase program kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan melalui dokumen anggaran (%)		90	5.123.450.000
4.03.48.05	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	Jumlah Dokumen Usulan Prog/Keg Forum Regional Kalimantan (Laporan)	bpn, smd, luarPrv	2	235.000.000
4.03.48.08	Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan (RPJPD, RPJMD, RKPD, P-RKPD) (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	2	3.563.000.000
4.03.48.10	Penyusunan Rancangan Pendanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	2	600.450.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
4.03.48.11	Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kaltim dan Kabupaten/Kota (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	66	725.000.000
4.03.50	Program Pengembangan Data dan Analisis Pembangunan Daerah	Presentase ketersediaan data dan informasi yang digunakan dalam analisis perencanaan pembangunan (%)		81	2.911.940.000
4.03.50.01	Pengembangan Data dan Analisis Sektoral Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi yang Dihasilkan (Dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	14	1.206.540.000
4.03.50.02	Pengembangan Data dan Analisis Geospasial Pembangunan Daerah	Publikasi Jenis Data dan Informasi Geospasial Tematik (IGT) (IGT)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	200	1.705.400.000
4.04	Keuangan				102.991.620.000
4.04.01	Badan Pendapatan Daerah				57.601.700.000
4.04.01.001	Badan Pendapatan Daerah				27.459.810.000
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		88	5.918.005.000
4.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	smd	12	5.918.005.000
		Jumlah Unit Kantor yang terlayani (unit)		1	
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		5	3.798.949.000
4.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan (Jenis)	smd	8	1.912.371.000
4.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara (Jenis)	smd	11	1.886.578.000
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		68	3.382.420.000
4.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi (Koordinasi / Konsultasi)	smd	45	2.877.729.000
4.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek (PNS)	smd	20	504.691.000
		Jumlah Pengadaan Pakaian dinas (Stel)		325	
4.04.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (nilai AKIP)		70	928.581.000
4.04.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran (Dokumen)	smd	4	410.839.000
4.04.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Dokumen / Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan (Dokumen / Laporan)	smd	5	517.742.000
4.04.31	Program Koordinasi Pajak Daerah	Persentase tercapainya target penerimaan pajak daerah (%)		100	5.480.953.000
4.04.31.01	Pendataan, administrasi dan keberatan pajak	Jumlah realisasi tunggakan pajak (Rupiah)	smd	60000000000	822.469.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
4.04.31.02	Peningkatan pendapatan PKB dan BBNKB	Jumlah realisasi penerimaan PKB (Rupiah)	smd	84872000 000 0	2.616.926.000
		Jumlah realisasi penerimaan BBNKB (Rupiah)		90736000 000 0	
4.04.31.03	Peningkatan pendapatan Pajak Daerah Lainnya	Jumlah realisasi penerimaan PBBKB (Rupiah)	smd	31757600 000 00	2.041.558.000
		Jumlah realisasi penerimaan Pajak AP (Rupiah)		14400000 000	
		Jumlah realisasi penerimaan Pajak Rokok (Rupiah)		17173500 000 0	
4.04.32	Program Koordinasi Penerimaan Bukan Pajak	Persentase tercapainya target penerimaan Bukan Pajak Daerah (%)		100	2.682.717.000
4.04.32.01	Koordinasi Pendapatan Retribusi Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah (Rupiah)	smd	22489341 200	1.277.449.000
4.04.32.02	Koordinasi Penerimaan lain-lain	Jumlah realisasi Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (Rupiah)	smd	34786989 133 8	519.574.000
		Jumlah realisasi lain - lain pendapatan asli daerah yang sah (Rupiah)		79535027 046 2	
		Jumlah realisasi lain - lain pendapatan daerah yang sah (Rupiah)		12607000 000	
4.04.32.03	Peningkatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	Jumlah realisasi bagi hasil pajak dan bukan pajak (Rupiah)	smd	30626000 000 00	885.694.000
		Jumlah realisasi DAU (Rupiah)		81569364 100 0	
4.04.33	Program Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan	Jumlah hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pendapatan dan administrasi dari pengawas internal maupun eksternal (Dokumen)		18	926.485.000
4.04.33.02	Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Jumlah jenis pendapatan daerah yang dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap mekanisme pendapatan daerah serta administrasi keuangan (Jenis Pendapatan)	smd	3	502.380.000
4.04.33.03	Kajian Hukum dan Perundang-undangan	Jumlah regulasi yang berkaitan dengan pendapatan (Dokumen Peraturan)	smd	5	424.105.000
4.04.35	Program Perencanaan dan Pengembangan Sumber Pendapatan Daerah	Jumlah Obyek/Sumber Pendapatan Baru (Obyek)		6	4.341.700.000
4.04.35.01	Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan	Jumlah realisasi sumber Pendapatan Baru (Sumber)	smd	6	1.884.833.000
4.04.35.02	Analisis Pengembangan Pendapatan dan Pelayanan Pendapatan Daerah	Jumlah Kajian analisis pengembangan pelayanan pendapatan (Kajian)	smd	2	2.456.867.000
4.04.01.00 2	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda				4.976.090.000
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		88	3.433.059.988

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
4.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	smd	12	3.433.059.988
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		3	1.045.466.000
4.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan (Jenis)	smd	13	215.957.000
4.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara (Jenis)	smd	10	829.509.000
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		50	177.224.012
4.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi (Koordinasi / Konsultasi)	smd	5	85.524.012
4.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pengadaan Pakaian dinas (Stel)	smd	131	91.700.000
4.04.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Samarinda (%)		100	320.340.000
4.04.34.01	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB se - Kaltim (Rupiah)	smd	50000000 00	136.230.000
4.04.34.02	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Samarinda (Rupiah)	smd	42000000 000 0	184.110.000
4.04.01.00 3	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara				4.462.000.000
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		88	2.952.066.613
4.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	kkr	12	2.952.066.613
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		3	725.387.387
4.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan (Jenis)	kkr	21	157.700.000
4.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara (Jenis)	kkr	8	567.687.387
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		50	217.046.000
4.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi (Koordinasi / Konsultasi)	kkr	10	133.746.000
4.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pengadaan Pakaian dinas (Stel)	kkr	119	83.300.000
4.04.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Kukar (%)		100	567.500.000
4.04.34.01	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Kukar (Rupiah)	kkr	20000000 00	334.500.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
4.04.34.02	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Kukar (Rupiah)	kkr	22100000000	233.000.000
4.04.01.004	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur				3.000.400.000
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		88	1.416.405.000
4.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	ktm	12	1.416.405.000
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		3	762.212.000
4.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan (Jenis)	ktm	12	393.602.000
4.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara (Jenis)	ktm	8	368.610.000
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		50	243.430.000
4.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi (Koordinasi / Konsultasi)	ktm	5	209.550.000
4.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pengadaan Pakaian dinas (Stel)	ktm	44	33.880.000
4.04.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Kutim (%)		100	578.353.000
4.04.34.01	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Kutim (Rupiah)	ktm	4000000000	242.035.000
4.04.34.02	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Kutim (Rupiah)	ktm	10700000000	336.318.000
4.04.01.005	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat				2.805.000.000
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		88	1.752.606.000
4.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	kbr	12	1.752.606.000
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		3	416.600.000
4.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan (Jenis)	kbr	10	161.000.000
4.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara (Jenis)	kbr	10	255.600.000
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		50	246.994.000
4.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi (Koordinasi / Konsultasi)	kbr	5	203.874.000
4.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pengadaan Pakaian dinas (Stel)	kbr	56	43.120.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
4.04.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Kubar (%)		100	388.800.000
4.04.34.01	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Kubar (Rupiah)	kbr	750000000	209.000.000
4.04.34.02	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Kubar (Rupiah)	kbr	47500000000	179.800.000
4.04.01.006	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan				4.450.000.000
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		88	2.719.428.000
4.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	bpn	12	2.719.428.000
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		3	844.780.000
4.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan (Jenis)	bpn	13	119.419.000
4.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara (Jenis)	bpn	11	725.361.000
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		50	337.414.000
4.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi (Koordinasi / Konsultasi)	bpn	10	265.804.000
4.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pengadaan Pakaian dinas (Stel)	bpn	93	71.610.000
4.04.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Balikpapan (%)		100	548.378.000
4.04.34.01	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Balikpapan (Rupiah)	bpn	50000000000	260.135.000
4.04.34.02	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Balikpapan (Rupiah)	bpn	4500000000000	288.243.000
4.04.01.007	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang				2.150.000.000
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		88	1.194.580.000
4.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	btg	12	1.194.580.000
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		3	360.420.000
4.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan (Jenis)	btg	10	61.000.000
4.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara (Jenis)	btg	6	299.420.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		50	276.980.000
4.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi (Koordinasi / Konsultasi)	btg	10	243.100.000
4.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pengadaan Pakaian dinas (Stel)	btg	44	33.880.000
4.04.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Bontang (%)		100	318.020.000
4.04.34.01	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Bontang (Rupiah)	btg	4000000000	117.430.000
4.04.34.02	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Bontang (Rupiah)	btg	7000000000	200.590.000
4.04.01.008	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara				2.698.400.000
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		88	1.256.950.000
4.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	ppu	12	1.256.950.000
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		3	818.630.000
4.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan (Jenis)	ppu	10	237.468.000
4.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara (Jenis)	ppu	10	581.162.000
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		50	264.220.000
4.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi (Koordinasi / Konsultasi)	ppu	6	236.500.000
4.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pengadaan Pakaian dinas (Stel)	ppu	36	27.720.000
4.04.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Penajam Paser Utara (%)		100	358.600.000
4.04.34.01	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Penajam Paser Utara (Rupiah)	ppu	5000000000	250.800.000
4.04.34.02	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Penajam Paser Utara (Rupiah)	ppu	4000000000	107.800.000
4.04.01.009	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser				3.000.000.000
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		88	1.118.212.250
4.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	psr	12	1.118.212.250

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		3	937.844.750
4.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan (Jenis)	psr	10	495.116.750
4.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara (Jenis)	psr	10	442.728.000
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		50	425.876.000
4.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi (Koordinasi / Konsultasi)	psr	12	395.846.000
4.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pengadaan Pakaian dinas (Stel)	psr	39	30.030.000
4.04.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Paser (%)		100	518.067.000
4.04.34.01	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Paser (Rupiah)	psr	1000000000	246.721.000
4.04.34.02	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Paser (Rupiah)	psr	70000000000	271.346.000
4.04.01.01.0	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau				2.600.000.000
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		88	1.474.259.000
4.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	bru	12	1.474.259.000
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		3	552.814.000
4.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan (Jenis)	bru	10	157.365.000
4.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara (Jenis)	bru	10	395.449.000
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		50	260.205.000
4.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi (Koordinasi / Konsultasi)	bru	13	230.945.000
4.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pengadaan Pakaian dinas (Stel)	bru	38	29.260.000
4.04.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Berau (%)		100	312.722.000
4.04.34.01	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Berau (Rupiah)	bru	10000000000	93.129.000
4.04.34.02	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Berau (Rupiah)	bru	68000000000	219.593.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
4.04.02	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				45.389.920.000
4.04.02.001	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				45.389.920.000
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		80	6.289.449.180
4.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas (bulan)	smd	0	6.289.449.180
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (%)		25	4.477.179.820
4.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas (bulan)	smd		3.882.979.820
4.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas (bulan)	smd		594.200.000
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		65	4.858.000.000
4.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah (kegiatan)	smd, luarPrv	0	2.985.200.000
4.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas (bulan)	smd		1.872.800.000
4.04.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase anggaran belanja Program/Kegiatan yang sesuai dengan dokumen rencana pembangunan daerah (%)		90	21.860.916.000
4.04.17.01	Penyusunan analisa standar belanja	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas (bulan)	smd	12	622.000.000
		Jumlah pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku (dokumen)		1	
4.04.17.06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas (bulan)	smd	12	2.035.000.000
		Jumlah pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku (dokumen)		2	
4.04.17.07	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas (bulan)	smd	12	1.635.784.000
		Jumlah pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku (dokumen)		2	
4.04.17.10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas (bulan)	smd	12	798.532.000
		Jumlah pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku (dokumen)		6	

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
4.04.17.11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas (bulan)	smd	12	900.800.000
		Jumlah pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku (dokumen)		6	
4.04.17.14	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas (bulan)	smd	12	911.000.000
		Jumlah pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku (dokumen)		3	
4.04.17.20	Implementasi SIMDA Keuangan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas (bulan)	smd	12	720.600.000
		Jumlah pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku (dokumen)		3	
4.04.17.24	Rekonsiliasi Keuangan Daerah	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas (bulan)	smd	12	1.062.000.000
		Jumlah pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku (dokumen)		12	
4.04.17.26	Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Penyertaan Modal	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas (bulan)	smd	12	951.600.000
		Jumlah pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku (dokumen)		500	
4.04.17.28	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas (bulan)	smd	12	1.524.150.000
		Jumlah pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku (dokumen)		12	
4.04.17.29	Pengelolaan, Pengadministrasian Usulan dan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas (bulan)	smd	12	300.000.000
		Jumlah pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku (dokumen)		282	
4.04.17.35	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas (bulan)	smd		1.009.175.000
4.04.17.37	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Perbendaharaan	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas (bulan)	smd		1.940.975.000
4.04.17.39	Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten / Kota	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas (bulan)	smd	12	1.218.600.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
		Jumlah pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku (dokumen)		12	
4.04.17.42	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas (bulan)	smd		851.300.000
4.04.17.43	Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas (bulan)	smd		2.570.000.000
4.04.17.44	Penyusunan Standarisasi dan Kebutuhan BMD	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas (bulan)	smd		518.000.000
4.04.17.46	Monitoring dan Evaluasi BUMD dan BLUD	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas (bulan)	smd		1.590.700.000
4.04.17.47	Penyusunan KUA-PPAS APBD dan P-APBD	Jumlah Dokumen Pendanaan Pembangunan Daerah (KUA-PPAS, KUPA-PPAS, Aplikasi SIPPD) (dokumen)	smd	2	700.700.000
4.04.18	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	Persentase belanja program/kegiatan dalam Dokumen APBD Kab/Kota yang sejalan dengan APBD Provinsi (%)		90	1.980.475.000
4.04.18.01	Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten/kota	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas (bulan)	smd	12	426.875.000
		Jumlah rancangan peraturan daerah APBD (dokumen)		20	
4.04.18.02	Evaluasi rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD kabupaten/kota	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas (bulan)	smd	12	376.750.000
		Jumlah rancangan peraturan daerah APBD (dokumen)		20	
4.04.18.07	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas (bulan)	smd	12	150.000.000
		Jumlah rancangan peraturan daerah APBD (dokumen)		10	
4.04.18.08	Evaluasi Rancangan Peraturan KDH tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Penjabaran APBD Kab/Kota	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas (bulan)	smd	12	160.000.000
		Jumlah rancangan peraturan daerah APBD (dokumen)		10	
4.04.18.09	Pembinaan dan Fasilitasi APBD Kabupaten/ Kota	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas (bulan)	smd	12	526.700.000
		Jumlah rancangan peraturan daerah APBD (dokumen)		10	
4.04.18.11	Pengelolaan Dana Perimbangan Pusat dan Bagi Hasil Pajak Provinsi	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas (bulan)	smd	12	340.150.000
		Jumlah rancangan peraturan daerah APBD (dokumen)		12	
4.04.22	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Daerah	Persentase aset tetap (Tanah dan Bangunan) Daerah yang diamankan dan dimanfaatkan (%)		90	5.923.900.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
4.04.22.01	Persertifikatan dan Pengamanan Aset Daerah	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas (bulan)	smd		4.051.300.000
4.04.22.04	Rehab Penyempurnaan Prasarana Fisik Pemerintahan	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas (bulan)	smd		852.700.000
4.04.22.05	Penghapusan, Penilaian, Penjualan dan Peyusunan Regulasi Pengelolaan Aset Daerah	Terlaksananya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas (bulan)	smd		1.019.900.000
4.05	Kepegawaian				28.379.342.600
4.05.01	Badan Kepegawaian Daerah				26.414.342.600
4.05.01.00 1	Badan Kepegawaian Daerah				21.523.370.000
4.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (%)		100	2.634.808.000
		Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		86	
4.05.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (bulan)	smd	12	2.634.808.000
		Jumlah Laporan Keuangan Semester dan Akhir Tahun yang terselesaikan (Laporan)		2	
		Jumlah GU/LS/TUP yang diselesaikan (Dokumen)		200	
4.05.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		5	1.401.750.000
4.05.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan sarana dan prasarana kantor (unit)	smd	0	595.000.000
		Jumlah Pengadaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Kantor (Unit)		40	
4.05.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor (bulan)	smd	0	806.750.000
		Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Kantor (Bulan)		12	
4.05.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		12	2.315.050.000
4.05.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (kegiatan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	60	1.030.000.000
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (kegiatan)		80	
		Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman (untuk rapat, kegiatan/pelatihan dan tamu) (bulan)		12	
4.05.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti Bimbingan Teknis dilingkungan BKD Prov. Kaltim (PNS)	bpn, btg, smd, luarPrv	0	354.550.000
		Jumlah Pakaian Dinas (Stel)		0	
		Jumlah Sosialisasi Peraturan Kepegawaian (Laporan)		0	

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
		Jumlah PNS dilingkungan BKD yang mengikuti Bimtek/Diklat Teknis/Fungsional (PNS)		20	
		Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas (Stel)		280	
4.05.09.03	Sinkronisasi dan Pemanjapan ASN	Jumlah Sosialisasi Peraturan Kepegawaian (Laporan)	kk, ktm, bpn, btg, smd, luarPrv	2	930.500.000
		Jumlah Laporan Rapat Koordinasi Kepegawaian (Laporan)		1	
4.05.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (Nilai)		77	390.000.000
4.05.10.01	Penyusunan Dokumen dan Perencanaan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran (dokumen)	smd		50.000.000
		Jumlah Dokumen RKA dan RKA Perubahan (Dokumen)		2	
		Jumlah Dokumen DPA dan DPA Perubahan (Dokumen)		2	
		Jumlah Dokumen Renstra dan Reviu Renstra (Dokumen)		2	
		Jumlah Dokumen Renja dan Renja Perubahan (Dokumen)		2	
		Jumlah Dokumen RKT dan Perjanjian Kinerja (Dokumen)		21	
4.05.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Pelaksanaan Evaluasi Renja (Laporan)	ktm, psr, bpn, btg, smd, luarPrv	4	340.000.000
		Jumlah Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Bulanan (Laporan)		12	
		Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan (dokumen)			
		Predikat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BKD Prov. Kaltim (Nilai)		82	
		Jumlah Dokumen LPPD (Dokumen)		1	
		Jumlah Dokumen Pengukuran Kinerja (Dokumen)		19	
4.05.15	Program Peningkatan Pelayanan Mutasi Kepegawaian	Persentase pegawai yang di mutasi sesuai dengan job description (%)		91	2.522.862.500
4.05.15.01	Administrasi Kepangkatan PNS	Jumlah Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) PNS (PNS)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	1146	533.437.500
		Jumlah Kenaikan Pangkat Pilihan bagi PNS Provinsi Gol.IV/b kebawah (PNS)		745	
		Jumlah Kenaikan Pangkat bagi PNS Provinsi Gol.IV/c ke atas (PNS)		22	
		Jumlah Kenaikan Pangkat Pilihan bagi PNS Kab/Kota Gol.IV/b ke bawah (PNS)		836	
		Jumlah Kenaikan Pangkat bagi PNS Kab/Kota Gol.IV/c ke atas (PNS)		62	
4.05.15.02	Penyusunan Formasi dan Pengadaan Pegawai	Jumlah PNS yang Melaksanakan Ujian Dinas (PNS)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	200	1.499.460.000
		Jumlah PNS yang melaksanakan Ujian Penyesuaian Ijazah (PNS)		30	

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
		Jumlah dokumen dalam rangka seleksi CPNS (Dokumen)		1	
		Jumlah CPNS menjadi PNS (PNS)		200	
		Jumlah PNS yang melaksanakan Pengambilan Sumpah/Janji PNS (PNS)		200	
		Jumlah pengadaan CPNS dari sekolah kedinasan (IPDN) (CPNS)		3	
4.05.15.03	Penempatan PNS	Jumlah PNS yang pindah antar Pemerintah Kab/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur (PNS)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	55	489.965.000
		Jumlah PNS yang pindah dari Pemerintah Kab/Kota/Provinsi Kaltim keluar Wilayah Prov. Kaltim (PNS)		50	
		Jumlah PNS yang pindah dari Pemerintah Kab/Kota/Provinsi/Kementerian diluar Prov. Kaltim ke Pemerintah Kab/Kota didalam Wilayah Prov. Kaltim (PNS)		60	
		Jumlah PNS yang pindah dari Pemerintah Kab/Kota/Provinsi/Kementerian diluar Prov. Kaltim ke Pemerintah Prov. Kaltim (PNS)		20	
		Jumlah PNS yang pindah dari Pemerintah Kab/Kota di Wilayah Prov. Kaltim ke Pemerintah Prov. Kaltim (PNS)		25	
		Jumlah PNS yang pindah antar unit kerja/perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (PNS)		50	
4.05.16	Program Peningkatan Kompetensi Aparatur	Persentase SDM Aparatur yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan (%)		80	8.736.453.000
4.05.16.01	Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui Pengangkatan Pertama (PNS)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	20	373.000.000
		Jumlah PNS yang diberhentikan dari Jabatan Fungsional (PNS)		16	
		Jumlah Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui perpindahan dari Jabatan lain (PNS)		1	
		Jumlah Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing (PNS)		25	
		Jumlah Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui promosi (PNS)		90	
		Jumlah Pengangkatan Kembali PNS dalam Jabatan Fungsional (PNS)		18	
4.05.16.02	Peningkatan Kualitas Pengembangan Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pengukuran kompetensi pegawai (PNS)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	1000	7.620.493.000
		Jumlah PNS yang melaksanakan Tugas Belajar (PNS)		55	

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
		Jumlah PNS yang diusulkan melaksanakan Diklat Struktural, Diklat Prajabatan, Diklat Fungsional dan Diklat Teknis lainnya (PNS)		600	
		Jumlah PNS yang melaksanakan Ijin Belajar (PNS)		30	
4.05.16.03	Pengembangan Karier Pegawai	Jumlah PNS yang diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (PNS)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	5	742.960.000
		Persentase PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas (%)		89,61	
		Jumlah PNS yang diangkat dalam Jabatan Administrator (PNS)		27	
		Jumlah PNS yang diangkat dalam Jabatan Pengawas (PNS)		53	
		Jumlah PNS yang direkomendasikan untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kab/Kota (PNS)		1	
		Jumlah PNS Kab/Kota yang direkomendasikan untuk menduduki Jabatan Struktural yang menangani Administrasi Kependudukan (PNS)		13	
4.05.17	Program Peningkatan Kinerja dan Disiplin Pegawai	Persentase PNS Berkinerja Baik (%)		84	2.646.900.000
4.05.17.01	Penegakan Kode Etik, Perilaku dan Disiplin Pegawai	Jumlah Penanganan Kasus yang ditangani (PNS)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	55	500.000.000
		Jumlah Cuti PNS (PNS)		320	
		Jumlah PNS yang diberhentikan/pensiun (PNS)		340	
		Persentase Tingkat Kehadiran PNS (%)		98	
4.05.17.02	Penilaian Kinerja dan Penghargaan PNS	Persentase PNS yang mencapai target kinerja diatas 80% (%)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	84	2.146.900.000
		Jumlah PNS yang mendapatkan KGB (PNS)		1500	
		Jumlah PNS yang menerima SLKS (PNS)		1000	
		Jumlah PNS Pra Pensiun yang mengikuti seminar dan konseling (PNS)		444	
		Jumlah PNS yang melaksanakan tes kesehatan (Tes Urine) (PNS)		150	
4.05.18	Program Pengembangan Data dan Informasi ASN	Persentase Data Kepegawaian yang digunakan dalam proses penempatan pegawai, mutasi dan promosi jabatan (%)		95	875.546.500
4.05.18.01	Penguatan Sistem Informasi dan Pengolahan Database Pegawai	Jumlah Update Data Kepegawaian melalui SIMPEG (Data PNS)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	5500	465.096.500
		Jumlah Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (Aplikasi)		6	

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
4.05.18.02	Pengolahan Dokumen Tata Naskah Kepegawaian	Jumlah karis/karsu yang diproses (Kartu)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	360	410.450.000
		Jumlah Dokumen Informasi Kepegawaian (Dokumen)		1200	
		Jumlah Dokumen Kepegawaian yang ter update (Dokumen PNS)		3000	
		Jumlah Karpeg yang diproses (Kartu)		500	
4.05.01.00 2	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai				4.890.972.600
4.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		75	842.600.000
4.05.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (bulan)	smd	12	842.600.000
		Jumlah GU/LS/TUP yang diselesaikan (Dokumen)		30	
4.05.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		1	2.479.472.600
4.05.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Kantor (Unit)	smd	10	2.084.250.000
4.05.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor (bulan)	smd	12	395.222.600
4.05.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		30	1.128.900.000
4.05.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (kegiatan)	smd	20	930.900.000
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (kegiatan)		10	
		Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman (untuk rapat, kegiatan/pelatihan dan tamu) (bulan)		12	
4.05.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS dilingkungan BKD yang mengikuti Bimtek/Diklat Teknis/Fungsional (PNS)	smd	12	198.000.000
		Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas (Stel)		12	
4.05.16	Program Peningkatan Kompetensi Aparatur	Persentase SDM Aparatur yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan (%)		50	440.000.000
4.05.16.02	Peningkatan Kualitas Pengembangan Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pengukuran kompetensi pegawai (PNS)	smd	300	440.000.000
4.05.02	Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur				1.965.000.000
4.05.02.00 1	Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur				1.965.000.000
4.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		85	1.115.000.000
4.05.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksana administrasi perkantoran (Bulan)	smd	12	1.115.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
4.05.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Kegiatan)		100	350.000.000
4.05.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor (9 Unit)	smd	4	150.000.000
4.05.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana (Bulan)	smd	12	200.000.000
4.05.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Program dan Kegiatan KORPRI (%)		100	450.000.000
4.05.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (Kegiatan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	15	350.000.000
4.05.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek (Kegiatan)	smd	4	100.000.000
4.05.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya Program dan Kegiatan KORPRI (%)		100	50.000.000
4.05.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Tercapaian Laporan Kinerja (4 Laporan)	smd	4	50.000.000
4.06	Pendidikan dan Pelatihan				41.169.396.058
4.06.01	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia				41.169.396.058
4.06.01.001	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia				41.169.396.058
4.06.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		86	4.920.524.914
4.06.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)	smd	86	4.920.524.914
4.06.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		4	9.060.403.368
4.06.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)	smd	4	2.958.700.000
4.06.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)	smd	4	6.101.703.368
4.06.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		93	1.359.665.000
4.06.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan (Kegiatan)	smd	50	778.345.000
4.06.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)	smd	93	581.320.000
4.06.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (Nilai)		82	813.691.776
4.06.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (Nilai)	smd	82	379.584.976
4.06.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (Nilai)	smd	82	434.106.800

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
4.06.15	Program Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan	Persentase ASN yang telah memiliki sertifikasi kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri (%)		80	4.970.576.000
4.06.15.02	Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi	Persentase Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembangan Kompetensi (%)	smd	80	1.818.286.000
4.06.15.03	Sertifikasi Kompetensi	Persentase ASN yang telah memiliki Sertifikasi Kompetensi dan LSP PDN (%)	smd	80	2.436.050.000
4.06.15.04	Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama	Persentase Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama (%)	smd	80	716.240.000
4.06.16	Program Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang memperoleh sertifikasi pengembangan kompetensi teknis dan sosio kultural (%)		20	5.576.845.000
4.06.16.01	Pengembangan Kompetensi Umum dan Pilihan Jabatan Administrasi	Persentase ASN yang telah memiliki Sertifikasi Pengembangan Kompetensi Umum dan Pilihan Jabatan Administrasi (%)	smd	20	1.072.970.000
4.06.16.02	Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi	Persentase ASN yang telah memiliki Sertifikasi Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi (%)	smd	20	2.259.525.000
4.06.16.03	Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang	Persentase ASN yang telah memiliki Sertifikasi Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang (%)	smd	20	1.390.100.000
4.06.16.04	Pengembangan Kompetensi Umum dan Pilihan Jabatan Administrasi (Kontribusi)	Persentase ASN yang telah memiliki Sertifikasi Pengembangan Kompetensi Umum dan Pilihan Jabatan Administrasi (%)	smd	20	252.200.000
4.06.16.05	Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi (Kontribusi)	Persentase ASN yang telah memiliki Sertifikasi Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi (%)	smd	20	497.940.000
4.06.16.06	Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang (Kontribusi)	Persentase ASN yang telah memiliki Sertifikasi Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang (%)	smd	20	104.110.000
4.06.17	Program Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang memperoleh sertifikasi pengembangan kompetensi manajerial dan pemerintahan serta bagi jabatan fungsional (%)		70	14.467.690.000
4.06.17.03	Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan	Persentase ASN yang telah Sertifikasi Pengembangan Kompetensi Kpemimpinan dan Prajabatan (%)	smd	70	4.266.720.000
4.06.17.04	Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah dan Jabatan Tinggi	Persentase Pejabat yang telah Sertifikasi Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah dan Jabatan Tinggi (%)	smd	70	2.051.240.000
4.06.17.05	Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	Persentase ASN yang telah Sertifikasi Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional (%)	smd	70	2.010.000.000
4.06.17.06	Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan (Kontribusi)	Jumlah Peserta Diklat Pelatihan Dasar Gol. II dan III (orang)	smd	320	5.479.720.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
4.06.17.07	Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah dan Jabatan Tinggi (Kontribusi)	Jumlah peserta Pengembangan Kompetensi untuk Pimpinan Daerah dan Jabatan Pimpinan Tinggi (orang)	smd	48	660.010.000
4.07	Penelitian dan Pengembangan				14.155.456.000
4.07.01	Badan Penelitian dan Pengembangan				14.155.456.000
4.07.01.001	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah				14.155.456.000
4.07.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		90	1.839.663.000
4.07.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah kegiatan pelaksanaan administrasi perkantoran (kegiatan)	smd	15	1.839.663.000
4.07.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)		4	1.087.900.000
4.07.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah kegiatan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana (kegiatan)	smd	8	1.087.900.000
4.07.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		82	1.854.794.000
4.07.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah ASN Yang Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi (orang)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	155	1.494.244.000
4.07.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan peningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur (orang)	smd, luarPrv	12	360.550.000
4.07.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (BB)		79	60.000.000
4.07.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran (dokumen)	bru, kbr, kkr, ktm, psr, ppu, bpn, btg, smd	10	36.500.000
4.07.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah laporan evaluasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan (laporan)	bru, kbr, kkr, ktm, psr, ppu, bpn, btg, smd	23	23.500.000
4.07.23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Persentase teknologi yang dapat dimanfaatkan dengan optimal (%)		80	938.950.000
4.07.23.02	Pengembangan teknologi informasi kelitbangan	Persentase terselenggaranya program pemanfaatan teknologi informasi kelitbangan (%)	smd	80	249.000.000
		Jumlah artikel Jurnal riset pembangunan dan buletin lembusuaana (artikel)		70	
4.07.23.03	Rakorda Kelitbangan	Persentase terselenggaranya kegiatan rakorda kelitbangan (%)	kbr, ktm, psr, ppu, luarPrv	100	689.950.000
4.07.41	Program Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase rekomendasi yang dihasilkan litbang bidang ekonomi dan pembangunan (%)		90	2.335.910.000
4.07.41.01	Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah laporan litbang sub bidang ekonomi yang dilaksanakan (Laporan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	1	1.678.840.000
		Jumlah laporan litbang sub bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dilaksanakan (Laporan)		1	
		Jumlah laporan sub bidang pengembangan wilayah, fisik dan		1	

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2021	
				TARGET	PAGU (Rp.)
		prasarana yang dilaksanakan (laporan)			
4.07.41.02	Penelitian mandiri bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah laporan penelitian mandiri fungsional peneliti bidang ekonomi dan pembangunan yang dilaksanakan (laporan)	bru, kbr, kkr, ktm, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	5	657.070.000
4.07.47	Program Litbang Bidang Inovasi dan Teknologi	Persentase rekomendasi yang dihasilkan litbang bidang inovasi dan teknologi (%)		90	3.528.814.000
4.07.47.01	Litbang Bidang Inovasi dan Teknologi	Jumlah laporan litbang sub bidang inovasi dan pengembangan teknologi yang dilaksanakan (Laporan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	1	3.109.120.000
		Jumlah laporan litbang sub bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi yang dilaksanakan (laporan)		1	
		Jumlah laporan litbang sub bidang diseminasi kelibangan yang dilaksanakan (laporan)		1	
4.07.47.02	Penelitian mandiri bidang Inovasi dan Teknologi	jumlah laporan pelaksanaan penelitian mandiri bidang inovasi dan teknologi (Laporan)	bru, kkr, ktm, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	1	419.694.000
4.07.48	Program Litbang Bidang Sosial dan Pemerintahan	Persentase rekomendasi yang dihasilkan litbang bidang sosial dan pemerintahan (%)		90	2.509.425.000
4.07.48.01	Litbang Bidang Sosial dan Pemerintahan	Jumlah laporan litbang sub bidang kependudukan, pemberdayaan dan masyarakat desa yang dilaksanakan (Laporan)	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	1	1.670.000.000
		Jumlah laporan litbang sub bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang dilaksanakan (laporan)		1	
		Jumlah laporan litbang sub bidang sosial dan budaya yang dilaksanakan (Laporan)		1	
4.07.48.02	Penelitian mandiri bidang Sosial dan Pemerintahan	Jumlah laporan penelitian mandiri fungsional peneliti bidang sosial dan pemerintahan yang dilaksanakan (laporan)	bru, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luar Prv	6	839.425.000
	JUMLAH				5.911.334.207.283

BAB 7

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan gambaran hasil yang ingin dicapai dalam pembangunan yang tergambarkan dalam pencapaian indikator-indikator dari *impact* dan *outcome*. Indikator *impact* dan *outcome* ini dianggap mampu mewakili dan menggambarkan hasil capaian yang dilakukan melalui berbagai pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan pembangunan pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pengukuran kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan pembangunan daerah dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja berdasarkan kesepakatan bersama namun tetap berlandaskan dengan tinjauan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur beserta turunannya. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat mutlak untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari rencana pembangunan tahunan daerah karena rencana kinerja merupakan gambaran maupun potret pembangunan Provinsi Kalimantan Timur di masa kini maupun yang akan datang.

Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcomes*/hasil) dari kegiatan (*output*/keluaran). Selain itu, indikator kinerja program merupakan cerminan sebuah fungsi dari keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung) dimana pengukuran indikator “hasil” lebih utama daripada sekedar “keluaran” karena “hasil” (*outcomes*) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang pencapaian dari perencanaan suatu organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Indikator kinerja pembangunan merupakan alat ukur yang mampu memberikan suatu informasi kinerja dan hasil kerja baik *outcome* ataupun *output* pada instansi atau lembaga pemerintahan suatu daerah. Dalam perkembangannya, indikator kinerja harus mampu mengikuti perkembangan dinamika global manajemen kinerja pemerintah daerah sehingga setiap permasalahan maupun pra kondisi pembangunan dapat dianalisis melalui capaian target indikator kinerja.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun RKPD 2021. Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 7.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Kalimantan Timur**

No	Indikator	Target 2021
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,56
2.	Tingkat kemiskinan (%)	5,87
3.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,5±1
4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi non Migas dan Batubara (%)	6±1
5.	Indeks Gini	0,328
6.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	75.95
7.	Indeks Persepsi Korupsi	6,65

Kinerja pembangunan suatu daerah, pada dasarnya, digambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan RPJMD. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil. Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama (key performance indicator). Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan;
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting, dan merupakan prioritas program pembangunan daerah; serta
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Secara rinci, penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian penyelenggaraan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berisikan data indikator berupa target/kondisi akhir yang akan dicapai dengan mempertimbangkan capaian indikator dari tahun sebelumnya. Penetapan

indikator kinerja daerah terhadap capaian penyelenggaraan pemerintah di sajikan tabel 7.2 berikut:

**Tabel 7.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan**

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Akhir 2021
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	
a	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	
1.1	Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)	12,92
1.2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	0,99
1.3	Kontribusi lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB (%)	20
1.4	Kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB (%)	0,55
1.5	Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	0,35
1.6	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	5,7
1.7	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)	1,55
1.8	Kontribusi lapangan usaha sub sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	1,1
b	Fokus Kesejahteraan Sosial	
2.1	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	9,60
2.2	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,34
2.3	Usia Harapan Hidup (Tahun)	73,76
c	Fokus Seni Budaya dan Olahraga	
3.1	Persentase /Jumlah sekolah mengembangk-an budaya lokal (%)	233
3.2	Persentase pelaku olahraga daerah yang berprestasi (%)	40
B	ASPEK PELAYANAN UMUM	
a	Fokus : Urusan Wajib Pelayanan Dasar	
1	Pendidikan	
1.1	Persentase /Jumlah sekolah yang mengembangk-an ekstrakurikuler berbasis agama (SMA/SMK/SLB) (unit)	233
1.2	Jumlah SMK yang bekerjasama dengan Dunia Usaha dan Industri (SMK)	70
1.3	Angka Partisipasi Murni SMA/MA, SMK, MAK, SMLB (%)	77
1.4	Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang telah memenuhi standar kompetensi (%)	99
1.5	Jumlah Penerima Beasiswa KALTIM TUNTAS (orang)	19.500
1.6	Jumlah Siswa SMA/SMK Miskin penerima beasiswa (Siswa)	2.500
1.7	Persentase sekolah yang telah menggunakan sistem pendidikan jarak jauh (%)	95
1.8	Persentase pelayanan pendidikan luar biasa (%)	75
2	Kesehatan	
2.1	Persentase puskesmas yang memiliki 9 (5 tenaga promotif dan preventif, 4 tenaga kuratif) tenaga kesehatan (%)	75

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Akhir 2021
2.2	Persentase capaian indikator standar pelayanan minimal Rumah Sakit (%)	90
2.3	Persentase Puskesmas Minimal Terakreditasi Utama (%)	68
2.4	Persentase Penduduk Miskin dan Kurang Mampu yang memperoleh Jaminan Pelayanan Kesehatan (%)	100
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
3.1		
3.2	Kapasitas Air Baku (L/detik)	8.622
3.3	Cakupan layanan Air Minum Perpipaan (%)	67,23
3.4	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	36.722
3.5	Prosentase Kesesuaian RTRW Provinsi dengan RTRW Kab/Kota (%)	77,19
4	Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat	
4.1	Persentase penggunaan hak-hak politik masyarakat (%)	70
4.2	Persentase desa/kelurahan tangguh bencana (%)	50
4.3	Persentase Peningkatan Responsif Mandiri Daerah dalam Penanganan Bencana (%)	89
5	Sosial	
5.1	jumlah PMKS yang tertangani (PMKS)	2500
b	Fokus : Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	
1	Tenaga Kerja	
1.1	Persentase Penempatan Tenaga Kerja (%)	0,53
1.2	Persentase Lulusan Pelatihan Yang Terserap di pasar kerja (%)	80
1.3	Persentase Wirausahaan Baru dari Pencari Kerja (%)	35
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (%)	56,72
2.2	Persentase pemenuhan kebutuhan hak anak (%)	88
2.3	Persentase pelaku ekonomi perempuan (%)	76
2.4	Rasio KDRT	0,048
3	Lingkungan Hidup	
3.1	Jumlah aksi mitigasi perubahan iklim yang diinventarisasi dan di PEP kan (aksi)	600
3.2	Indeks Pencemaran Lingkungan	sedang (8)
3.3	Persentase emisi yang diturunkan dari BAU sektor perkebunan (%)	40
4	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
4.1	Jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal (desa)	448
4.2	Meningkatkan jumlah Bumdes yang aktif (Bumdes)	30
4.3	Meningkatkan jumlah desa berkembang (Desa)	30
4.4	Jumlah desa yang mampu menjalankan pemerintahan desa secara optimal (Desa)	35
4.5	Jumlah kampung/desa Iklim +	25
5	Perhubungan	
5.1	Jumlah penumpang yang terlayani (orang)	11.536.200
5.2	Jumlah barang (ton)	355.200.000
5.3	Jumlah dan kapasitas prasarana perhubungan laut dan SDP	11 Dermaga

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Akhir 2021
	(Unit/%)	SDP – 12 Pelabuhan Laut (88%)
5.4	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas (Kasus)	512
6	Komunikasi dan Informatika	
6.1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3
7	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
7.1	Jumlah UKM Naik Kelas (UKM)	200
8	Kepemudaan dan Olahraga	
8.1	Indeks Pembangunan Pemuda	57,82
9	Kebudayaan	233
10	Perpustakaan	
10.1	Jumlah masyarakat yang mengakses layanan perpustakaan (on line dan on site) (orang)	577,1
c	Fokus : Urusan Pelayanan Pilihan	
1	Pariwisata	
1.1	Jumlah Destinasi Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di fasilitasi pengembangannya (kawasan)	2.00
2	Pertanian	
2.1	Jumlah produksi padi (Ton)	511.048
2.2	Jumlah Miniranch yang beroperasi (unit)	40
2.3	Angka Kelahiran Sapi (%)	20,5
2.4	Jumlah produksi tanaman hortikultura (Ton)	247.698
2.5	Produksi Komoditi Perkebunan (Ton)	17.136.849
3	Kehutanan	
3.1	Realisasi penerimaan PNPB sektor kehutanan (Rp. Miliar)	170
3.2	Persentase kerusakan hutan di dalam kawasan hutan (%)	≤1,5
3.3	Persentase meningkatnya tutupan lahan (%)	13,98
3.4	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat (Ha)	32.000
4	Energi dan Sumber Daya Mineral	
4.1	Persentase pemanfaatan EBT (%)	4,13
4.2	Jumlah KK Berlistrik (KK)	1.018.607
5	Perdagangan	
5.1	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) (Perusahaan)	35
5.2	Jumlah Produk Perkebunan yang bersertifikat SNI (Produk)	2
6	Perindustrian	
6.1	Presentase Pertumbuhan Industri Olahan (%)	1
6.2	Jumlah perusahaan industri pada kawasan peruntukan industri (perusahaan)	7
7	Kelautan dan Perikanan	
7.1	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	124.535
7.2	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	158.938
7.3	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih (ekor)	3 Milyar
7.4	Jumlah kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif (Kawasan)	1
d	Fokus : Urusan Penunjang	
1	Perencanaan	

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Akhir 2021
1.1	Proporsi program pembangunan daerah yang sinergi antara Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota (%)	91
2	Keuangan	
2.1	Jumlah objek/sumber pendapatan baru	6
3	Pengawasan	
3.1	Hasil Penilaian Integritas	75
3.2	Level kapasitas APIP	3
4	Umum/Sekretariat	
4.1	Persentase Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah yang memperoleh predikat minimal B (Baik) (%)	77
4.2	Persentase PD yang dibentuk sesuai dengan norma, standar prosedur dan kriteria (%)	92
4.3	Persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan survey kepuasan masyarakat (SKM) sesuai standar (%)	71
6.4	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun SOP sesuai ketentuan/aturan (%)	78,95
C	ASPEK DAYA SAING	
a	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	
1.1	Tingkat kemantapan jalan provinsi (%)	63,46
1.2	Jumlah kawasan strategis provinsi yang terhubung dengan kawasan sentra produksi (Kawasan)	3
1.3	Cakupan layanan air minum (%)	77
1.4	Luas lahan pertanian yang beririgasi (Ha)	15.558,5
1.5	Luas genangan banjir perkotaan (Ha)	505
1.6	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	459,59
1.7	Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	75,09
1.8	Rasio elektrifikasi (%)	89,50
b	Fokus iklim berinvestasi	
1.1	Nilai realisasi investasi (Rp Triliun)	34,73
1.2	Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah (%)	3,84
1.3	Waktu Penyelesaian Proses Perizinan (hari)	12
1.4	Persentase penurunan emisi dari BAU (%)	27,75
1.5	Indeks Resiko Bencana	135
1.6	Indeks Demokrasi Indonesia	75,5
c	Fokus Sumber Daya Manusia	
1.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	78,50
1.2	Skor Kepuasan Masyarakat (SKM)	82
1.3	Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Pemda	Level 3

BAB 8 PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 merupakan pelaksanaan tahun ketiga perencanaan pembangunan jangka menengah daerah dalam periode 2019-2023. Dengan Tema “**Menumbuhkan Industri Hilir yang Mendukung Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kawasan**”. Hal ini mengindikasikan perlu ditumbuhkannya industri hilir dalam mengoptimalkan setiap sumber daya yang ada untuk meningkatkan nilai tambah dalam mendukung ekonomi kerakyatan dan ekonomi kawasan.

Penyusunan RKPD tahun 2021, dilakukan melalui berbagai forum koordinasi dan konsultasi, baik antar pemerintah kab/kota, Perangkat Daerah, lembaga pemerintah nonkementerian dan pemangku kepentingan lainnya, dengan memperhatikan hasil evaluasi tahun sebelumnya, guna menghasilkan rencana kerja yang baik.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin aparat Pemerintah Daerah Kalimantan Timur, aparat Pemerintah Kabupaten/Kota serta peran aktif masyarakat dan dunia usaha.

Dalam kaitan ini, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur, dan Lembaga Pemerintahan lainnya, bersama-sama masyarakat termasuk sektor swasta dan dunia pendidikan perlu dengan sungguh-sungguh melaksanakan dan saling mendukung program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD Tahun 2021 agar lebih bersinergi dan mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Peran pemerintah dalam rangka meningkatkan optimalisasi penggunaan seluruh sumber daya difokuskan kepada peningkatan kualitas government spending utamanya pada pembangunan sektor-sektor produktif, yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan masyarakat dan dunia usaha, untuk mencapai target dan sasaran RKPD tahun 2021.

8.1 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 memerlukan langkah-langkah praktis dan strategis namun tetap relevan dalam menunjang pencapaian target pembangunan daerah. Adapun beberapa kaidah pelaksanaan RKPD 2020 yang harus diperhatikan oleh pemangku kepentingan dan subyek pelaksana pembangunan lainnya, antara lain:

1. RKPD Tahun 2021 merupakan rencana kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 yang memerlukan peran serta aktif seluruh Pemangku Kepentingan untuk berkontribusi sesuai perannya masing-masing;
2. RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi antar pelaku pembangunan untuk menjamin efisiensi dan efektivitas pelaksanaan RKPD tahun 2021;
3. RKPD tahun 2021 merupakan pedoman penyusunan dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021;
4. Setiap PD/Dinas/Instansi lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur wajib menyesuaikan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021 dengan mengacu pada RKPD Tahun 2021 dengan tetap memperhatikan sinkronisasi, integrasi, dan sinergitas program/kegiatan terhadap kebijakan Renja K/L 2021 dan Renja Perangkat Daerah kabupaten/Kota tahun 2021;
5. Dalam pelaksanaan RKPD tahun 2021, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang tercantum dalam RKPD tahun 2021 wajib dilaksanakan oleh seluruh kepala perangkat daerah dan bupati/walikota dengan tujuan untuk: (1) memastikan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan; (2) memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif, akuntabel dan partisipatif; serta (3) melakukan pelaporan atas perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan kepada gubernur dan masyarakat umum, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku
6. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta aktif dalam pembangunan, baik sebagai subyek pelaksana maupun sebagai obyek melakukan pengawasan pelaksanaan setiap kebijakan serta program dan kegiatan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur;
7. Gubernur, melalui Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan daerah pada setiap satuan kerja pemerintah provinsi secara berkala (3 bulanan) untuk selanjutnya menyusun evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2020;
8. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala PD/Dinas/Instansi, dan hasil evaluasi tahunan tersebut akan menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Kerja Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022;



9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2021. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkannya dokumen hingga masa pelaksanaannya.

Samarinda, 2020
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

DR. IR. H. ISRAN NOOR, M.SI

**Rencana
Kerja
Pemerintah
Daerah**

RKPD

BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur

Alamat Kantor :

*Jl. Kesuma Bangsa No. 2 Samarinda 75123, Telp : 0541 - 741044
<http://bappeda.kaltimprov.go.id> e-mail: mail@bappedakaltim.com*